



BATOLA

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

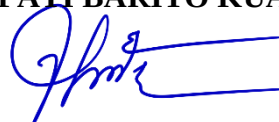
KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) merupakan Dokumen tahunan yang wajib disusun pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota. Penyusunan Dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam dokumen ini tertuang prioritas-prioritas yang setiap tahunnya berubah untuk menyesuaikan isu strategis yang akan ditangani.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) didalamnya tergambar Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui program kegiatan yang telah dipetakan dari Permendagri 86 tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja ke nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021. Program kegiatan ini juga memuat dari usulan masyarakat yang di inventarisir melalui musrenbang desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten Barito Kuala serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barito Kuala. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan dan pendapatan daerah digambarkan pada kebijakan daerah, sekaligus di sinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan serta prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

Diharapkan disusun dan disampaikan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan atau referensi dari seluruh stakeholder dalam bersinergi membangun daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat dalam upaya membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat kabupaten Barito Kuala.

BUPATI BARITO KUALA



Dr. H. BAHRUL ILMI, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2024
 - 2.2.1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
 - 2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja
 - 2.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja
 - 2.2.4. Fakto-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan
 - 2.2.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah
 - 2.2.6. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

**2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah**

III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional (RPJMN 2020 – 2024)
 - 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan (2021 – 2026)
 - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala (RPD Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026)
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan P-RKPD berisi Perubahan rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada penyesuaian visi, misi, program prioritas kepala daerah terpilih dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tata cara penyusunan Rancangan P-RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
 14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pemberian SDM Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :400.5/8476/SJ Perihal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023- 2042;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045;
 33. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 dan 260 mengamanatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai bagian dari SPPN. Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN juga mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. SPPN dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Konsep SPPN hadir dalam perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat:

- a. Mengalokasikan sumberdaya pembangunan kedalam kegiatan melalui kelembagaan;
- b. Fleksibel dengan horizon perencanaan yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu kaku dengan penerapan konsep pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. Memperluas dan mendiseminasikan kemampuan perencanaan ke seluruh masyarakat.

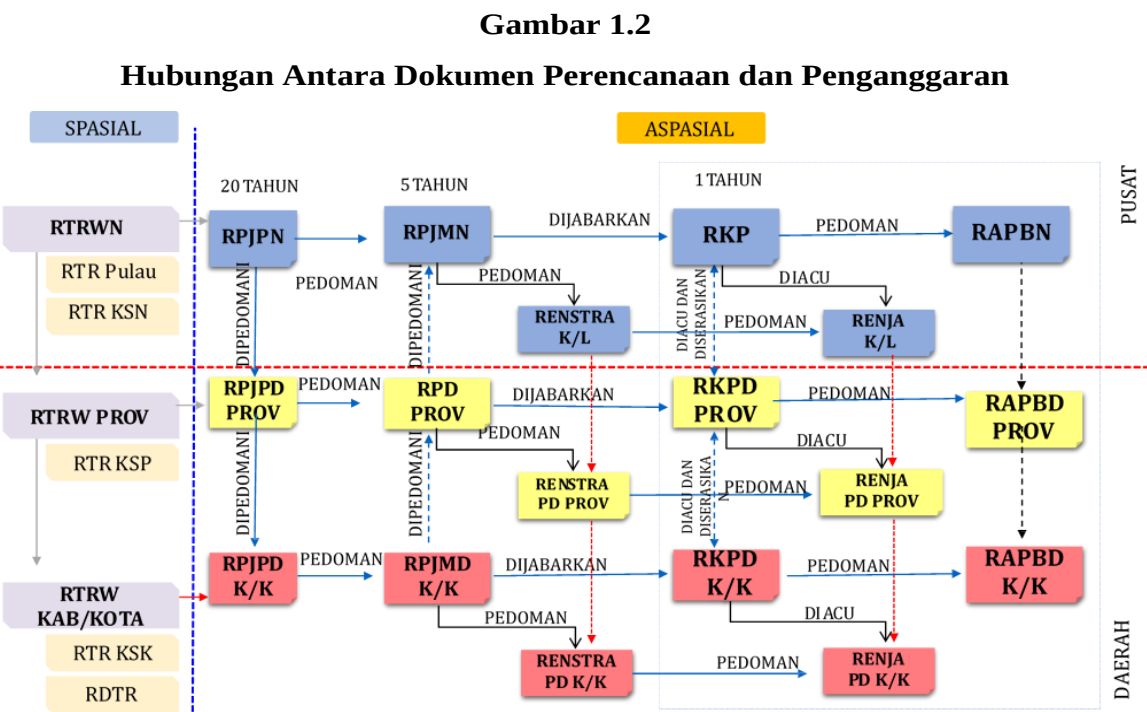
Pada pelaksanaannya, konsep SPPN berjalan beriringan dengan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan membutuhkan proses koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen. Proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yakni 20 tahun.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun.
- c. Dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dari adanya keselarasan antar dokumen tersebut, yaitu: (1) terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah; dan (2) menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.

Dari berbagai landasan hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.2 di bawah dilakukan secara spasial dan aspasial. Secara a-spasial, keterkaitan antar

dokumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPD yang berpedoman pada RPJP Daerah dan mengacu serta diserasikan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Di sisi lain, dokumen RPD juga memedomani dokumen RPJMN. Hal tersebut bermakna bahwa dalam mencapai target pembangunan secara nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP dan RPJMN, dukungan dari daerah menjadi hal yang penting. Dokumen Perubahan RPKD tahun 2025 adalah proses tahapan transisi awal untuk pelaksanaan dokumen RPJMD baru, yang mana dalam dokumen ini sudah mulai menyesuaikan dengan visi, misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024 (diolah)

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang juga mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD untuk kurun waktu 5 tahun. Dokumen Perubahan RKPD tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD-P) sebelum menjadi APBD-P. Selain itu, dokumen-dokumen a-spasial tersebut juga perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yang berhubungan dengan penataan ruang, antara lain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dalam hal keberlanjutan proses perencanaan menuju proses penganggaran, P-RKPD juga memiliki peran penting lainnya, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD-P dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, yang pada akhir proses penganggaran akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD-P Kab. Barito Kuala.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah untuk bahan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025. Tujuan Rancangan Perubahan agar adanya sinkronisasi antara RPD tahun 2025 dengan Renstra SKPD Tahun 2025 dan penyesuaian terhadap visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri 12 Tahun 2024, sistematika penulisan Dokumen RKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen RPJMD dan dokumen lainnya yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Perubahan RKPD, kedudukan Rancangan Perubahan RKPD dalam tahapan penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen Rancangan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan yang relevan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rancangan Perubahan RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan triwulan 1, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan (triwulan 1) dan Realisasi RPD.

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja

pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun berjalan triwulan 1.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun berjalan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, Triwulan 1 tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam bab ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Perubahan perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Marabahan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996,46 km² dan berpenduduk sebanyak 329.779 jiwa (berdasar Kabupaten Barito Kuala dalam Angka Tahun 2025).

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada 2° 29' 50" – 3° 30' 18" Lintang Selatan dan 114° 20' 50" – 114° 50' 18" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas dan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen Awalnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Wilayah Kabupaten Barito Kuala terbagi menjadi 17 (Tujuh Belas) kecamatan yang mana luas masing-masing kecamatan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Menurut Kecamatan

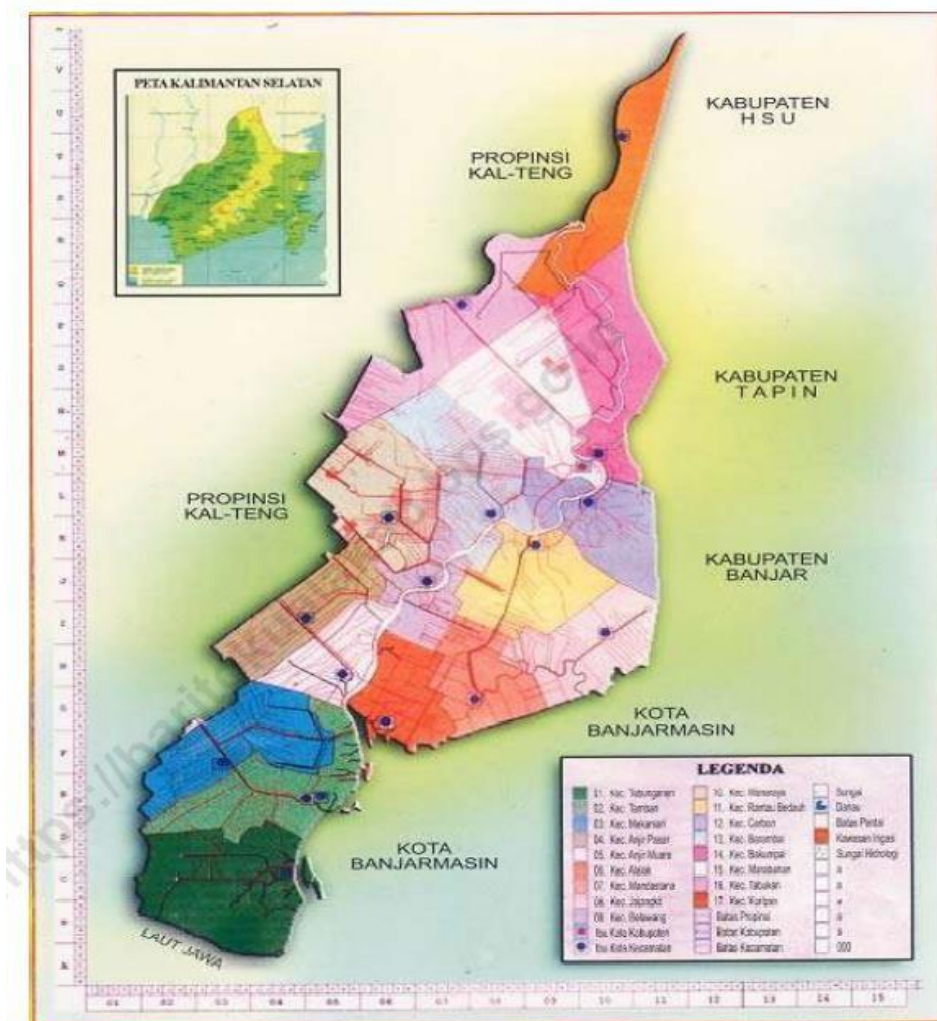
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)
1.	Tabunganen	Tabunganen Kecil	228,76
2.	Tamban	Purwosari I	170,91
3.	Mekarsari	Tamban Raya	134,44
4.	Anjir Pasar	Anjir Pasar Kota II	108,19
5.	Anjir Muara	Anjir Muara Kota	91,95
6.	Alalak	Handil Bakti	102,06
7.	Mandastana	Tabing Rimbah	115,52
8.	Jejangkit	Jejangkit Pasar	165,35
9.	Belawang	Belawang	72,13
10.	Wanaraya	Kolam Kiri	156,27

11.	Barambai	Barambai	163,11
12.	Rantau Badauh	Sungai Gampa	129,12
13.	Cerbon	Bantuil	118,58
14.	Bakumpai	Lepasan	182,00
15.	Marabahan	Marabahan Kota	177,36
16.	Tabukan	Teluk Tamba	168,65
17.	Kuripan	Rimbun Tulang	141,44
TOTAL (dalam Km²)			2.425,83

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kecamatan Tabunganen merupakan Kecamatan terluas yakni 228,76 Km² atau 9,43% dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belawang yakni 72,13 Km² atau hanya 2,97% dari total luas Kabupaten Barito Kuala.

Selanjutnya dapat dilihat gambaran peta Kabupaten Barito Kuala, seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Barito Kuala

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Topografi Daerah

Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 mdpl (meter dari permukaan laut) yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb. Barito Kuala dibelah oleh Sungai Barito yang membentang dari selatan sebagai muara sungainya (Kecamatan Tabunganen) hingga ke-utara (Kecamatan Kuripan)

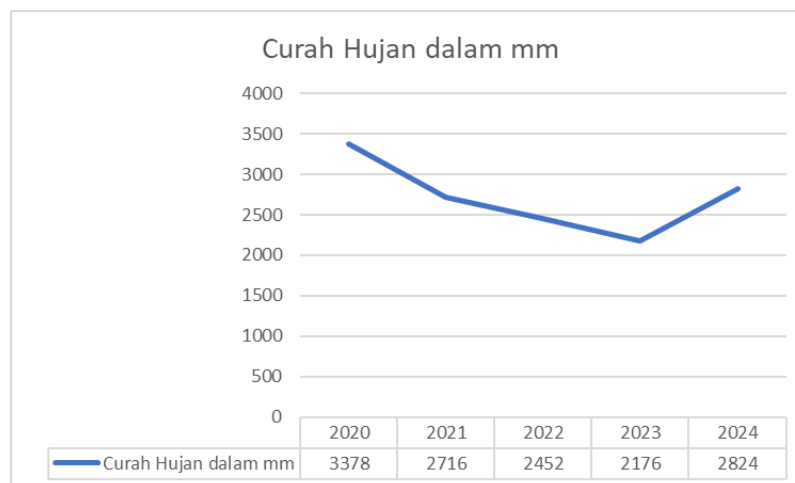
B. Hidrologi Daerah

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Selain Sungai Barito, sungai yang ada di Kabupaten Barito Kuala antara lain: Sungai Negara, Sungai Kapuas, Sungai Alalak, Sungai Puntik, Saluran Drainase Tamban, Saluran Drainase Anjir Pasar, Saluran Drainase Tabukan dan Saluran Drainase Tabunganen.

C. Kondisi Klimatologis Daerah

Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang beriklim tropis. Data curah hujan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa curah hujan agregat tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan mencapai 3.378 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 250 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 2.176 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 121 hari. Pergerakan curah hujan dari 2020 hingga 2023 cenderung menurun tiap tahunnya, namun dari 2023 menuju 2024 terjadi lonjakan curah hujan yang cukup tinggi. Bulan Tertinggi curah hujan dalam lima tahun selalu bergantian berkisar dari Bulan Desember – April, sedangkan Bulan Terendah curah hujan dalam lima tahun cenderung terjadi pada Bulan Agustus. Grafik perkembangan curah hujan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Curah Hujan dalam mm, Lima Tahun Terakhir
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021-2025

D. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Potensi Penggunaan Lahan

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Berdasarkan sektor ini, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian.

a. Pertanian

Berbicara tanaman pangan, Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi bagi provinsi Kalimantan Selatan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 seluruhnya merupakan lahan non irigasi dengan total luasan 114.256 Ha, dimana Kecamatan Tamban menjadi yang terluas dengan 10.763 ha dan Kecamatan Marabahan menjadi yang terkecil dengan hanya 1.895 ha. Pada tahun 2024 produksi padi di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 219.963 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan luas panen sebesar 58.873 ha. Beras Anjir menjadi produk/komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala dan banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah.

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 sebesar 7.153 ton dengan produksi terbersarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya. Selanjutnya adalah total produksi kacang tanah tahun 2024 adalah sebesar 73,6 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya, total produksi ubi kayu tahun 2024 sebesar 9.056,44 ton yang sebagian besari dihasilkan di Kecamatan Mekarsari, dan terakhir total produksi ubi jalar tahun 2024 sebanyak 113,3 ton yang

sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya dan Marabahan.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan produksi pertanian ini, kabupaten barito kuala telah menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, telah disusun naskah akademik untuk kebutuhan pembuatan perda tersebut. Hingga Awal tahun 2022, telah berhasil dikeluarkan Surat Keputusan Bupati mengenai Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan nomor 188.45/7/KUM/2022. Selain itu juga pernah dilaksanakan program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* / Program Pengembangan dan Manajemen Pengelolaan Irigasi secara Terintegrasi dan Bersifat Partisipatif) selama kurun waktu 2018 hingga 2022 dimana program tersebut berupaya untuk pengembangan luasan tanam dan panen tanaman pangan terutama padi dan mengembangkan partisipasi masyarakat terutama kelompok tani dalam mengelola, menjaga dan mengembangkan lahan pertanian mereka.

b. Hortikultura

Disamping pada sektor tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di propinsi Kalimantan Selatan. Produk Hortikultura Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2024, total produksi Jeruk Siam mencapai 710.509,64 kw (kuintal) yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mandastana dengan besaran produksi sebanyak 182.493,5 kw, dilanjutkan produksi total Nenas pada tahun 2024 mencapai 130.120,17 kw yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mekarsari dengan besaran produksi sebanyak 123.755,81 kw. Produksi buah-buahan lainnya yang tercatat selama tahun 2024 diantaranya adalah Semangka sebesar 1.323,9 kw, Melon sebesar 13 kw, Mangga sebesar 55 kw, Durian sebesar 129,4 kw, Pisang sebesar 2.376 kw, Pepaya sebesar 185 kw, Sirsak sebesar 299,52 kw, Belimbing sebesar 13,3 kw, Buah Naga sebesar 5,75 kw, Jambu air sebesar 15,75 kw, Jambu Biji sebesar 67,2 kw, Jeruk Lemon sebesar 1,5 kw, Lengkeng sebesar 60,5 kw, Nangka sebesar 180,5 kw, Rambutan sebesar 73,2 kw, Sawo sebesar 86,18 kw, dan terakhir adalah Sukun sebesar 34 kw.

Selanjutnya, Produk Hortikultura pada segmen tanaman sayuran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 paling besar adalah tanaman Cabai Besar dengan total produksi sebesar 993,5 kw, disusul Cabai Rawit sebesar 946,89 kw, dan Terung sebesar 764,6 kw. Ketiga tanaman sayuran dengan produksi terbesar tersebut

semuanya paling banyak dihasilkan di daerah Kecamatan Wanaraya. Sedangkan berdasar luasan panen, tiga tanaman hortikultura sayuran paling besar adalah Jamur Tiram dengan luasan panen seluas 1.600 ha, Daun Bawang seluas 109,5 ha, dan Cabai Rawit seluas 80,75 ha (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

c. Perkebunan

Selain tanaman pangan dan hortikultura, Kabupaten Barito Kuala juga memproduksi tanaman perkebunan, dengan produksi terbesar pada komoditas kelapa sawit, yakni sebesar 37.985,87 ton di sepanjang tahun 2024. Selain kelapa sawit, juga terdapat komoditas kelapa, karet, purun, dan sagu. Adapun total produksi tanaman perkebunan tersebut, berturut-turut adalah 5.589,10 ton; 3.308,08 ton; 377,61 ton; dan 5,79 ton (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

d. Peternakan dan Perikanan

Populasi ternak pada tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Sapi Potong, yakni sebanyak 7.336 ekor. Sapi Potong tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mandastana. Selain Sapi Potong, terdapat juga ternak kambing dengan populasi sebanyak 1.476 ekor yang terdapat pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kuripan. Sebaliknya di Kecamatan Kuripan terdapat ternak yang tidak ada pada kecamatan lain, yaitu Kerbau sebanyak 1.633 ekor. Di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat ternak Babi, yakni sebanyak 40 ekor yang hanya berada di Kecamatan Wanaraya dan Barambai. Selama tahun 2024, total ternak yang telah dipotong adalah sebanyak 589 ekor Sapi, 28 ekor Kerbau, dan 97 ekor Kambing yang mana sebagian besar dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya total produksi daging ternak selama tahun 2024 adalah 1.408,5 kw dari Sapi Potong, 60,23 kw dari Kerbau, dan 17,78 kw dari Kambing.

Unggas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 adalah Ayam Pedaging sebanyak 1.276.464 ekor, Ayam Kampung sebanyak 1.070.534 ekor, Itik sebanyak 52.955 ekor, dan Itik Manila sebanyak 1.557 ekor. Adapun unggas tersebut ada yang diambil dagingnya, maupun telurnya. Total unggas yang telah dipotong adalah sebanyak 15.022 ekor Ayam Kampung, 311.780 ekor Ayam Pedaging, 200 ekor Itik, dan 63 ekor Itik Manila yang dari pemotongan tersebut dihasilkan produksi daging unggas selama tahun 2024 adalah 195,57 kw dari Ayam Kampung, 17.906,3 kw dari Ayam Pedaging, 1,75 kw dari Itik dan 0,86 kw dari Itik Manila. Kemudian telur yang dihasilkan dari unggas ini adalah 847.388,37 kg dari Ayam Kampung dengan produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Pasar, 372.865 kg dari Itik dengan produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Muara, 7.969 kg dari Itik Manila dengan produksi terbanyak di Kecamatan Tamban.

Sebagai wilayah yang dilalui salah satu sungai terpanjang, yakni Sungai Barito, serta berbatasan langsung dengan wilayah laut, maka masyarakat Kabupaten Barito Kuala cukup banyak yang mengusahakan perikanan tangkap. Pada tahun 2024, tercatat ada sekitar 859 rumah tangga yang melakukan penangkapan perikanan laut dengan produksi sebesar 3.404 ton. Selain itu, terdapat 1.145 rumah tangga yang melakukan penangkapan di perairan umum dengan total produksi sebesar 5.772,76 ton.

Selain perikanan tangkap, di Kabupaten Barito Kuala juga banyak rumah tangga yang melakukan budidaya perikanan, di mana sebagian besar menggunakan kolam. Adapun produksi perikanan budidaya sepanjang 2024 adalah sebesar 11.940,27 ton (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

e. Pariwisata

Kabupaten Barito Kuala secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
- Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah; dan
- Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata.

Sepanjang tahun 2024 tercatat 196.323 wisatawan domestik yang berwisata di

Kabupaten Barito Kuala dengan puncak kunjungan pada bulan Desember. Sedangkan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Barito Kuala adalah 189 orang. Sebagian besar kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dilakukan pada musim panas (Mei s.d Agustus). Sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 455 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan. Tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

2) Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.

Jenis budidaya yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkebunan. Kawasan perdagangan dan jasa dijadikan kawasan strategis yang cepat tumbuh yang menjadi tempat pergudangan, perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan peruntukan lainnya.

Tabel 2.2
Pola Ruang Kabupaten Barito Kuala

No	Jenis Kawasan Lindung dan Lokasi	Luas (Ha)
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
	Kawasan Lindung Gambut	
	1. Kecamatan Kuripan	79,72
	Total	79,72
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
	A. Sempadan Sungai	
	Anjir Pasar	-
	Anjir Muara	110,96
	Bakumpai	497,59
	Barambai	93,74
	Belawang	133,46
	Cerbon	96,76
	Jejangkit	-

No	Jenis Kawasan Lindung dan Lokasi	Luas (Ha)
	Alalak	74,41
	Kuripan	394,63
	Mandastanah	-
	Marabahan	-
	Mekarsari	-
	Rantau Badauh	41,16
	Tabukan	162,04
	Tabunganen	317,33
	Tamban	101,13
	Wanaraya	-
Total		2023,197849
3	Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	-
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas :	-
	a. Kompleks Makam H. Abdussamad	
	b. Rumah bulat garing joglo	
	c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan	
	d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	
	2. Lain-lain terdiri atas :	
	a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	
4	Kawasan Konservasi	
	Kawasan Suaka Alam	
	Anjir Muara	38,23
	Alalak	80,21
	Tabunganen	3836,69
Total		3955,13
5	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	1. Kawasan rawan gelombang pasang	-
	a. Terdapat di Kec. Tabukan, Kec. Marabahan, Kec. Cerbon, Kec. Rantau Badauh, Kec. Belawang, Kec. Anjir Pasar, Kec. Anjir Muara, Kec. Alalak, Kec. Tamban dan Kec. Tabunganen	
	2. Kawasan rawan banjir	
	a. Terdapat di Kec. Kuripan, Kec. Bakumpai, Kec. Tabunganen, Kec. Mandastana, Kec. Jejangkit dan Kec. Tabukan yang terdiri atas :	
	✓ Daerah pesisir/pantai, meliputi sepanjang pantai Selatan dan wilayah Kecamatan Tabunganen	
	✓ Daerah dataran banjir tersebar pada daerah rendah dan rawa di Kec. Bakumpai	
	✓ Daerah sempadan sungai meliputi Kec. Tabukan dan Kec. Kuripan	
	3. Kawasan kebakaran hutan	

No	Jenis Kawasan Lindung dan Lokasi	Luas (Ha)
	Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.	
6	Kawasan Cagar Budaya	
	1. Kawasan tradisional Panglima Wangkang, terdiri atas : a. Kompleks Makam H. Abdussamad b. Rumah bulat garing joglo c. Rumah adat Banjar di Kec. Marabahan d. Makam Datu Aminin dan Makam Datu Kayan di Kec. Alalak	-
	2. Lain-lain terdiri atas : a. Makam Datuk Ilyas Bakul	
	b. Makam Tabib Gabun	
	c. Makam Syahidun	
	d. Makam Habib Alwi	
	e. Makam Syarifah Ratu Shella	
	f. Makam Panglima Jaya Arja	
	Total Kawasan Lindung	6.058,048

Sumber: RPJPD Kab. Barito Kuala

Kawasan industri besar sebagian besar berlokasi di Kecamatan Tamban, Tabunganen, Anjir Muara dan Alalak. Kemudian untuk kawasan industri sedang diarahkan ke Kecamatan Alalak Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Rantau Badauh. Terakhir pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala diarahkan dengan potensi wisata religius, wisata buatan dan wisata alam yang tersebar di seluruh Kabupaten Barito Kuala sesuai potensi yang ada.

E. Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kabupaten Barito Kuala yang relatif datar dan berada hanya 0,2 - 3 meter di atas permukaan laut (mdpl) menyebabkan Kabupaten Barito Kuala rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air laut. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kabupaten Barito Kuala yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Negara. Curah hujan yang cukup tinggi dari daerah atau wilayah hulu serta pasang air laut merupakan sumber penyebab terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun daerah-daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabunganen, Mandastana, Jejangkit dan Tabukan. Sedangkan daerah yang rawan bencana gelombang pasang adalah Kecamatan Tabukan, Marabahan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Pasar, Alalak, Tamban dan Tabunganen.

Potensi Bencana dapat dilihat dari Indeks Resiko Bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dapat diakses secara *online* melalui website <https://inarisk.bn timer.go.id/irbi>. Berikut adalah tabel Indeks Resiko Bencana di

Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.3
Indeks Resiko Bencana Kab. Barito Kuala 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana Kab. Barito Kuala	155,45	155,96	140,65	149,6	156,15

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Indeks Resiko Bencana dilihat jika semakin rendah nilai indeks yang diperoleh, maka semakin rendah resiko bencana yang mungkin terjadi di Kabupaten tersebut, begitupula sebaliknya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (Tiga) tahun terakhir, Resiko Bencana di Kabupaten Barito Kuala selalu meningkat yang kemungkinan disebabkan pengaruh alam baik secara internal maupun eksternal.

F. Demografis

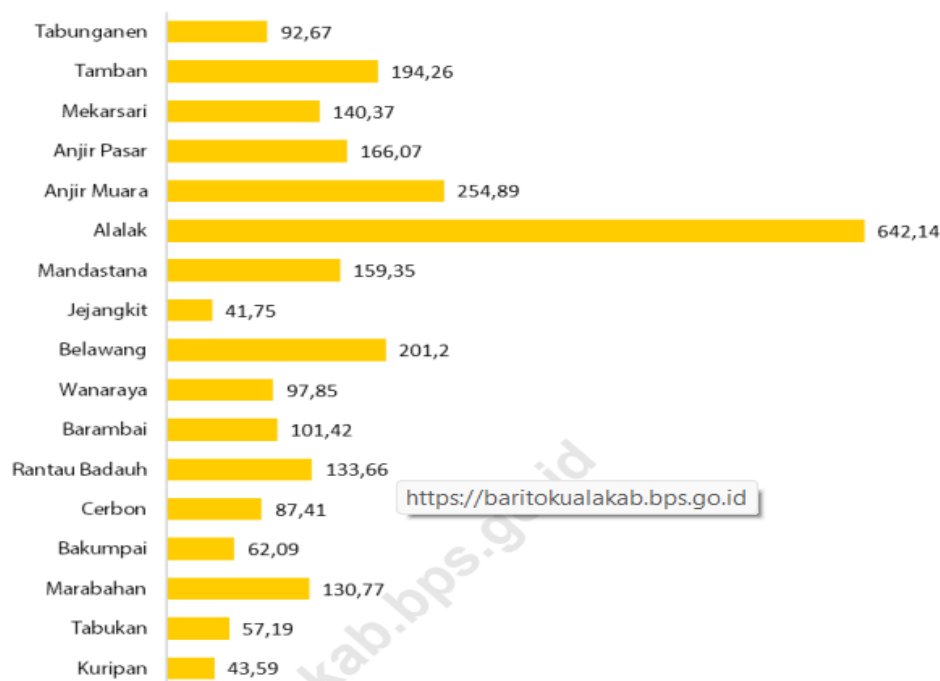
Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2020-2024) tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 313.021 jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 316.960 jiwa, tahun 2022 sebanyak 321.770, tahun 2023 sebanyak 324.502 jiwa, dan terakhir pada tahun 2024 tercatat sebanyak 329.779 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada info grafis berikut.



Gambar 2.3 Perkembangan Penduduk di Kab. Barito Kuala
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021-2025

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 642,14 jiwa/km² diikuti oleh

Kecamatan Anjir Muara yaitu sebesar 254,89 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jejangkit yaitu sebesar 41,75 jiwa/km². Selebihnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/Regional Population and Civil Registry Office of Barito Kuala Regency

Gambar 2.4 Sebaran Kepadatan Penduduk di Kab. Barito Kuala tahun 2024
Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Pada aspek demografis ini dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1) Perbandingan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 sebanyak 329.779 jiwa, yang terdiri dari 167.086 laki-laki dan 162.713 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,69 yang artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 atau 103 penduduk laki-laki. Lebih detailnya, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, dan juga berdasar rentang/kelompok usia di Barito Kuala pada tahun 2024 dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berdasar Kecamatan dan Kelamin, dan berdasar Kelompok Usia
Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	10.760	10.439	21.199
Tamban	16.894	16.308	33.202
Mekarsari	9.592	9.279	18.871
Anjir Pasar	9.034	8.933	17.967
Anjir Muara	11.881	11.556	23.437
Alalak	33.116	32.421	65.537
Mandastana	9.306	9.102	18.408
Jejangkit	3.541	3.362	6.903
Belawang	7.388	7.125	14.513
Wanaraya	7.815	7.476	15.291
Barambai	8.348	8.195	16.543
Rantau Badauh	8.668	8.590	17.258
Cerbon	5.249	5.116	10.365
Bakumpai	5.869	5.431	11.300
Marabahan	11.582	11.612	23.194
Tabukan	4.873	4.772	9.645
Kuripan	3.170	2.996	6.166
Barito Kuala	167.086	162.713	329.799

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	11.057	10.340	21.397
5–9	13.736	13.090	26.826
10–14	14.816	14.028	28.844
15–19	13.161	12.669	25.830
20–24	14.702	13.400	28.102
25–29	11.961	10.890	22.851
30–34	13.037	12.225	25.262
35–39	12.669	12.724	25.393
40–44	13.342	13.293	26.635
45–49	12.646	12.876	25.522
50–54	11.103	11.220	22.323
55–59	9.134	9.048	18.182
60–64	6.589	6.399	12.988
65–69	4.162	4.416	8.578
70–74	2.624	2.542	5.166
75+	2.347	3.553	5.900
Barito Kuala	167.086	162.713	329.799

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Berdasarkan data tahun 2024 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala, Kecamatan dengan penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak ada di Kecamatan Alalak yang mana masing-masing jumlah untuk penduduk laki-laki dan perempuan secara beurutan adalah 33.116 jiwa dan 32.421 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk laki-laki dan perempuan paling sedikit ada di

Kecamatan Kuripan yang mana masing-masing jumlah untuk penduduk laki-laki dan perempuan secara berurutan adalah 3.170 jiwa dan 2.996 jiwa. Kemudian komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 28.844 jiwa, diikuti kelompok umur 20 – 24 Tahun sebanyak 28.102 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit berasal dari kelompok umur 70 – 74 tahun dengan jumlah 5.166 jiwa.

2) Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk pada usia kerja per tahun 2024 adalah sebanyak 246.911 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 181.384 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 175.196 jiwa dan penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka) sebesar 6.188 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sebanyak 65.527 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bersekolah sebesar 17.605 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 43.721 jiwa dan termasuk kategori lainnya sebesar 4.201 jiwa. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas
Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2024

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/<i>Economically active</i>	110.974	70.410	181.384
1. Bekerja/ <i>Working</i>	107.179	68.017	175.196
2. Pengangguran terbuka/ <i>Unemployment</i>	3.795	2.393	6.188
II. Bukan angkatan kerja/<i>Not economically active</i>	13.822	51.705	65.527
1. Sekolah/ <i>Attending school</i>	7.693	9.912	17.605
2. Mengurus rumah tangga/ <i>Housekeeping</i>	2.897	40.824	43.721
3. Lainnya/ <i>Others</i>	3.232	969	4.201
Jumlah/<i>Total</i>	124.796	122.115	246.911
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i>	88,92	57,66	73,46
Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rate</i>	3,42	3,40	3,41

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-*Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey*

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

3) Berdasarkan Agama

Pada tahun 2024, hampir sebagian besar penduduk di Kabupaten Barito Kuala menganut agama Islam. Selain dari agama Islam, juga ada penganut Kristen Protestan sebanyak 1.365 orang dengan total penganut agama ini terbanyak berada di Kecamatan Alalak, kemudian penganut Kristen Katolik sebanyak 690 orang dengan total penganut agama ini terbanyak berada di Kecamatan Alalak, lalu penganut Hindu sebanyak 1.427 orang dengan total penganut agama ini terbanyak berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Barambai dan Wanaraya, dan terakhir ada penganut Budha dengan total penganut sebanyak 62 orang. Detail mengenai sebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Agama yang Dianut Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	21.196	3	–	–	–	–
Tamban	33.182	8	7	3	2	–
Mekarsari	18.870	1	–	–	–	–
Anjir Pasar	17.957	6	4	–	–	–
Anjir Muara	23.404	11	22	–	–	–
Alalak	64.527	703	200	51	56	–
Mandastana	18.345	53	8	–	2	–
Jejangkit	6.867	26	10	–	–	–
Belawang	14.486	18	9	–	–	–
Wanaraya	14.582	89	4	616	–	–
Barambai	15.680	123	4	736	–	–
Rantau Badauh	17.218	23	17	–	–	–
Cerbon	10.138	57	170	–	–	–
Bakumpai	11.084	103	113	–	–	–
Marabahan	23.008	92	71	21	2	–
Tabukan	9.645	–	–	–	–	–
Kuripan	6.066	49	51	–	–	–
Barito Kuala	326.255	1.365	690	1.427	62	–

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala/Regional Population and Civil Registry Office of Barito Kuala Regency

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat pada 3 (Tiga) aspek yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

a) PDRB Menurut Lapangan Usaha

Selama kurun waktu tahun 2020-2024 besaran PDRB ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 telah mencapai 11.350,36 Miliar Rupiah, bertambah sebesar 782,48 Miliar Rupiah dibanding tahun 2023 yang tercatat 10.567,88 Miliar Rupiah. Kemudian Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 telah mencapai 6.728,9 Miliar Rupiah, bertambah sebesar 321,8 Miliar Rupiah dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 6.406,49 Miliar Rupiah. Berikut ditampilkan perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha yang terbagi atas 17 (Tujuh Belas) sektor lapangan usaha, berdasar ADHB dan ADHK Tahun 2010, selama 5 tahun terakhir yaitu selama kurun waktu 2020 hingga 2024.

Tabel 2.6

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	2.422,34	2.476,18	2.613,93	2.755,50	2.960,40
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Minning and Quarrying</i>	7,72	8,13	8,68	9,18	9,43
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1.372,33	1.439,62	1.508,58	1.535,28	1.621,58
D. Pengadaan Listri dan Gas/ <i>electricity and Gas</i>	9,84	10,56	11,28	12,09	12,82

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	24,89	26,72	28,56	30,38	31,66
F. Kontruksi/ <i>Construction</i>	1.149,84	1.274,21	1.414,82	1.565,54	1.697,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.074,01	1.141,87	1.301,65	1.433,78	1.538,40
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	294,75	304,20	334,73	370,08	406,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	204,99	216,45	238,86	262,59	291,66
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	188,05	203,86	222,49	239,88	256,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	165,05	173,36	178,18	194,92	207,77
L. Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	321,72	347,84	378,02	415,54	448,28
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	13,67	14,67	16,39	18,01	19,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	712,02	729,16	745,79	795,62	852,74
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	543,21	581,49	622,05	661,72	706,41

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q. Jaasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	131,67	147,94	159,73	172,43	184,40
R,S,T,U Jasan Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	74,39	78,68	87,13	95,34	104,41
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	8.710,47	9.174,92	9.867,87	10.567,88	11.350,36

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara
 Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Tabel 2.7
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2020–2024

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	1.595,86	1.613,96	1.629,04	1.666,44	1.746,44
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	5,27	5,51	5,73	5,93	5,98
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	901,26	926,63	942,28	949,97	987,37
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,87	6,13	6,49	6,88	7,20
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	16,86	17,91	18,86	19,83	20,62
F. Kontruksi/ <i>contruction</i>	781,44	835,90	893,47	954,95	1.011,21
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	689,11	708,72	757,74	808,17	843,37

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	196,42	200,11	208,83	217,42	231,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	141,23	145,20	157,50	167,57	181,70
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	145,46	156,73	167,27	177,86	188,17
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	105,45	105,39	104,47	111,96	117,70
L. Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	231,68	244,31	258,46	277,99	294,25
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,52	8,94	9,59	10,16	10,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	439,39	444,03	445,46	457,17	476,26
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	362,69	379,87	399,14	414,30	437,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	86,61	94,26	99,41	105,20	110,21
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	47,27	49,11	52,11	54,61	58,04
Penduduk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	5.760,37	5.942,72	6.155,85	6.406,42	6.728,29

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Berdasar kedua tabel di atas, baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010, secara keseluruhan mengalami kenaikan tiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Berdasar ADHB, ke 17 Sektor Usaha mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan berdasar ADHK Tahun 2010, dari ke-17 Sektor Usaha, hanya Sektor Jasa Keuangan

dan Asuransi sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian meningkat ke tahun 2023, tetapi kembali menurun di tahun 2024, sedangkan 16 sektor usaha lainnya mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya.

b) PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan pengeluaran atas barang dan jasa pada tingkat konsumsi Awal. Pendekatan ini merupakan penghitungan PDRB yang dilakukan dengan menghitung semua komponen permintaan Awal yang terdiri dari : Pengeluaran konsumsi Awal rumah tangga; pengeluaran konsumsi Awal lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi Awal pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; dan Net Ekspor (Ekspor dikurang Impor).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna Awal (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN,1993)

Berikut ditampilkan perkembangan PDRB menurut Pengeluaran yang terbagi atas 6 (Enam) sektor pengeluaran, berdasar ADHB dan ADHK Tahun 2010, selama 5 tahun terakhir yaitu selama kurun waktu 2020 hingga 2024.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2020–2024

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	5.900,82	6.062,60	6.878,18	7.537,67	8.270,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	142,08	147,10	159,97	181,24	219,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.295,75	1.364,55	1.403,57	1.503,88	1.689,23
Pembentukan Model Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.567,07	2.747,04	3.041,34	3.371,60	3.686,48

Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	2,12	2,70	-30,62	4,45	-1.48
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-1.197,35	-1.149,06	-1.584,56	-2.030,96	-2.514,50
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	8.710,47	9.174,92	9.867,87	10.567,88	11.350,36

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Tabel 2.9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (dalam miliar rupiah), 2020–2024

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	4.158,13	4.185,31	4.413,85	4.630,49	4.919,44
Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	90,28	91,49	95,44	102,89	121,24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	781,01	802,54	789,79	816,45	867,26
Pembentukan Model Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1.702,95	1.780,55	1.890,72	1.983,37	2.076,50
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	1,45	1,78	-18,14	2,74	-0,85
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-973,46	-918,96	-1.015,79	-1.129,53	-1.255,29
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5.760,37	5.942,72	6.155,85	6.406,42	6.728,29

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Berdasar kedua tabel di atas, baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010, secara keseluruhan mengalami kenaikan tiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Berdasar ADHB, ke 6 Sektor Pengeluaran mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali Perubahan Inventori yang sempat naik turun, dimana dari tahun 2021 menuju 2022 terjadi penurunan yang cukup tinggi hingga menyentuh nilai minus, namun kembali menguat saat memasuki 2023, dan kembali menurun saat memasuki tahun 2024 dimana kembali masuk nilai minus. Sedangkan berdasar ADHK Tahun 2010, dari ke-

6 Sektor Pengeluaran mengalami peningkatan tiap tahunnya, selain Perubahan Inventori yang mengalami kondisi peningkatan dan penurunan yang sama seperti pada ADHB, dan ditambah Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang sempat mengalami penurunan dari tahun 2021 menuju 2022, namun kembali menguat secara stabil di tahun-tahun kedepannya. Sementara pada kedua sisi, Sektor Net Ekspor Barang dan Jasa baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010 masih sama-sama berada pada nilai minus.

c) PDRB per Kapita

PDRB perkapita merupakan suatu ukuran pendapatan yang dapat dianggap menggambarkan tingkat pendapatan tiap penduduk pada suatu daerah. PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 sudah mencapai Rp.34.420.000,-. Meningkatnya PDRB per kapita ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala yang tumbuh sebesar 5,02% pada tahun 2024. Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitasnya masih rendah. Meningkatnya angka ini disebabkan laju signifikan sektor sekunder dan tersier, diantaranya sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang merupakan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan efek multiplier yang cukup tinggi. Diharapkan kedepan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi dengan pengeluaran perkapita yang tidak jauh beda. Gambaran umum capaian indikator yang mendukung capaian PDRB perkapita pada tahun 2024 adalah:

Pertama, Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun 2024, UMKM di Kabupaten Barito Kuala telah mencapai 4.417 usaha berdasar yang sudah diterbitkan izinnya oleh aplikasi OSS RBA, yang terdiri dari 4.414 usaha yang masih berstatus Usaha Mikro dan Kecil, dan 3 usaha yang sudah berstatus Menengah. Selanjutnya sudah ada 37 usaha yang sudah termasuk usaha skala besar, sehingga di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh UMKM dengan persentase cakupan sebesar 99,17%. Karenanya, untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha berupa kegiatan pelatihan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produksi yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, Koperasi yang Aktif. Pada tahun 2024 terdapat 56 koperasi aktif di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 13 Koperasi Unit Desa (KUD), 17 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 3 Koperasi Karyawan (Kopkar), dan 23 Koperasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Ketiga, Nilai Investasi Daerah. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 jumlah investasi daerah yang berusaha di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 230.411.412.636,- yang tersebar di seluruh perusahaan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam upayanya untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Barito Kuala, beberapa upaya telah dilaksanakan, diantaranya melalui koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, meningkatkan perhatian dan partisipasi/kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM, meningkatkan informasi dari media massa, melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta melaksanakan dan mengikuti pameran investasi/promosi daerah dan yang telah diresmikan di tahun 2022 adalah Mal Pelayanan Publik untuk lebih mendorong kemudahan dan kecepatan pelayanan berinvestasi.

Keempat, Pembinaan Kawasan Transmigrasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan transmigrasi melalui kegiatan penguatan tahapan satuan kemandirian melalui bidang infrastruktur, sosial ekonomi kelembagaan, penguatan SDM dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pelaku usaha seperti Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP), Vokasi, Otomotif dan berbagai jenis pelatihan lainnya. Selain melalui kegiatan APBD pengembangan Kawasan transmigrasi juga dilaksanakan melalui TP APBN dengan program daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, tahun 2023 sebelumnya telah ada kegiatan difokuskan pada peningkatan infrastruktur wilayah berupa pembuatan jembatan box culvert, pada Desa Dinar Baru Kec. Rantau Badauh, peningkatan TALUD Jalan Boulevard pusat KTM. Selain itu dalam upaya peningkatan SDM melalui kegiatan mental spiritual juga dilakukan rehabilitasi Mushalla Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit. Semua kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, dan meningkatkan infrastruktur kawasan transmigrasi, mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha dalam rangka peningkatan kualitas SDM sehingga meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, merencanakan kegiatan pelatihan pengembangan peningkatan usaha untuk pelaku usaha di kawasan Transmigrasi melalui kajian dan FGD yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder yang terkait.

d) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memperlihatkan adanya kecenderungan membaik (meningkat) dari tahun ke tahun, walaupun dimulai dengan kondisi cukup parah pada tahun 2020 yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi dengan nilai minus (-) 1.06, namun kondisi ini wajar karena secara umum di Kalimantan Selatan laju pertumbuhan ekonomi berada pada pertumbuhan minus (-) bahkan secara nasional, dikarenakan

efek dari Pandemi COVID-19. Kondisi ini kemudian mulai membaik seiring waktu dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Kendati demikian, pada sektor usaha hampir semua sektor usaha mengalami penurunan di tahun 2024 yang mana ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala berdasar pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Pengerluaran di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2020 – 2024

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	-1,97	1,13	0,93	2,30	4,80
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,30	4,54	4,10	3,53	0,69
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-2,30	2,82	1,69	0,82	3,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,83	4,52	5,75	6,06	4,60
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,63	6,26	5,32	5,13	3,96
F. Konstruksi/ <i>construction</i>	-2,76	6,97	6,89	6,88	5,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-3,43	2,85	6,92	6,65	4,36
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-3,54	1,88	4,36	4,11	6,29

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	-3,24	2,82	8,47	6,39	8,44
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,81	7,75	6,73	6,33	5,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,96	-0,06	-0,87	7,17	5,12
L. Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,05	5,45	5,79	7,56	5,85
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-2,00	4,91	7,26	5,97	5,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,97	1,06	0,32	2,63	4,18
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,13	4,74	5,07	3,80	5,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,31	8,83	5,46	5,83	4,76
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	-1,70	3,90	6,09	4,80	6,29
Penduduk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	-1,06	3,17	3,59	4,07	5,02

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara
 Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2020 – 2024

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	-0,21	0,65	5,46	4,91	6,24

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	-1,1	1,34	4,32	7,81	17,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	-0,91	2,76	-1,59	3,38	6,22
Pembentukan Model Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	-3,3	4,56	6,19	4,9	4,7
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	-1,06	3,17	3,59	4,07	5,02

* = angka sementara, ** = angka sangat sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

2) Laju Inflasi

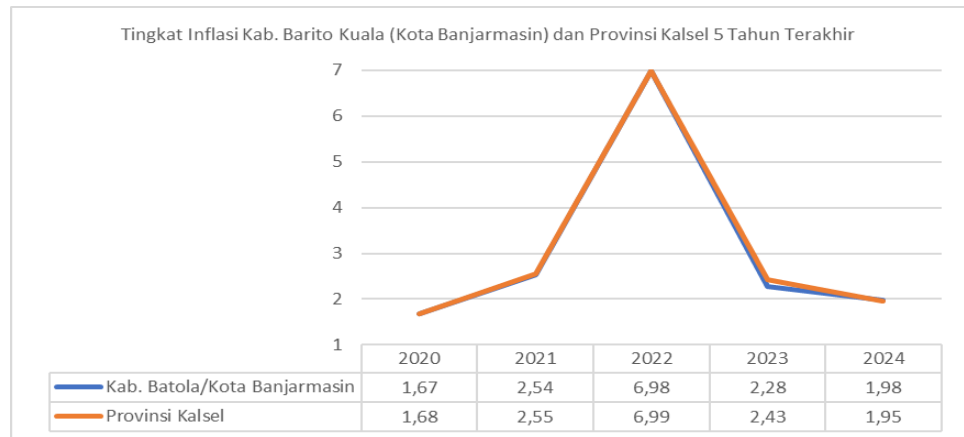
Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala mengacu inflasi di Kota Banjarmasin. Berdasar pada data dari website publikasi data BPS Kalimantan Selatan di laman kalsel.bps.go.id, Tingkat Inflasi di Kota Banjarmasin selama 5 tahun terakhir mengalami naik-turun yang cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel dan infografis di bawah.

Tabel 2.12

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Barito Kuala, dengan mengacu pada Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Banjarmasin dan Perbandingannya dengan Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Kuala	1,67%	2,54%	6,98%	2,28%	1,98%
Kalimantan Selatan	1,68%	2,55%	6,99%	2,43%	1,95%



Gambar 2.5 Pergerakan Tingkat Inflasi Rata-Rata 5 Tahun Terakhir antara Kab. Barito Kuala (Kota Banjarmasin) dan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: kalsel.bps.go.id

Berdasar tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Inflasi antara Kota Banjarmasin yang menjadi acuan untuk tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala selalu beriringan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi selama tahun 2020 hingga 2023 selalu berada dibawah sedikit dari Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, kecuali pada tahun 2024 dimana Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan dengan selisih sebesar 0,03%. Secara perkembangannya selama 2020 hingga 2022 tingkat inflasi meningkat dengan puncak tertingginya berada di tahun 2022 dimana tingkat inflasi berada di atas 5%, namun kemudian mulai menurun dan hingga tahun 2024, sudah berada pada level 1,98% untuk Kota Banjarmasin dan 1,95% untuk Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada 2 (dua) sisi, yaitu terkait Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Terkait Kemiskinan, pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.044 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.707 orang, yang artinya secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala turun sebanyak 663 orang. Lebih detailnya, kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2020 hingga 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan,
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala
selama 5 Tahun Terakhir (2020-2024)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	14.251	4,51	340.526	0,810	0,210
2021	16.099	5,11	355.160	0,565	0,121
2022	15.055	4,75	375.707	0,711	0,173
2023	14.707	4,60	417.110	1,144	0,395
2024	14.044	4,36	437.579	0,689	0,156

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa secara jumlah dan persentase penduduk miskin, di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 menuju 2021 sempat mengalami kenaikan, namun kemudian berangsur-angsur menurun secara signifikan di tahun-tahun selanjutnya hingga tahun 2024. Selanjutnya, garis kemiskinan tiap tahun selalu mengalami peningkatan, hingga tahun 2024 mencapai Rp. 437.579,00 / Kapita / Bulan. Sedangkan pada Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemsikinan mengalami naik-turun selama 5 tahun terakhir, dengan puncak tertinggi berada pada tahun 2023 dan terendah berada pada tahun 2021.

Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi kemiskinan terutama terkait kemiskinan eskترم, yaitu akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pendapatan masyarakat.

- Berdasar data dari BPS Kalimantan Selatan, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Barito Kuala di tahun 2024* adalah sebesar 56,66% , masih jauh di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai angka 82.89%, dan menjadi posisi paling bawah di antara 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Ini disebabkan karena masih banyaknya penggunaan jamban di bantaran sungai oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagai sarana sanitasi.
- Selanjutnya terkait akses terhadap air bersih, berdasar rilis data oleh PDAM Kabupaten Barito Kuala melalui BPS Kabupaten Barito Kuala, total pelanggan yang mendapat akses air bersih PDAM adalah sebanyak 39.385 pelanggan, dengan pelanggan terbanyak di Kecamatan Alalak dan Mandastana. Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Barito Kuala, maka total penduduk yang sudah memiliki akses air bersih PDAM adalah sebesar 11,94%. Detail mengenai cakupan akses air bersih PDAM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.14
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala
berdasar Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Pelanggan <i>Number of Customers</i>	Air Disalurkan <i>Distributed Water (m³)</i>	Penjualan <i>Sold Water (m³)</i>	Nilai <i>Value (Rp)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	301	91.356	76.955	310.695.000
Tamban-Mekarsari	244	47.449	40.719	178.768.000
Anjir Pasar-Anjir Muara	2.610	832.668	515.346	3.092.774.000
Alalak-Mandastana	24.626	5.638.996	4.355.521	28.264.931.000
Jejangkit	400	83.383	75.279	434.282.500
Belawang-Wanaraya	778	173.772	154.412	886.683.000
Barambai	1.510	435.787	347.988	1.917.612.000
Rantau Badauh	1.385	357.340	349.994	1.915.435.000
Cerbon	1.049	270.002	246.109	1.368.078.500
Bakumpai	249	55.592	54.284	319.943.500
Marabahan	5.297	1.879.594	1.426.168	8.296.322.000
Tabukan-Kuripan	936	213.435	193.005	1.084.074.500
Barito Kuala	39.385	10.079.374	7.835.780	48.069.599.000

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

- Terakhir terkait pendapatan, dapat dilihat pada Rasio Gini (Ketimpangan Pendapatan) di Kabupaten Barito Kuala. Berikut dilihatkan perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.15
Rasio Gini di Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Tahun <i>Year</i>	Rasio Gini <i>Gini Ratio</i>
(1)	(2)
2020	0,277
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312
2024	0,272

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Bisa dilihat pada tabel diatas, bahwa Rasio Gini/Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Kuala sempat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yang mengindikasikan jarak ketimpangan pendapatan di masyarakat yang semakin tinggi. Namun, tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan di masyarakat Kabupaten Barito Kuala mulai mengecil.

Selanjutnya berikaitan dengan Pembangunan Manusia. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 adalah sebesar 71,4 dengan kategori “Tinggi”, dimana indeks tersebut mengalami kenaikan 0,73 poin dari tahun 2023 dimana nilai indeks IPM tahun 2023 adalah 70,67. Adapun komponen penyusun IPM terdiri atas: Umur Harapan Hidup yang pada tahun 2024 adalah sebesar 72,28 Tahun; Rata-Rata Lama Sekolah yang pada tahun 2024 adalah sebesar 7,92 Tahun; Harapan Lama Sekolah yang pada tahun 2024 adalah sebesar 12,56 tahun; dan Pengeluaran per Kapita yang pada tahun 2024 adalah sebesar 11.168.000 ribu rupiah/kapita/tahun. Perkembangan komponen IPM selama 5 tahun di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Perolehan Nilai Komponen Penyusun IPM Kab. Barito Kuala Tahun 2024

Tahun Years	Umur Harapan Hidup (Tahun) <i>Life Expectancy (Year)</i>	Harapan Lama Sekolah (Tahun) <i>Expectancy Years School (Year)</i>	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) <i>Mean Years School (Year)</i>	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun) <i>Expenditure per Capita (Thousand Rupiah/ Capita/Year)</i>	IPM HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	71,37	12,39	7,34	9.805	68,65
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67
2024	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Meskipun baik secara indeks IPM maupun ke-4 komponen penyusun IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, namun pada tahun 2024 IPM di Kabupaten Barito Kuala menjadi yang paling rendah diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala berada sekitar 0,34 point selisih dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tahun sebelumnya masih di bawah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala memiliki selisih nilai sebesar 3,79 yang terbilang cukup jauh. Perbandingan nilai IPM Kabupaten Barito Kuala dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan dan dengan Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

Berita Resmi Statistik No. 72/12/63/Th. XXVIII, 2 Desember 2024



PERTUMBUHAN IPM KALSEL 2024
▲ 0,71%



IPM KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024



Keterangan:
■ Sangat Tinggi
■ Tinggi



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Gambar 2.6 Perbandingan Perolehan Nilai IPM 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: Infografis Diskominfo Prov. Kalsel 2024, berdasar Berita Resmi Statistik No. 72/12/63/Th. XXVIII, 2 Desember 2024

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan

organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Selanjutnya mengenai situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana terdapat 14 (empat belas) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Mutu pelayanan di Kabupaten Barito Kuala dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 62,81 – 81,25.

Indikator-indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik tersebut antara lain:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).

- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tiap tahun dilaksanakan sebanyak 2 kali tiap tahunnya yang terbagi atas 2 semester. Semester 1, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan Semester 2, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Unit Penyelenggara Pelayanan yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat adalah Satuan / Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat. Ada 55 unit pelayanan yang wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, baik pelaksana survei, indikator yang digunakan dan metodologi yang diterapkan.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri dan langsung oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan, mulai dari penyebaran kuisioner, penghitungan

kuisisioner dan penyusunan laporan hasil survei. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan survei dengan mewajibkan semua unit penyelenggara pelayanan menyampaikan laporan hasil survei kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan.

Dengan demikian, diharapkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit penyelenggaraan pelayanan secara mandiri dan langsung dapat dipantau dan dievaluasi progres atau kemajuan capaian kinerja pelayanannya setiap tahun. Secara garis besar konversi penilaian IKM berdasar nilai yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Hasil Survei Indeks Kepuasan Berdasarkan Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Intreval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
81,26 – 100	A	Sangat Baik
62,81 – 81,25	B	Baik
43,76 – 62,80	C	Kurang Baik
25,00 – 43,75	D	Tidak Baik

Sumber: Laporan Pelaksanaan SKM Pemkab. Batola Tahun 2024

Sehingga berdasar tabel di atas, kita dapat menilai capaian Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 seperi pada data tabel dibawah yang disajikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam Laporan Pelaksanaan SKM di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

Tabel 2.18
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2023-2024

No	Unit Pelayanan	Indeks			
		2023 Semester 1	2023 Semester 2	2024 Semester 1	2024 Semester 2
1	Dinas Kependudukan dan Capil	84,51	84,51	90,65	92,42
2	Dinas PMPTSP	86,9	90,89	89,19	93,39
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	86,73	88,61	88,85	89,01
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	81,92	82,00	82,09	82,09
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan	90,89	94,19	84,5	88,25
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	89,45	90,89	90,89	86,51
7	Dinas Kesehatan	85,19	85,59	85,24	85,94
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,29	-	87,29	92,41
9	Dinas Lingkungan Hidup	83,33	92,67	82,18	81,45
10	Dinas Pendidikan	87,25	88,25	88,50	88,75
11	Dinas Sosial	83,25	85,06	81,14	84,11
12	Dinas PPKBP3A	86,22	80,30	81,08	84,94
13	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	89,44	86,99	91,9	92,22
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	78,61	82,62	88,11	88,35
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,67	83,59	85,53	85,53
16	RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	78,71	76,75	80,26	81,39
17	Klinik Utama Setara	88,93	88,97	0	80,85
18	Kecamatan Tabunganen	89,69	90,2	89,02	91,04
19	Kecamatan Mekarsari	86,7	86,50	91,36	91,58
20	Kecamatan Tamban	90	90	86,5	90,03
21	Kecamatan Anjir Pasar	89,5	90,30	90,7	91,31
22	Kecamatan Anjir Muara	90,11	90,60	90,07	90,25
23	Kecamatan Alalak	85,17	85,39	90,25	91,25
24	Kecamatan Mandastana	92,75	90,03	90,75	91,3
25	Kecamatan Jejangkit	90	90	90	92,61
26	Kecamatan Rantau Badauh	85,78	85,80	91,01	91,01
27	Kecamatan Cerbon	83,51	84,57	85,85	87,02
28	Kecamatan Bakumpai	89,56	88,71	83,51	83,51
29	Kecamatan Belawang	86,31	87,25	85,81	85,81
30	Kecamatan Wanaraya	89,75	89,25	87,49	87,84
31	Kecamatan Barambai	87,03	89,75	89,25	91,5
32	Kecamatan Marabahan	83,32	83,32	90,01	90,65
33	Kecamatan Tabukan	84,51	84,51	84,71	84,71
34	Kecamatan Kuripan	87,94	90,17	88,36	89,79
35	Kelurahan Marabahan Kota	91,88	91,60	91,6	91,67

36	Kelurahan Ulu Benteng	79	89,55	80,75	80,75
37	Kelurahan Lepas	84,57	84,57	85	84,73
38	Kelurahan Handil Bakti	89,11	89,12	89,5	89,15
39	Kelurahan Berangas	83,7	92,42	92,42	78,06
40	Kelurahan Berangas Barat	87,73	87,82	87,82	88,33
41	Puskesmas Tabunganen	82,79	93,07	85,69	86,01
42	Puskesmas Mekarsari	81,03	83,07	85,06	86,49
43	Puskesmas Tamban	78,16	81,55	80,29	86,88
44	Puskesmas Anjir Pasar	81,83	90,45	82,03	86,44
45	Puskesmas Anjir Muara	81,16	82,36	84,26	79,41
46	Puskesmas Berangas	81,87	81,92	82,03	83,74
47	Puskesmas Mandastana	91,9	88,24	82,89	83,65
48	Puskesmas Jejangkit	85,97	87,61	87,7	87,7
49	Puskesmas Rantau Badauh	81,73	82,62	82,9	84,1
50	Puskesmas Bantuil	93,94	94,94	97,73	93,38
51	Puskesmas Lepas	80,2	88,39	84,50	90,61
52	Puskesmas Belawang	81,5	82	85,75	86,25
53	Puskesmas Wanaraya	89,04	90,34	88,76	88,78
54	Puskesmas Barambai	87,24	89,30	90,76	90,85
55	Puskesmas Marabahan	84,59	87,81	83,79	81,29
56	Puskesmas Tabukan	86,42	87,67	87,76	87,93
57	Puskesmas Kuripan	88,25	88,43	88,66	88,71
58	Puskesmas Jelapat	85,48	89,60	84,63	86,19
59	Puskesmas Semangat Dalam	94,5	94,90	94,9	94,2
Jumlah		5002	4,973.07	5049,23	5164,12
Rata-rata		85,25	87,25	87,27	87,52
Target		95	95	95	95

Kategori	Capaian					
	2021	2022	2023 Sem 1	2023 Sem 2	2024 Sem 1	2024 Sem 2
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,25	85	85,25	87,25	87,27	87,52

Sumber: Laporan Pelaksanaan SKM Pemkab. Batola Tahun 2024

Dari data yang disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala ini dapat diambil kesimpulan bahwa selama tahun 2021 hingga Semester I 2023, Nilai IKM stabil diangka 85. Peningkatan mulai terjadi saat memasuki Semester II 2023 hingga pada Semester II yang meningkat menuju angka 87, menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kemudian berdasar tabel 2.17, maka pada tahun 2024 diperoleh nilai IKM di Kabupaten Barito Kuala sebesar 87,52 dengan predikat A atau “Sangat Baik”.

Selain indeks kepuasan masyarakat, juga telah dilakukan pengukuran terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun capaian target standar pelayanan minimal Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 berdasarkan pelaporan pada laman website <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Rekapitulasi Realisasi Standar Pelayanan Minimal tahun 2024

• SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					92.86 %
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					93.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.33 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10499	9755	744	92.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.89 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94.44 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	92.91	7.09	92.91 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	70	69.64	0.36	99.49 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	58.19	61.2	-3.01	100.00 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	61.61	65.04	-3.43	100.00 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.4	0.3	0.1	75.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	47.7	2.3	95.40 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	0.4	0.36	0.04	90.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	35	34.78	0.22	99.37 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0.45	0.44	0.01	97.78 %
2 .	Pendidikan Dasar					97.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.93 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	51088	49766	1322	97.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.28 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.41 %
	SD (2024)					96.84 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	99.69	0.31	99.69 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98.6	1.4	98.60 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	59.08	57.9	1.18	98.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	47.63	46.6	1.03	97.84 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.27	2.27	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.09	1.09	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78.88	74.21	4.67	94.08 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.7	72.41	2.29	96.93 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.56	55.79	6.77	89.18 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	47.7	2.3	95.40 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.45	0.42	0.03	93.33 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	35	33.57	1.43	95.91 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.69	2.69	0	100.00 %
	SMP (2024)					95.97 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	88.2	88.18	0.019	99.98 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	95.16	4.84	95.16 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	70.95	67.01	3.94	94.45 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	67.08	59.47	7.61	88.66 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.49	4.49	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.04	2.04	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.34	70.44	4.9	93.50 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.98	71.65	2.33	96.85 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	62.07	55.85	6.22	89.98 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	25	23.26	1.74	93.04 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.38	0.37	0.01	97.37 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	36	35.51	0.49	98.64 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.61	2.61	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					88.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.65 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1452	1246	206	85.81 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.51 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.53 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	93	92.06	0.94	98.99 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	85.81	14.19	85.81 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	40	38.74	1.26	96.85 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	35	34.4	0.6	98.29 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	4.11	4.11	0	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.44	2.44	0	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	42	41.77	0.23	99.45 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	40	38.72	1.28	96.80 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	35	34.42	0.58	98.34 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1.5	1.4	0.1	93.33 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %

• SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			89.74 %	
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	53.11 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6091	4044	2047	66.39 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.27 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	81.37 %	
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	762	757	5	99.34 %	
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1096380	579780	516600	52.88 %	
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6091	4044	2047	66.39 %	
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	6091	4044	2047	66.39 %	
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6091	4044	2047	66.39 %	
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	6091	4044	2047	66.39 %	
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	6091	4044	2047	66.39 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6091	4044	2047	66.39 %	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6091	4044	2047	66.39 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	19	19	0	100.00 %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	Orang	1	1	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"						
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	352	352	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	385	385	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	6091	4044	2047	66.39 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						69.29 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	51.61 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6064	3912	2152	64.51 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.68 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.38 %	
	1 . Formulir partograf	Formulir	6064	3912	2152	64.51 %	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6064	3912	2152	64.51 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	6091	4044	2047	66.39 %	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	385	385	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)						
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						76.30 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.66 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5287	3877	1410	73.33 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.64 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.19 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	5169	3877	1292	75.00 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	5287	3877	1410	73.33 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	5287	3877	1410	73.33 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	5287	3877	1410	73.33 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	5287	3877	1410	73.33 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6091	4044	2047	66.39 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	45	45	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	1973	1973	0	100.00 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita						83.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.47 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22198	18443	3755	83.08 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.47 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.35 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	22198	18443	3755	83.08 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	22198	18443	3755	83.08 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	6091	4044	2047	66.39 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4046	3874	172	95.75 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	16439	16178	261	98.41 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1363	1163	200	85.33 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	2379	2179	200	91.59 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	2500	2407	93	96.28 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	3300	3237	63	98.09 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	12552	1045	11507	8.33 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	1500	1340	160	89.33 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2513	1475	1038	58.69 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	25000	20000	5000	80.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	19	19	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1	1	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	51	51	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	1600	1600	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	1973	1973	0	100.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						97.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.53 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	51524	49933	1591	96.91 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.49 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.45 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	51524	49933	1591	96.91 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	51524	49933	1591	96.91 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	51524	49933	1591	96.91 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	51524	49933	1591	96.91 %	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	51524	49933	1591	96.91 %	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	11279	11000	279	97.53 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	19	19	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	1350	1000	350	74.07 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	2400	2352	48	98.00 %	
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	16	16	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	19	19	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	165	165	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	1973	1973	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						89.24 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.71 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	213961	186447	27514	87.14 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.53 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.65 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	220	215	5	97.73 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	220	215	5	97.73 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	220	215	5	97.73 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	19	19	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	213961	186447	27514	87.14 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	19	19	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	213961	186447	27514	87.14 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	19	19	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	19	19	0	100.00 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	3453	3453	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	19	19	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	569	500	69	87.87 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	36	36	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1005	1005	0	100.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						91.75 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72.73 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32311	29373	2938	90.91 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.02 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.10 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	32311	29373	2938	90.91 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	32311	29373	2938	90.91 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	36	36	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1973	1973	0	100.00 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21344	21344	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	21344	21344	0	100.00 %	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	21344	21344	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	19	19	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	36	36	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	26	26	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3232	3232	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3232	3232	0	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	230	230	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip	Unit	3232	3232	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	tes gula darah, kapas alkohol, lancet						
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	19	19	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	36	36	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	56	56	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	467	467	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	19	19	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	6	6	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	19	19	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)						
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	19	19	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	19	19	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	36	36	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	19	19	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	19	19	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	19	19	0	100.00 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4432	4432	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	25	25	0	100.00 %	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	803	803	0	100.00 %	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	19	19	0	100.00 %	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	200	200	0	100.00 %	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4432	4432	0	100.00 %	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	4432	4432	0	100.00 %	
	8 . Tuberulin	Vial	19	19	0	100.00 %	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	2	2	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	44	44	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	35	35	0	100.00 %	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	4590	4590	0	100.00 %	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6169	6169	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	19	19	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6169	6169	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	19	19	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	19	19	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	2	2	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	385	385	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	352	352	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	56	56	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	45	45	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	0	100.00 %	

• SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5024	5024	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	JARINGAN PERPIPAAN						
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1256	1256	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1256	1256	0	100.00 %	
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %	
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4768	4768	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1192	1192	0	100.00 %	
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %	
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %	

• SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1. KI20240222043646300222	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						6304

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	160	160	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	40	40	0	100.00 %	
	2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %	
2 . KI20240222043722300223	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %	
	Ada Relokasi Program Pemerintah						6304
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32	32	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	8	8	0	100.00 %	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	8	8	0	100.00 % 100.00	
	2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %	

• SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	153	153	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	153	153	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	153	153	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	153	153	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	14	14	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)						
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	14	14	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	96	96	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	96	96	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	96	96	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan	Orang	96	96	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)						
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	96	96	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	96	96	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	96	96	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	96	96	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	6	6	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	6	6	0	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	33	33	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	34	34	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk	Orang	34	34	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	34	34	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23	23	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	23	23	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	23	23	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	23	23	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)						
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	23	23	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	8	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	8	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)						
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	15	15	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	128	128	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	128	128	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	67	67	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	47	47	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
	(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)						
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	128	128	0	100.00 %	

• SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	AKSI
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					96.67 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	85030	85030	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	16.67 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	198	198	0	100.00 %	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	6	6	0	100.00 %	

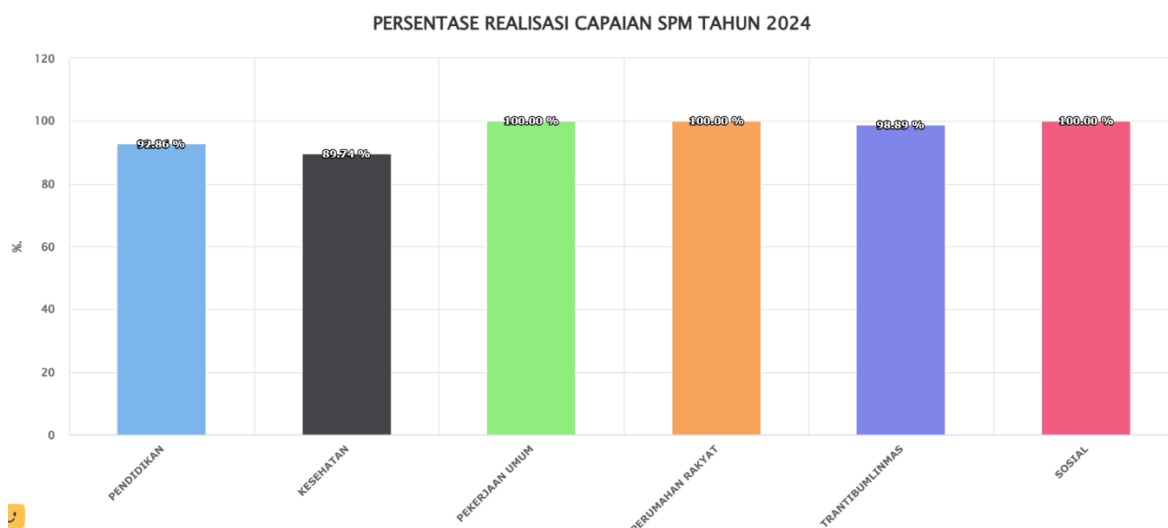
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)						
	Data Dukung : 6304-202410010147008 SOP Penyidikan & Penindakan.pdf Status : Approved						
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	2104	2104	0	100.00 %	
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0	0	0	0.00 %	
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload						
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	0	0	0	100.00 %	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %	
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1743	1743	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
	Data Dukung : 6304-20240720051611DOK KRB.pdf Status : Approved						
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	1743	1743	0	100.00 %	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1743	1743	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	33	33	0	100.00 %	
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	505	505	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	194	194	0	100.00 %	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	505	505	0	100.00 %	

3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1743	1743	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100.00 %	
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	1743	1743	0	100.00 %	
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	2	2	0	100.00 %	
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100.00 %	
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	7519	7519	0	100.00 %	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %	
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	26	26	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		

	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	22	22	0	100.00 %	
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	1	1	0	100.00 %	
Data Dukung : 6304-202410010150368 SOP Penyidikan & Penindakan.pdf Status : Approved							
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	49	49	0	100.00 %	
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	4	4	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1	1	0	100.00 %	
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	22	22	0	100.00 %	

Sumber: SPM Bangda pada laman: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>



Gambar 2.7 Persentase Capaian SPM Tahun 2024

Sumber: SPM Bangda pada laman: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Berdasar data tabel dan gambar di atas, bahwa dari 6 (Enam) Bidang Urusan SPM, 4 (Empat) diantaranya sudah tercapai 100% yaitu Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Sosial, dan Trantibumlinmas. Sedangkan 2 Urusan lainnya masih belum mencapai 100% yaitu Pendidikan dan Kesehatan dimana Kesehatan menjadi yang paling rendah yaitu 89,71%.

A. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar

1) Fokus Pelayanan Umum Urusan Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 760 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 275 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 329 buah unit, SMP/MTs sebanyak 105 unit, SMA/MA sebanyak 46 unit, dan SMK sebanyak 5 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Lebih detailnya mengenai jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.20
Jumlah Sekolah di Kabupaten Barito Kuala per Kecamatan tahun 2024

Kecamatan	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Tabunganen	16	24	9	2	1
Tamban	28	31	14	5	1
Mekarsari	16	21	8	5	0
Anjir Pasar	7	22	5	4	0
Anjir Muara	21	27	5	3	1

Kecamatan	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Alalak	48	41	13	7	1
Mandastana	18	19	5	2	0
Jejangkit	2	11	2	1	0
Belawang	9	16	2	1	0
Wanaraya	16	20	8	2	0
Barambai	12	16	5	2	0
Rantau Badauh	17	22	7	13	0
Cerbon	12	12	4	1	0
Bakumpai	7	11	4	2	0
Marabahan	24	16	7	3	1
Tabukan	12	11	4	2	0
Kuripan	10	9	3	1	0
Barito Kuala	275	329	105	46	5

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Selanjutnya dibahas mengenai jumlah guru dan murid di Kabupaten Barito Kuala sampai pendataan pada tahun 2024. Total guru di Kabupaten Barito Kuala yang terdata adalah sejumlah 6.581 orang dan jumlah murid di Kabupaten Barito Kuala yang terdata adalah sejumlah 66.539 orang dengan perincian berdasar tingkat pendidikan seperti pada tabel dibawah.

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Barito Kuala per Satuan Pendidikan tahun 2024 (orang)

	TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK
Guru	1.041	3.109	1.377	896	158
Murid	8.074	33.109	14.203	9.164	1.989
Estimasi Rasio Guru : Murid	1 : 8	1 : 11	1 : 10	1 : 10	1 : 13

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru terbanyak ada pada jenjang SD/MI, sedangkan guru paling sedikit ada pada jenjang SMK, begitupula dengan jumlah muridnya. Namun jika melihat dari rasio antara guru dengan murid, pada tingkat SMK merupakan rasio paling tinggi dimana estimasinya 1 guru mengajar kepada sekitar sekitar 13 murid, sedangkan rasio paling rendah ada pada tingkat TK/RA dimana estimasinya 1 guru mengajar kepada 8 murid.

Jumlah maksimal peserta didik setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI adalah 28 peserta didik, jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah 32 peserta didik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase sekolah menurut SNP, sehingga dapat ditentukan sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi SNP menurut rasio siswa per rombel, dan dapat sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Barito Kuala masih berada di bawah SNP yang berarti jumlah ruang kelas masih dapat menampung sejumlah peserta didik yang ada. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan fasilitas pendukung lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan

sebagaimana mestinya.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini secara efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya sejak tahun 2016 yang baru lalu mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A No. 5)

2) Fokus Pelayanan Umum Urusan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025, Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit yaitu RSUD H. Abdul Aziz di Kota Marabahan, 1 Poliklinik di Kecamatan Alalak, Puskesmas sebanyak 19 unit yang tersebar di seluruh 17 Kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak 56 unit, dan Apotek sebanyak 8 unit yang secara detail per Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.22
Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Tabunganen	-	-	1	3	-
Tamban	-	-	1	5	-
Mekarsari	-	-	2	2	-
Anjir Pasar	-	-	1	4	-
Anjir Muara	-	-	1	4	1
Alalak	-	1	2	5	2
Mandastana	-	-	1	5	2
Jejangkit	-	-	1	1	-
Belawang	-	-	1	4	-

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Wanaraya	-	-	1	4	-
Barambai	-	-	1	3	-
Rantau Badauh	-	-	1	3	-
Cerbon	-	-	1	3	1
Bakumpai	-	-	1	3	-
Marabahan	1	-	1	4	2
Tabukan	-	-	1	2	-
Kuripan	-	-	1	1	-
Barito Kuala	2	1	19	56	8

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Selain seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, beberapa kecamatan juga sudah tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 26 buah yang terdiri dari kendaraan bermotor sebanyak 21 buah dan perahu bermotor sebanyak 5 buah. Selain fasilitas kesehatan yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, juga tersedia beberapa fasilitas kesehatan yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain seperti oleh pihak swasta dan TNI/Polri. Sarana Kesehatan pada TNI/Polri sebanyak 3 buah dan Swasta sebanyak 5 buah.

Selanjutnya adalah jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai pada tahun 2024 sebanyak 1.062 orang yang terdiri atas: Tenaga Medis, Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Nutrisisionis, Tenaga Keterampilan, Tenaga Keteknisan Medis, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Sebaran Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Tenaga Medis ¹ <i>Medical Worker¹</i>	Psikologi Klinis <i>Clinical Psychology</i>	Tenaga Keperawatan <i>Nursing Worker</i>	Tenaga Kebidanan <i>Midwifery Worker</i>	Tenaga Kefarmasian <i>Pharmaceutical Worker</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tabunganen	3	—	15	15	3
Tamban	3	—	16	22	3
Mekarsari	6	—	26	24	4
Anjir Pasar	2	—	16	21	2
Anjir Muara	4	—	10	23	2
Alalak	15	—	33	43	18
Mandastana	4	—	9	22	2
Jejangkit	2	—	7	11	3
Belawang	3	—	12	18	3
Wanaraya	2	—	9	19	3
Barambai	3	—	9	18	2
Rantau Badauh	4	—	14	18	2
Cerbon	2	—	9	13	3
Bakumpai	2	—	9	18	2
Marabahan	29	—	104	55	16
Tabukan	2	—	9	16	1
Kuripan	3	—	5	13	1
Barito Kuala	89	—	312	369	70

Kecamatan <i>District</i>	Tenaga Kesehatan Masyarakat <i>Public Health worker</i>	Tenaga Kesehatan Lingkungan <i>Enviromental Health Worker</i>	Tenaga Gizi <i>Nutritionist</i>	Tenaga Keterampilan Fisik <i>Physical Therapists</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tabunganen	2	1	3	—
Tamban	3	1	3	—
Mekarsari	4	3	4	—
Anjir Pasar	3	1	4	—
Anjir Muara	1	2	3	—
Alalak	7	4	9	—
Mandastana	1	1	1	—
Jejangkit	2	1	2	—
Belawang	5	1	2	—
Wanaraya	1	1	2	—
Barambai	1	1	3	—
Rantau Badauh	1	2	1	—
Cerbon	2	2	5	—
Bakumpai	1	—	3	—
Marabahan	4	6	7	4
Tabukan	1	2	1	—
Kuripan	5	1	2	—
Barito Kuala	44	30	55	4

Kecamatan <i>District</i>	Tenaga Keteknisan Medis <i>Medical Technicians</i>	Tenaga Teknik Biomedika <i>Biomedical Enginer</i>	Tenaga Kesehatan Tradisional <i>Traditional Health Worker</i>	Ahli Teknologi Laboratorium Medik <i>Medical Laboratory Scientist</i>
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tabunganen	1	—	—	1
Tamban	2	—	—	2
Mekarsari	1	—	—	2
Anjir Pasar	3	—	—	2
Anjir Muara	1	—	—	2
Alalak	6	—	—	6
Mandastana	1	—	—	2
Jejangkit	1	—	—	1
Belawang	1	—	—	1
Wanaraya	2	—	—	2
Barambai	2	—	—	1
Rantau Badauh	2	—	—	2
Cerbon	3	—	—	2
Bakumpai	1	—	—	1
Marabahan	11	—	—	20
Tabukan	1	—	—	1
Kuripan	1	—	—	1
Barito Kuala	40	—	—	49

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Selain daripada tenaga kesehatan seperti tabel di atas, juga terdapat 107 dokter di Kabupaten Barito Kuala sampai pada tahun 2024 yang terdiri atas Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi. Sebaran dokter tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.24
Sebaran Dokter di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024

Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi
Tabunganen	2	-	1
Tamban	2	-	1
Mekarsari	4	-	2
Anjir Pasar	1	-	1
Anjir Muara	3	-	1
Alalak	12	2	3
Mandastana	3	-	1
Jejangkit	1	-	1
Belawang	2	-	1
Wanaraya	1	-	1
Barambai	2	-	1
Rantau Badauh	2	-	2
Cerbon	1	-	1
Bakumpai	1	-	1
Marabahan	20	16	9
Tabukan	1	-	1
Kuripan	2	-	1
Barito Kuala	60	18	29

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Berdasar tabel di atas, bahwa sebaran tenaga kesehatan dan dokter terkonsentrasi di Kecamatan Marabahan, ini dikarenakan posisi Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Barito Kuala yang menjadi satu-satunya di Kabupaten Barito Kuala berada di Kecamatan Marabahan. Setelahnya sebaran terbanyak ada di Kecamatan Alalak dimana selain konsentrasi penduduk yang cukup tinggi berada pada kecamatan tersebut, juga di Kecamatan Alalak terdapat Poliklinik Setara yang sedang berproses untuk menjadi Rumah Sakit.

Secara umum ketersediaan tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala masih diperlukan penambahan secara jumlah yang disertai dengan pemerataan penyebarannya di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sementara ini ketersediaan tenaga dokter dalam hal ini dokter umum masih lebih besar berada pada fasilitas kesehatan yang tergolong dalam wilayah perkotaan terutama di rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten.

Berbicara tentang pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi prioritas. Pelayanan terhadap ibu hamil dapat dilihat dari pelayanan pada Kunjungan K1, K4, dan Pemberian Tablet Tambah Darah (Zat Besi/Fe). Berikut dapat dilihat kondisi selama 5 tahun terakhir (2020-2024) terkait cakupan pelayanan pada Ibu Hamil dan juga angka kematian ibu hamil di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.25
Pelayanan Ibu Hamil dan Kondisi Ibu Hamil
di Kabupaten Barito Kuala Selama 5 tahun (2020-2024)

Tahun	Jumlah Ibu Hamil	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Mendapat Tablet Tambah Darah/Zat Besi (Fe)	Kurang Energi Kronis (KEK)	Kematian Ibu Hamil
2020	4.992	4.992	4.351	846	846	6
2021	4.577	4.577	4.173	925	925	6
2022	3.962	3.962	3.382	666	666	3
2023	4.268	4.268	4.013	545	545	6
2024	4.391	4.391	4.044	673	673	5

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah ibu hamil tiap tahun selama 5 tahun naik turun, dan semua ibu hamil melaksanakan dan mendapat kunjungan K1, namun pada kunjungan K4 tidak semua ibu hamil melaksanakan dan mendapatkan, dengan persentase kunjungan K4 paling tinggi pada tahun 2024 dimana mencakup 92,09% dari total ibu hamil yang terdata. Selanjutnya untuk ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai 2024, dan semua ibu hamil yang mengalami KEK mendapat tablet tambah darah selama 5 tahun terakhir. Terakhir pada kematian ibu hamil mengalami naik-turun selama 5 tahun terakhir, dengan yang paling rendah terjadi pada tahun 2022 dengan hanya sebanyak 3

orang. Setelah ibu hamil, pelayanan terhadap bayi terutama kondisi gizi bayi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Kondisi Gizi Bayi di Barito Kuala tahun 2024
Berdasarkan Hasil Penimbangan di Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Bayi Ditimbang <i>Infant Weighed</i>	Status Gizi <i>Nutritional Status</i>			
			Buruk <i>Malnutrition</i>	Kurang <i>Lack of Nutrients</i>	Baik <i>Good Nutrition</i>	Lebih <i>Excess Nutrients</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	Tabunganen	1.281	56	99	1.074	52
Tamban	Tamban	1.079	7	30	1.010	32
Mekarsari	Mekarsari	468	32	75	337	24
	Jelapat	1.753	17	85	1.592	59
Anjir Pasar	Anjir Pasar	903	3	39	819	42
Anjir Muara	Anjir Muara	1.528	10	43	1.371	104
Alalak	Berangas	1.877	33	157	1.537	150
	Semangat Dalam	2.073	1	36	1.990	46
Mandastana	Mandastana	1.147	12	71	973	91
Jejangkit	Jejangkit	440	—	60	349	31
Belawang	Belawang	858	1	79	708	70
Wanaraya	Wanaraya	868	25	83	646	114
Barambai	Barambai	926	1	60	782	83
Rantau Badauh	Rantau Badauh	1.044	—	15	1.027	2
Cerbon	Bantuil	598	11	48	486	53
Bakumpai	Lepasan	696	5	64	564	63
Marabahan	Marabahan	1.722	10	44	1.330	338
Tabukan	Tabukan	570	19	65	447	39
Kuripan	Kuripan	369	1	41	300	27
Jumlah/Total		20.200	244	1.194	17.342	1.420

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas bahwa dari total 20.200 bayi yang ditimbang, sebanyak 17.342 bayi atau 85,85% berada dalam kondisi gizi baik menandakan kondisi bayi di Kabupaten Barito Kuala sampai pada pendataan 2024 didominasi dengan gizi baik, selebihnya ada 1.194 bayi dalam kondisi gizi kurang atau sebesar 5,91%, 1.420 bayi dalam kondisi gizi berlebih atau sebesar 7,03%, dan terakhir sebanyak 244 bayi atau 1,21% berada dalam kondisi gizi buruk.

Kondisi yang ditemukan dari pendataan bayi pada tabel di atas berindikasi pada angka kematian bayi di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 yang menurun cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan gizi pada bayi di Kabupaten Barito

Kuala. Tabel di bawah memperlihatkan angka kematian bayi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Barito Kuala.

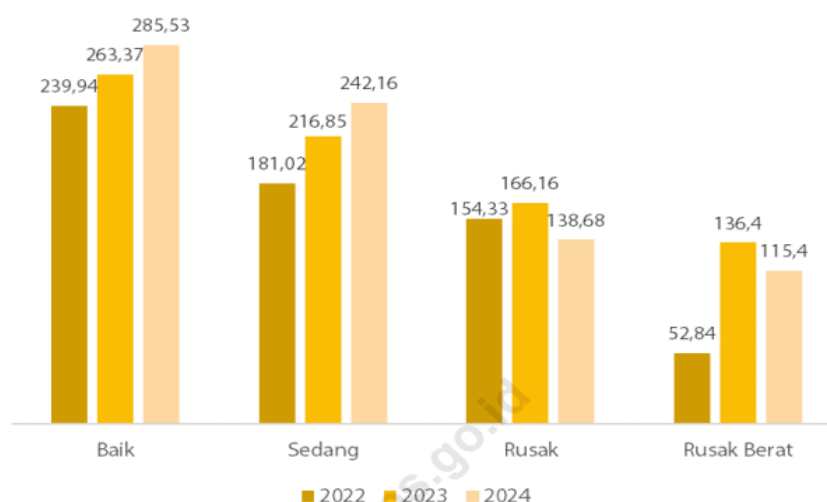
Tabel 2.27
Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Tahun	Jumlah Kematian Bayi
2020	48
2021	59
2022	54
2023	58
2024	28

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

3) Fokus Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam memperlancar aktivitas pemerintahan dan perekonomian tentunya diperlukan kondisi jalan yang memadai. Kondisi jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 (Tiga) tahun terakhir berdasarkan kondisi dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/Public Works Office of Barito Kuala Regency

Gambar 2.8 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2024
Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025

Tercatat selama tiga tahun terakhir sampai pada tahun 2024, kondisi jalan baik di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya kondisi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat sempat mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, namun kembali menurun di tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan terhadap kondisi tersebut. Selanjutnya pada tabel dibawah dijelaskan panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun terakhir berdasar jenis permukaan jalan dalam satuan kilometer (km).

Tabel 2.28
Panjang Jalan Berdasar Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2024

Jenis Permukaan Jalan <i>Type of Road Surface</i>	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/ <i>Paved</i>	338,61	423,37	428,70
Kerikil/ <i>Gravel</i>	235,22	262,00	256,67
Tanah/ <i>Soil</i>	29,95	65,85	65,85
Lainnya/ <i>Others</i>	24,35	30,55	30,55
Jumlah/Total	628,13	781,77	781,77

Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Works Office of Barito Kuala Regency*

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025

Berdasar tabel di atas, bahwa pada permukaan jalan tanah dan lainnya meningkat cukup tinggi dari tahun 2022 ke 2023, namun stagnan ketika sampai di 2024. Kemudian panjang permukaan jalan dengan kerikil mengalami peningkatan dari 2022 ke 2023, lalu menurun tipis di 2024. Terakhir panjang jalan dengan permukaan yang sudah diaspal selalu mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir dengan kenaikan yang cukup tinggi dari 2022 ke 2023, menunjukkan panjang jalan yang diaspal di Kabupaten Barito Kuala selalu meningkat setiap tahunnya.

4) Fokus Pelayanan Umum Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Rumah itu sendiri dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
- Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah bahwa berdasarkan SK Kawasan Kumuh tahun 2017, luas kawasan kumuh di Kabupaten Barito Kuala adalah seluas 251,08 Ha dengan wewenang di bawah 10 hektar per kawasan. Hingga tahun 2024 telah ditangani seluas 157,242 ha atau 62,63%, ini termasuk capaian penanganan tahun ini yaitu sebesar 60.218 ha atau 23,98% dari total kawasan kumuh.

Selanjutnya Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kembali informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah bahwa dari total 82.271 unit rumah di kabupaten Barito Kuala, sebanyak 14.562 unit teridentifikasi sebagai RTLH berdasar pada pendapatan tahun 2021. Sampai pada tahun 2024, telah ditangani sebanyak 3.223 unit atau sebanyak 22,13%, yang terdiri dari 126 unit dengan dana dari APBD kabupaten, 225 unit melalui APBD provinsi, 250 Unit melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat, dan 4 unit melalui Dana CSR BAZNAS.

5) Fokus Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Warga yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Warga yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19 mengenai Rekapitulasi Realisasi Standar Pelayanan Minimal tahun 2024 di Sub Bagian Trantibumlinmas.

Sedangkan capaian lainnya dalam hal mendukung penegakan Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.29
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Kejahatan	Penyelesaian Kejahatan	Persentase Penyelesaian (%)	Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan
2023	265	213	80	82
2024	282	387	137	87

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah kasus kejahatan dari tahun 2023 ke 2024, namun tingkat penyelesaiannya juga meningkat, menandakan semua kasus yang masuk dapat diselesaikan secara hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa terjadi peningkatan resiko penduduk terkena tindak kejahatan seiring dengan bertambahnya jumlah kasus kejahatan. Selain kasus kejahatan secara umum, di Tahun 2024 juga terdapat penyelesaian terhadap kasus Narkoba yang telah ditangani oleh pihak berwenang sebanyak 47 kasus.

Tabel 2.30
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Banjir <i>Flood</i>	Gempa Bumi <i>Earthquake</i>	Puting Beliung <i>Tornado</i>	Orang Tenggelam <i>Drown</i>	Kebakaran Rumah <i>House Fire</i>	Kebakaran Hutan dan Lahan <i>Forest and Land Fires</i>
Tabunganen	-	2	-	-	1	-
Tamban	-	-	-	-	3	2
Mekarsari	-	-	-	-	-	3
Anjir Pasar	-	3	-	-	2	1
Anjir Muara	-	3	-	-	2	-
Alalak	-	3	1	2	3	5
Mandastana	-	3	2	-	2	2
Jejangkit	-	3	-	-	-	4
Belawang	-	3	-	-	1	-
Wanaraya	-	3	-	-	-	1
Barambai	-	3	2	-	2	-
Rantau Badauh	-	3	-	-	-	3
Cerbon	-	3	-	-	1	2
Bakumpai	-	3	1	2	-	-
Marabahan	-	3	-	1	3	1
Tabukan	1	3	-	-	-	-
Kuripan	1	-	-	-	-	4

Sumber: BPBD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Tabel 2.31

Jumlah Korban Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Banjir <i>Flood</i>			Puting Beliung <i>Tornado</i>		
	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>
Tabunganen	-	-	-	-	-	-
Tamban	-	-	-	-	-	-
Mekarsari	-	-	-	-	-	-
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	-	-	-	-
Alalak	-	-	-	-	-	3 KK/11 Jiwa
Mandastana	-	-	-	-	-	19 KK/75 Jiwa
Jejangkit	-	-	-	-	-	-

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Banjir <i>Flood</i>			Puting Beliung <i>Tornado</i>		
	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>
Belawang	-	-	-	-	-	-
Wanaraya	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	-	-	-	25 KK/82 Jiwa
Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-
Cerbon	-	-	-	-	-	-
Bakumpai	-	-	-	-	-	-
Marabahan	-	-	-	-	-	-
Tabukan	-	-	-	-	-	-
Kuripan	-	-	1.403 KK/6.278 Jiwa	-	-	-

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Orang Tenggelam <i>Drown</i>			Kebakaran Rumah <i>House Fire</i>		
	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>	Meninggal Dunia/ Hilang <i>Fatality/ Missing</i>	Luka/Sakit <i>Casualty</i>	Terdampak dan Mengungsi <i>Affected and Evacuated</i>
Tabunganen	-	-	-	-	-	1 KK/1 Jiwa
Tamban	-	-	-	-	-	7 KK/18 Jiwa
Mekarsari	-	-	-	-	-	-
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	2 KK/4 Jiwa
Anjir Muara	-	-	-	-	-	2 KK/7 Jiwa
Alalak	2 Jiwa	-	-	-	-	7 KK/27 Jiwa
Mandastana	-	-	-	-	-	1 KK/2 Jiwa
Jejangkit	-	-	-	-	-	-
Belawang	-	-	-	-	-	-
Wanaraya	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	-	-	-	2 KK/2 Jiwa
Rantau Badauh	-	-	-	-	-	-
Cerbon	-	-	-	-	-	-
Bakumpai	1 KK/6 Jiwa	-	-	-	-	-

Marabahan	1 Jiwa	-	-	-	-	2 KK/7 Jiwa
Tabukan	-	-	-	-	-	-
Kuripan	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Pada 2 tabel diatas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana yang umum terjadi di Kabupaten Barito Kuala adalah Banjir, Puting Beliung, Kebakaran baik rumah maupun hutan/lahan, sedangkan gempa merupakan kejadian bencana yang baru mulai terasa di beberapa Kecamatan di Barito Kuala akhir-akhir ini. Korban yang terdampak kejadian bencana sebagian besar diungsikan di tempat sementara dan untuk kejadian orang tenggelam terdapat 9 orang yang dinyatakan meninggal dunia sepanjang 2024.

Dalam menyukseskan Bidang Trantibumlinmas, dukungan personil/pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Kuala terdiri dari ASN Struktural sebanyak 12 Orang, ASN Fungsional sebanyak 34 Orang, ASN Pelaksana sebanyak 9 Orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 14 Orang, Tenaga Kontrak sebanyak 30 Orang, dan THL Damkar sebanyak 3 Orang, sedangkan dukungan personil pada BPBD terdiri dari Seluruh ASN BPBD, Pusdalops, TNI dan POLRI, PMI, dan relawan.

Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Sesuai Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Personil SATPOL PP Kabupaten Barito Kuala minimal 250 Orang. Sedangkan Personil yang dimiliki adalah berjumlah 102 Orang;
- Terbatasnya anggaran, SDM, dan peralatan.
- Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Barito Kuala.

Upaya yang telah untuk menangani permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- Pendataan dan Pemetaan ideal kebutuhan personil untuk diajukan sebagai penambahan personil.
- Memaksimalkan anggaran dan peralatan dengan penentuan titik rawan pelanggaran Perda.
- Sosialisasi Perda dan Perkada sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
- Usulan untuk Penambahan anggaran, SDM, dan peralatannya.

6) Fokus Pelayanan Umum Urusan Sosial

SPM bidang Sosial di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

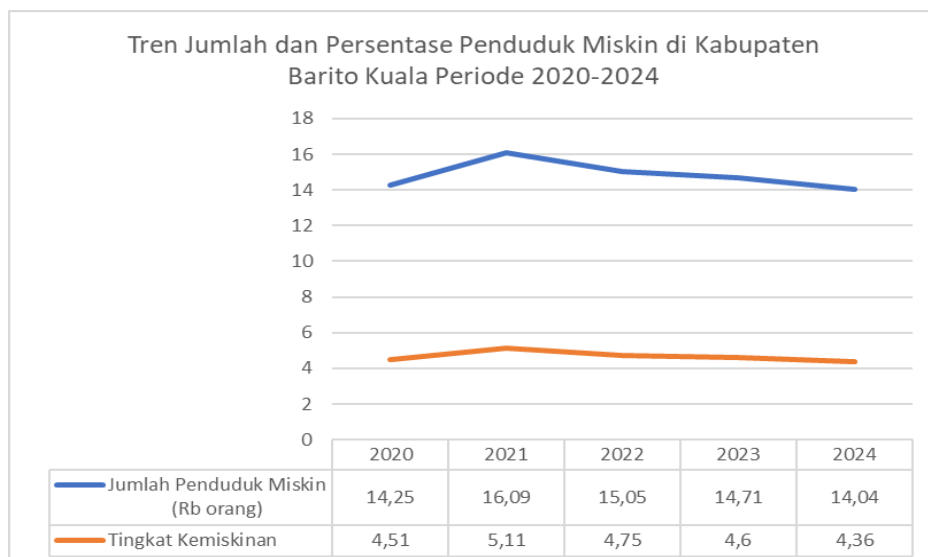
- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Capaian SPM pada Urusan Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19 mengenai Rekapitulasi Realisasi Standar Pelayanan Minimal tahun 2024 di Sub Bagian Sosial.

Permasalahan kemiskinan menjadi aspek utama yang diperhatikan dalam urusan sosial. Gambaran kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.044 orang, sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 14.707 orang, yang artinya secara absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala turun sebanyak 663 orang. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Barito Kuala 2020-2024

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dibandingkan 2020, dan baru mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan 2020, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan 2021, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan 2022, dan terakhir untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan 2023.

Sealnjutnya dapat dilihat jumlah keluarga di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, berdasarkan klasifikasinya per kecamatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Pra Sejahtera <i>Pre Prosperous</i>	Sejahtera <i>Prosperous</i>
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	360	3.118
Tamban	275	4.805
Mekarsari	1.271	1.763
Anjir Pasar	520	3.191
Anjir Muara	3.250	235
Alalak	644	9.689
Mandastana	360	3.118
Jejangkit	817	332
Belawang	466	1.482

Kecamatan Subdistrict	Pra Sejahtera Pre Prosperous	Sejahtera Prosperous
Wanaraya	431	1.713
Barambai	115	2.487
Rantau Badauh	226	2.361
Cerbon	387	1.139
Bakumpai	337	1.687
Marabahan	662	2.375
Tabukan	993	760
Kuripan	491	637
Barito Kuala	11.605	41.252

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, jumlah keluarga sejahtera di Kabupaten Barito Kuala lebih banyak daripada yang masuk dalam pra-sejahtera, dengan 14 dari 17 kecamatan didominasi keluarga yang sudah sejahtera. Namun masih ada 3 kecamatan yang lebih didominasi keluarga pra-sejahtera yaitu di Kecamatan Anjir Muara, Jejangkit, dan Tabukan.

Upaya program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Kuala untuk penanganan kemiskinan, khususnya untuk kemiskinan ekstrem adalah:

- a. Program pengelolaan sumber daya air (SDA), termasuk didalamnya Irigasi Padat Karya (Dinas PUPR)
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk didalamnya PAMSIMAS (Dinas PUPR)
- c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, termasuk didalamnya pengelolaan sanitasi sesuai standar (Dinas PUPR)
- d. Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD (Dinas Pendidikan)
- e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)
- f. Penyediaan Biaya Prosenil Peserta Didik (Beasiswa) (Dinas Pendidikan)
- g. Penyediaan Dana BOS SD (Dinas Pendidikan)
- h. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Dinas Pendidikan)
- i. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)
- j. Program Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial)
- k. Program Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial)
- l. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
- m. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) (Dinas PMD)
- n. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Disperkim)
- o. Pelatihan-pelatihan dalam hali ini diantaranya manajemen agrowisata bagi pelaku

usaha, Pelatihan budidaya jamur tiram, Pelatihan keterampilan non institusional pengolahan hasil pertanian, dan Pelatihan keterampilan institusional pengolahan hasil pertanian (Disnakertrans)

B. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Non-Dasar

1) Ketenagakerjaan

Dari total 329.779 jiwa penduduk Kabupaten Barito Kuala per tahun 2024, tentunya ada yang merupakan kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK). Kelompok ini berada pada rentang umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2024, ada 246.911 jiwa yang berada di dalam kelompok PUK. kelompok PUK kemudian dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dengan 181.384 jiwa dan bukan angkatan kerja dengan 65.527 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur Lima belas tahun ke atas sebesar 73,46%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 3,41%, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktifitas Selama Seminggu Terakhir
Berdasar Kelamin Tahun 2024

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/<i>Economically active</i>	110.974	70.410	181.384
1. Bekerja/ <i>Working</i>	107.179	68.017	175.196
2. Pengangguran terbuka/ <i>Unemployment</i>	3.795	2.393	6.188
II. Bukan angkatan kerja/<i>Not economically active</i>	13.822	51.705	65.527
1. Sekolah/ <i>Attending school</i>	7.693	9.912	17.605
2. Mengurus rumah tangga/ <i>Housekeeping</i>	2.897	40.824	43.721
3. Lainnya/ <i>Others</i>	3.232	969	4.201
Jumlah/<i>Total</i>	124.796	122.115	246.911
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i>	88,92	57,66	73,46
Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rate</i>	3,42	3,40	3,41

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Sealnjutnya dapat dilihat kondisi ketenagakerjaan pada angkatan kerja yang bekerja sebanyak 175.196 orang, sebaran berdasar status pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Status Pekerjaan Utama
Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	20.700	14.602	35.302
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	21.573	7.045	28.618
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	4.117	1.074	5.191
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	46.530	18.623	65.153
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	5.507	2.033	7.540
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	8.752	24.640	33.392
Jumlah/Total	107.179	68.017	175.196

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa status pekerjaan utama yang paling banyak berada pada buruh/karyawan baik untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan banyak sebagai Pekerja keluarga, yang mana disini maksudnya adalah pekerja yang ikut usaha keluarga.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

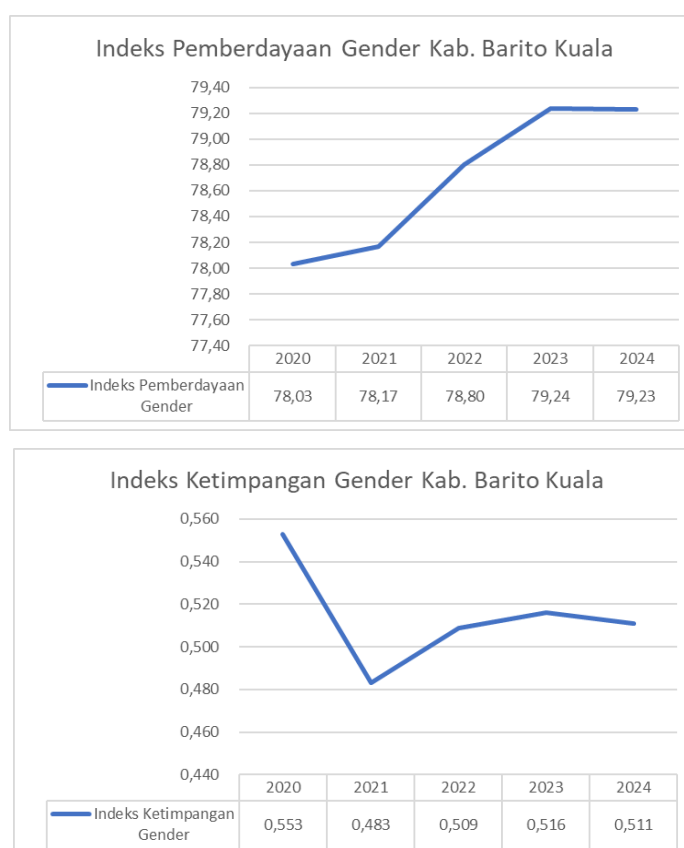
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 2 tahun 2009 tentang kebijakan kota layak anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya kota layak anak dan kota ramah anak.

Selanjutnya untuk melihat pemberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat pada dua Indeks, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indeks Pemberdayaan Gender adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu negara atau wilayah, serta sejauh mana perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang setara dengan laki-laki, dimana dinyatakan dalam skala 0–100. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi tingkat pemberdayaan gender di suatu wilayah. Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama pembangunan manusia yaitu Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan dan Partisipasi Ekonomi, dimana dinyatakan dalam skala 0 – 1, semakin mendekati 0, artinya ketimpangan gender rendah yang berarti kesetaraan gender lebih baik di suatu wilayah, begitupula sebaliknya.



Gambar 2.9 Tren Indeks Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender di Kab. Barito Kuala 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 2020 ke 2021, Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Barito Kuala menurun yang selaras dengan Ketimpangan Gender yang meningkat. Namun selama 2022-2023, terjadi sedikit anomali dimana ketika Pemberdayaan Gender meningkat, namun Ketimpangan Gender juga ikut meningkat walaupun sedikit. Pada tahun 2024, ketimpangan gender di Kabupaten Barito Kuala menurun dengan pemberdayaan gender yang masih stagnan.

Tabel 2.35
Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender
di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender					Indeks Ketimpangan Gender				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Selatan	74,48	74,58	74,8	75,97	75,01	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486
Tanah Laut	72,8	72,86	73,54	76,45	76,98	0,517	0,483	0,481	0,421	0,473
Kotabaru	72,21	72,6	74,85	75,95	75,94	0,584	0,588	0,597	0,571	0,551
Banjar	80,52	80,24	80,83	80,86	76,41	0,509	0,504	0,498	0,530	0,528
Barito Kuala	78,03	78,17	78,8	79,24	79,23	0,553	0,483	0,509	0,516	0,511
Tapin	64,97	73,19	72,82	73,53	65,08	0,605	0,586	0,581	0,563	0,577
Hulu Sungai Selatan	53,82	53,55	54,45	55,12	65,92	0,564	0,567	0,497	0,531	0,459
Hulu Sungai Tengah	77,53	77,48	77,89	77,73	72,39	0,521	0,436	0,482	0,360	0,390
Hulu Sungai Utara	70,65	70,07	71,81	70,65	71,44	0,518	0,494	0,445	0,458	0,465
Tabalong	73,39	74,65	74,6	72,54	75,83	0,523	0,529	0,504	0,503	0,421
Tanah Bumbu	67,23	66,87	65,72	67,75	64,51	0,591	0,573	0,570	0,557	0,533
Balangan	70,14	70,57	70,03	73,27	68,83	0,581	0,579	0,555	0,574	0,523
Kota Banjarmasin	79,6	79,45	79,73	79,48	80,9	0,356	0,459	0,422	0,400	0,284
Kota Banjarbaru	66,77	69,7	69,33	70,2	76,8	0,409	0,436	0,405	0,361	0,173

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas, bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Barito Kuala selalu berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sedikit dibawah Kota Banjarmasin. Sedangkan pada Indeks Ketimpangan Gender, Barito Kuala berada sedikit di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berada diatas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3) Lingkungan Hidup

Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun bagian-bagian yang mempengaruhi IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Pengelolaan Timbulan Sampah dalam Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.

Pada Tahun 2024 berdasar informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Perolehan Nilai IKLH di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 adalah sebesar 64,01 yang

terdiri atas Indeks Kualitas Air sebesar 51,82. Indeks Kualitas Udara sebesar 96,63, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 24,64, dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 62,4. Telah dilaksanakan berbagai upaya pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan yang menjadi fokus dari kegiatan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup termasuk penanganan persampahan di Kabupaten Barito Kuala. Berikut dapat dilihat data Bank Sampah yang terdata di seluruh Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.36
Daftar Bank Sampah di Kabupaten Barito Kuala

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	Bank Sampah MTsN Marabahan	Jl. Vetran Rt.13 Marabahan	Marabahan
2	Bank Sampah Komplek Bakumpai Permai	Jl. Jend. Sudirman Rt.14 Marabahan	Marabahan
3	Bank sampah SMAN 1 Marabahan	Jl. AES Nasution No.66 Marabahan	Marabahan
4	Bank Sampah SMKN 1 Marabahan	Jl. Jend. Sudirman No. 87 Marabahan	Marabahan
5	Bank Sampah SDN Marabahan 2	Jl. Pahlawan No.21 Rt.14 Marabahan	Marabahan
6	Bank sampah SMPN 3 Marabahan	Jl. Jend. Sudirman No.75 Marabahan	Marabahan
7	Bank Sampah Ibtidassalam	Jl. Teans Kalimantan Desa Andaman II Anjir Pasar	Anjir Pasar
8	Bank Sampah KSM Persada Jaya	Komplek Persada Permai Baru II jalur III Desa Semangat dalam Alalak	Alalak
9	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 2	Jl. Gusti m. Seman Marabahan	Marabahan
10	Bank Sampah SMPN 1 Marabahan	Jl. Tarutan Jaya No. 333 Marabahan	Marabahan
11	Bank Sampah Papadaan	Jl. Panglima Batur RT.04 Kel. Ulu Benteng	Marabahan
12	Bank Sampah Sungai Rasau	Jl. Panglima Batur RT.10 Kel. Ulu Benteng	Marabahan
13	Bank Sampah MTsN Anjir Muara Km.20	Jl Trans Kalimantan Km.24 Desa Anjir Muara lama Rt.06 Kec. Anjir Muara	Anjir Muara
14	Bank Sampah Maju Bersama	Jl. Panglima Wangkang Rt. 13 Rw. 004 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
15	Bank Sampah SDN Handil Bakti	Jl. Trans Kalimantan Km.2,5 No.12 Handil Bakti Kec. Alalak	Alalak
16	Bank Sampah Komplek Family Permai	Jl. Vetran Rt. 023 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
17	Bank Sampah Asmil Nasution	Jl. AES Nasution Rt. 017 Kel. Marabahan Kota	Marabahan
18	Bank Sampah SDN Bantuil 1	Jl. Simpang Nungki Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
19	Bank Sampah BLH Batola	Jl.Jend. Sudirman No. 76 Marabahan	Marabahan
20	Bank Sampah MAN 5 Marabahan	Jl Trans Kalimantan Km.24 Desa Anjir Muara lama Rt.06 Kec. Anjir Muara	Anjir Muara
21	Bank Sampah Kenanga	Jl. H. M. Ruslan Rt. 03 Desa Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
22	Bank sampah Seroja	Jl. H. M. Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kec. Cerbon	Cerbon
23	Bank Sampah SMPN 5 Marabahan	Jl.Sabumi Kec. Marabahan	Marabahan
24	Bank Sampah MAN 1 Marabahan	Jl. Vetran Rt.13 Marabahan	Marabahan
25	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 3	Jl. Panglima Batur Rt. 05 No. 192 Marabahan	Marabahan
26	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 5	Jl. Jend.Sudirman Komplek Bumi Bakumpai Permai Marabahan	Marabahan
27	Bank Sampah SDN Bagus 2	Jl. S.Parman Rt. 06 Desa Bagus	Marabahan
28	Bank sampah Marabahan 3	Jl. Veteran Rt. XIII Marabahan Kota	Marabahan
29	Bank Sampah Mekar Bersama	Desa Barambai kolam Kanan Rt. 07 Kec. Barambai	Barambai
30	Bank Sampah Sama Arep (pasar)	Jl.Panglima wangkang Marabahan.	Marabahan
31	Bank Sampah Al Mujahidin	Jl. Jenderal Sudirman Rt.14 No. 76 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan	Marabahan
32	Bank Sampah SDN Marabahan 1	Jl. Pahlawan Rt. 14 Kec. Marabahan	Marabahan
33	Bank Sampah Sungai Pantai 1	Sungai Pantai Rt.08 Kecamatan Rantau Badauh	Rantau Badauh

34	Bank Sampah Mulia Abadi (Induk)	Jl. Kecamatan Cerbon	Cerbon
35	Bank Sampah Tarutan Bersinar	Jl. Tarutan Komplek Tarutan Permai Marabahan	Marabahan
36	Bank Sampah Sehat Mulia SMPN 2 Alalak	Jl. Brigjend H. Hasan Basri Km. 11 Kec. Alalak	Alalak
37	Bank Sampah Desa Sungai Gampa	Desa Sungai Gampa	Rantau Badauh
38	Bank Sampah SDN Sungai Gampa 2	Jl. Brigjen h. Hasan Basri Rt. 05 Desa Sungai gampa Kec. Rantau Badauh	Rantau Badauh
39	Bank Sampah Sehat Ceria SDN Penghulu	Jl.Haryono MT Rt.III Desa Penghulu	Marabahan
40	Bank Sampah SDN Semangat Dalam 3	Jl. Komp. Persada Permai Permai Rt. 21 Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak	Alalak
41	Bank Sampah Dinas Pertanian dan TPH	Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan	Marabahan
42	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 1	Jl. Putri Junjung Buih Rt. 17 Kel. Ulu Benteng Marabahan	Marabahan
43	Bank Sampah Taufik	Jl. AES Nasution GG. Taufik Marabahan	Marabahan
44	Bank Sampah SDN Sungai Gampa Asahi	Jln. Brigjen H.Hasan Basri km.28 Sungai Gampa Asahi RT 11	Rantau Badauh
45	Bank Sampah SDN Ulu Benteng 4	Jln. Panglima Batur	Marabahan
46	Bank Sampah SDN Bagus 1	Jln. S. Parman Desa Bagus RT 1 Kec.Marabahan	Marabahan
47	Bank Sampah SDN Jejangkit Muara 1	Desa Jejangkit Muara Rt.6 Kec. Jejangkit Kab Batola	Jejangkit
48	Bank Sampah SDN Antar Baru 1	Jl.Anjir Talaran Km.7 Kec. Marabahan Kab. Batola	Marabahan
49	Bank Sampah Lestari Mandiri Desa Semangat Dalam	Desa Semangat Dalam Rt. 44 Kec. Alalak	Alalak
50	Bank Sampah Kuala Lupak	Desa Kuala Lupak	Tabunganen
51	Bank Sampah Jejangkit Muara	Desa Jejangkit Muara	Jejangkit
52	Bank Sampah SDN Banitan	Desa Banitan	Bakumpai
53	Bank Sampah Desa Banitan	Desa Banitan	Bakumpai
54	Bank Sampah Desa Karang Bunga	Desa Karang Bunga	Mandastana
55	Bank Sampah Alya Regency	jln Jendral Sudirman	Marabahan
56	Bank Sampah SMAN 1 Barambai	jln. Jenderal Sudirman RT 14 RW 1 Ray V Barambai Kolam Kiri	Barambai
57	Bank Sampah Desa Bagus	Desa Bagus	Marabahan
58	Bank Sampah Kelurahan Ulu Benteng	jln. Jendral Sudirman Rt.13 RW.001 Kel.Ulu Benteng	Marabahan
59	Bank Sampah MI Ulumul Qur'an	jln.Brigjend. H. Hasan Basri KM 29 Desa Sungai Gampa Asahi	Rantau Badauh
60	Bank Sampah Kelurahan Marabahan Kota	Jln. Aes Nasution RT.17 RW.001	Marabahan
61	Bank Sampah Desa Penghulu	Desa Penghulu	Marabahan
62	Bank Sampah Tatah Mesjid	Desa Tatah Mesjid	Alalak
63	Bank Sampah PT. Talenta Bumi	PT. Talenta Bumi Kecamatan Bakumpai	Bakumpai
64	Bank Sampah SDN Anjir Serapat Muara	jln. Simpang Marabahan Desa Anjir Serapat Muara No. 50 RT. 07	Anjir Muara
65	Bank Sampah Indah Bersama	Jln. Soemarno RT. 07 RW. 02 Ray. 03	Barambai
66	Bank Sampah Maju Bersama	Desa Tabukan Raya	Tabukan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

4) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data dari BPS Kabupaten Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2025 menunjukkan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 berjumlah 329.799 jiwa yang terdiri dari laki-laki 167.086 jiwa dan perempuan 162.713 jiwa dengan Sex Rasio sebesar 102,69. Distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar terletak pada Kecamatan Alalak sebanyak 65.537 jiwa atau 19,87% sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 6.166 jiwa atau 1,87%. Rata-rata kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Barito Kuala adalah 135,95 jiwa/km², dimana kembali Kecamatan Alalak adalah kecamatan terpadat dengan kepadatan sebanyak 642,14 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatannya yaitu Kecamatan Jejangkit sebesar 41,75 jiwa/km².

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa demografi penduduk di Kabupaten Barito Kuala didominasi penduduk

dengan usia 10-14 tahun dengan total 28.844 jiwa dengan rincian 14.816 laki-laki dan 14.028 perempuan. Detail sebaran penduduk berdasar kelompok umur dan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Sebaran Penduduk Berdasar Kelompok Umur di Kabupaten Barito Kuala 2024

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	11.057	10.340	21.397
5–9	13.736	13.090	26.826
10–14	14.816	14.028	28.844
15–19	13.161	12.669	25.830
20–24	14.702	13.400	28.102
25–29	11.961	10.890	22.851
30–34	13.037	12.225	25.262
35–39	12.669	12.724	25.393
40–44	13.342	13.293	26.635
45–49	12.646	12.876	25.522
50–54	11.103	11.220	22.323
55–59	9.134	9.048	18.182
60–64	6.589	6.399	12.988
65–69	4.162	4.416	8.578
70–74	2.624	2.542	5.166
75+	2.347	3.553	5.900
Barito Kuala	167.086	162.713	329.799

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Ruang lingkup pelayanan kependudukan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari pelayanan pembuatan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan yang terbaru adalah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan program dari pemerintah nasional.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah. Sampai dengan tahun 2024, berdasar data Indeks Desa Membangun 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala dengan total desa sebanyak 195 desa, terdapat 103 Desa dengan Kategori Maju, 81 Desa dengan Kategori Mandiri, 11 Desa Berkembang, dan tidak memiliki desa dengan kategori Desa tertinggal.

6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi, misalnya untuk subsidi pangan, pendidikan, bahan bakar dan juga subsidi kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menggalakkan program KB (keluarga berencana) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dengan menggalakkan program keluarga berencana di tujuhan untuk menekan peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera sehingga diharapkan dengan jumlah keluarga pra sejahtera yang kontans dan cenderung menurun intervensi pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dapat maksimal.

Tabel 2.38
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan Subdistrict	Pra Sejarhtera Pre Prosperous	Sejahtera Prosperous
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	360	3.118
Tamban	275	4.805
Mekarsari	1.271	1.763
Anjir Pasar	520	3.191
Anjir Muara	3.250	235
Alalak	644	9.689
Mandastana	360	3.118
Jejangkit	817	332
Belawang	466	1.482
Wanaraya	431	1.713
Barambai	115	2.487
Rantau Badauh	226	2.361
Cerbon	387	1.139
Bakumpai	337	1.687
Marabahan	662	2.375
Tabukan	993	760
Kuripan	491	637
Barito Kuala	11.605	41.252

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Tabel 2.39
Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	KKB <i>Family Planning Clininics</i>	PPKBD <i>Village Family Planning Service Units</i>
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	1	14
Tamban	1	16
Mekarsari	2	9
Anjir Pasar	1	15
Anjir Muara	1	15
Alalak	2	18
Mandastana	1	14
Jejangkit	1	7
Belawang	1	13
Wanaraya	1	13
Barambai	1	11
Rantau Badauh	1	9
Cerbon	1	8
Bakumpai	1	9
Marabahan	1	10
Tabukan	1	11
Kuripan	1	9
Barito Kuala	19	201

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Pada kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, jumlah keluarga sejahtera di Kabupaten Barito Kuala lebih banyak daripada yang masuk dalam pra-sejahtera, dengan 14 dari 17 kecamatan didominasi keluarga yang sudah sejahtera. Namun masih ada 3 kecamatan yang lebih didominasi keluarga pra-sejahtera yaitu di Kecamatan Anjir Muara, Jejangkit, dan Tabukan. Kemudian Klinik Keluarga Berencana juga sudah tersebar secara merata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, begitupula dengan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa dengan jumlah pos terbanyak berada di Kecamatan Alalak dan yang plaing sedikit berada di Kecamatan Jejangkit.

7) Perhubungan

Meningkatnya kualitas akses jalan darat menyebabkan peningkatan dari volume kendaraan bermotor yang beroperasi maupun melintas di Kabupaten Barito Kuala. Menurut UPPD Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan dalam Barito Kuala Dalam Angka 2025 tercatat pada tahun 2024 ada sebanyak 68.650 unit kendaraan dengan rincian kendaraan roda 2 sebanyak 59.341 unit, kendaraan Roda 3 sebanyak 78 unit, dan kendaraan roda 4/lebih sebanyak 9.231 unit. Kabupaten

Barito Kuala sampai dengan tahun 2024 ini memiliki 24 Trayek angkutan Darat yang tersebar di seluruh kawasan Kabupaten, namun hanya 6 Trayek yang masih aktif. Kemudian juga terdapat 43 rambu sungai yang terpasang di seluruh jalur transportasi sungai di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.40
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Barito Kuala (unit),
Tahun 2024

Jenis Kendaraan <i>Type of Motor Vehicles</i>	Baru	Ulang	Mutasi	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Umum				
Sedan	—	—	—	—
Jeep	—	—	—	—
Minibus	—	6	—	6
Microbus	—	10	1	11
Bus	—	1	—	1
Pick Up	4	103	1	108
Light Truck	—	37	—	37
Truck	24	351	6	381
Alat Berat	—	—	—	—
Sepeda Motor	—	—	—	—
Scoter	—	—	—	—
Sepeda Motor Roda 3	—	—	—	—
2. Tidak Umum				
Sedan	1	60	3	64
Jeep	27	332	12	371
Minibus	519	5.531	114	6.164
Microbus	1	45	1	47
Bus	—	2	—	2
Pick Up	208	1.695	8	1.911
Light Truck	2	8	—	10
Truck	15	103	—	118
Alat Berat	—	—	—	—
Sepeda Motor	8.351	50.974	16	59.341
Scoter	—	—	—	—
Sepeda Motor Roda 3	26	52	—	78
Jumlah/Total	9.178	59.310	162	68.650

Sumber/Source: UPPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/ UPPD Regional Revenue Agency of Kalimantan Selatan Province

Tabel 2.41
Data Trayek Angkutan dan Penumpang di Kabupaten Barito Kuala

TRAYEK ANGKUTAN DAN PENUMPANG			
No	Trayek	Jumlah Armada	Keterangan
1	Pantang Baru - Muara Dadahup	2	Lintas Kabupaten / Antar Provinsi
2	Marabahan - Kuripan (Speed Boat)	3	Lintas Kabupaten
3	Marabahan - Kuripan	4	Lintas Kabupaten
4	Balukung Lama - Balukung Baru	10	Lintas Kabupaten
5	Palingkau - Banitan	2	Lintas Kabupaten
6	Ulu Benteng - Murung Raya	6	Lintas Kabupaten
7	Marabahan - Lepasari	13	Lintas Kabupaten
8	Pendalaman Baru - Sungai Gampa	20	Lintas Kabupaten
9	Patih Selera - Bambang	13	Lintas Kabupaten
10	Samuda - Belawang	1	Lintas Kabupaten
11	Murung Keramat - Binaan Baru	2	Lintas Kabupaten
12	Jelapat Baru - Berangas	3	Lintas Kabupaten
13	Jelapat I - Kuin Cerucuk	6	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
14	Jenamas - Rantau Badauh (Speedboat)	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
15	Barambai - Banjarmasin	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
16	Wanaraya - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
17	Belawang - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
18	Tamban - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
19	Mekarsari - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
20	Tabunganen - Banjarmasin	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
21	Jejangkit - Banjarmasin	1	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
22	Sungai Lauk - Banjar Raya	2	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
23	Saka Kajang - Banjar Raya	3	Lintas Kabupaten dalam Provinsi
24	Muara Tamban - Muara Mantuil	3	Lintas Kabupaten dalam Provinsi

Tabel 2.42
Data Rambu Sungai Terpasang di Wilayah Perairan Kabupaten Barito Kuala

No	Jenis Rambu	Jumlah Rambu	Lokasi	Tahun Pengadaan
1	Rambu Wajib	5	Jembatan Rumpiang	2011
2	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Ujung Panti	2012
3	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Kuripan	2012
4	Rambu Wajib	2	Wilayah Perairan Tabukan	2012
5	Rambu Peringatan	3	Perairan Sungai Barito	2013
6	Rambu Peringatan	5	Sungai Mekarsari	2015
7	Rambu Peringatan	5	Sungai Belawang	2017
8	Rambu Petunjuk	7	Perairan Sungai Anjir Talaran	2013
9	Rambu Petunjuk	7	Perairan Sungai Anjir Talaran	2015
10	Rambu Petunjuk	5	Sungai Pendalaman Baru	2017

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala

8) Komunikasi dan Informatika

Di tengah maraknya penggunaan berbagai teknologi komunikasi modern serta banyaknya jasa pengiriman swasta, PT Pos Indonesia selaku pionir jasa pengiriman di Indonesia masih tetap eksis di Kabupaten Barito Kuala dengan memiliki 12 cabang pembantu yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Mekarsari, Jejangkit,

Cerbon, dan Bakumpai, berdasar data dari Kabupaten Barito Dalam Angka Tahun 2025. Dalam bidang komunikasi dan informatika, Jumlah blankspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala ada di 72 desa atau 35,82% dari luas wilayah kabupaten Barito Kuala.

9) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi yang Aktif pada tahun 2024 adalah sebanyak 56 koperasi di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 13 Koperasi Unit Desa (KUD), 17 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 3 Koperasi Karyawan (Kopkar), dan 23 Koperasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

Kabupaten Barito Kuala juga telah melakukan pengembangan dan inovasi kain sasirangan dimana pemerintah daerah melakukan intensifikasi pendampingan dan pelatihan kepada para pengrajin yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Barito Kuala. Salah satu desain kain batik sasirangan sudah terdaftar di Kemenkumham sebagai Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Barito Kuala dengan motif padi, purun, jeruk dan gigi haruan (ciri khas Barito Kuala). Hasil identifikasi pengrajin yang ada di Kabupaten Barito Kuala setidaknya terdapat di 6 (enam) kecamatan antara lain Sasirangan Nazwa di Desa Pendalaman Kecamatan Barambai, Parhan Sasirangan di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang, Wahyu Sasirangan di Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar, Aulia Sasirangan di Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Lampau Sasirangan di Desa Sungai Sahurai Kecamatan Rantau Badauh, dan Santik Sasirangan di Desa Puntik Luar Kecamatan Mandastana.

Purun Tikus merupakan jenis tanaman rumput yang tumbuh di daerah rawa berair. Sejauh ini di Provinsi Kalimantan Selatan, tanaman purun tikus hanya dapat tumbuh di Barito Kuala dan menjadi ciri khas Barito Kuala. Hingga saat ini hasil identifikasi pengrajin purun tikus/danau tersebar di 3 (tiga) kecamatan antara lain: Kerajinan Anyaman Purun Tikus di Desa Parimata Kec. Belawang, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai, Kerajinan Anyaman Purun Danau di Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan. Seluruh pengrajin anyaman purun ini mengembangkan hasil olahan purun tersebut dalam bentuk Masker Purun kombinasi kain, Tas Purun Kombinasi Kulit, Tas Purun kombinasi Sasirangan, Wadah Tisu, Box File, Kotak Souvenir dan Topi Kreasi purun yang semuanya merupakan jenis handicraft pada sektor pariwisata. Hal ini memiliki peluang yang cukup besar terutama mendukung pariwisata tidak hanya di daerah Barito Kuala tetapi juga pada sektor wisata populer di Kalimantan Selatan.

Sejauh ini dalam peningkatan kualitas produk kerajinan Anyaman Purun Tikus, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melakukan kerjasama dengan pengrajin tas kulit dari Yogyakarta dan Tangerang. Dalam peningkatan kualitas produk kerajinan anyaman purun danau, pemerintah daerah juga telah melakukan kerjasama dengan PT. Eco Fesyen Indonesia (EFI) dan Kementerian Koperasi RI.

10) Penanaman Modal

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak.

Iklim investasi di Kabupaten Kaupaten Barito Kuala terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang baik, Kabupaten Barito Kuala memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkembangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayananan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP 85% dan peningkatan nilai investasi daerah 50 miliar pertahun selama 4 tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan target

kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 pindah kantor dari kantor yang ada ke Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan oleh Menpan – RB Azwar Anas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 dengan jumlah pelayanan sebanyak 158 Pelayanan dari 17 intansi.

Tabel 2.43
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Nilai Investasi (Ribu Rp.) <i>Investment (Thousand Rp.)</i>	Nilai Produksi (Ribu Rp.) <i>Production Value (Thousand Rp.)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	110	101	994.242	1.235.425
Tamban	101	967	138.724.135	2.701.800
Mekarsari	226	366	2.883.250	1.801.435
Anjir Pasar	75	115	41.901.350	1.375.251
Anjir Muara	41	64	2.465.400	1.692.500
Alalak	92	139	946.200	30.543.000
Mandastana	17	63	67.500	127.000
Jejangkit	155	330	795.600	3.027.700
Belawang	83	148	1.235.100	5.993.200
Wanaraya	124	248	858.225	933.400
Barambai	98	192	1.118.000	1.493.330
Rantau Badauh	97	145	1.180.950	1.481.400
Cerbon	107	221	864.000	1.767.590
Bakumpai	390	620	7.401.400	15.805.670
Marabahan	97	254	424.440	445.620
Tabukan	31	248	232.500	299.500
Kuripan	323	912	53.581.218	53.344.218
Barito Kuala	2.167	5.133	255.673.510	124.068.039

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang didasari pada jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah Rp. 255.673.510.000, dimana nilai perusahaan terbanyak berada di Kecamatan Bakumpai dengan 390 Perusahaan, Tenaga Kerja terbanyak berada di Kecamatan Tamban yaitu sebanyak 967 orang dan begitupula investasi tertinggi berada di Kecamatan Tamban dengan nilai investasi sebesar Rp. 138.724.135.000,

sedangkan nilai produksi paling tinggi berada di Kecamatan Kuripan yaitu sebesar Rp. 124.068.039.000 berdasar data dari Dinas Koperindag Kab. Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka tahun 2025.

11) Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, Festival Layang – layang, Balogo dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Pada situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

C. Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Pariwisata

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, fasilitas penunjang dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata.

Sepanjang tahun 2024 tercatat 196.323 wisatawan domestik yang berwisata di Kabupaten Barito Kuala dengan puncak kunjungan pada bulan Desember. Sedangkan wisatawan

mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Barito Kuala adalah 189 orang. Sebagian besar kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dilakukan pada musim panas (Mei s.d Agustus). Sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 455 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan. Tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

2) Pertanian

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi bagi provinsi Kalimantan Selatan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 seluruhnya merupakan lahan non irigasi dengan total luasan 114.256 Ha, dimana Kecamatan Tamban menjadi yang terluas dengan 10.763 ha dan Kecamatan Marabahan menjadi yang terkecil dengan hanya 1.895 ha. Pada tahun 2024 produksi padi di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 219.963 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan luas panen sebesar 58.873 ha. Beras Anjir menjadi produk/komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala dan banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah.

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 sebesar 7.153 ton dengan produksi terbersarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya. Selanjutnya adalah total produksi kacang tanah tahun 2024 adalah sebesar 73,6 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya, total produksi ubi kayu tahun 2024 sebesar 9.056,44 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Mekarsari, dan terakhir total produksi ubi jalar tahun 2024 sebanyak 113,3 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya dan Marabahan.

Disamping pada sektor tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di propinsi Kalimantan Selatan. Produk Hortikultura Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2024, total produksi Jeruk Siam mencapai 710.509,64 kw (kuintal) yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mandastana dengan besaran produksi sebanyak 182.493,5 kw, dilanjutkan produksi total Nenas pada tahun 2024 mencapai 130.120,17 kw yang mana produksi paling besar ada di Kecamatan Mekarsari dengan besaran produksi sebanyak 123.755,81 kw. Produksi buah-buahan lainnya yang tercatat selama tahun 2024 diantaranya adalah Semangka sebesar 1.323,9 kw, Melon sebesar 13 kw, Mangga sebesar 55 kw, Durian

sebesar 129,4 kw, Pisang sebesar 2.376 kw, Pepaya sebesar 185 kw, Sirsak sebesar 299,52 kw, Belimbing sebesar 13,3 kw, Buah Naga sebesar 5,75 kw, Jambu air sebesar 15,75 kw, Jambu Biji sebesar 67,2 kw, Jeruk Lemon sebesar 1,5 kw, Lengkek sebesar 60,5 kw, Nangka sebesar 180,5 kw, Rambutan sebesar 73,2 kw, Sawo sebesar 86,18 kw, dan terakhir adalah Sukun sebesar 34 kw.

Selanjutnya, Produk Hortikultura pada segmen tanaman sayuran di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 paling besar adalah tanaman Cabai Besar dengan total produksi sebesar 993,5 kw, disusul Cabai Rawit sebesar 946,89 kw, dan Terung sebesar 764,6 kw. Ketiga tanaman sayuran dengan produksi terbesar tersebut semuanya paling banyak dihasilkan di daerah Kecamatan Wanaraya. Sedangkan berdasar luasan panen, tiga tanaman hortikultura sayuran paling besar adalah Jamur Tiram dengan luasan panen seluas 1.600 ha, Daun Bawang seluas 109,5 ha, dan Cabai Rawit seluas 80,75 ha (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

Selain tanaman pangan dan hortikultura, Kabupaten Barito Kuala juga memproduksi tanaman perkebunan, dengan produksi terbesar pada komoditas kelapa sawit, yakni sebesar 37.985,87 ton di sepanjang tahun 2024. Selain kelapa sawit, juga terdapat komoditas kelapa, karet, purun, dan sagu. Adapun total produksi tanaman perkebunan tersebut, berturut-turut adalah 5.589,10 ton; 3.308,08 ton; 377,61 ton; dan 5,79 ton.

Populasi ternak pada tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Sapi Potong, yakni sebanyak 7.336 ekor. Sapi Potong tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mandastana. Selain Sapi Potong, terdapat juga ternak kambing dengan populasi sebanyak 1.476 ekor yang terdapat pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kuripan. Sebaliknya di Kecamatan Kuripan terdapat ternak yang tidak ada pada kecamatan lain, yaitu Kerbau sebanyak 1.633 ekor. Di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat ternak Babi, yakni sebanyak 40 ekor yang hanya berada di Kecamatan Wanaraya dan Barambai. Selama tahun 2024, total ternak yang telah dipotong adalah sebanyak 589 ekor Sapi, 28 ekor Kerbau, dan 97 ekor Kambing yang mana sebagian besar dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya total produksi daging ternak selama tahun 2024 adalah 1.408,5 kw dari Sapi Potong, 60,23 kw dari Kerbau, dan 17,78 kw dari Kambing.

Unggas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 adalah Ayam Pedaging sebanyak 1.276.464 ekor, Ayam Kampung sebanyak 1.070.534 ekor, Itik sebanyak 52.955 ekor, dan Itik Manila sebanyak 1.557 ekor. Adapun unggas tersebut ada yang diambil dagingnya, maupun telurnya. Total unggas yang telah dipotong adalah sebanyak 15.022 ekor Ayam Kampung, 311.780 ekor Ayam Pedaging, 200 ekor Itik, dan 63 ekor Itik Manila yang dari pemotongan tersebut dihasilkan produksi daging unggas selama tahun 2024 adalah 195,57 kw dari Ayam Kampung, 17.906,3 kw dari Ayam Pedaging, 1,75 kw dari Itik dan 0,86 kw dari Itik Manila. Kemudian telur yang dihasilkan dari unggas ini adalah 847.388,37 kg dari Ayam Kampung dengan produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Pasar, 372.865 kg dari Itik dengan

produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Muara, 7.969 kg dari Itik Manila dengan produksi terbanyak di Kecamatan Tamban.

3) Kehutanan

Berdasar data dari Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2025, didapat data bahwa sampai pada tahun 2024 luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Barito Kuala adalah 144,9 Ha, lahan konservasi daratan seluas 3.666,69 Ha, hutan produksi yang dapat dikonservasi seluas 876,66 Ha, dan jumlah luas hutan dan perairan seluas 4688,25 ha. Data ini berdasar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 2023.

Selanjutnya Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun 2024, di Kabupaten Barito Kuala ada 4 Kawasan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 13313/MenLHK-PKTL/PKH/PLA.2/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yaitu:

- SM Kuala Lupak seluas 3.295,34 Ha
- SM Pulau Kaget seluas 318,62 Ha
- TWA Pulau Kembang seluas 79,34 Ha
- TWA Pulau Bakut seluas 19,58 Ha

Selanjutnya mengenai sebaran Titik Panas/Hotspot tahun 2023 di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 88 titik berdasarkan data dari Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2025.

4) Sumber Daya Energi dan Mineral

Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025, pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah pengguna listrik PLN sebanyak 3.792 pelanggan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah produksi listrik dibanding tahun 2023, diikuti dengan jumlah listrik yang terjual juga dari tahun 2023. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut mengenai produksi dan penjualan listrik serta jumlah pelanggan selama 5 tahun terakhir (2020-2024), berdasar data dari PLN yang disajikan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025.

Tabel 2.44
Jumlah Daya Terpasang, Produksi dan Penjualan Listrik serta Jumlah Pelanggan Listrik
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Tahun Year	Daya Terpasang Installed Electricity Power (KW)	Produksi Listrik Electricity Production (KWh)	Listrik Terjual Electricity Sold (KWh)	Dipakai Sendiri Own Used (KWh)	Susut/ Hilang Shrinkage/ Lost (KWh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	109.739.924	211.165.058	202.407.644	148.894	8.608.520
2021	119.935.874	220.433.378	211.577.577	494.051	8.361.750
2022	124.949.174	216.516.277	204.730.474	991.329	10.794.474
2023	137.879.020	217.201.102	205.054.680	1.099.892	11.046.530
2024	149.537.924	246.138.448	227.497.876	1.170.180	17.470.392

Sumber/Source: PT PLN (PERSERO) Wilayah Kabupaten Barito Kuala/Regional PT PLN (PERSERO) of Barito Kuala Regency

Tahun Year	Jumlah Pelanggan Number of Electricity Customers
(1)	(2)
2020	101.210
2021	106.879
2022	110.715
2023	115.858
2024	119.650

Sumber/Source: PT PLN (PERSERO) Wilayah Kabupaten Barito Kuala/Regional PT PLN (PERSERO) of Barito Kuala Regency

Sumber: Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025

Selanjutnya jumlah air bersih yang disalurkan sepanjang tahun 2024, berdasarkan data PDAM Barito Kuala tercatat sebesar 10.079.374 m³ air dengan nilai penjualan sebesar Rp 48.069.599.000,00. Total pelanggan yang mendapat akses air bersih PDAM adalah sebanyak 39.385 pelanggan, dengan pelanggan terbanyak di Kecamatan Alalak dan Mandastana. Jika dibandingkan dengan total penduduk Kabupaten Barito Kuala, maka total penduduk yang sudah memiliki akses air bersih PDAM adalah sebesar 11,94%. Detail mengenai cakupan akses air bersih PDAM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.45

Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Barito Kuala berdasar Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan District	Pelanggan Number of Customers	Air Disalurkan Distributed Water (m ³)	Penjualan Sold Water (m ³)	Nilai Value (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	301	91.356	76.955	310.695.000
Tamban-Mekarsari	244	47.449	40.719	178.768.000
Anjir Pasar-Anjir Muara	2.610	832.668	515.346	3.092.774.000
Alalak-Mandastana	24.626	5.638.996	4.355.521	28.264.931.000
Jejangkit	400	83.383	75.279	434.282.500
Belawang-Wanaraya	778	173.772	154.412	886.683.000
Barambai	1.510	435.787	347.988	1.917.612.000
Rantau Badauh	1.385	357.340	349.994	1.915.435.000
Cerbon	1.049	270.002	246.109	1.368.078.500
Bakumpai	249	55.592	54.284	319.943.500
Marabahan	5.297	1.879.594	1.426.168	8.296.322.000
Tabukan-Kuripan	936	213.435	193.005	1.084.074.500
Barito Kuala	39.385	10.079.374	7.835.780	48.069.599.000

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

5) Perdagangan

Sarana perdagangan di Kabupaten Barito Kuala tidak banyak mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2024. Total sarana perdagangan baik tahun 2023 maupun 2024 berjumlah sebanyak 811 unit, dengan rincian pasar sebanyak 51 unit, 32 unit toko, dan 728 unit kios. Adapun daftar pasar yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46

Rekapitulasi Data Pasar di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Nama Pasar	Lokasi	Luas (m ²)	Kios	Los	Pedagang
1	Pasar Baru Marabahan Barat (Harian)	Marabahan	14.440	196	60	315
2	Pasar Wangkang (Harian)	Marabahan	1.660	84	72	213
3	Pasar Ikan Wangkang (Minggu)	Marabahan	1.301,85	-	104	105
4	Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu)	Marabahan	1.387,5	35	198	233
5	Pasar Antar Jaya (Minggu)	Marabahan	220	-	21	50
6	Pasar Antar Baru (Rabu)	Marabahan	-	-	-	-
7	Pasar Sei Gampa (Kamis)	Rantau Badauh	3.500	-	150	404
8	Pasar Sei Pantai (Selasa)	Rantau Badauh	3.500	-	-	70
9	Pasar Danda Jaya (Jum'at)	Rantau Badauh	1.100	-	52	110
10	Pasar Barambai Muara (Senin)	Barambai	2.500	-	34	150

No	Nama Pasar	Lokasi	Luas (m ²)	Kios	Los	Pedagang
11	Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu)	Barambai	3.500	-	50	200
12	Pasar Rabu	Barambai	2.800	-	10	75
13	Pasar Sei Seluang (Sabtu)	Belawang	2.500	-	34	120
14	Pasar Karang Buah	Belawang	-	-	-	-
15	Pasar Bambang	Belawang	-	-	-	-
16	Pasar Belawang	Belawang	-	-	-	-
17	Pasar Kolam Kiri (Selasa)	Wanaraya	2.100	-	70	136
18	Pasar Sidumulyo (Selasa)	Wanaraya	1.500	-	25	110
19	Pasar Sumber Rahayu	Wanaraya	-	-	-	-
20	Pasar Simpang Jaya	Wanaraya	-	-	-	-
21	Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu)	Anjir Muara	3.500	-	41	270
22	Pasar Codeco (Sabtu)	Anjir Muara	600	-	20	30
23	Pasar KM. 21 (Jum'at)	Anjir Muara	700	-	66	270
24	Pasar KM. 14 (Selasa)	Anjir Pasar	600	-	40	263
25	Pasar Anjir Pasar (Rabu)	Anjir Pasar	7.200	52	96	750
26	Pasar Jejangkit (Selasa)	Jejangkit	2.800	-	30	135
27	Pasar Tanipah (Senin)	Mandastana	1.716	-	34	130
28	Pasar Tabing Rimbah (Jum'at)	Mandastana	1.200	-	42	70
29	Pasar Karang Bunga (Minggu)	Mandastana	-	-	-	-
30	Pasar KM.6 (Sabtu)	Tamban	2.000	-	150	350
31	Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu)	Tamban	850	-	42	150
32	Pasar KM. 12 (Jum'at)	Mekarsari	12.500	-	70	350
33	Pasar KM.5 (Kamis)	Mekarsari	1.100	-	14	115
34	Pasar KM 17 (Rabu)	Mekarsari	1.700	-	24	130
35	Jelapat II (Selasa)	Mekarsari	2.000	-	40	125
36	Pasar Mekarsari (Kamis)	Mekarsari	-	-	-	-
37	Pasar Tabunganen Muara (Minggu)	Tabunganen	3.100	-	92	240
38	Pasar Beringin Kencana (Kamis)	Tabunganen	1.400	-	14	114
39	Pasar Desa Pemurus (Selasa)	Tabunganen	3.000	-	21	150
40	Pasar Induk Handil Bakti (Harian)	Alalak	31.000	271	160	150
41	Pasar Berangas Barat (Senin)	Alalak	7.500	21	50	350
42	Pasar Beringin	Alalak	-	-	-	-
43	Pasar Semangat Dalam	Alalak	-	-	-	-
44	Pasar Rimbun Tulang (Minggu)	Kuripan	4.000	-	50	50
45	Pasar Tabatan Baru (Sabtu)	Kuripan	400	-	-	75
46	Pasar Jambu (Kamis)	Kuripan	400	-	-	50
47	Pasar Kabuau (Minggu)	Kuripan	1.600	-	-	-
48	Pasar Asia Baru	Kuripan	-	-	-	-
49	Pasar Tabukan Raya (Senin)	Tabukan	2.100	-	56	315
50	Pasar Bantuil (Jum'at)	Cerbon	1.830	-	50	150
51	Pasar KUD Basunondo (Jum'at)	Rantau Badauh	3.500	15	64	150

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Selanjutnya dapat dilihat jumlah usaha menurut kecamatan, berdasarkan skala usaha yang yang diterbitkan izinnya oleh aplikasi OSS RBA di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Jumlah Usaha Berdasar Skala Usaha di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan Subdistrict	Usaha Besar Large Enterprise	Usaha Menengah Medium Enterprise	Usaha Kecil dan Mikro Small & Micro Enterprise
(1)	(2)	(3)	(4)
Tabunganen	-	-	72
Tamban	6	-	197
Mekarsari	1	-	112
Anjir Pasar	-	-	134
Anjir Muara	1	-	201
Alalak	18	-	1.551
Mandastana	1	-	199
Jejangkit	-	1	54
Belawang	-	-	122
Wanaraya	1	-	172
Barambai	-	-	174
Rantau Badauh	2	1	192
Cerbon	2	-	132
Bakumpai	2	1	99
Marabahan	1	-	864
Tabukan	-	-	99
Kuripan	2	-	40
Barito Kuala	37	3	4.414

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

6) Perindustrian

Terdapat 2.167 perusahaan pada tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala dengan total investasi perusahaan yang tercatat sebanyak Rp 255.673.510.000,00 dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 5.133 tenaga kerja, dengan total nilai produksi sebesar Rp 124.068.039.000. Selain itu, berdasar skalanya, Industri di Kabupaten Barito Kuala dapat dikelompokkan menjadi industri kecil yang masih menjadi yang terbanyak dengan 2.154 unit, diikuti industri sedang dan besar dengan jumlah berturut-turut sebanyak 6 dan 7 unit. Selebihnya dapat dilihat pada 2 tabel dibawah ini.

Tabel 2.48
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Nilai Investasi (Ribu Rp.) <i>Investment (Thousand Rp.)</i>	Nilai Produksi (Ribu Rp.) <i>Production Value (Thousand Rp.)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	110	101	994.242	1.235.425
Tamban	101	967	138.724.135	2.701.800
Mekarsari	226	366	2.883.250	1.801.435
Anjir Pasar	75	115	41.901.350	1.375.251
Anjir Muara	41	64	2.465.400	1.692.500
Alalak	92	139	946.200	30.543.000
Mandastana	17	63	67.500	127.000
Jejangkit	155	330	795.600	3.027.700
Belawang	83	148	1.235.100	5.993.200
Wanaraya	124	248	858.225	933.400
Barambai	98	192	1.118.000	1.493.330
Rantau Badauh	97	145	1.180.950	1.481.400
Cerbon	107	221	864.000	1.767.590
Bakumpai	390	620	7.401.400	15.805.670
Marabahan	97	254	424.440	445.620
Tabukan	31	248	232.500	299.500
Kuripan	323	912	53.581.218	53.344.218
Barito Kuala	2.167	5.133	255.673.510	124.068.039

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Tabel 2.49
Jumlah Perusahaan Industri Besar, Sedang, Kecil dan Rumah Tangga
berdasarkan jenisnya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

No	Jenis Industri	Besar	Sedang	Kecil	Rumah Tangga	Jumlah
1	Perbengkelan	-	-	437	-	437
2	Kerajinan	-	-	168	-	168
3	Penggilingan Padi	-	-	63	-	63
4	Batu Bata	-	-	32	-	32
5	Penjahit Pakaian	-	-	142	-	142
6	Industri Pengolahan Kayu dan Meubel	3	3	73	-	79
7	Industri Perkapalan/Perahu	1	3	68	-	72
8	Pandai Besi	-	-	11	-	11
9	Industri Perekat/Lem	1	-	-	-	1
10	Industri Tangki Air/Stanles stell	-	1	-	-	1
11	Industri Minyak Kelapa Sawit	1	-	-	-	1
12	Industri Lainnya	-	-	263	-	263
13	Pangan	-	-	897	-	897
	JUMLAH	6	7	2.154	-	2.167

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

7) Transmigrasi

Pembinaan kawasan transmigrasi, pada tahun 2023-2024 telah dilakukan melalui Program Pengembangan Kawasan transmigrasi melalui kegiatan penguatan tahapan satuan kemandirian melalui bidang infrastruktur, sosial ekonomi kelembagaan dengan pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit yang merupakan desa utama SKP B Kawasan transmigrasi Cahaya Baru, sedangkan penguatan SDM dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pelaku usaha yaitu pelatihan budidaya jamur tiram untuk pelaku usaha di Kawasan transmigrasi dengan pelatih/narasumber dari kelompok jamur tiram Mutiara alam binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, peserta pelatihan 30 orang berasal dari 6 (enam) desa perwakilan SKP di Kawasan transmigrasi.

Pelatihan selanjutnya adalah workshop administrasi keuangan sederhana untuk pelaku usaha dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang pelaku usaha dari perwakilan SKP di Kawasan transmigrasi disamping itu ada pula bantuan untuk kelompok Kambang Barenteng Desa Cahaya Baru berupa peralatan mesin serbuk instan untuk usaha pembuatan jamu instan dan pelatihan pembuatan jamu instan.

Selain melalui kegiatan APBD pengembangan Kawasan transmigrasi juga dilaksanakan melalui TP APBN dengan program daerah tertinggal, Kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, dimana sebelumnya tahun 2022 kegiatan difokuskan pada peningkatan infrastruktur wilayah berupa pembuatan jembatan box culvert, pada Desa Dinar Baru Kec. Rantau Badauh, peningkatan TALUD Jalan Boulevard pusat KTM. Selain itu dalam upaya peningkatan SDM melalui kegiatan mental spiritual juga dilakukan rehabilitasi Mushalla Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit.

8) Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang berada di pesisir Sungai Barito menyebabkan banyaknya budidaya ikan menggunakan tambak, selain itu sebagian besar penduduk Barito Kuala menangkap ikan di sungai, hanya Kecamatan Tabunganen saja yg sebagian besar penduduknya menangkap ikan di laut jawa. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap di laut sebesar 3.404 ton yang berlokasi di Kecamatan Tabunganen dan Tamban, produksi perikanan tangkap di perairan umum sebesar 5.772,76 ton yang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali di Kecamatan Anjir Pasar, Jejangkit, dan Wanaraya. Kemudian produksi perikanan budidaya tambak sebesar 11.638,73 ton, produksi perikanan budidaya kolam sebesar 44,88 ton, dan perikanan budidaya jaring apung sebesar 256,66 ton, dimana kegiatan perikanan budidaya tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Kuripan. Lebih detailnya mengenai produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2024

Kecamatan Subdistrict	Perikanan Laut <i>Marine Fisheries</i>		Perairan Umum <i>Inland Water</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tabunganen	4.116,98	3.148,70	1.346,58	45,69	5.463,56	3.194,39
Tamban	-	255,30	224,43	201,59	224,43	456,89
Mekarsari	-	-	168,32	443,34	168,32	443,34
Anjir Pasar	-	-	-	-	-	-
Anjir Muara	-	-	392,75	491,14	392,75	494,14
Alalak	-	-	224,43	342,32	224,43	342,32
Mandastana	-	-	112,22	171,44	112,22	171,44
Jejangkit	-	-	-	-	-	-
Belawang	-	-	280,54	166,24	280,54	166,24
Wanaraya	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	336,65	378,10	336,65	378,10
Rantau Badauh	-	-	392,75	403,50	392,75	403,50
Cerbon	-	-	280,54	595,15	280,54	595,15
Bakumpai	-	-	504,97	1.124,49	504,97	1.124,49
Marabahan	-	-	448,86	287,47	448,86	287,47
Tabukan	-	-	168,32	423,70	168,32	423,70
Kuripan	-	-	729,40	695,59	729,40	695,59
Barito Kuala	4.116,98	3.404,00	5.610,75	5.772,76	9.727,73	9.176,76

Kecamatan Subdistrict	Tambak Brackish <i>WaterPond</i>		Kolam <i>Fresh WaterPond</i>		Jaring Apung <i>Floating Cage Net</i>		Jumlah <i>Total</i>	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tabunganen	11.502,14	11.638,73	31,99	3,15	-	-	11.534,13	11.641,88
Tamban	-	-	19,22	7,67	-	-	19,22	7,67
Mekarsari	-	-	12,24	4,30	-	-	12,24	4,30
Anjir Pasar	-	-	0,40	-	-	-	0,40	-
Anjir Muara	-	-	4,85	5,33	-	-	4,85	5,33
Alalak	-	-	10,88	4,15	-	-	10,88	4,15
Mandastana	-	-	2,04	1,47	-	-	2,04	1,47
Jejangkit	-	-	0,20	0,24	-	-	0,20	0,24
Belawang	-	-	-	11,88	-	-	-	11,88
Wanaraya	-	-	-	-	-	-	-	-
Barambai	-	-	4,47	2,77	-	-	4,47	2,77
Rantau Badauh	-	-	3,25	1,55	-	-	3,25	1,55
Cerbon	-	-	1,64	0,53	-	-	1,64	0,53
Bakumpai	-	-	-	-	97,71	13,51	97,71	13,51
Marabahan	-	-	-	-	188,32	243,15	188,32	243,15
Tabukan	-	-	2,26	1,85	-	-	2,26	1,85
Kuripan	-	-	-	-	-	-	-	-
Barito Kuala	11.502,14	11.638,73	93,43	44,88	257,35	745,24	11.881,69	11.940,27

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu kabupaten yang membudidayakan komoditas ikan air tawar ini. Hingga tahun 2024 terdapat 4 kecamatan yang melakukan proses budidaya serta 1 kecamatan yang melakukan pengolahan ikan Haruan, yaitu sebagai berikut:

- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tabukan
Memiliki potensi lahan pengembangan seluas 4.404 m². Budidaya menggunakan sistem bioflok yang berlokasi di Desa Teluk Tamba. Telah terbentuk Pokdakan sebanyak 8 kelompok dengan 99 pembudidaya dan telah dijadikan sebagai Kampung Haruan untuk menghasilkan produk albumin.
- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Jejangkit
Budidaya sistem terpal yang berlokasi di Desa Jejangkit Pasar. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 9 kelompok dengan 105 orang pembudidaya ikan. Pada tahun 2017 mendapatkan bantuan benih gabus 25.000 ekor dan pakan 2 ton
- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Mandastana
Potensi lahan pengembangan di Mandastana adalah seluas 2.150 m². Budidaya sistem terpal berkembang di Desa Tatah Halayung dan Desa Tanipah. Telah terbentuk kelompok pembudidaya ikan sebanyak 6 kelompok dengan 66 orang pembudidaya ikan.
- Budi daya ikan Haruan di Kecamatan Tamban
Potensi lahan pengembangan yang dimiliki adalah seluas 1.575 m². Usaha pembenihan dan pembesaran yang berlokasi di Desa Jalapat Baru dan telah terbentuk 1 Pokdakan dengan 10 orang pembudidaya ikan. Pakan yang diberikan berupa ikan sepat hasil tangkapan dilingkungan sekitar.
- Pengembangan hasil olahan ikan di Kecamatan Bakumpai
Potensi lahan pengembangan di Kecamatan Bakumpai masih tersedia. Hasil olahannya berupa Kerupuk Ikan Haruan dengan areal pemasaran dalam dan luar Barito Kuala. Telah terbentuk POKLAHSAR HARUAN sebanyak 2 kelompok.

D. Pelayanan Urusan Pemerintahan Penunjang

1) Perencanaan dan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan lebih pada keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan tahunan serta keselarasan dengan APBD. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD (RPD) kedalam RKPD maupun APBD dapat dilihat pada jumlah program pada RKPD/APBD baik tahun 2023 maupun 2024 pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51
Jumlah Program RPJMD (RPD) dibandingkan kedalam RKPD maupun APBD

RPD 2023-2026	RKPD/APBD 2023	RKPD/APBD 2024
130	119	120

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dari 130 Program yang ada pada RPD 2023-2026, Pada tahun 2023 terdapat 119 Program yang berjalan sehingga konsistensi yang diraih sebesar 91,54%. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat peningkatan dengan bertambah 1 (Satu) Program yang masuk sehingga terdapat 120 Program yang berjalan sehingga konsistensi yang diraih sebesar 92,31%, dengan catatan baik di 2023 maupun 2024 sudah dalam APBD Perubahan.

Sedangkan berdasar hasil evaluasi capaian program selama tahun 2024, yang dikelompokkan berdasar skala capaian yang dikelompokkan dalam Tabel T.E-1 Permendagri 86 Tahun 2017 adalah bahwa ada Program yang Belum Mencapai Target sebesar 4,8% dari total program yang ada, kemudian Program yang Mencapai Target sebesar 89,08% dari total program yang ada, dan terakhir Program yang Melebihi Target sebesar 6,11% dari total program yang ada. Detail capaian tersebut dapat dilihat pada Subbab 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan RKPD Tahun 2024 di Bab II ini.

2) Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 1.914.583.000.660 dengan realisasi Belanja sebesar Rp.1.895.536.220.808 atau mencapai 99,01%. Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.52
Rincian APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 (*Unaudited*)

Uraian	REALISASI APBD
	2024
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.617.357.440
Pajak daerah	30.822.327.264
Retribusi Daerah	2.977.143.727
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.516.297.184
Lain-lain PAD yang Sah	67.301.589.265
Pendapatan Transfer	1.801.965.643.220
Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat	1.658.977.093.232
Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.988.549.988
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
Pendapatan Hibah	-
Jumlah pendapatan	1.914.583.000.660

Uraian	Proyeksi APBD-P
--------	-----------------

	2024
BELANJA	
BELANJA OPERASI	1.249.822.757.265
Belanja Pegawai	721.592.920.258,80
Belanja Barang dan Jasa	448.377.642.261,27
Belanja Hibah	78.535.761.402,00
Belanja Bantuan Sosial	1.316.433.343,00
BELANJA MODAL	364.967.168.093
Belanja Modal Tanah	8.641.969.686,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.879.380,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.482.443.020,00
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	208.499.077.592,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	423.108.025,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.106.690.390,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	360.250.000
Belanja Tidak Terduga	360.250.000,00
BELANJA TRANSFER	280.386.045.450
Belanja Bagi Hasil	3.260.178.705,00
Belanja Bantuan Keuangan	277.125.866.745,00
Jumlah Belanja	1.895.536.220.808

Uraian	proyeksi APBD P
	2024
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Penggunaan SILPA	221.164.744.955,00
Pencairan Dana Cadangan	
Penerimaan Kembali Pinjaman Angsuran Berjangka	
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	7.540.412.000,00
Jumlah I (Penerimaan Pembiayaan)	228.705.156.955
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pinjaman Angsuran Berjangka	7.581.681.000,00
Jumlah II (Pengeluaran Pembiayaan)	7.581.681.000
Total PEMBIAYAAN NETO (I-II)	221.123.475.955

Sumber: TAPD Kab. Barito Kuala (Unaudited)

Data pada tabel di atas masih dalam tahap audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, sehingga masih dimungkinkan adanya perubahan total baik di pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang biasanya tidak terlalu jauh selisihnya dari data di atas.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berbicara tentang kepegawaian tidak terlepas dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Barito Kuala, yang sekarang terdiri atas 2 unsur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Pada tahun 2024, terdapat sejumlah 5.644 ASN yang bertugas, dengan rincian 4.085 orang berstatus PNS dan 1.559 orang berstatus PPPK. PNS berdasarkan posisinya dapat dibagi menjadi Pejabat Struktural dan Fungsional, sedangkan PPPK hanya pada posisi Pejabat Fungsional. Detail sebaran ASN di Kabupaten Barito Kuala berdasar jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Berdasar Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan <i>Occupation</i>	Aparatur Sipil Negara <i>State Civil Service</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	—	—	—
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	28	4	32
Administrator/Administrator	76	47	123
Pengawas/Supervisor	149	107	256
Eselon V/5 th Echelon	—	—	—
Jabatan Fungsional Dosen <i>Certain Functional Position for Lecturer</i>	—	—	—
Jabatan Fungsional Guru <i>Certain Functional Position for Teacher</i>	1.096	2.103	3.199
Jabatan Fungsional Medis <i>Certain Functional Position for Medical Field</i>	206	697	903
Jabatan Fungsional Teknis <i>Certain Functional Position for Technical Field</i>	270	192	462
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana <i>General Functional Position</i>	445	224	669
Jumlah/Total	2.270	3.374	5.644

Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dengan formasi terbanyak berada pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan dari total keseluruhan, ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Perempuan dengan selisih sebanyak 1.104 orang, menunjukkan keterlibatan perempuan pada ASN sudah sangat baik.

Selanjutnya dapat kita lihat detail ASN Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikan, berdasar pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024
Berdasar Tingkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Aparatur Sipil Negara <i>State Civil Service</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	19	2	21
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	53	6	59
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	330	113	443
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	—	4	4
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	50	39	89
Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	172	634	806
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	24	37	61
S1/Sarjana <i>Under Graduate/Bachelor</i>	1.462	2.432	3.894
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	158	107	265
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	2	—	2
Jumlah/Total	2.270	3.374	5.644

Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh lulusan Strata 1 atau sarjana, dengan total sebanyak 3.894 orang, disusul lulusan Diploma III atau D-III sebanyak 806 orang, dan yang paling sedikit adalah lulusan Strata 3 atau Doktor yang sampai saat ini masih berjumlah 2 orang. Terakhir, dapat kita lihat sebaran ASN di Kabupaten Barito Kuala berdasar Tingkat Kepangkatannya, dimana untuk PNS dan PPPK memiliki struktur kepangkatan yang berbeda, dimana pada PNS tersusun atas tingkatan I sampai IV dengan yang terendah adalah I.a dan tertinggi IV.e, sedangkan PPPK tersusun atas Pangkat dalam angka romawi dari Tingkat I hingga XVII.

Tabel 2.55
Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024
Berdasar Tingkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PNS

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy		Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I		24	3	27
1. I/A	(Juru Muda/Junior Clerk)	—	—	—
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	3	—	3
3. I/C	(Juru/Clerk)	11	—	11
4. I/D	(Juru Tingkat I/First Class Clerk)	10	3	13
Golongan II/Range II		246	157	403
5. II/A	(Pengatur Muda/Junior Supervisor)	29	2	31
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	33	7	40
7. II/C	(Pengatur/Supervisor)	81	75	156
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	103	73	176
Golongan III/Range III		1.088	1.644	2.732
9. III/A	(Penata Muda/Junior Superintendent)	225	286	511
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	261	301	562
11. III/C	(Penata/Superintendent)	262	571	833
12. III/D	(Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	340	486	826
Golongan IV/Range IV		490	433	923
13. IV/A	(Pembina/Administrator)	247	231	478
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	196	161	357
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	45	41	86
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	1	—	1
17. IV/E	(Pembina Utama/Senior Administrator)	1	—	1
Jumlah/Total		1.848	2.237	4.085

Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency

Tabel 2.56
Jumlah ASN di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024
Berdasar Tingkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, PPPK

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I	—	—	—
II	—	—	—
III	—	—	—
IV	—	—	—
V	10	6	16
VI	—	—	—
VII	36	122	158
VIII	—	—	—
IX	366	1.001	1.367
X	10	8	18
XI	—	—	—
XII	—	—	—
XIII	—	—	—
XIV	—	—	—
XV	—	—	—
XVI	—	—	—
XVII	—	—	—
Jumlah/Total	422	1.137	1.559

Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala/Education and Training Personnel Agency of Barito Kuala Regency

Sumber kedua Tabel: BKPP dalam Barito Kuala Dalam Angka 2025

Dari kedua tabel di atas, bahwa PNS di Kabupaten Barito Kuala didominasi Golongan III / Penata, senada dengan tingkat pendidikan yang diselesaikan oleh PNS di Kabupaten Barito Kuala yang masih didominasi lulusan sarjana. Sedangkan untuk PPPK didominasi oleh Pangkat/Golongan IX (Sembilan) yang secara hierarkis setara dengan Golongan III.a pada PNS.

4) Penelitian dan Pengembangan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, salah satu fungsi Lembaga penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota adalah memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten/ kota disamping sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan kajian/ penelitian di kabupaten/ kota. Dalam hal peningkatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan kegiatan kajian/ penelitian dan lomba inovasi daerah. Kajian/ penelitian dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Lomba inovasi daerah dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan ruang kepada masyarakat dan ASN yang telah dan sedang melakukan penelitian dan pengembangan diberbagai bidang dan dari perlombaan inovasi ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dan ASN untuk melakukan berbagai inovasi. Dari perlombaan inovasi ini juga akan menjadi penyaring inovasi mana yang memiliki manfaat luas untuk masyarakat yang selanjutnya diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi penelitian komprehensif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan lomba inovasi daerah di kabupaten Barito Kuala didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/559/KUM/2022 tanggal 30 Desember 2022, perihal Satu SKPD Satu Inovasi, bahwa setiap SKPD wajib membuat minimal satu inovasi setiap tahun anggaran.

Tolak ukur pemerintahan daerah yang inovatif yaitu dari Innovative Government Award (IGA). Dimana setiap organisasi pemerintah daerah diharapkan melakukan pengembangan inovasi terhadap kebutuhan unit organisasinya dengan mengedepankan efektif dan efisien. Capaian Skor IGA kabupaten barito kuala pada tahun 2023 adalah sebesar 42,01 yang termasuk dalam Kategori Inovatif, dan berada pada urutan ke 236 dari 416 kabupaten se Indonesia, naik dibanding tahun 2022 yang memperoleh skor sebesar 16,50 yang termasuk dalam Kategori Kurang Inovatif dengan urutan ke 333 dari 416 kabupaten di Indonesia. Sedangkan untuk Capaian Skor IGA tahun 2024 sampai dokumen ini ditulis masih belum diumumkan oleh BSKDN Kemendagri.

Alokasi pendanaan untuk bidang penelitian dan pengembangan terus diupayakan meningkat di mana pada tahun 2024 anggaran yang tersedia sebesar Rp 969.187.920,00 dimana meningkat dari tahun 2023 sebesar Rp 394.579.575,00 yang sebelumnya dengan jumlah anggaran Rp 574.608.345,00.

5) Pengawasan

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yaitu 1,00% (satu persen) dari total belanja APBD untuk daerah yang APBD nya sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sesuai Permendagri Pedoman Penyusunan APBD. Pada tahun 2024, telah dianggarkan total anggaran pengawasan sebesar Rp 3.545.964.200,00 yang mana penyesuaian anggaran berdasarkan *Mandatory Spending* Pengawasan baru dimulai pada Anggaran Perubahan 2024, sehingga penyerapan anggaran pengawasan pada 2024 belum maksimal. Namun hal tersebut tidak menyebabkan penurunan kinerja pada pengawasan, terbukti dengan Hasil TLHP BPK RI yang diselesaikan pada tahun 2024 yang jumlahnya 109 rekomendasi, terselesaikan 79 rekomendasi dengan sisa 30 rekomendasi atau 96%; dan Hasil TLHP APIP yang diselesaikan pada tahun 2024 yang jumlahnya 1.023 rekomendasi, terselesaikan 911 rekomendasi dengan sisa sebanyak 112 rekomendasi atau 96,45% (Sumber: LKIP Inspektorat Tahun 2024)

6) Sekretariat Dewan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi yang prima dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD, ini berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), keputusan DPRD, dan Raperda Inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dewan, hearing, kegiatan reses, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Berikut disajikan tabel-tabel mengenai Sekretariat Dewan yang meliputi Jumlah Anggota Dewan menurut Daerah Pemilihan dan Partai, Jumlah Sidang/Rapat, dan Jumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan selama tahun 2024.

Tabel 2.57

Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan Tahun 2024

No	Daerah Pemilihan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	6	1	7
2	II	5	2	7
3	III	4	3	7
4	IV	8	-	8
5	V	4	2	6
	TOTAL	27	8	35

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Tabel 2.58

Jumlah Anggota Dewan Berdasar Jenis Kelamin dan Partai Politik Tahun 2024

No	Partai Politik	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	9	3	12
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	1	3
3	Partai Amanat Nasional	2	1	3
4	PDI Perjuangan	2	1	3
5	Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
6	Partai Persatuan Pembangunan	6	-	6

7	Partai Nasional Demokrat	3	1	4
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	1	3
	TOTAL	27	8	35

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Berdasar 2 tabel di atas, Jumlah Anggota DPRD Tahun 2024 berdasar jenis kelamin masih didominasi laki-laki dengan total 27 orang dan perempuan sendiri berjumlah 8 orang. Sedangkan berdasar daerah pemilihan, yang paling banyak ada di Dapil IV dengan total sebanyak 8 anggota, dan paling sedikit ada di Dapil V dengan total sebanyak 6 anggota. Sedangkan berdasar Partai Politik, anggota paling banyak berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan total 12 anggota, dan paling sedikit dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 1 anggota.

Tabel 2.59
Jumlah Sidang/Rapat DPRD 5 Tahun Terakhir (2020 - 2024)

No	Jenis Sidang	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rapat Paripurna	21	21	24	16	14
2	Rapat Paripurna Istimewa	-	-	-	-	-
3	Rapat Intern DPRD	-	20	19	-	11
4	Rapat Badan Kehormatan DPRD	-	-	2	-	-
5	Rapat Badan Pembentukan Perda	3	3	9	2	1
6	Rapat Badan Musyawarah	16	20	21	15	17
7	Rapat Badan Anggaran	7	13	8	12	11
8	Rapat Panitia Khusus	-	16	28	-	-
9	Rapat Fraksi	1	-	-	-	1
10	Rapat Intern Komisi	1	-	-	2	12
11	Rapat Komisi	48	-	-	10	63
12	Rapat Gabungan Komisi	23	-	-	16	22
13	Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi	4	-	-	4	6
14	Kunjungan Kerja Komisi Dalam Daerah Kabupaten	47	-	-	17	-
15	Kunjungan Kerja Komisi Luar Daerah Kabupaten	12	-	-	5	-
16	Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi	65	-	-	173	-
17	Kunjungan Reses DPRD	3	-	-	3	-
18	Rapat Pembahasan Perda-Perda	18	-	-	12	28

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Tabel 2.60
Jumlah Surat Keputusan DPRD 5 Tahun Terakhir (2020 - 2024)

No	Jenis Surat Keputusan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Surat Keputusan DPRD	39	36	51	47	51

2	Peraturan Daerah	1	5	12	7	7
3	Pendidikan dan Pelatihan DPRD	1	2	3	3	3

Sumber: Sekretariat DPRD dalam Barito Kuala dalam Angka 2025

Pada 2 tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sidang pada tahun 2024 sedikit menurun daripada tahun 2023, terutama tidak adanya Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi di Tahun 2024. Sedangkan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan, terjadi peningkatan pada tahun 2024 dari tahun 2023 dengan total jumlah surat yang dikeluarkan pada tahun 2024 sebanyak 61 surat, meningkat sebanyak 4 surat dari tahun 2023 yang sejumlah 57 surat.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada beberapa fokus, diantaranya:

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Barito Kuala merupakan daerah dengan potensi terbesar berada pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga dalam struktur yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yakni berkisar antara 27 sampai dengan 28 persen dari PDRB Kabupaten Barito Kuala.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memperlihatkan adanya kecenderungan membaik (meningkat) dari tahun ke tahun, walaupun dimulai dengan kondisi cukup parah pada tahun 2020 yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi dengan nilai minus (-) 1.06, namun kondisi ini wajar karena secara umum di Kalimantan Selatan laju pertumbuhan ekonomi berada pada pertumbuhan minus (-) bahkan secara nasional, dikarenakan efek dari Pandemi COVID-19. Kondisi ini kemudian mulai membaik seiring waktu dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Kendati demikian, pada sektor usaha hampir semua sektor usaha mengalami penurunan di tahun 2024 yang mana ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala berdasar pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Pengerluaran di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.61
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2020 – 2024

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>	-1,97	1,13	0,93	2,30	4,80
B. Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	4,30	4,54	4,10	3,53	0,69
C. Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-2,30	2,82	1,69	0,82	3,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,83	4,52	5,75	6,06	4,60
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,63	6,26	5,32	5,13	3,96
F. Konstruksi/ <i>construction</i>	-2,76	6,97	6,89	6,88	5,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-3,43	2,85	6,92	6,65	4,36
H. Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-3,54	1,88	4,36	4,11	6,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and food Service Activities</i>	-3,24	2,82	8,47	6,39	8,44
J. Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,81	7,75	6,73	6,33	5,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,96	-0,06	-0,87	7,17	5,12

Lapangan Usaha/ Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L. Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,05	5,45	5,79	7,56	5,85
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-2,00	4,91	7,26	5,97	5,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,97	1,06	0,32	2,63	4,18
P. Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,13	4,74	5,07	3,80	5,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,31	8,83	5,46	5,83	4,76
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	-1,70	3,90	6,09	4,80	6,29
Penduduk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	-1,06	3,17	3,59	4,07	5,02

* = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

Tabel 2.62

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Kuala (Persen), 2020 – 2024

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	-0,21	0,65	5,46	4,91	6,24
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	-1,1	1,34	4,32	7,81	17,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	-0,91	2,76	-1,59	3,38	6,22
Pembentukan Model Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	-3,3	4,56	6,19	4,9	4,7
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	-1,06	3,17	3,59	4,07	5,02

* = Angka Sementara, ** = Angka Sangat Sementara

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2021 – 2025

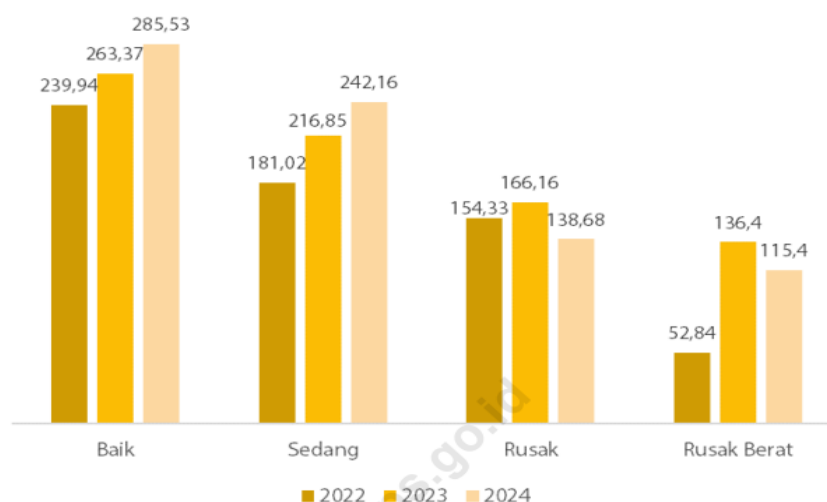
Berbicara tentang Kemampuan Ekonomi Daerah, tidak akan lepas dari namanya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 besaran PDRB ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 telah mencapai 11.350,36 Miliar Rupiah, bertambah sebesar 782,48 Miliar Rupiah dibanding tahun 2023 yang tercatat 10.567,88 Miliar Rupiah. Kemudian Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 telah mencapai 6.728,9 Milyar Rupiah, bertambah sebesar 321,8 Miliar Rupiah dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 6.406,49 Miliar Rupiah. Berdasar ADHB, ke 17 Sektor Usaha mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan berdasar ADHK Tahun 2010, dari ke-17 Sektor Usaha, hanya Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian meningkat ke tahun 2023, tetapi kembali menurun di tahun 2024, sedangkan 16 sektor usaha lainnya mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya. Lebih lengkap mengenai tabel PDRB Berdasar Lapangan Usaha baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010 telah dijelaskan pada Tabel 2.6 dan 2.7 pada Subbab 2.1.2 tentang Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Sedangkan Berdasarkan Pengeluaran, ADHB maupun ADHK Tahun 2010, secara keseluruhan mengalami kenaikan tiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Berdasar ADHB, ke 6 Sektor Pengeluaran mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali Perubahan Inventori yang sempat naik turun, dimana dari tahun 2021 menuju 2022 terjadi penurunan yang cukup tinggi hingga menyentuh nilai minus, namun kembali menguat saat memasuki 2023, dan kembali menurun saat memasuki tahun 2024 dimana kembali masuk nilai minus. Sedangkan berdasar ADHK Tahun 2010, dari ke-6 Sektor Pengeluaran mengalami peningkatan tiap tahunnya, selain Perubahan Inventori yang mengalami kondisi peningkatan dan penurunan yang sama seperti pada ADHB, dan ditambah Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang sempat mengalami penurunan dari tahun 2021 menuju 2022, namun kembali menguat secara stabil di tahun-tahun

kedepannya. Sementara pada kedua sisi, Sektor Net Ekspor Barang dan Jasa baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010 masih sama-sama berada pada nilai minus. Lebih lengkap mengenai tabel PDRB Berdasar Pengeluaran baik ADHB maupun ADHK Tahun 2010 telah dijelaskan pada Tabel 2.8 dan 2.9 pada Subbab 2.1.2 tentang Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

B. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Infrastruktur tentu saja berbicara mengenai transportasi dan fasilitas wilayah yang mendukung kehidupan masyarakat. Hal pertama yang dibahas adalah mengenai sarana transportasi dalam hali ini adalah akses jalan. Dalam memperlancar aktivitas pemerintahan dan perekonomian tentunya diperlukan kondisi jalan yang memadai. Kondisi jalan di Kabupaten Barito Kuala selama 3 (Tiga) tahun terakhir berdasarkan kondisi dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/Public Works Office of Barito Kuala Regency

Gambar 2.10 Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2024

Sumber: Dinas PUPR dalam Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025

Tercatat selama tiga tahun terakhir sampai pada tahun 2024, kondisi jalan baik di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya kondisi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat sempat mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, namun kembali menurun di tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan terhadap kondisi tersebut.

Selanjutnya adalah mengenai fasilitas wilayah yang mendukung kehidupan masyarakat, yang dapat dilejsakan secara ringkas ke dalam point-point berikut.

1) Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 seperti yang dituangkan dalam Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025, penyebaran sekolah di Kabupaten

Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 760 buah sekolah dengan rincian pada jenjang Pendidikan TK/RA sebanyak 275 unit, pendidikan SD/MI saat ini tersedia 329 buah unit, SMP/MTs sebanyak 105 unit, SMA/MA sebanyak 46 unit, dan SMK sebanyak 5 unit yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

2) Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Berdasar data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025, Fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 1 unit yaitu RSUD H. Abdul Aziz di Kota Marabahan, 1 Poliklinik di Kecamatan Alalak, Puskesmas sebanyak 19 unit yang tersebar di seluruh 17 Kecamatan, Puskesmas Pembantu sebanyak 56 unit, dan Apotek sebanyak 8 unit.

3) Sarana Komunikasi dan Informatika

Di tengah maraknya penggunaan berbagai teknologi komunikasi modern serta banyaknya jasa pengiriman swasta, PT Pos Indonesia selaku pionir jasa pengiriman di Indonesia masih tetap eksis di Kabupaten Barito Kuala dengan memiliki 12 cabang pembantu yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, kecuali di Kecamatan Tabunganen, Mekarsari, Jejangkit, Cerbon, dan Bakumpai, berdasar data dari Kabupaten Barito Dalam Angka Tahun 2025. Dalam bidang komunikasi dan informatika, Jumlah blankspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala ada di 72 desa atau 35,82% dari luas wilayah kabupaten Barito Kuala.

4) Koperasi, Sarana Perdagangan, dan Industri

Jumlah Koperasi yang Aktif pada tahun 2024 adalah sebanyak 56 koperasi di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari 13 Koperasi Unit Desa (KUD), 17 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 3 Koperasi Karyawan (Kopkar), dan 23 Koperasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sarana perdagangan di Kabupaten Barito Kuala tidak banyak mengalami

peningkatan dari tahun 2023 hingga 2024. Total sarana perdagangan baik tahun 2023 maupun 2024 berjumlah sebanyak 811 unit, dengan rincian pasar sebanyak 51 unit, 32 unit toko, dan 728 unit kios. Sedangkan berdasar skala usahanya, di Kabupaten Barito Kuala terdiri atas 37 usaha skala besar, 3 usaha skala menengah, dan 4.414 Usaha Kecil dan Mikro.

Terdapat 2.167 perusahaan/industri pada tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala dengan total investasi perusahaan yang tercatat sebanyak Rp 255.673.510.000,00 dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 5.133 tenaga kerja, dengan total nilai produksi sebesar Rp 124.068.039.000. Selain itu, berdasar skalanya, Industri di Kabupaten Barito Kuala dapat dikelompokkan menjadi industri kecil yang masih menjadi yang terbanyak dengan 2.154 unit, diikuti industri sedang dan besar dengan jumlah berturut-turut sebanyak 6 dan 7 unit.

5) Situs Budaya dan Pariwisata

Pada situs budaya, selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumpung, Kuda Gepang, Reog dan Keroncong.

Pada pariwisata, tercatat ada 7 objek wisata alam di Kabupaten Barito Kuala yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Rambai Mangrove Center, Agropolitan Terantang/Kampung Inggris, Susur Sungai Barito, Pulau Kaget, dan Pulau Curiak. Selain itu, terdapat 5 objek wisata buatan yaitu RTH Jembatan Rumpiang, Agrowisata Talaran Setara, Ulek (Siring) Marabahan, Kawasan Wisata Jembatan Barito, dan Jejangkit Ecopark. Terakhir ada 1 (satu) objek wisata religi yaitu Makam Datuk Abdussamad di Kecamatan Marabahan. Kemudian juga ada sarana penunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala, antara lain tersedianya 4 penginapan dan 455 rumah makan/restoran yang tersebar di setiap kecamatan.

6) Situs Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan sebanyak 4 (Empat) Kawasan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 13313/MenLHK-PKTL/PKH/PLA.2/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yaitu:

- SM Kuala Lupak seluas 3.295,34 Ha
- SM Pulau Kaget seluas 318,62 Ha
- TWA Pulau Kembang seluas 79,34 Ha

- TWA Pulau Bakut seluas 19,58 Ha

C. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kaupaten Barito Kuala terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang bai, Kabupaten Barito Kuala memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkebangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluang investasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayananan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan DPMPTSP 85% dan peningkatan nilai investasi daerah 50 miliar pertahun selama 4 tahun ke depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi terutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi, perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasan masyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembang cepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

pada tahun 2022 pindah kantor dari kantor yang ada ke Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diresmikan oleh Menpan – RB Azwar Anas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 dengan jumlah pelayanan sebanyak 158 Pelayanan dari 17 instansi.

Tabel 2.63
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Perusahaan <i>Establishment</i>	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	Nilai Investasi (Ribu Rp.) <i>Investment (Thousand Rp.)</i>	Nilai Produksi (Ribu Rp.) <i>Production Value (Thousand Rp.)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	110	101	994.242	1.235.425
Tamban	101	967	138.724.135	2.701.800
Mekarsari	226	366	2.883.250	1.801.435
Anjir Pasar	75	115	41.901.350	1.375.251
Anjir Muara	41	64	2.465.400	1.692.500
Alalak	92	139	946.200	30.543.000
Mandastana	17	63	67.500	127.000
Jejangkit	155	330	795.600	3.027.700
Belawang	83	148	1.235.100	5.993.200
Wanaraya	124	248	858.225	933.400
Barambai	98	192	1.118.000	1.493.330
Rantau Badauh	97	145	1.180.950	1.481.400
Cerbon	107	221	864.000	1.767.590
Bakumpai	390	620	7.401.400	15.805.670
Marabahan	97	254	424.440	445.620
Tabukan	31	248	232.500	299.500
Kuripan	323	912	53.581.218	53.344.218
Barito Kuala	2.167	5.133	255.673.510	124.068.039

Sumber/Source: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala/Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi yang didasari pada jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah Rp. 255.673.510.000, dimana nilai perusahaan terbanyak bberada di Kecamatan Bakumpai dengan 390 Perusahaan, Tenaga Kerja terbanyak berada di Kecamatan Tamban yaitu sebanyak 967 orang dan begitupula investasi tertinggi berada di Kecamatan Tamban dengan nilai investasi sebesar Rp. 138.724.135.000, sedangkan nilai produksi paling tinggi berada di Kecamatan Kuripan yaitu sebesar Rp. 124.068.039.000 berdasar data dari Dinas Koperindag Kab. Barito Kuala dalam Barito Kuala Dalam Angka tahun 2025.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

Berbicara Sumber Daya Manusia (SDM), dimulai dari melihat demografi Masyarakat Kabupaten Barito Kuala terlebih dahulu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir (2020-2024) tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 313.021 jiwa, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 316.960 jiwa, tahun 2022 sebanyak 321.770, tahun 2023 sebanyak 324.502 jiwa, dan terakhir pada tahun 2024 tercatat sebanyak 329.779 jiwa.

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Alalak dengan kepadatan sebesar 642,14 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Anjir Muara yaitu sebesar 254,89 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jejangkit yaitu sebesar 41,75 jiwa/km².

Lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 167.086 laki-laki dan 162.713 perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,69 yang artinya jika terdapat 100 penduduk perempuan, maka akan terdapat sejumlah 102 atau 103 penduduk laki-laki. Kecamatan dengan penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak ada di Kecamatan Alalak yang mana masing-masing jumlah untuk penduduk laki-laki dan perempuan secara beurutan adalah 33.116 jiwa dan 32.421 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk laki-laki dan perempuan paling sedikit ada di Kecamatan Kuripan yang mana masing-masing jumlah untuk penduduk laki-laki dan perempuan secara berurutan adalah 3.170 jiwa dan 2.996 jiwa.

Komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 28.844 jiwa, diikuti kelompok umur 20 – 24 Tahun sebanyak 28.102 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit berasal dari kelompok umur 70 – 74 tahun dengan jumlah 5.166 jiwa.

Berdasarkan jenis keluarga, di Kabupaten Barito Kuala terdapat Keluarga Sejahtera maupun Pra-Sejahtera. Secara keseluruhan, jumlah keluarga sejahtera di Kabupaten Barito Kuala lebih banyak daripada yang masuk dalam pra-sejahtera, dengan 14 dari 17 kecamatan didominasi keluarga yang sudah sejahtera. Namun masih ada 3 kecamatan yang lebih didominasi keluarga pra-sejahtera yaitu di Kecamatan Anjir Muara, Jejangkit, dan Tabukan, seperti pada tabel dibawah.

Tabel 2.64
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Pra Sejarhtera <i>Pre Prosperous</i>	Sejahtera <i>Prosperous</i>
(1)	(2)	(3)
Tabunganen	360	3.118

Tamban	275	4.805
Mekarsari	1.271	1.763
Anjir Pasar	520	3.191
Anjir Muara	3.250	235
Alalak	644	9.689
Mandastana	360	3.118
Jejangkit	817	332
Belawang	466	1.482
Wanaraya	431	1.713
Barambai	115	2.487
Rantau Badauh	226	2.361
Cerbon	387	1.139
Bakumpai	337	1.687
Marabahan	662	2.375
Tabukan	993	760
Kuripan	491	637
Barito Kuala	11.605	41.252

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Kemudian berdasarkan pekerjaan, jumlah penduduk pada usia kerja per tahun 2024 adalah sebanyak 246.911 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 181.384 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebesar 175.196 jiwa dan penduduk yang menganggur (pengangguran terbuka) sebesar 6.188 jiwa. Sedangkan penduduk yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sebanyak 65.527 jiwa, yang terdiri dari penduduk yang bersekolah sebesar 17.605 jiwa, mengurus rumah tangga sebesar 43.721 jiwa dan termasuk kategori lainnya sebesar 4.201 jiwa. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Aktivitas Selama Seminggu Terakhir
Berdasar Kelamin Tahun 2024

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	110.974	70.410	181.384
1. Bekerja/Working	107.179	68.017	175.196
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	3.795	2.393	6.188
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	13.822	51.705	65.527
1. Sekolah/Attending school	7.693	9.912	17.605
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	2.897	40.824	43.721
3. Lainnya/Others	3.232	969	4.201
Jumlah/Total	124.796	122.115	246.911
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically Active Participation Rate	88,92	57,66	73,46
Tingkat Pengangguran Unemployment Rate	3,42	3,40	3,41

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025

Sealnjutnya dapat dilihat kondisi ketenagakerjaan pada angkatan kerja yang bekerja sebanyak 175.196 orang, sebaran berdasar status pekerjaan utama dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Jumlah Penduduk berumur 15 tahun ke atas Berdasar Status Pekerjaan Utama
Selama Seminggu Terakhir Berdasar Kelamin Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	20.700	14.602	35.302
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	21.573	7.045	28.618
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	4.117	1.074	5.191
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	46.530	18.623	65.153
Pekerja bebas Casual worker	5.507	2.033	7.540
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	8.752	24.640	33.392
Jumlah/Total	107.179	68.017	175.196

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Sumber: Barito Kuala Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa status pekerjaan utama yang paling banyak berada pada buruh/karyawan baik untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan banyak sebagai Pekerja keluarga, yang mana disini maksudnya adalah pekerja yang ikut usaha keluarga.

Terakhir adalah dari segi SDM Pemerintahan, ini tidak terlepas dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kabupaten Barito Kuala, yang sekarang terdiri atas 2 unsur, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Pada tahun 2024, terdapat sejumlah 5.644 ASN yang bertugas, dengan rincian 4.085 orang berstatus PNS dan 1.559 orang berstatus PPPK. ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dengan formasi terbanyak berada pada formasi Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan dari total keseluruhan, ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Perempuan dengan selisih sebanyak 1.104 orang, menunjukkan keterlibatan perempuan pada ASN sudah sangat baik.

Dari segi pendidikan, ASN di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh lulusan Strata 1 atau sarjana, dengan total sebanyak 3.894 orang, disusul lulusan Diploma III atau D-III sebanyak 806 orang, dan yang paling sedikit adalah lulusan Strata 3 atau Doktor yang sampai saat ini masih berjumlah 2 orang.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD (RPD)

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan I Tahun 2025

Penilaian capaian program/kegiatan dapat diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) Kategori dengan merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 yang tertuang dalam Tabel T-E.1 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Klasifikasi Capaian Berdasarkan Nilai Realisasi

Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian	Kategori Penilaian
91 – 100	Sangat Tinggi	Memenuhi Target
76 – 90	Tinggi	Memenuhi Target
66 – 75	Sedang	Memenuhi Target Minimal
51 – 65	Rendah	Belum Memenuhi Target
Dibawah 50	Sangat Rendah	Belum Memenuhi Target

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dari kelima interval nilai tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa suatu program/kegiatan dapat dinyatakan mencapai target jika capaian program/kegiatan tersebut telah mencapai nilai minimal 66 dan naik seterusnya (maksimal 100). Sedangkan suatu program/kegiatan belum dinyatakan mencapai target jika capaian program/kegiatan masih bernilai 65 dan kebawahnya. Evaluasi kali ini dibatasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dimana program/kegiatan dapat dinyatakan mencapai target jika setidaknya mencapai 16,25%.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, rata-rata capaian fisik seluruh SKPD di Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2025 sampai pada Triwulan I adalah sebesar 21,5% yang mana secara peraturan pada tabel sebelumnya sudah termasuk memenuhi target. Kendati demikian ada beberapa SKPD yang perlu menjadi perhatian dikarenakan capaiannya yang masih dibawah 16,25%, diantaranya:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian fisik masih 7,07%
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian fisik masih 8,99%
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, capaian fisik masih 10,58%
- d) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian fisik masih 12,25%
- e) Kecamatan Mekarsari, capaian fisik masih 15%, dan
- f) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, capaian fisik masih 15,69%

Secara capaian keuangan, dari total APBD pada Tahun 2025 sebesar Rp 1.819.774.116.893, telah tercapai sebesar Rp 389.267.510.712 atau sebesar 21,39%. Secara dengan pernyataan dalam edaran dari Sekretariat Daerah Nomor 910/1/SETDA-BPKAD/2025 tanggal 31 Desember 2024 dimana pembagian keuangan dalam setahun adalah 30:30:20:20, maka dapat dikategorikan bahwa sampai pada akhir triwulan I 2025 capaian keuangan APBD Kabupaten Barito Kuala masih dibawah target.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD (RPD) dapat dilihat pada Tabel T.C-19 yang terlampir pada dokumen RKPD ini, dengan ringkasan capaian Program/Kegiatan yang belum mencapai, mencapai, dan melebihi target akan dijelaskan dibawah ini.

A. Realisasi Program dan Kegiatan yang belum memenuhi target

Berikut adalah realisasi program yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I tahun 2025, ditinjau dari capaian fisiknya yang berada pada posisi 16,25% atau kebawahnya.

Tabel 2.68
Realisasi Program dan/atau Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	62.648.750,00	-	0,00	0,00
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	135.485.590,00	-	0,00	0,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	52.299.600,00	-	0,00	0,00
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	138.400.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.072.858.623,00	134.315.797,00	12,52	12,50
			PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	682.813.418,00	39.477.200,00	5,78	0,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		624.999.000,00	34.751.368,00	5,56	0,00
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	349.999.700,00	3.900.000,00	1,11	0,00
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	124.999.800,00	7.720.068,00	6,18	0,00
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	149.999.500,00	23.131.300,00	15,42	0,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		590.380.000,00	43.348.250,00	7,34	0,00
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	139.710.700,00	18.545.000,00	13,27	0,00
			PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	450.669.300,00	24.803.250,00	5,50	0,00
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.892.994.606,00	1.030.231.744,00	21,06	10,78
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	110.642.050,00	6.544.000,00	5,91	8,33
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.268.537.571,00	959.144.517,00	22,47	14,29

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	310.041.575,00	36.155.658,00	11,66	11,11
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17.516.750,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.626.000,00	8.520.600,00	13,83	14,29
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		2.317.066.250,00	176.959.000,00	7,64	16,15
			MUTASI DAN PROMOSI ASN	776.503.400,00	29.797.000,00	3,84	4,17
			PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	399.598.950,00	-	0,00	0,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.047.745.474,00	671.589.496,00	11,10	15,39
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.948.400,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.358.904.000,00	63.661.705,00	4,68	6,31
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.154.210.995,00	78.963.500,00	6,84	5,77
			PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	92.883.200,00	-	0,00	0,00
			PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	624.636.800,00	43.245.000,00	6,92	8,95
			PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	256.192.470,00	26.386.700,00	10,30	10,62
			PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	180.498.525,00	9.331.800,00	5,17	5,74
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	152.301.250,00	4.106.000,00	2,70	8,33
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	767.678.835,00	56.201.044,00	7,32	7,32
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	414.508.450,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	150.917.400,00	12.268.061,00	8,13	11,40
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		275.585.074.847,00	110.538.087.270	40,11	12,75
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH	3.693.480.400,00	559.599.120,00	15,15	7,50

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN	1.100.346.760,00	64.947.000,00	5,90	5,85
			PENUNJANGAN URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAERAH	269.594.512.337,00	109.862.073.150,00	40,75	14,33
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIKI DAERAH		1.719.669.762,00	166.919.932,00	9,71	5,83
			PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.719.669.762,00	166.919.932,00	9,71	5,83
6	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.385.260.761,00	1.046.558.853,00	12,48	15,44
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	232.584.000,00	8.660.000,00	3,72	12,17
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	66.436.250,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.072.524.515,00	237.953.000,00	22,19	15,08
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		3.149.290.000,00	507.480.956,00	16,11	16,05
			KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.149.290.000,00	507.480.956,00	16,11	16,05
7	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		178.855.161.735,00	40.268.603.567,00	22,51	6,95
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	218.885.225,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	335.974.750,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.451.677.323,00	7.130.000,00	0,29	0,04
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	771.010.810,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.536.671.100,00	581.349.774,00	12,81	2,35
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.306.792.470,00	38.597.200,00	1,67	3,23
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		130.807.844.833,00	12.290.469.027,00	9,40	5,34

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.040.645.488,00	40.145.140,00	0,07	0,03
			PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH	71.399.458.230,00	12.204.540.067,00	17,09	0,03
			PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	30.560.000,00	1.602.500,00	5,24	8,33
			PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH	337.181.115,00	44.181.320,00	13,10	12,96
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.380.361.455,00	19.521.520,00	1,41	10,55
			PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	235.292.105,00	13.521.520,00	5,75	7,94
			PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.145.069.350,00	6.000.000,00	0,52	13,16
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		453.493.295,00	1.271.875,00	0,28	5,27
			PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT	232.559.295,00	1.271.875,00	0,55	10,53
			PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	220.934.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		347.397.205,00	1.715.100,00	0,49	4,17
			PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.687.000,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	272.710.205,00	1.715.100,00	0,63	8,33
8	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	80.965.500,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	259.744.800,00	10.994.000,00	4,23	5,17
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.844.151.982,00	73.325.634,00	3,98	2,39
			PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.900.000,00	-	0,00	-
			PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.834.251.982,00	73.325.634,00	4,00	4,78
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		3.046.524.181,00	712.490.250,00	23,39	14,98
			REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	2.672.738.675,00	657.612.000,00	24,60	12,34
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.293.823.235,00	104.468.450,00	8,07	8,00
			PENGLOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.293.823.235,00	104.468.450,00	8,07	8,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		270.653.387,00	14.568.275,00	5,38	6,50
			PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	270.653.387,00	14.568.275,00	5,38	6,50
9	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	153.678.000	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.094.725.990	930.324.176,00	22,72	15,15
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	1.742.813.500	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		20.250.350	-	0,00	0,00
			PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	20.250.350	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	31.071.750,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	245.274.600,00	16.807.745,00	6,85	13,33
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		214.688.320,00	20.708.560,00	9,65	12,97
			PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	214.688.320,00	20.708.560,00	9,65	12,97
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		397.584.327,00	23.415.100,00	5,89	7,15
			PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	363.658.494,00	23.415.100,00	6,44	14,29
			PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	33.925.833,00	-	0,00	0,00
11	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	373.315.280,00	50.503.416,00	13,53	15,30
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	122.549.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	10.319.582.150,00	2.703.244.008,00	26,20	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		3.602.301.979,00	56.374.675,00	1,56	12,50
			PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN /ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA	383.776.604,00	43.299.775,00	11,28	25,00
			PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	3.218.525.375,00	13.074.900,00	0,41	0,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	187.382.350,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		156.661.700,00	15.229.930,00	9,72	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.661.700,00	15.229.930,00	9,72	0,00
13	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.236.125.362,00	1.236.982.858,00	19,84	14,00
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	91.609.600,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	75.574.500,00	-	0,00	0,00
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.862.500,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		98.139.625,00	-	0,00	0,00
			PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	98.139.625,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		406.605.620,00	-	0,00	2,00
			PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	406.605.620,00	-	0,00	2,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		577.812.025,00	399.804.575,00	69,19	0,00
			PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	577.812.025,00	399.804.575,00	69,19	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		32.179.824,00	-	0,00	0,20
			PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	32.179.824,00	-	0,00	0,20
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		26.860.000,00	-	0,00	0,20
			PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK	26.860.000,00	-	0,00	0,20

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			IUI, IPUI, IUKI DAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	286.500.000,00	23.939.884,00	8,36	15,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		587.441.100,00	60.575.300,00	10,31	8,27
			PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	587.441.100,00	60.575.300,00	10,31	8,27
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		93.888.900,00	-	0,00	0,00
			PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KAB/KOTA	93.888.900,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		1.837.131.700,00	94.576.200,00	5,15	13,33
			PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	1.770.300.850,00	91.456.200,00	5,17	10,00
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.917.143.400,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	585.554.000,00	14.413.109,00	2,46	7,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		5.527.586.125,00	9.076.875,00	0,16	1,33
			PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	222.986.725,00	1.950.000,00	0,87	2,50
			PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	4.450.021.100,00	7.126.875,00	0,16	1,50
			PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	854.578.300,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		10.874.058.980,00	18.530.600,00	0,17	1,38
			PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	10.874.058.980,00	18.530.600,00	0,17	1,38
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2.599.412.029,00	2.217.400,00	0,09	1,50

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.599.412.029,00	2.217.400,00	0,09	1,50
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		28.830.000.435,00	20.931.853,00	0,07	0,75
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	28.830.000.435,00	20.931.853,00	0,07	0,75
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		3.446.907.690,00	10.000.000,00	0,29	0,00
			PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.446.907.690,00	10.000.000,00	0,29	0,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	369.120.977,00	19.631.180,00	5,32	8,49
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	65.295.190,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		926.572.158,00	154.262.800,00	16,65	3,61
			PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	517.853.075,00	518.000,00	0,10	4,08
			PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	408.719.083,00	153.744.800,00	37,62	3,14
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		633.000.746,00	122.935.150,00	19,42	12,81
			PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	423.915.846,00	103.999.850,00	24,53	17,50
			PENGLOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.884.900,00	2.490.000,00	3,46	4,26
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	6.862.500,00	-	0,00	0,00
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	93.396.000,00	2.060.400,00	2,21	7,69
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		650.000.000,00	43.207.900,00	6,65	5,00
			PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA	550.000.000,00	43.207.900,00	7,86	10,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA				
			PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		6.041.334.821,00	251.655.100,00	4,17	8,01
			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.202.765.425,00	67.910.000,00	3,08	15,38
			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	100.000.000,00	-	0,00	0,00
			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	1.950.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		361.503.970,00	22.000.000,00	6,09	12,50
			PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	43.282.220,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		704.510.780,00	8.340.000,00	1,18	14,29
			PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	704.510.780,00	8.340.000,00	1,18	14,29
18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	217.258.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		506.689.358,00	85.355.787,00	16,85	8,50
			PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	506.689.358,00	85.355.787,00	16,85	8,50
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.758.242.700,00	74.125.000,00	4,22	9,08
			PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.176.842.700,00	26.050.000,00	2,21	9,09
			PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN	581.400.000,00	48.075.000,00	8,27	8,33

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			(DAK NON FISIK KETAHANAN PANGAN-PERTANIAN)				
19	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	64.724.500,00	-	0,00	0,00
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	55.635.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.024.906.871,00	45.650.295,00	4,45	0,00
			PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	714.632.145,00	22.275.900,00	3,12	0,00
			PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	64.274.300,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	246.000.426,00	23.374.395,00	9,50	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		91.110.645,00	12.539.000,00	13,76	0,00
			PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.110.645,00	12.539.000,00	13,76	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	362.924.670,00	36.678.250,00	10,11	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		892.488.059,00	137.182.525,00	15,37	15,38
			PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	818.075.424,00	124.101.825,00	15,17	0,00
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	33.946.000,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	674.475.885,00	84.638.006,00	12,55	12,87
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.350.825,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	340.781.200,00	25.172.800,00	7,39	12,50

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		1.546.936.200,00	74.067.325,00	4,79	0,37
			PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.259.136.700,00	67.080.825,00	5,33	1,11
			PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	64.006.000,00	-	0,00	0,00
			PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	223.793.500,00	6.986.500,00	3,12	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		1.358.309.050,00	252.592.548,00	18,60	0,00
			PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	1.358.309.050,00	252.592.548,00	18,60	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		1.546.519.575,00	68.230.000,00	4,41	12,50
			PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	18.677.585,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		226.117.270,00	28.382.750,00	12,55	15,44
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	226.117.270,00	28.382.750,00	12,55	15,44
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		368.650.000,00	38.773.200,00	10,52	12,50
			PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	368.650.000,00	38.773.200,00	10,52	12,50

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	57.586.250,00	-	0,00	0,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	148.500.000,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	45.069.000,00	-	0,00	0,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	127.358.470,00	6.300.350,00	4,95	5,00
			PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.164.970,00	6.300.350,00	7,76	10,00
			PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	46.193.500,00	-	0,00	0,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	168.040.750,00	11.220.000,00	6,68	10,00
			PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.040.750,00	11.220.000,00	6,68	10,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	195.608.125,00	10.580.350,00	5,41	16,24
			PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.608.125,00	10.580.350,00	5,41	16,24
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.877.500,00	1.660.000,00	4,76	15,38
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.877.500,00	1.660.000,00	4,76	15,38
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.994.076.115,00	649.515.435,00	16,26	7,84
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.999.750,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	289.406.035,00	55.455.232,00	19,16	8,33
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	167.296.350,00	16.186.604,00	9,68	9,44
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.143.305,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		25.000.000,00	-	0,00	0,00
			PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	25.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		372.762.748,00	9.000.000,00	2,41	1,42
			PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.750.000,00	-	0,00	0,00
			PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.435.000,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	294.577.748,00	9.000.000,00	3,06	3,33
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		45.000.000,00	-	0,00	0,00
			PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		72.000.000,00	2.420.000,00	3,36	0,00
			PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	72.000.000,00	2.420.000,00	3,36	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		177.935.000,00	-	0,00	0,00
			PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.750.000,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.585.000,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.600.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1.982.909.980,00	377.700.739,00	19,05	4,00
			PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	150.392.980,00	9.352.800,00	6,22	0,00
			PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.832.517.000,00	368.347.939,00	20,10	4,35
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.087.307.300,00	11.930.400,00	0,57	0,00
			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.087.307.300,00	11.930.400,00	0,57	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		3.753.271.060,00	195.892.665,00	5,22	6,38
			PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.616.000.000,00	132.254.977,00	8,18	1,82
			PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.026.277.000,00	50.716.158,00	4,94	9,90
			PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM	1.110.994.060,00	12.921.530,00	1,16	0,49

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	10.113.368.418,00	2.126.681.257,00	21,03	13,43
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	61.001.750,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	421.159.994,00	82.141.600,00	19,50	12,75
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	306.112.700,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	778.394.800,00	124.828.959,00	16,04	13,89
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	420.361.700,00	37.672.575,00	8,96	7,92
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		41.786.446.525,00	4.735.926.464,00	11,33	5,76
			PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.387.448.275,00	56.096.500,00	0,39	1,02
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		200.000.000,00	-	0,00	0,00
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		15.537.268.000,00	1.581.038.686,00	10,18	8,50
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.537.268.000,00	1.581.038.686,00	10,18	8,50
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		11.812.989.500,00	99.575.122,00	0,84	3,83
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	11.812.989.500,00	99.575.122,00	0,84	3,83

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		46.160.176.750,00	5.158.113.845,00	11,17	14,29
			PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	46.160.176.750,00	5.158.113.845,00	11,17	14,29
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		2.700.000.000,00	-	0,00	0,00
			PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		72.268.748.000,00	33.638.000,00	0,05	0,20
			PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	72.268.748.000,00	33.638.000,00	0,05	0,20
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		800.000.255,00	50.750.100,00	6,34	10,94
			PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	497.957.005,00	14.750.000,00	2,96	5,30
			PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.302.000,00	26.123.400,00	13,80	14,00
			PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL)	66.167.500,00	6.100.000,00	9,22	10,00
			PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	46.573.750,00	3.776.700,00	8,11	7,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		1.004.651.375,00	44.561.750,00	4,44	6,67
			PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	588.689.750,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	245.201.375,00	21.300.000,00	8,69	10,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
25	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.526.454.417,00	2.262.309.776,00	15,57	5,75
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	326.395.150,00	8.985.862,00	2,75	5,56
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	433.600.000,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	174.072.100,00	16.668.581,00	9,58	12,78
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	3.652.097.500,00	270.452.481,00	7,41	14,45
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.589.798.720,00	16.233.500,00	1,02	1,06
			PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.589.798.720,00	16.233.500,00	1,02	1,06
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.897.700,00	-	0,00	0,00
		ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.131.917.065,00	139.631.825,00	12,34	15,28
27	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENATAAN ORGANISASI	1.719.244.900,00	139.084.460,00	8,09	13,33
			PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.735.235.000,00	364.791.074,00	13,34	5,88
28	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	356.036.500,00	13.760.000,00	3,86	14,29
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	414.000.000,00	-	0,00	0,00
			LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.828.020.552,00	5.952.405.764,00	28,58	14,29
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	425.435.000,00	-	0,00	0,00
29	KECAMATAN ALALAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.853.326.797,00	1.801.516.483,00	22,94	7,13
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.674.500,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	358.833.495,00	34.398.935,00	9,59	6,09

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		159.487.025,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.557.025,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	156.930.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		21.568.850,00	-	0,00	0,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.568.850,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	606.475.000,00	2.600.000,00	0,43	12,50
30	KECAMATAN ANJIR MUARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.864.900,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	194.619.000,00	23.244.400,00	11,94	3,58
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.823.170,00	4.046.428,00	15,09	11,11
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	93.490.000,00	1.350.000,00	1,44	11,11
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		85.125.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.000.000,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	80.125.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		25.280.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.280.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		28.500.000,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.500.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		28.134.750,00	1.420.000,00	5,05	10,87
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	28.134.750,00	1.420.000,00	5,05	10,87
31	KECAMATAN ANJIR PASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.229.004.902,00	701.535.941,00	21,73	9,28
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.031.850,00	1.269.600,00	2,76	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	138.378.400,00	25.819.288,00	18,66	6,87
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	81.250.000,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	97.961.000,00	2.700.000,00	2,76	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		99.051.620,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.606.620,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	94.445.000,00	-	0,00	0,00
32	KECAMATAN BAKUMPAI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	191.054.680,00	26.011.500,00	13,61	2,82
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.400.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80.256.450,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.650.000,00	-	0,00	0,00
			PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA	7.906.450,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN				
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	70.700.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		22.250.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.250.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		7.206.350,00	-	0,00	0,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.206.350,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		266.932.500,00	900.000,00	0,34	3,13
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	66.932.500,00	900.000,00	1,34	6,25
			KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	200.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.658.989.508,00	512.742.832,00	19,28	8,16
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.110.000,00	-	0,00	0,00
33	KECAMATAN BARAMBAI		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.801.515,00	21.880.280,00	18,57	6,17
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33.285.000,00	-	0,00	0,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	57.466.000,00	7.710.750,00	13,42	13,83
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	359.743.000,00	7.649.200,00	2,13	6,13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		163.417.900,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.767.900,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	161.650.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24.625.000,00	3.800.000,00	15,43	15,45
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.625.000,00	3.800.000,00	15,43	15,45
34	KECAMATAN BELAWANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	625.000,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	115.913.185,00	19.166.188,00	16,53	11,44
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	410.775,00	-	0,00	0,00
35	KECAMATAN CERBON	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.517.250,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89.942.860,00	20.007.025,00	22,24	11,23
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	54.637.525,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.680.000,00	2.655.000,00	8,95	0,28
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80.216.574,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.589.974,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	74.626.600,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21.810.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.810.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		15.300.000,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.300.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		42.105.500,00	4.197.000,00	9,97	15,63
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	42.105.500,00	4.197.000,00	9,97	15,63
36	KECAMATAN JEJANGKIT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.798.091.868,00	339.412.320,00	18,88	14,29
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.783.900,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	76.657.900,00	6.686.000,00	8,72	7,21
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		79.985.650,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	12.433.700,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	67.551.950,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.282.700,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.282.700,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		43.757.975,00	778.275,00	1,78	0,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	38.117.450,00	778.275,00	2,04	0,00
			PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASTARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	5.640.525,00	-	0,00	0,00
37	KECAMATAN KURIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.400.211.845,00	466.497.455,00	19,44	15,16
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	192.736.275,00	20.164.702,00	10,46	4,18

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	54.466.750,00	5.486.600,00	10,07	13,23
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		312.080.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	40.080.000,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	272.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		35.787.250,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	35.787.250,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	43.709.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		541.680.000,00	-	0,00	0,00
38	KECAMATAN MANDASTANA		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	2.430.000,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	539.250.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.511.250,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.511.250,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.456.092.134,00	1.145.533.025,00	21,00	11,18
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.500.000,00	-	0,00	0,00
39	KECAMATAN MARABAHAN		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.920.963.595,00	1.069.087.490,00	21,73	13,47

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	281.193.185,00	36.030.415,00	12,81	10,84
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	32.050.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		96.662.685,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	7.233.185,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	89.429.500,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.218.000,00	5.700.000,00	19,51	12,50
			KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	2.700.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		52.580.550,00	8.000.000,00	15,21	6,25
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.580.550,00	8.000.000,00	15,21	6,25
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	400.000.000,00	56.200.000,00	14,05	6,25
40	KECAMATAN MEKARSARI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.401.513.466,00	319.922.778,00	13,32	11,30
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.788.870,00	-	0,00	0,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	172.243.205,00	-	0,00	2,93
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.071.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		110.571.600,00	-	0,00	8,33
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	3.407.000,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	104.450.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		30.439.685,00	-	0,00	0,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.439.685,00	-	0,00	0,00
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.550.000,00	-	0,00	0,00
41	KECAMATAN RANTAU BADAUH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.000.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60.062.335,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.789.010,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	57.273.325,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19.900.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.900.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		16.727.000,00	-	0,00	0,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.727.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		32.540.900,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	32.540.900,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	141.343.163,00	19.417.100,00	13,74	14,85
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.385.000,00	6.476.200,00	10,91	13,72
42	KECAMATAN TABUKAN						

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	531.400,00	-	0,00	0,00
43	KECAMATAN TABUNGANEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.233.347.296,00	444.582.165,00	19,91	15,14
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.135.000,00	-	0,00	0,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	250.541.000,00	5.935.000,00	2,37	4,17
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		71.740.000,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	1.250.000,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	70.490.000,00	-	0,00	0,00
44	KECAMATAN TAMBAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.467.847.224,00	494.185.404,00	20,02	15,36
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.641.200,00	2.950.000,00	5,50	7,88
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	45.140.000,00	2.180.000,00	4,83	8,65
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		97.436.800,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	4.986.800,00	-	0,00	0,00
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	92.450.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.446.040,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	29.446.040,00	-	0,00	0,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.380.000,00	-	0,00	0,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.380.000,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12.006.040,00	-	0,00	0,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	12.006.040,00	-	0,00	0,00
45	KECAMATAN WANARAYA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.034.500,00	-	0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	6.400.000,00	-	0,00	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan SKPD Triwulan I Tahun 2025

B. Realisasi Program yang memenuhi target

Berikut adalah realisasi program yang sudah memenuhi target kinerja pada Triwulan I tahun 2025, ditinjau dari capaian fisiknya yang berada pada posisi 16,25% atau lebih.

Tabel 2.69
Realisasi Program dan/atau Kegiatan yang memenuhi target kinerja pada Triwulan I Tahun 2025

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.060.675.104,00	922.845.714,00	22,73	25,00
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.770.000,00	3.660.000,00	41,73	25,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.246.209.394,00	829.644.898,00	25,56	25,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	378.468.320,00	46.714.926,00	12,34	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.823.250,00	27.699.890,00	27,20	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	127.269.800,00	15.126.000,00	11,88	25,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		953.912.380,00	2.900.000,00	0,30	25,00
			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	953.912.380,00	2.900.000,00	0,30	25,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		2.029.867.396,00	46.351.050,00	2,28	25,00
			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	2.029.867.396,00	46.351.050,00	2,28	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		141.507.705,00	9.058.986,00	6,40	25,00
			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	141.507.705,00	9.058.986,00	6,40	25,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		1.611.588.155,00	126.208.990,00	7,83	25,00
			PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.611.588.155,00	126.208.990,00	7,83	25,00
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.596.395.200,00	1.066.895.255,00	19,06	17,25

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	159.482.350,00	19.431.100,00	12,18	36,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.180.407.345,00	903.926.001,00	21,62	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	373.406.205,00	80.554.570,00	21,57	24,52
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	323.092.700,00	58.864.934,00	18,22	25,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	390.045.205,00	94.838.597,00	24,31	25,00
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	124.630.660,00	19.866.969,00	15,94	16,67
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.020.943.350,00	126.882.000,00	12,43	41,67
			PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	120.020.550,00	20.280.000,00	16,90	18,78
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2.769.683.250,00	1.293.140.500,00	46,69	50,00
			SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	2.769.683.250,00	1.293.140.500,00	46,69	50,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.406.280.294,00	380.228.181,00	11,16	25,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.194.468.580,00	209.706.810,00	17,56	20,66
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78.144.200,00	17.992.800,00	23,03	25,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.388.886.488,00	1.491.290.535,00	15,88	19,62
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.731.500,00	1.250.000,00	1,53	44,44
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.523.619.453,00	1.374.207.111,00	18,27	28,57
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	298.129.600,00	43.258.319,00	14,51	17,62
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.196.735.350,00	51.468.000,00	4,30	23,33
6			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.230.334.606,00	724.596.875,00	11,63	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	305.891.390,00	55.895.472,00	18,27	34,95
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	477.490.000,00	19.453.506,00	4,07	22,88
7	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	123.229.354.926,00	29.074.274.546,00	23,59	25,00
			PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	45.004.795.131,00	10.567.252.047,00	23,48	25,00
8	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.246.867.835,00	1.049.375.262,00	20,00	17,21
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94.457.800,00	18.500.000,00	19,59	31,43
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.157.035.774,00	888.314.012,00	21,37	16,25
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	575.841.681,00	112.359.231,00	19,51	25,50
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	78.822.280,00	19.208.019,00	24,37	24,94
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI DASAR SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	373.785.506,00	54.878.250,00	14,68	17,62
9	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.045.665.081,00	1.047.294.360,00	14,86	23,61
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.153.050,00	2.340.000,00	5,42	16,67
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.999.854.697,00	950.942.790,00	19,02	25,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.074.700,00	-	0,00	25,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	490.914.994,00	48.972.630,00	9,98	25,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.102.640,00	23.250.740,00	18,29	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.345.565.000,00	21.788.200,00	1,62	25,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		569.148.505,00	24.779.950,00	4,35	26,06

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	46.153.050,00	3.740.825,00	8,11	45,83
			PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	367.910.655,00	14.929.725,00	4,06	25,00
			PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	155.084.800,00	6.109.400,00	3,94	25,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		297.698.800,00	28.076.650,00	9,43	26,06
			PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	220.502.175,00	18.246.650,00	8,28	25,00
			PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.196.625,00	9.830.000,00	12,73	25,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		709.040.150,00	70.302.225,00	9,92	25,32
			PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	368.411.975,00	50.762.575,00	13,78	25,00
			PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.182.350,00	3.869.150,00	3,09	25,00
			PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	215.445.825,00	15.670.500,00	7,27	25,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		270.621.399,00	8.706.975,00	3,22	26,83
			PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.621.399,00	8.706.975,00	3,22	25,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		90.539.200,00	5.590.000,00	6,17	25,00
			PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	90.539.200,00	5.590.000,00	6,17	25,00
10	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		435.775.868.520	98.125.016.079	22,52	57,20
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	169.881.400	30.000.000,00	17,66	16,67

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	426.571.336.305	97.079.842.813,00	22,76	70,83
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.072.876.325	52.217.663,00	4,87	22,22
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.970.557.000	32.631.427,00	1,66	21,69
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		75.195.302.790	24.674.227.892,00	32,81	32,63
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	36.158.001.200	13.811.079.000,00	38,20	27,38
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	15.880.825.740	6.381.560.892,00	40,18	35,71
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	20.941.512.350	3.527.471.000,00	16,84	34,09
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN.	2.214.963.500	954.117.000,00	43,08	33,33
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.161.192.146,00	848.351.479,00	16,44	27,95
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.114.550,00	-	0,00	33,33
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.556.702.282,00	499.890.566,00	14,05	42,86
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	972.629.489,00	290.867.647,00	29,91	46,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	331.399.475,00	40.785.521,00	12,31	32,18
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		1.231.329.104,00	400.811.360,00	32,55	29,05
			PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1.231.329.104,00	400.811.360,00	32,55	29,05
12	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.538.128.984,00	1.611.652.586,00	24,65	23,38
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.068.550,00	-	0,00	21,74
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.620.979.994,00	1.521.615.942,00	27,07	25,93
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.875.000,00	-	0,00	40,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	89.289.750,00	6.856.284,00	7,68	16,67
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	141.933.310,00	16.612.644,00	11,70	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	185.118.100,00	16.064.300,00	8,68	42,42
		PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		10.728.856.255,00	2.760.159.562,00	25,73	27,78
			PENGLOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	199.583.000,00	31.442.129,00	15,75	58,33
			PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA	209.691.105,00	25.473.425,00	12,15	25,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN /ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA	383.776.604,00	43.299.775,00	11,28	25,00
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.250.150.533,00	748.943.994,00	17,62	20,00
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	105.950.900,00	26.365.120,00	24,88	35,29
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.162.375.771,00	617.610.428,00	19,53	23,21
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	48.069.000,00	6.697.100,00	13,93	25,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	419.383.617,00	67.346.810,00	16,06	20,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	172.480.895,00	21.043.536,00	12,20	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	154.508.000,00	9.881.000,00	6,40	41,18
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.451.666.548,00	139.645.800,00	5,70	39,00
			PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.451.666.548,00	139.645.800,00	5,70	39,00
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		3.632.503.770,00	495.716.360,00	13,65	75,00
			PENGLOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP	2.776.039.020,00	382.137.650,00	13,77	100,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	856.464.750,00	113.578.710,00	13,26	50,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN		250.753.718,00	14.838.300,00	5,92	62,50
			PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.598.950,00	780.000,00	0,61	25,00
			PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.154.768,00	14.058.300,00	11,42	100,00
14	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.325.771.537,00	1.163.264.164,00	21,84	26,81
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	263.353.425,00	37.134.506,00	14,10	16,83
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	209.136.800,00	22.174.388,00	10,60	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	213.817.000,00	14.409.800,00	6,74	29,33
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		53.857.750,00	2.940.000,00	5,46	38,64
			PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.857.750,00	2.940.000,00	5,46	38,64
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		14.835.000,00	-	0,00	20,00
			PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.835.000,00	-	0,00	20,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		208.167.625,00	11.713.150,00	5,63	26,67
			PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	208.167.625,00	11.713.150,00	5,63	26,67

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		262.464.937,00	14.599.655,00	5,56	40,00
			PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	262.464.937,00	14.599.655,00	5,56	40,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		44.114.896,00	3.917.400,00	8,88	25,00
			PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	44.114.896,00	3.917.400,00	8,88	25,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		827.426.634,00	214.186.798,00	25,89	30,00
			PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	827.426.634,00	214.186.798,00	25,89	30,00
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.229.207.618,00	828.912.346,00	19,60	28,30
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.154.350,00	20.006.940,00	26,62	28,57
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.328.580.233,00	676.570.337,00	20,33	21,43
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	69.161.250,00	5.460.000,00	7,89	16,67
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	206.009.100,00	49.550.008,00	24,05	27,13
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	263.802.685,00	53.385.177,00	20,24	21,74
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		250.482.735,00	16.810.490,00	6,71	16,67
			PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	250.482.735,00	16.810.490,00	6,71	16,67
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ,MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.830.850,00	3.120.000,00	4,67	16,67
16	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.611.662.548,00	1.002.581.052,00	11,64	17,75
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	94.259.375,00	5.850.000,00	6,21	20,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.214.502.923,00	860.321.259,00	20,41	26,91
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	155.245.500,00	14.060.000,00	9,06	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.377.884.400,00	90.842.234,00	6,59	17,50
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	267.072.950,00	17.094.450,00	6,40	25,00
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.169.307.006,00	790.312.916,00	15,29	20,50
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	154.158.850,00	3.908.000,00	2,54	25,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.686.293.799,00	705.917.276,00	19,15	25,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	79.505.250,00	15.879.360,00	19,97	40,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	245.613.940,00	25.041.884,00	10,20	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	569.319.000,00	19.935.216,00	3,50	20,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	423.915.846,00	103.999.850,00	24,53	17,50
			PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	137.200.000,00	16.445.300,00	11,99	16,67
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		61.072.500,00	16.086.400,00	26,34	22,22
			PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	38.352.000,00	13.036.000,00	33,99	33,33
			PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	15.858.000,00	3.050.400,00	19,24	33,33
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.317.039.130,00	1.065.493.171,00	16,87	32,32
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	149.529.550,00	16.117.000,00	10,78	25,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.846.870.831,00	867.849.295,00	17,91	62,50

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	130.186.250,00	6.240.000,00	4,79	20,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	937.847.499,00	142.389.800,00	15,18	21,41
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	159.209.000,00	30.836.676,00	19,37	25,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.788.569.396,00	183.745.100,00	10,27	16,67
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		300.000.000,00	75.000.000,00	25,00	25,00
			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	75.000.000,00	25,00	25,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2.366.240.400,00	618.540.000,00	26,14	50,00
			PENGLOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.240.400,00	618.540.000,00	26,14	50,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	318.221.750,00	22.000.000,00	6,91	25,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		520.159.550,00	68.903.596,00	13,25	25,00
			PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	520.159.550,00	68.903.596,00	13,25	25,00
19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.687.506.020,00	5.125.581.915,00	22,59	23,28
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	208.174.400,00	28.564.775,00	13,72	40,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.280.737.415,00	4.791.067.084,00	23,62	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	578.910.515,00	125.013.470,00	21,59	27,44
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.370.400,00	-	0,00	20,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	269.046.290,00	68.909.586,00	25,61	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.098.009.000,00	112.027.000,00	10,20	21,93
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		6.522.392.813,00	84.944.325,00	1,30	40,70

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	5.926.097.913,00	70.594.325,00	1,19	40,70
			PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	596.294.900,00	14.350.000,00	2,41	24,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		576.835.500,00	-	0,00	17,06
			PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	576.835.500,00	-	0,00	16,67
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.672.533.472,00	1.392.251.150,00	20,87	21,20
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	77.268.600,00	1.560.000,00	2,02	100,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.768.996.842,00	1.228.475.570,00	21,29	21,43
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	291.160.280,00	103.909.057,00	35,69	27,64
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	233.486.250,00	34.076.523,00	14,59	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	181.262.000,00	24.230.000,00	13,37	37,78
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		622.074.185,00	109.083.130,00	17,54	19,67
			PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	259.149.515,00	72.404.880,00	27,94	20,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	74.412.635,00	13.080.700,00	17,58	25,00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.834.234.839,00	1.556.536.599,00	19,87	17,69
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.821.500,00	7.880.000,00	9,63	62,50
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.308.854.379,00	1.383.280.924,00	21,93	28,66
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	35.092.800,00	7.321.725,00	20,86	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	258.912.250,00	48.243.144,00	18,63	25,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	402.841.990,00	68.230.000,00	16,94	25,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		204.808.400,00	2.737.625,00	1,34	100,00
			PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.808.400,00	2.737.625,00	1,34	100,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		46.800.000,00	5.460.000,00	11,67	25,00
			PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	46.800.000,00	5.460.000,00	11,67	25,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH		14.065.053.075,00	1.690.268.000,00	12,02	21,56
			PENGELOLAAN SAMPAH	14.065.053.075,00	1.690.268.000,00	12,02	21,56
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.758.110.561,00	810.087.827,00	21,56	20,28
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	26.606.550,00	5.785.600,00	21,75	25,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.110.541.681,00	687.973.080,00	22,12	26,69
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	215.006.430,00	70.706.200,00	32,89	37,29
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	143.775.650,00	30.333.747,00	21,10	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56.094.000,00	15.289.200,00	27,26	28,00
		PROGRAM PENATAAN DESA		159.693.125,00	9.620.000,00	6,02	20,41
			PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	159.693.125,00	9.620.000,00	6,02	30,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		2.907.491.296,00	547.088.656,00	18,82	21,28
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.907.491.296,00	547.088.656,00	18,82	26,83
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,		928.179.282,00	232.678.500,00	25,07	28,89

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DEA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	928.179.282,00	232.678.500,00	25,07	50,00
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.222.458.683,00	833.280.787,00	19,73	18,18
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.269.100,00	4.500.200,00	20,21	23,08
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.087.416.035,00	593.296.990,00	19,22	23,08
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	454.930.448,00	113.786.711,00	25,01	22,55
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	485.108.100,00	104.205.286,00	21,48	20,83
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	127.666.000,00	17.491.600,00	13,70	19,52
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		404.457.220,00	83.898.700,00	20,74	53,72
			PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	404.457.220,00	83.898.700,00	20,74	53,72
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.437.230.675,00	577.873.599,00	16,81	21,43
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	51.271.250,00	22.678.395,00	44,23	50,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.075.066.224,00	1.859.359.728,00	23,03	28,57
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH	27.398.998.250,00	4.679.829.964,00	17,08	19,99

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.760.250,00	23.261.750,00	13,62	16,67
26	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.992.372.567,00	2.115.354.600,00	19,24	28,58
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.968.449.750,00	57.944.032,00	2,94	21,19
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	421.989.000,00	54.065.092,00	12,81	20,69
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	209.575.850,00	9.291.609,00	4,43	38,41
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		3.968.121.250,00	326.023.106,00	8,22	23,89
			PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	316.023.750,00	55.570.625,00	17,58	33,33
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.880.486.786,00	1.707.207.791,00	17,28	29,40
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.425.000,00	-	0,00	100,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.303.238.236,00	1.629.755.489,00	17,52	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	366.790.700,00	44.651.436,00	12,17	22,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	66.515.350,00	9.986.616,00	15,01	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.619.800,00	22.814.250,00	20,81	30,26
		ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.181.916.990,00	141.928.950,00	12,01	20,14
			PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	49.999.925,00	2.297.125,00	4,59	25,00
		ROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		421.954.760,00	4.120.000,00	0,98	25,00
			PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN	421.954.760,00	4.120.000,00	0,98	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
28	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		42.528.013.099,00	11.805.420.087,00	27,76	31,82
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.410.400,00	5.205.200,00	50,00	60,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.832.618.043,00	3.933.049.235,00	24,84	24,87
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.647.250,00	6.843.100,00	17,71	30,00
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	69.000.000,00	15.000.000,00	21,74	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.482.297.655,00	3.337.879.818,00	51,49	54,72
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.304.965.300,00	2.677.450.000,00	81,01	23,53
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.592.523.900,00	448.908.614,00	17,32	30,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.248.560.981,00	427.501.706,00	5,90	25,21
			ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.366.957.020,00	167.690.880,00	12,27	29,03
			FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	1.127.552.650,00	282.016.000,00	25,01	30,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		14.477.104.974,00	7.486.407.513,00	51,71	56,32
			ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.856.567.834,00	500.794.700,00	26,97	36,84
			EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.629.630.290,00	6.883.042.381,00	59,19	62,76
			FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	755.904.600,00	73.722.880,00	9,75	18,47
			FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	235.002.250,00	28.847.552,00	12,28	20,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.488.855.945,00	762.643.485,00	30,64	36,67
			EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	502.526.520,00	49.861.200,00	9,92	30,00
			ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	503.517.475,00	66.659.598,00	13,24	30,00
			PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.482.811.950,00	646.122.687,00	43,57	49,77

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
29	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.241.066.239,00	7.904.011.264,00	22,43	23,34
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	208.873.000,00	3.349.500,00	1,60	33,33
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.413.165.902,00	901.287.087,00	20,42	35,71
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.059.788.885,00	150.677.097,00	4,92	33,70
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.566.263.400,00	305.137.776,00	19,48	23,07
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.070.065.000,00	212.808.040,00	6,93	35,08
			LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.324.853.000,00	364.586.000,00	27,52	30,58
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		27.904.060.050,00	5.951.485.552,00	21,33	22,26
			PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	2.456.553.500,00	143.012.294,00	5,82	42,86
			PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.802.137.450,00	276.412.300,00	9,86	26,80
			PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.867.449.300,00	216.905.000,00	11,62	16,67
			FASILITASI TUGAS DPRD	20.352.484.800,00	5.315.155.958,00	26,12	25,00
30	KECAMATAN ALALAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.250.000,00	-	0,00	25,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.111.914.662,00	1.729.072.021,00	24,31	28,57
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	168.686.140,00	25.409.527,00	15,06	32,06
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	200.968.000,00	12.636.000,00	6,29	16,62
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		23.700.000,00	-	0,00	16,67
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.700.000,00	-	0,00	16,67
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		643.782.600,00	2.600.000,00	0,40	18,75
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	37.307.600,00	-	0,00	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
31	KECAMATAN ANJIR MUARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.666.890.609,00	535.745.908,00	20,09	33,31
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	900.000,00	-	0,00	100,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.316.243.539,00	493.905.080,00	21,32	24,06
			PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.950.000,00	13.200.000,00	60,14	50,00
32	KECAMATAN ANJIR PASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.803.725.052,00	663.924.427,00	23,68	23,81
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	61.658.600,00	7.822.626,00	12,69	25,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.460.000,00	-	0,00	25,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.460.000,00	-	0,00	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.625.000,00	2.950.000,00	9,33	66,67
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.625.000,00	2.950.000,00	9,33	66,67
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		43.916.500,00	7.192.908,00	16,38	50,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	43.916.500,00	7.192.908,00	16,38	50,00
33	KECAMATAN BAKUMPAI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.551.919.543,00	479.301.467,00	18,78	21,04
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.756.000,00	1.300.000,00	16,76	50,00
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.178.401.438,00	430.398.767,00	19,76	25,00
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	32.979.600,00	5.310.000,00	16,10	25,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	87.157.825,00	12.019.000,00	13,79	16,67
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.170.000,00	4.262.200,00	10,35	27,78

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
34	KECAMATAN BARAMBAI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.088.583.993,00	475.502.602,00	22,77	22,86
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.514.800,00	3.738.150,00	18,22	44,32
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.514.800,00	3.738.150,00	18,22	44,32
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		24.446.500,00	10.602.500,00	43,37	43,66
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	24.446.500,00	10.602.500,00	43,37	43,66
35	KECAMATAN BELAWANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.319.065.197,00	369.484.802,00	15,93	17,12
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.097.143.522,00	341.549.614,00	16,29	20,83
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.553.390,00	4.164.000,00	15,11	16,67
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	77.830.100,00	4.605.000,00	5,92	36,67
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		88.056.775,00	700.000,00	0,79	16,67
			PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	87.646.000,00	700.000,00	0,80	33,33
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19.604.400,00	3.500.000,00	17,85	25,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.604.400,00	3.500.000,00	17,85	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		21.273.800,00	8.025.000,00	37,72	73,08
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.273.800,00	8.025.000,00	37,72	73,08
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		27.820.900,00	4.211.000,00	15,14	50,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	27.820.900,00	4.211.000,00	15,14	50,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
36	KECAMATAN CERBON	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.170.962.134,00	417.858.706,00	19,25	18,29
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.965.962.914,00	391.685.209,00	19,92	35,71
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.221.585,00	3.511.472,00	18,27	62,50
37	KECAMATAN JEJANGKIT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.060.210.163,00	382.842.869,00	18,58	23,66
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.658.100,00	1.228.275,00	26,37	23,08
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	141.643.625,00	32.103.082,00	22,66	41,07
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.374.770,00	3.413.192,00	15,25	26,39
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23.434.825,00	10.117.700,00	43,17	33,33
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.434.825,00	10.117.700,00	43,17	33,33
38	KECAMATAN KURIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.098.164.520,00	436.804.482,00	20,82	25,00
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	54.844.300,00	4.041.671,00	7,37	18,21
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		28.576.200,00	1.500.000,00	5,25	25,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.576.200,00	1.500.000,00	5,25	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		22.554.600,00	1.500.000,00	6,65	100,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.554.600,00	1.500.000,00	6,65	100,00
39	KECAMATAN MANDASTANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.830.870.342,00	561.638.346,00	19,84	17,37
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.503.088.642,00	531.656.246,00	21,24	21,43
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	172.719.050,00	18.093.600,00	10,48	16,59
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.592.650,00	6.893.500,00	13,11	16,67

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	58.761.000,00	4.995.000,00	8,50	32,14
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		22.652.500,00	6.700.000,00	29,58	28,57
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.652.500,00	6.700.000,00	29,58	28,57
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		37.449.500,00	1.600.000,00	4,27	26,79
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	37.449.500,00	1.600.000,00	4,27	26,79
40	KECAMATAN MARABAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	120.949.554,00	22.651.149,00	18,73	16,67
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96.435.800,00	17.763.971,00	18,42	26,09
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.518.000,00	5.700.000,00	21,49	25,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		429.638.850,00	63.791.850,00	14,85	36,46
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	29.638.850,00	7.591.850,00	25,61	66,67
41	KECAMATAN MEKARSARI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.130.403.191,00	319.922.778,00	15,02	28,57
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	46.007.200,00	-	0,00	25,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	2.714.600,00	-	0,00	25,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.400.000,00	-	0,00	16,67
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.400.000,00	-	0,00	16,67
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		211.033.035,00	-	0,00	50,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	211.033.035,00	-	0,00	50,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
42	KECAMATAN RANTAU BADAUH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.336.363.448,00	514.771.062,00	22,03	21,64
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.069.652.273,00	483.465.678,00	23,36	37,50
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	143.901.275,00	18.311.600,00	12,73	26,51
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	46.758.900,00	6.346.884,00	13,57	25,00
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	51.501.000,00	6.646.900,00	12,91	40,84
43	KECAMATAN TABUKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.506.592.964,00	495.839.082,00	19,78	17,36
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.268.204.951,00	463.907.032,00	20,45	21,43
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	37.659.850,00	6.038.750,00	16,03	19,44
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	83.000.000,00	10.000.000,00	12,05	33,33
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		25.080.000,00	4.950.000,00	19,74	25,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.080.000,00	4.950.000,00	19,74	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		21.475.000,00	1.890.000,00	8,80	27,27
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.475.000,00	1.890.000,00	8,80	27,27
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.735.000,00	1.000.000,00	7,28	21,21
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	13.735.000,00	1.000.000,00	7,28	21,21
44	KECAMATAN TABUNGANEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.724.434.356,00	389.968.820,00	22,61	28,57
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	196.316.390,00	46.480.845,00	23,68	17,95
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.920.550,00	2.197.500,00	11,03	25,00

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		20.100.000,00	2.000.000,00	9,95	25,00
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.100.000,00	2.000.000,00	9,95	25,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		20.000.000,00	7.500.000,00	37,50	25,00
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	7.500.000,00	37,50	25,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		27.833.600,00	5.600.000,00	20,12	62,50
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	27.833.600,00	5.600.000,00	20,12	62,50
45	KECAMATAN TAMBAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.198.454.274,00	461.487.904,00	20,99	25,00
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	170.611.750,00	27.567.500,00	16,16	19,90
46	KECAMATAN WANARAYA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.097.026.670,00	416.644.595,00	19,87	25,71
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.860.686.930,00	374.362.995,00	20,12	46,15
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	119.161.030,00	25.598.600,00	21,48	28,21
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.534.210,00	3.016.400,00	10,21	16,67
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	64.610.000,00	13.666.600,00	21,15	37,50
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	81.863.000,00	3.000.000,00	3,66	33,33
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		12.400.000,00	2.700.000,00	21,77	33,33
			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.400.000,00	2.700.000,00	21,77	33,33
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14.100.000,00	6.850.000,00	48,58	46,15
			FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.100.000,00	6.850.000,00	48,58	46,15

No	SKPD	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		24.725.050,00	4.500.000,00	18,20	50,00
			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	24.725.050,00	4.500.000,00	18,20	50,00

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Keuangan SKPD Triwulan I Tahun 202

C. Realisasi Program dan/atau Kegiatan yang Melebihi Target

Pada evaluasi yang dilaksanakan untuk Triwulan I Tahun 2025, tidak ada Program yang melebihi target dikarenakan belum ada program dari SKPD maupun Kecamatan yang capaiannya melebihi daripada 100%.

D. Evaluasi Kinerja Berdasar Indikator Kinerja Umum (IKU)

Berikut adalah Evaluasi Kinerja yang ditarik dari Penilaian Indikator Kinerja Umum (IKU) SKPD sampai pada Triwulan I tahun 2025, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70
Evaluasi Kinerja Berdasar IKU SKPD pada Triwulan I Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif dan Demokratis di Kabupaten Barito Kuala	Terwujudnya desa dan kelurahan bebas konflik	Persentase Desa dan Kelurahan yang Bebas Konflik	Persen	100%	25%	23,05%	92,20%	23,05%	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Nilai SAKIP BAKESBANGPOL	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai	25	0	0	0,00%	0,00%	Capaian akan didapat saat evaluasi Triwulan IV
		Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Kabupaten	Nilai	24	0	0	0,00%	0,00%	Capaian akan didapat saat evaluasi Triwulan IV
		Meningkatnya Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Persentasi Kajian Yang Diterapkan Dalam Dokumen Perencanaan	Nilai	100	25	25	100,00%	25,00%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbang	Nilai Evaluasi SAKIP Bappelitbang	Nilai	82	0	0	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP Keluar di Triwulan IV
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase kesesuaian penempatan ASN dalam jabatan	Meningkatnya manajemen kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai terhadap Formasi Pegawai sesuai Kualifikasi	Persen	72,50	72,50	65,61	90,50%	90,50%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	sesuai kompetensi dan kualifikasi		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	67,5	67,5	0	0,00%	0,00%	Nilai IP ASN akan keluar di Triwulan IV
2	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Indeks	93,2	25	25	100,00%	26,82%	
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	Menurunkan Resiko Bencana	Meningkatnya Usaha Mitigasi Bencana	Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Persen	100%	25%	12,5%	13%	13%	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemkab	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMD yang akuntabel	Persentasi OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Target per triwulanan adalah 100%
			Persentasi OPD yang Menyusun Laporan BMD Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Target per triwulanan adalah 100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH										
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	65.028.850.000,00	9.754.327.500,00	11.375.068.402,00	116,62%	17,49%	
			Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	3.105.471.000,00	559.273.400,00	295.990.485,00	52,92%	9,53%	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi Sakip BPPRD	Nilai	74,95	0	0	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
DINAS KESEHATAN										
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	100%	25,00%	29,53%	118,12%	29,53%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	86	86	0	0,00%	0,00%	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan per semester
		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
DINAS PENDIDIKAN										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	Angka	93,5	93,5	0,00	0,00%	0,00%	Angka akan dikeluarkan pada Triwulan IV
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	Angka	98,9	98,9	0,00	0,00%	0,00%	Angka akan dikeluarkan pada Triwulan IV
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun	Angka	86,5	86,5	0,00	0,00%	0,00%	Angka akan dikeluarkan pada Triwulan IV
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai SAKIP akan dikeluarkan Triwulan IV
DINAS PERHUBUNGAN										
1	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan lalu lintas angkutan umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Umum	Rasio Konektivitas Kabupaten	Nilai Rasio	1	1	0	0,00%	0,00%	
2		Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi	Persen	100	25	25	100,00%	25,00%	
3		Meningkatnya Angkutan Umum yang Beroperasi Sesuai Ketentuan	Persentase Peningkatan Angkutan Umum yang Beroperasi Sesuai Ketentuan	Persen	100	25	25	100,00%	25,00%	
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS SOSIAL										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Persen	87,71	21,93	16,23	74,01%	18,50%	
		Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	100	25,00	25,00	100,00%	25,00%	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN										
1	Meningkatkan Pendapatan per Kapita Sektor Pertanian terutama pada Subsektor Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)	Persen		4,00	4,01			
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak (%)	Persen		2,56	2,56			
		Meningkatnya Kualitas Produk Peternakan	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	Persen		13,50	13,62			
		Meningkatnya Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan yang Diterima Pasar	Persentase jenis produk olahan perkebunan yang diterima pasar (%)	Persen		100%	100%			IKU Baru Eksis di 2024
			Persentase jenis produk olahan peternakan yang diterima pasar (%)	Persen		100%	100%			IKU Baru Eksis di 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai SAKIP SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan (Nilai)	Nilai		84,00	79,66			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persen	96,00%	24%	23,72%	98,83%	24,71%	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persen	72,00%	18%	17,73%	98,50%	24,63%	
		Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	Persen	100,00%	25%	20,00%	80,00%	20,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab. Batola	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persentase Jumlah informasi dan komunikasi pemerintah yang dipublikasikan	Persen	100,00%	100%	132,13%	132,13%	132,13%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatkan Penyelenggaraan SPBE	Meningkatnya Pelaksanaan pengelolaan SPBE	Persentase Pengelolaan domain SPBE	Persen	100,00%	81%	78%	96,30%	78,00%	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai Indeks baru keluar di akhir tahun/Tri IV
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Diskominfo	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
1	Meningkatnya peran dan kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	19	4,75	4,75	100,00%	25,00%	
		Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen	0,28	0,07	0,07	100,00%	25,00%	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	Meningkatnya produk IKM yang Berdaya saing	Persentase produk IKM yang Berdaya saing	Persen	4,37	1,09	1,10	100,92%	25,17%	
3	Meningkatnya daya beli	Terwujudnya Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Persentase harga bahan pokok kebutuhan masyarakat yang stabil harganya	Persen	98	24,50	24,50	100,00%	25,00%	
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Standar	Persen	95,76	2,00	2,00	100,00%	2,09%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskopperindag	Nilai evaluasi SAKIP Diskopperindag	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
1	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja	Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja	Persentase kasus PHK yang difasilitasi	Persen	100,00	0,00	0,00	0,00%	0%	
2	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatnya Penduduk yang bekerja	Persentase Angkatan Kerja yang bekerja	Persen	97,05	48,50	0,00	0,00%	0%	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	90,97	22,74	12,12	53,30%	13,32%	
3	Meningkatnya Pendapatan Penududuk	Meningkatnya Status Kawasan Transmigrasi Mandiri Menuju Berdaya Saing	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks	76,53	76,53	0	0,00%	0,00%	Nilai Indeks akan dikeluarkan pada Triwulan IV
		Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang Menerapkan UMP dan tenaga kerja yang sudah terdaftar di Jamsostek	Persen	55,00	13,75	13,75	100,00%	25%	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persen	81	0	0	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Meningkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	86,52	21,63	21,63	100,00%	25,00%	
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan	Meningkatnya Perumahan dengan Prasarana Sarana dan	Persentase Pemenuhan PSU yang Memadai di Perumahan	Persen	100	25,00	0,00	0,00%	0,00%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
	Pengembangan Wilayah	Utilitas yang Memadai	Persentase Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	100	25,00	30,00	120,00%	30,00%	
		Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	5,74	1,44	0,00	0,00%	0,00%	
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
1	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip SKPD	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	77	0	0	0,00%	0,00%	Nilai dikeluarkan pada akhir tahun oleh Perpustnas
			Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Nilai	77	0	0	0,00%	0,00%	Nilai dikeluarkan pada akhir tahun oleh Perpustnas
		Meningkatkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip SKPD	Nilai Pengawasan Tata Kelola Kearsipan	Nilai	77	0	0	0,00%	0,00%	Nilai dikeluarkan pada akhir tahun oleh Perpustnas
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Disperpusip	Nilai Evaluasi SAKIP Disperpusip	Nilai	70	0	0	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA										
1	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya Kualitas SDM Kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional	Orang	55	4	4	100,00%	7,27%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Meningkatnya Kualitas SDM Keolahragaan	Jumlah Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/Nasional/Internasional	Medali	47	20	20	100,00%	42,55%	
2	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya Pembangunan wisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	196.545	47.561	49.449	103,97%	25,16%	
		Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata	Persen	60%	15,00%	15,00%	100,00%	25,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai SAKIP Disporbudpar	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
1	PDRB Per Kapita Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen Peningkatan	0,55	0,01	0,04	400,00%	7,27%	
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen Peningkatan	0,69	0,1	0,09	90,00%	13,04%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN										
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	181,5	181,5	0	0,00%	0,00%	Nilai/Skor baru keluar pada Triwulan IV

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	21.714	4.969	4.791,73	96,43%	22,07%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai Indeks	55,82	55,82	0	0,00%	0,00%	Nilai Indeks akan dikeluarkan pada Triwulan IV/Akhir Tahun
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai Indeks	97	97	0	0,00%	0,00%	Nilai Indeks akan dikeluarkan pada Triwulan IV/Akhir Tahun
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai Indeks	30,82	30,82	0	0,00%	0,00%	Nilai Indeks akan dikeluarkan pada Triwulan IV/Akhir Tahun
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai Indeks	71	71	0	0,00%	0,00%	Nilai Indeks akan dikeluarkan pada Triwulan IV/Akhir Tahun
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Meningkatnya Desa yang berstatus Mandiri	Persentase Desa yang berstatus Mandiri	Persen	46,67	11,67	10,91	93,49%	23,38%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMD	Nilai Evaluasi SAKIP DPMD	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	91	91	92,89	102,08%	102,08%	
2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah	Rupiah	150.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000	60,00%	60,00%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	70,1	0	0	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Mengendalikan Laju pertumbuhan Penduduk melalui total angka kelahiran	Terkendalnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR	2,3	0	0	0,00%	0,00%	Angka TFR akan dikeluarkan akhir tahun
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Perempuan dan anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,91	0	0	0,00%	0,00%	IPG akan dikeluarkan di akhir tahun
			Skor KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak)	Skor	800	0	0	0,00%	0,00%	Skor KLA akan dikeluarkan akhir tahun
3	Penanganan Stunting	Prevalensi Angka Stunting	Prevalensi Angka Stunting	Angka	18,8	0	0	0,00%	0,00%	Angka Prevalensi Stunting akan dikeluarkan akhir tahun/triwulan I tahun selanjutnya
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD DPPKBP3A	Nilai Evaluasi SAKIP DPPKBP3A	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Tersedianya Infrastruktur ke-PU-an dan infrastruktur dasar yang terkoneksi, berkualitas dan Merata dan Pembangunan Kewilayahan yang Tertib Penataan Ruang	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Persentase Infrastruktur kePU-an yang berkualitas	Persen	72,56	72,56	69,28	95,48%	95,48%	Akumulasi dari penilaian Irigasi Rawa, Panjang Jalan, Bangunan Perkantoran dan Publik sesuai Standar, Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Tertata, Drainase, dan Tenaga Konstruksi Berdaya Saing
		Meningkatnya infrastruktur dasar yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase Pelayanan Air Minum	Persen	78	78	73,17	93,81%	93,81%	
			Persentase Pelayanan Air Limbah	Persen	13	13	11,16	85,85%	85,85%	
		Meningkatnya kawasan dengan kesesuaian penataan ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	44,94	44,94	44,93	99,98%	99,98%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
INSPEKTORAT										
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Penyelesaian TLHP APIP	Presentase Penyelesaian TLHP APIP	Persen	97	97	96,62	99,61%	99,61%	
		Terwujudnya SKPD yang mendapatkan predikat WBK	Jumlah SKPD yang mendapatkan Predikat WBK	SKPD	1	1	0	0,00%	0,00%	
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	0	0,00%	0,00%	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100	25	25	100,00%	25,00%	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100	100	108,3	108,30%	108,30%	Adanya Penyesuaian target setelah asistensi, yang akan disesuaikan pada Renstra periode selanjutnya
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	78	0	0	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
SEKRETARIAT DAERAH										
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih akuntabel, kapabel dan melayani	Meningkatnya Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	96,68	0	0	0,00%	0,00%	Nilai/Indeks keluar di akhir tahun
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi	3,3894	0	0	0,00%	0,00%	Nilai/Indeks keluar di akhir tahun
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Nilai/Indeks keluar di akhir tahun

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	89	0	0	0,00%	0,00%	Nilai IKM keluar di tiap semester
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten pada Komponen Pelaporan	Nilai	12,5	0	0	0,00%	0,00%	Nilai/Indeks keluar di akhir tahun
		Meningkatnya Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Persentasi Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Persen	100	25	25	100,00%	25,00%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
SEKRETARIAT DPRD										
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Kepada Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian dilakukan pada Triwulan III
		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala	Nilai	78	0	0	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN ALALAK										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Alalak	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Alalak	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN ANJIR MUARA										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Anjir Muara	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Muara	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN ANJIR PASAR										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Anjir Pasar	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Anjir Pasar	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN BAKUMPAI										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Bakumpai	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Bakumpai	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN BARAMBAI										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Barambai	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Barambai	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN BELAWANG										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Belawang	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Belawang	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN CERBON										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Cerbon	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Cerbon	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN JEJANGKIT										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Jejangkit	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Jejangkit	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
KECAMATAN KURIPAN										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Kuripan	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Kuripan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN MANDASTANA										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Mandastana	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Mandastana	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN MARABAHAN										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Marabahan	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Marabahan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN MEKARSARI										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Mekarsari	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Mekarsari	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN RANTAU BADAUH										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Rantau Badauh	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Rantau Badauh	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN TABUKAN										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Tabukan	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabukan	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN TABUNGANEN										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Tabunganen	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tabunganen	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN TAMBAN										

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (IKU)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKU)	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025 (Tri I)			PERSEN CAPAIAN DALAM SATU TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
						TARGET	CAPAIAN	PERSEN CAPAIAN		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Tamban	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Tamban	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV
KECAMATAN WANARAYA										
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian kemungkinan dilakukan per Semester
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kec. Wanaraya	Nilai Evaluasi SAKIP Kec. Wanaraya	Nilai	n/a	n/a	n/a	0,00%	0,00%	Penilaian SAKIP diumumkan pada Triwulan IV

Sumber: Paparan Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 SKPD Kab. Barito Kuala

E. Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

1) Faktor Pendorong

- a. Kerjasama dan koordinasi yang baik, baik itu secara internal SKPD maupun eksternal SKPD lain (antar SKPD)
- b. Evaluasi berkala internal masing-masing SKPD terhadap capaian kinerjanya, baik untuk jangka pendek (bulanan dan triwulanan), maupun jangka panjang (tahunan)
- c. Dukungan dari berbagai pihak eksternal yang turut menyukseskan program/kegiatan di masing-masing SKPD.

2) Faktor Penghambat

- a. Tujuan 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
 - (Diskoperindag) Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus / Pengelola Koperasi relative masih rendah dan sering terjadi pergantian, karena habis masa jabatan
 - (Diskoperindag) Kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisipasi terhadap kegiatan Koperasi masih rendah terutama dalam upaya pemupukan modal sendiri
 - (Diskoperindag) Pelaku Usaha Mikro sebagian masih belum memiliki jaminan yang memadai untuk memanfaatkan kredit program Pemerintah
 - (Diskoperindag) Masih lemahnya SDM pelaku usaha, terutama jiwa kewirausahaan, sehingga lambat dalam mengembangkan usahanya
 - (Diskoperindag) Tidak semua produk usaha Mikro menjadi Display pameran karena kemasan masih belum standar
 - (Diskoperindag) Masih lemahnya SDM pelaku usaha, terutama jiwa kewirausahaan, sehingga lambat dalam mengembangkan usahanya
 - (Diskoperindag) Masih terbatasnya wawasan pelaku usaha untuk memasarkan produknya
 - (Diskoperindag) Keterampilan dan Kreatifitas Pelaku IKM yang masih rendah
 - (Diskoperindag) Pemasaran produk IKM masih terbatas
 - (Diskoperindag) Minimnya SDM dan Anggaran Pemantauan serta Pengawasan terhadap perusahaan Industri
 - (DPMPTSP) Kegiatan masih dalam tahap menyusun dan merencanakan timeline pembuatan SOP kebijakan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - (DPMPTSP) Juknis dari pusat belum turun, sehingga kegiatan belum bisa sinkron antara provinsi dan kabupaten pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - (Dinas Sosial) Honorarium Petugas Fasilitator dan Petugas Puskesmas baru bisa direalisasikan pada Tri III dan IV
 - (Dinas Sosial) Data penerima bantuan sosial dari desa terkadang masih belum valid
 - (Dinas Sosial) Adanya usulan/permohonan yang diterima dari masyarakat/desa terlalu banyak, sehingga tidak semua dapat terealisasi karena kendala anggaran
 - (DKPP) Akses jalan menuju BBI sedang diperbaiki dan adanya informasi mengenai kualitas benih ikan dari BBI yang kurang baik, sehingga menyebabkan penjualan benih yang terdistribusi tidak maksimal
 - (DKPP) Menurunnya kualitas air di kolam pemeliharaan indukan ikan karena adanya endapan di dasar kolam
 - (DKPP) Adanya kerusakan di beberapa kolam induk ikan

- (DKPP) Fasilitas untuk indoor pemijahan dan pendederan ikan lele dan gurami rusak total
 - (DKPP) Kurangnya kualitas SDM untuk menangani suatu komoditas
 - (BPPRD) Kurang disiplinnya sebagian SKPD Penghasil dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan setiap bulannya sesuai dengan batasan waktu/tanggal yang sudah ditetapkan
 - (BPPRD) Belum terfasilitasinya untuk pelayanan pajak daerah secara keliling karena adanya efesiensi anggaran padahal sebelumnya kegiatan ini sudah di anggarkan
 - (BPPRD) Perbup Tappin Box, Perbup Pengelolaan Rumah Dinas, Perbup Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian dan Perbup Pengelolaan Retribusi Daerah masih dalam tahap rancangan sehingga sosialisasi PDRD belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025, hal ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
 - (BPPRD) Kurang disiplin Wajib Pajak Daerah dalam hal penyetoran penerimaan PAD yang tepat waktu.
- b. Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana.
- (BPBD) Kurangnya SDM Penyuluh Kebencanaan di Masyarakat.
 - (BPBD) Beberapa peralatan penunjang kegiatan sudah kurang memadai
 - (BPBD) Kondisi geografis alam dan waktu kejadian bencana alam tidak dapat di prediksi atau tidak mengenal waktu.
- c. Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani.
- (Bappelitbang) Kesibukan masing-masing SKPD mitra dengan aktivitas mereka masing-masing, sehingga koordinasi kegiatan sering terhambat
 - (Bappelitbang) Sering bergantinya pihak yang dapat dihubungi ketika diminta data, sehingga membuat pihak SKPD mitra kebingungan terhadap data yang diminta
 - (Bappelitbang) Keterlambatan sebagian kecil SKPD dalam mengumpulkan evaluasi yang diminta
 - (Bappelitbang) Padatnya jadwal kegiatan Bupati sehingga terkadang mengganggu agenda perencanaan
 - (Bappelitbang) Kurangnya pemahaman baik cara peinputan pada aplikasi SIPD maupun kesesuaian dengan tahapan perencanaan
 - (Bappelitbang) Input usulan di SIPD seringkali melebihi dari waktu yang telah ditetapkan sedangkan tahapan perencanaan tetap berjalan sehingga banyak pekerjaan yang tumpang tindih yang mengakibatkan kualitas perencanaan jauh dari yang diharapkan
 - (Satpol PP) Permasalahanan dilapangan banyak Lapak PKL yang sudah dilakukan penertiban tetapi kembali lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak adanya tempat relokasi yang memadai untuk menampung PKL serta mengakibatkan terjadinya kemacetan yang mengganggu pengguna jalan kurangnya peran serta SKPD terkait. Saran nya perlu adanya sosialisasi Peraturan dan sinergitas antar Instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan tersebut. (berdasarkan aduan masyarakat melalui E Lapor)
 - (Satpol PP) Terjadinya perubahan jadwal kegiatan pimpinan yang tidak di Informasikan ke Satpol PP dan maslaah lainnya adalah terjadi alih fungsi anggota Satpol PP dan terjadinya keterlambatan Satpol PP di tempat acara karena sarana dan prasarana tidak mendukung
 - (Satpol PP) Tidak semua Desa se Kabupaten Barito Kuala memiliki Satlinmas Desa ada beberapa Desa sudah membentuk Satlinmas Desa tetapi belum dibuatkan SK Satlinmas oleh Kepala Desa
 - (Satpol PP) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Program kegiatan
 - (DKPP) Ketidakstabilan harga pangan di pasar

- (DKPP) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat tertunda karena adanya efisiensi anggaran
- (DKPP) Kegiatan sosialisasi B2SA terdapat kendala teknis akibat efisiensi anggaran, dimana awalnya ditargetkan 5 desa menjadi 3 desa
- (Diskominfo) Kurang maksimalnya koordinasi internal di bidang IKP terkait penyusunan konten dikarenakan kurangnya personal untuk peliputan
- (Diskominfo) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola TIK yang belum memiliki kompetensi khusus di bidang DNS, keamanan domain dan pengelolaan hosting
- (Diskominfo) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten yaitu Terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mendukung tugas penyelenggaraan SPBE dalam mengelola kebijakan dan infrastruktur TI pemerintah
- (Diskominfo) Keterbatasan kapasitas server dan perangkat keras yang tidak memadai untuk menangani beban data yang terus bertambah dan Infrastruktur jaringan yang lambat atau tidak stabil, terutama di daerah terpencil
- (Diskominfo) Aplikasi rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data karena kurangnya fitur keamanan
- (Diskominfo) Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada bidang Statistik
- (Diskominfo) Admin data SKPD berganti setiap tahun, sehingga sedikit kesulitan untuk pendataan kegiatan pengolahan data sektoral yang ada di SKPD
- (Diskominfo) Masalah keamanan seringkali kurang mendapatkan perhatian bahkan kadang berada di urutan paling akhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Jika tidak mengganggu performa sistem, maka masalah keamanan sistem seringkali tidak begitu diutamakan. Keberadaan internet telah menciptakan suatu revolusi tersendiri di berbagai sektor, Para pengguna internet semakin lama semakin meningkat jumlahnya. dan saat ini internet menjadi kebutuhan pokok sebagaimana peran telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. faktor resiko terbesar adalah terjadinya insiden keamanan siber yang tidak diinginkan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja
- (DPMPTSP) Permasalahan koneksi internet kurang stabil pada bagian pelayanan penanaman modal
- (DPMPTSP) Kurang maksimalnya sarpras untuk pelayanan penanaman modal
- (DPMPTSP) Tidak sinkronnya data pelaku usaha dengan database kependudukan
- (DPMPTSP) Pengelolaan data perijinan usaha masih manual
- (Disperpusip) Kondisi geografis perpustakaan menyebabkan pelayanan perpustakaan tidak maksimal
- (Disperpusip) Banyaknya tenaga perpustakaan yang tidak berlatarbelakang pustakawan
- (Disperpusip) Masih rendahnya komunikasi, hal itu mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan seperti kegiatan lomba bercerita dan menulis cerpen menjadi kurang maksimal dalam hal jumlah peserta
- (Disperpusip) Belum terpenuhinya / optimalnya sarana perpustakaan
- (Disperpusip) Masih banyaknya arsip yang belum dikelola dengan baik di SKPD
- (Disperpusip) SDM Arsiparis masih banyak belum mengerti tentang pengelolaan arsip
- (Disperpusip) Kurangnya perhatian SKPD terhadap pentingnya arsip
- (Disperpusip) Kurangnya sarpras dan anggaran penataan arsip
- (Disperpusip) Penyusutan / pemusnahan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah masih arsip yang tersimpan di depo arsip

- (Disperpusip) Banyaknya arsip yang kena bencana di Kecamatan/Desa belum dilaporkan ke Lembaga kearsipan daerah
- (Disperpusip) Banyaknya arsip pembubaran dan penggabungan SKPD belum di tata pada SKPD yang bersangkutan
- (BPKAD) Permasalahan koneksi internet saat input RKA di SIPD
- (BPKAD) Masih ada SKPD yang salah input rekening belanja pada RKA-nya
- (BPKAD) Sesuai Permendagri 77 Tahun 2021, dalam aplikasi SIPD tidak ada lagi laporan BUD, BKU dan Posisi Kas Daerah Sehingga kesulitan memantau Pengeluaran dan Penerimaan serta Saldo terakhir
- (BPKAD) Sebagian SKPD terlambat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran karena baru mulai proses melengkapi dokumen persyaratan di akhir batas waktu penyampaian dokumen persyaratan
- (BPKAD) Setiap tahun selalu ada Update Aplikasi baru dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan PEMDA
- (BPKAD) Harga dan Biaya yang cenderung berubah
- (BPKAD) Sebagian SKPD ada yang tidak mengusulkan RKBMD sampai saat ini, maupun Usulan RKBMD SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD
- (BPKAD) Adanya kesulitan dalam pengumpulan data dukung dalam hal ini bukti spj pembelian baik belanja barang jasa dan belanja modal. Pengurus barang terkadang terlambat dalam mengumpulkan data dukung tersebut bahkan tidak diberi data, sehingga terlambat juga dalam penyusunan laporan BMD
- (Kecamatan) Untuk Kegiatan atau Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap pengurusan dengan pihak terkait
- (Kecamatan) Masih minimnya pemahaman kecamatan mengenai pengelolaan tata keuangan desa dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku
- (Kecamatan) Beberapa kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dst
- (Kecamatan) Kegiatan linmas di beberapa kecamatan tidak aktif
- (Kecamatan) Kuesioner yang diterima dari Desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian
- (Kecamatan) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan perlu anggaran yang besar mengingat melibatkan berbagai pihak
- (Kecamatan) Beberapa kecamatan sarana pelayanan publiknya mengalami kerusakan
- (Kecamatan) Di Kecamatan Tabunganen, Peserta kafilah MTQ yang dikirim masih wajah lama karena kurangnya seleksi dan pencarian bakat untuk menjadi kafilah MTQ kecamatan
- (Penunjang) Sebagian kegiatan dilaksanakan di triwulan selanjutnya
- (Penunjang) Hasil rekonsiliasi aset yang terlambat
- (Penunjang) Pertanggungjawaban keuangan belum maksimal karena, kegiatan rapat, fotocopy dokumen ikut kegiatan rutin sekretariat
- (Penunjang) Perubahan pada system pengadaan menggunakan e-katalog v.6
- (Penunjang) Adanya rencana efisiensi anggaran sehingga SKPD berhati-hati dalam merealisasikan kegiatan
- (Penunjang) Minimnya ASN di beberapa SKPD/Kecamatan menyebabkan rangkap tugas yang dilaksanakan oleh ASN yang ada

- (Penunjang) Minimnya anggaran koordinasi/konsultasi untuk beberapa kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten
 - (Penunjang) Di Kecamatan Mekarsari, akses air PDAM masih sangat minim bahkan di Kantor Kecamatan itu sendiri
 - (Penunjang) Di Kecamatan Tabunganen, penjual peralatan ATK Kantor sangat sedikit sehingga sedikit-banyak menghambat kinerja administrasi kecamatan.
- d. Tujuan 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
- (Diskoperindag) Tidak adanya anggaran sosialisasi kepada pedagang pasar, sehingga menyebabkan pedagang kurang mentaati peraturan yang berlaku
 - (Diskoperindag) Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu distribusi LPG 3 kg dan barang tidak standar (kadaluarsa)
 - (Diskoperindag) Belum tersediannya gudang/tempat khusus penyimpanan Alat standar kemetrolagian
 - (Diskoperindag) Masih belum bisa menabuh ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang untuk timbangan jembatan
 - (Diskoperindag) Fasilitas penunjang SRG masih belum lengkap.
 - (DKPP) Ketidakstabilan harga pangan di pasar
 - (DKPP) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat tertunda karena adanya efisiensi anggaran
 - (DKPP) Kegiatan sosialisasi B2SA terdapat kendala teknis akibat efisiensi anggaran, dimana awalnya ditargetkan 5 desa menjadi 3 desa
 - (DPMD) Sebagian kegiatan baru dimulai Triwulan II dst
 - (DPMPTSP) Permasalahan koneksi internet kurang stabil pada bagian pelayanan penanaman modal
 - (DPMPTSP) Kurang maksimalnya sarpras untuk pelayanan penanaman modal
 - (DPMPTSP) Tidak sinkronnya data pelaku usaha dengan database kependudukan
 - (DPMPTSP) Pengelolaan data perijinan usaha masih manual
 - (Satpol PP) Permasalahanan dilapangan banyak Lapak PKL yang sudah dilakukan penertiban tetapi kembali lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak adanya tempat relokasi yang memadai untuk menampung PKL serta mengakibatkan terjadinya kemacetan yang mengganggu pengguna jalan kurangnya peran serta SKPD terkait. Saran nya perlu adanya sosialisasi Peraturan dan sinegritas antar Instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan tersebut. (berdasarkan aduan masyarakat melalui E Lapor)
 - (Satpol PP) Terjadinya perubahan jadwal kegiatan pimpinan yang tidak di Informasikan ke Satpol PP dan maslaah lainnya adalah terjadi alih fungsi anggota Satpol PP dan terjadinya keterlambatan Satpol PP di tempat acara karena sarana dan prasarana tidak mendukung
 - (Satpol PP) Tidak semua Desa se Kabupaten Barito Kuala memiliki Satlinmas Desa ada beberapa Desa sudah membentuk Satlinmas Desa tetapi belum dibuatkan SK Satlinmas oleh Kepala Desa
 - (Satpol PP) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Program kegiatan
 - (Kecamatan) Beberapa kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dst
 - (Kecamatan) Kegiatan linmas di beberapa kecamatan tidak aktif
 - (Kecamatan) Kuesioner yang diterima dari Desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian

- (Kecamatan) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan perlu anggaran yang besar mengingat melibatkan berbagai pihak
- (Kecamatan) Beberapa kecamatan sarana pelayanan publiknya mengalami kerusakan
- (Kecamatan) Di Kecamatan Tabunganen, Peserta kafilah MTQ yang dikirim masih wajah lama karena kurangnya seleksi dan pencarian bakat untuk menjadi kafilah MTQ kecamatan
- (Kecamatan) Untuk Kegiatan atau Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap pengurusan dengan pihak terkait
- (Kecamatan) Masih minimnya pemahaman kecamatan mengenai pengelolaan tata keuangan desa dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku

F. Tindak Lanjut

Berdasar faktor penghambat dan faktor lainnya yang telah dijelaskan pada point sebelumnya, maka dapat diambil beberapa tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

- a. Tujuan 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
 - (Diskoperindag) Perlunya peningkatan kapasitas pengurus pengelola koperasi
 - (Diskoperindag) Perlunya peningkatan kesadaran anggota koperasi
 - (Diskoperindag) Perlu adanya koordinasi antara SKPD, untk membina pelaku usaha UMK, yang dikoordinir oleh sekretariat Pemerintah Daerah (Bidang Ekonomi Pembangunan)
 - (Diskoperindag) Perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi secara rutin, untuk mengembangkan dan meevaluasi pembangunan bidang ekonomi yang dikoordinir oleh Sekretariat Pemerintah Daerah
 - (Diskoperindag) Perlu adanya koordinasi antara SKPD, untk membina pelaku usaha UMK, yang dikoordinir oleh sekretariat Pemerintah Daerah (Bidang Ekonomi Pembangunan)
 - (Diskoperindag) Pelaku IKM yang mengikuti Pelatihan perlu diberikan Bantuan Peralatan dalam berproduksi
 - (Diskoperindag) Perlunya Perhatian dan Pemerintah Daerah dalam Memperluas Pasar terhadap produk IKM
 - (Diskoperindag) Perlunya penambahan Anggaran untuk kegiatan dan SDM pegawai
 - (DPMPTSP) Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat diakselerasi seoptimal mungkin
 - (DPMPTSP) Perlunya koordinasi ke instansi vertikal lebih intens sehingga tidak hanya tergantung pada juknis saja
 - (DKPP) Evaluasi kondisi kualitas benih ikan dari BBI
 - (DKPP) Pemeliharaan terhadap kolam pemeliharaan indukan ikan
 - (DKPP) Perbaikan kolam induk ikan dan fasilitas pemijahan dan pendederan ikan lele dan gurami yang rusak
 - (DKPP) Perlunya penambahan SDM untuk menangani suatu komoditas
 - (Dinas Sosial) Agar kegiatan dapat disesuaikan dengan arus kasnya
 - (Dinas Sosial) Perlunya dari Dinas Sosial untuk validasi langsung data penerima bantuan di desa
 - (Dinas Sosial) Diharapkan usulan dapat direalisasikan se-optimal mungkin dengan anggaran yang ada
 - (BPPRD) Diharapkan peran aktif seluruh SKPD Penghasil agar melaporkan realisasi penerimaannya segera di awal bulan.
 - (BPPRD) Penyesuaian dengan efisiensi anggaran
 - (BPPRD) Perlunya percepatan penyelesaian perbup sebagaimana yang dimaksud
 - (BPPRD) Perlu dilakukannya pembinaan kepada wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tepat

waktu sesuai dengan penerimaan yang diterima pada setiap Bulan Berjalan.

b. Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana.

- (BPBD) Penambahan SDM Penyuluh Kebencanaan
- (BPBD) Perlunya pembaharuan/pemugaran peralatan penunjang kegiatan
- (BPBD) Perlunya penambahan SDM yang berfokus pada penanggulangan bencana alam.

c. Tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani.

- (Bappelitbang) Koordinasi yang lebih intens dengan SKPD mitra sekalipun tidak bisa secara formal, koordinasi juga bisa dilaksanakan secara non formal (melalui media sosial)
- (Bappelitbang) Pengawasan berkala terhadap dokumen yang diminta dan memastikan agar SKPD mengumpulkan tepat waktu
- (Bappelitbang) Koordinasi dengan pihak protokol pimpinan daerah lebih diintensifkan
- (Bappelitbang) Dilaksanakan workshop input usulan pada SIPD dan rapat terbatas bagi SKPD terkait usulan Pokir dan usulan masyarakat
- (Satpol PP) Perlunya penertiban berkala Lapak PKL yang melanggar peraturan
- (Satpol PP) Perlunya koordinasi yang lebih intens antara Satpol PP dengan Protokol Forkopim, dan perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung
- (Satpol PP) Perlunya akselerasi pembentukan dan legalisasi Satlinmas Desa terutama bagi desa yang belum terbentuk sama sekali
- (Satpol PP) Perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung kegiatan
- (DKPP) Perlunya pendataan rutin harga pasar dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
- (DKPP) Memaksimalkan anggaran yang tersisa
- (DKPP) Nilai PPH keluar di akhir tahun/Triwulan IV
- (DPMD) Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
- (Diskominfo) Perlu dimaksimalkan koordinasi internal bidang IKP terkait penyusunan konten dan penambahan dari segi personil dan anggaran untuk peliputan.
- (Diskominfo) Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dengan memfasilitasi ASN/non ASN bidang IKP secara berkala sehingga memiliki sertifikasi kemampuan kompetensi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- (Diskominfo) Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan TIK bisa melalui Bimtek, sertifikasi atau kerjasama dengan perguruan tinggi/TIK profesional.
- (Diskominfo) Fokus pada pelatihan dan pengembangan SDM melalui program sertifikasi dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang TI
- (Diskominfo) Tingkatkan kapasitas server dengan investasi pada teknologi cloud atau server fisik yang lebih modern dan Perkuat jaringan dengan membangun infrastruktur tambahan seperti peningkatan bandwidth
- (Diskominfo) Terapkan langkah-langkah keamanan berlapis, seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan ancaman secara real-time
- (Diskominfo) Adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan dapat mendukung Indikator Kinerja Utama Pimpinan SKPD
- (Diskominfo) Adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan dapat mendukung Indikator Kinerja Utama Pimpinan SAdanya dukungan Sumber

Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan mendukung Indikator Kinerja Utama Pimpinan SKPD

- (DPMPTSP) Perlunya peningkatan sarpras pelayanan penanaman modal, terutama akses internet
- (DPMPTSP) Perlu sinkronisasi Kembali data pelaku usaha / pemohon dengan database kependudukan
- (DPMPTSP) Diharapkan ada peningkatan pengelolaan data perijinan usaha berbasis elektronik
- (Disperpusip) Perlunya pendataan para tenaga perpustakaan dan pustawakan untuk diikuti dalam pelatihan/bimtek perpustakaan
- (Disperpusip) Perlu lebih ditingkatkannya komunikasi sehingga pada akhirnya akan semakin menambah motivasi dan inovasi dalam kegiatan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca.
- (Disperpusip) Perlunya pemenuhan terhadap sarana Perpustakaan sehingga akan memberikan layanan yang optimal untuk para pemustaka
- (Disperpusip) SDM Arsiparis harus mengetahui tugas dan fungsinya
- (Disperpusip) SKPD harus mengalokasikan dana untuk penataan arsip dan sarana dan prasarana kearsipan
- (Disperpusip) SKPD yang memiliki arsip yang sudah sampai masa retensi arsipnya agar segera melakukan penyusutan/ Pemusnahan Arsipnya
- (Disperpusip) SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa dapat bekerjasama dengan Lembaga kearsipan untuk melaporkan arsip yang terkena bencana
- (Disperpusip) Kedepannya agar SKPD yang telah digabungkan ataupun dibubarkan, serta yang mekarkan dapat menyerahkan arsipnya ke Lembaga Kearsipan Daerah
- (BPKAD) Memastikan koneksi internet aman saat input RKA
- (BPKAD) Asistensi lebih ketat terkait RKA SKPD
- (BPKAD) Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak pusat, provinsi maupun pihak lainnya diharapkan tetap sesuai aturan yang berlaku, sehingga data laporan yang disajikan akurat, cepat dan tepat
- (BPKAD) Bendahara pengeluaran dan Pengelola Gaji SKPD di sarankan untuk menambah kemampuan dan wawasan bisa mengikuti FGD/ Bimtek/Workshop/Sosialisasi dan berkoordinasi/berkomunikasi/sharing-sharing dengan pihak -pihak yang berkompeten baik dalam daerah maupun luar daerah
- (BPKAD) Perlunya analisa lebih lanjut untuk 3 bulan ke depan terkait harga barang
- (BPKAD) Sebelum mengusul harus SKPD harus membandingkan aset yang tercatat pada SKPDnya dengan kebutuhan
- (BPKAD) Agar Pengguna Barang SKPD bisa memahami pentingnya penatausahaan Barang Milik Daerah, sehingga Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD SKPD tersampaikan tepat waktu
- (Kecamatan) Agar kepengurusan penyaluran barang dipercepat
- (Kecamatan) Diharapkan adanya Pelatihan/ sosialisasi sehingga aparatur Kecamatan memiliki wawasan dan potensi yang memadai tentang tata kelola keuangan desa dan pengawasan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (Kecamatan) Sesuaikan kegiatan dengan arus kasnya
- (Kecamatan) Perlunya digalakkan kembali kegiatan linmas di masyarakat supaya keamanan

daerah kembali terjamin

- (Kecamatan) Jika perlu pihak kecamatan bisa langsung turun ke desa untuk mengambil kembali kuesioner yang dibagikan
 - (Kecamatan) Dapat dipertimbangkan untuk penambahan anggaran pada beberapa kegiatan yang kekurangan anggaran
 - (Kecamatan) Perlunya peremajaan peserta MTQ di Kecamatan Tabunganen
 - (Penunjang) Penyesuaian arus kas sesuai pelaksanaan berdasarkan triwulan
 - (Penunjang) Rekonsiliasi aset agar secepatnya dilaksanakan
 - (Penunjang) Jangan sampai terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban
 - (Penunjang) Penyesuaian dengan aplikasi baru
 - (Penunjang) Agar anggaran efisiensi segera disahkan untuk kelancaran kegiatan
 - (Penunjang) Perlunya penambahan personil ASN/PPPK di beberapa instansi
 - (Penunjang) Perlunya penambahan anggaran koordinasi/konsultasi terkhusus kecamatan yang berada jauh dari pusat ibukota kabupaten
 - (Penunjang) Perlunya akselerasi cakupan pelayanan PDAM di beberapa kecamatan, khususnya di Kecamatan Mekarsari
 - (Penunjang) Agar menjadi perhatian kabupaten untuk pemerataan distribusi perdagangan di daerahnya.
- d. Tujuan 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- (Dinas Pendidikan) Sebagian kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan seterusnya
 - (Diskoperindag) Penambahan Anggaran untuk Rapat / Sosialisasi perihal penataan Pedagang Pasar
 - (Diskoperindag) Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha/konsumen tentang perlindungan konsumen
 - (Diskoperindag) Penambahan tenaga Reparatur
 - (Diskoperindag) Pembangunan gudang/ruangan tempat penyimpanan Alat standar kemetrolagian yang representatif.
 - (Diskoperindag) Menambah ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang Timbangan Jembatan
 - (Diskoperindag) Perlu tambahan Anggaran untuk peningkatan fasilitas penunjang SRG
 - (DKPP) Perlunya pendataan rutin harga pasar dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
 - (DKPP) Memaksimalkan anggaran yang tersisa
 - (DKPP) Nilai PPH keluar di akhir tahun/Triwulan IV
 - (DPMD) Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
 - (DPMPTSP) Perlunya peningkatan sarpras pelayanan penanaman modal, terutama akses internet
 - (DPMPTSP) Perlu sinkronisasi Kembali data pelaku usaha / pemohon dengan database kependudukan
 - (DPMPTSP) Diharapkan ada peningkatan pengelolaan data perijinan usaha berbasis elektronik
 - (Satpol PP) Perlunya penertiban berkala Lapak PKL yang melanggar peraturan
 - (Satpol PP) Perlunya koordinasi yang lebih intens antara Satpol PP dengan Protokol Forkopim, dan perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung
 - (Satpol PP) Perlunya akselerasi pembentukan dan legalisasi Satlinmas Desa terutama bagi desa yang belum terbentuk sama sekali

- (Satpol PP) Perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung kegiatan
- (Kecamatan) Agar kepengurusan penyaluran barang dipercepat
- (Kecamatan) Diharapkan adanya Pelatihan/ sosialisasi sehingga aparaturnya Kecamatan memiliki wawasan dan potensi yang memadai tentang tata kelola keuangan desa dan pengawalan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (Kecamatan) Sesuaikan kegiatan dengan arus kasnya
- (Kecamatan) Perlunya digalakkan kembali kegiatan linmas di masyarakat supaya keamanan daerah kembali terjamin
- (Kecamatan) Jika perlu pihak kecamatan bisa langsung turun ke desa untuk mengambil kembali kuesioner yang dibagikan
- (Kecamatan) Dapat dipertimbangkan untuk penambahan anggaran pada beberapa kegiatan yang kekurangan anggaran

2.2.2 Evaluasi Indikator Makro

A. Indeks Gini (Gini Rasio)

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Barito Kuala menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Kabupaten Barito Kuala. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, rasio gini yang semakin mendekati nilai 0 (nol), semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 (nol) pada rasio gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, rasio gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan, sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Semakin besar atau melebar indeks rasio gini, berarti kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya, sedangkan yang sudah kaya justru lebih cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata.

Tabel 2.71
Perkembangan Indeks Gini / Gini Rasio Lima Tahun Terakhir (2020-2024)

Tahun Year	Rasio Gini Gini Ratio
(1)	(2)
2020	0,277
2021	0,284
2022	0,289
2023	0,312
2024	0,272

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Indeks gini di Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2024 mencapai 0,272 dari target sebesar 0,245. Meskipun masih belum mencapai target, capaian ini telah menunjukan pemerataan pendapatan di Barito Kuala yang hampir merata dan tiap tahunnya terus menurun mendekat ke arah angka nol yang merupakan angka terbaik yang artinya tidak ada lagi kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan acuan adalah capaian angka Indeks Gini (Gini Ratio). Meskipun kondisi ini masih tergolong berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi, namun trend angka yang semakin mendekati ke angka “0” tentu sebuah gambaran kondisi yang semakin baik. Kedepan Indeks Gini akan diupayakan agar berada pada kisaran angka di bawah 0,30 sehingga kesenjangan pendapatan

di Kabupaten Barito Kuala tidak semakin jauh antar penduduk. Upaya pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah dengan pemberdayaan penduduk menjadi penduduk yang produktif sesuai bidang usaha yang digeluti. Terutama pada pengembangan wirausahaan-wirausahaan baru maupun wirausahawan yang sudah ada.Kebanyakan usaha produktif mereka melaksanakan bergerak pada usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya.

Tabel 2.72
Perbandingan Gini Rasio Se-Kalimantan Selatan, Lima Tahun Terakhir

Provinsi/Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2020	2021	2022	2023	2024
KALIMANTAN SELATAN	0,332	0,33	0,317	0,313	0,302
TANAH LAUT	0,25	0,232	0,263	0,259	0,257
KOTABARU	0,287	0,306	0,331	0,316	0,296
BANJAR	0,322	0,344	0,300	0,297	0,259
BARITO KUALA	0,277	0,284	0,289	0,312	0,272
TAPIN	0,274	0,289	0,291	0,281	0,260
HULU SUNGAI SELATAN	0,3	0,275	0,260	0,293	0,288
HULU SUNGAI TENGAH	0,285	0,331	0,228	0,225	0,251
HULU SUNGAI UTARA	0,319	0,378	0,301	0,271	0,276
TABALONG	0,346	0,288	0,337	0,284	0,300
TANAH BUMBU	0,3	0,281	0,292	0,280	0,309
BALANGAN	0,298	0,277	0,266	0,258	0,218
KOTA BANJARMASIN	0,342	0,35	0,330	0,370	0,347
KOTA BANJAR BARU	0,381	0,361	0,341	0,321	0,300

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir selalu memiliki rasio gini lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri, dan sedikit berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan,dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untukhidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, seperti tertera pada tabel di bawah.

Tabel 2.73
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barito Kuala	68,65	69,08	69,87	70,67	71,40
Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84	74,66	75,19

Sumber Data: BPS Provinsi Kalsel

Berdasarkan tabel di atas, Nilai IPM Kabupaten Barito Kuala selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, dan mulai pada tahun 2023 telah memasuki range 70 ke atas dimana termasuk dalam kategori IPM “Tinggi”. Kendati demikian nilai IPM di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tabel selanjutnya akan dilihat capaian komponen penyusun Nilai IPM di Kabupaten Barito Kuala, selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.74
Perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) periode 2020-2024

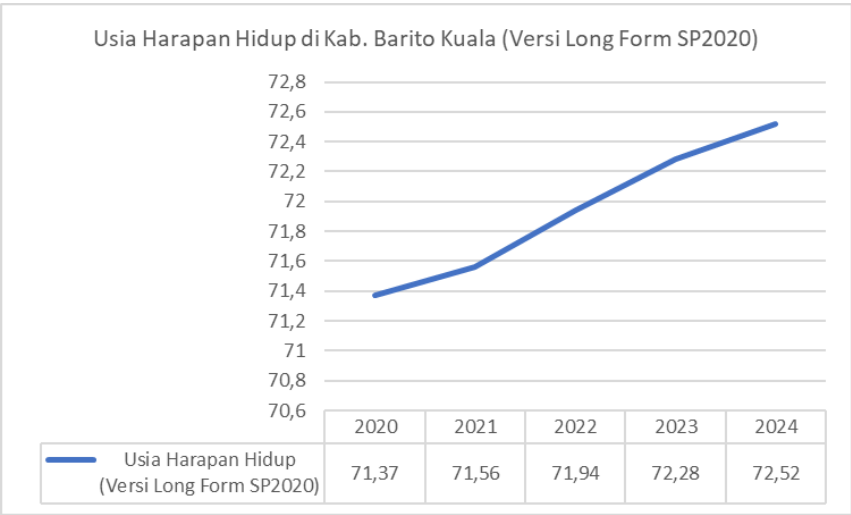
Tahun Years	Umur Harapan Hidup (Tahun) <i>Life Expectancy (Year)</i>	Harapan Lama Sekolah (Tahun) <i>Expectancy Years School (Year)</i>	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) <i>Mean Year School (Year)</i>	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun) <i>Expenditure per Capita (Thousand Rupiah/Capita/Year)</i>	IPM <i>HDI</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	71,37	12,39	7,34	9.805	68,65
2021	71,56	12,40	7,55	9.868	69,08
2022	71,94	12,54	7,63	10.230	69,87
2023	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67
2024	72,52	12,56	7,92	11.168	71,40

Sumber Data: BPS Kabupaten Barito Kuala

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) kompnen penyusun IPM, komponen pengeluaran per kapita adalah yang paling terlihat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sedangkan pada komponen Harapan Lama Sekolah adalah komponen yang tetap naik dari tahun ke tahun, namun kenaikannya terbilang sangat rendah, sehingga pada Harapan Lama Sekolah ini patut menjadi perhatian bersama terutama untuk Perangkat Daerah yang bertugas pada bidang pendidikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada tiga komponen/dimensi dasar penyusun nilai IPM, yaitu:

a) Aspek Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) / Usia Harapan Hidup (UHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Pergerakan AHH di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun dapat dilihat pada grafis berikut.



Gambar 2.11 Usia Harapan Hidup versi Long Form SP2020
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Capaiannya Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito pada 2024 adalah 72,52 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2023 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 72,52 tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 Tahun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada angka 72,28 Tahun.

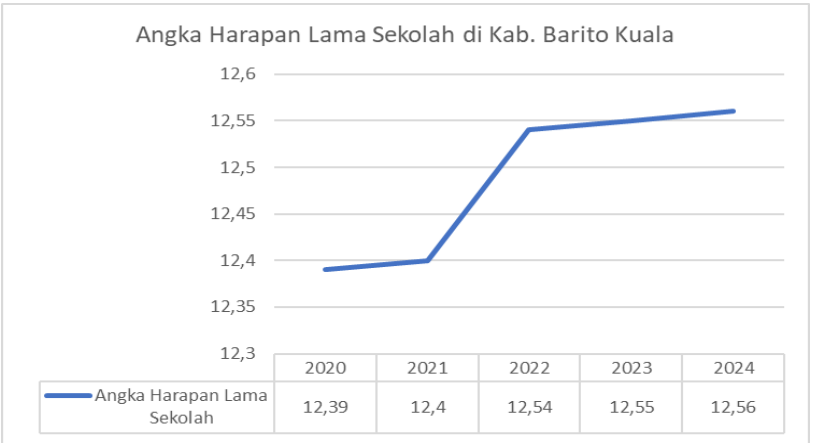
b) Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua”. Target ini terdiri dari beberapa target:

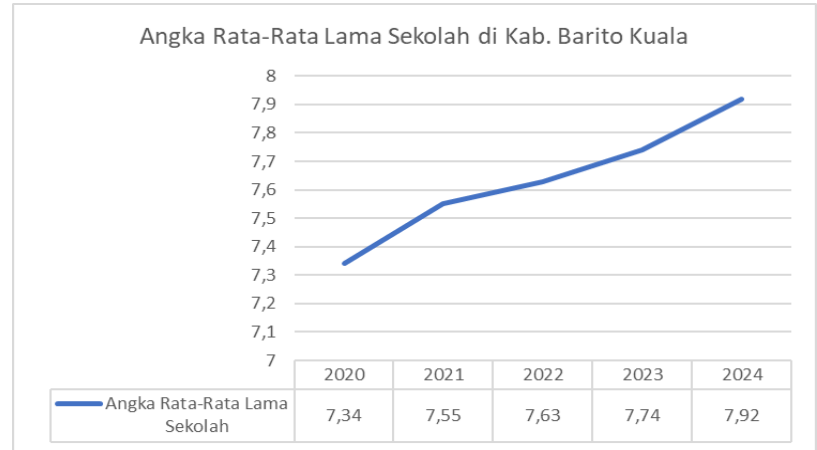
- 1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas;
- 2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol;
- 3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif.

Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.

Angka Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Gambar 2.12 Angka Harapan Lama Sekolah selama 5 Tahun Teakhir
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

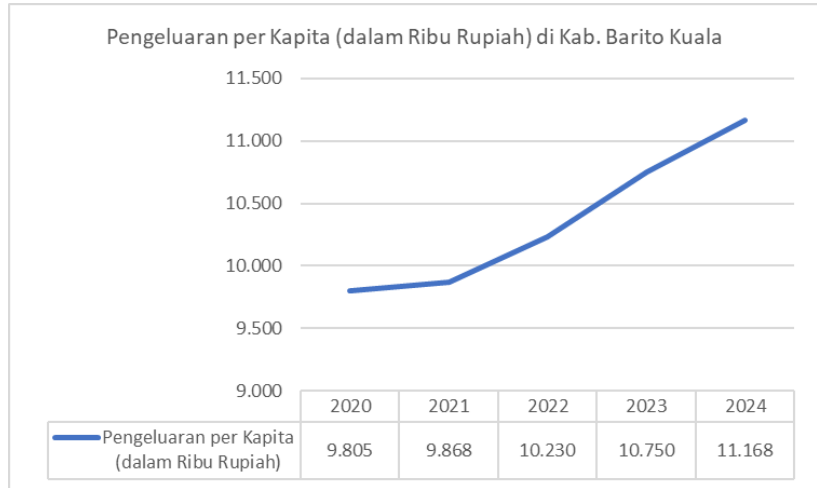


Gambar 2.13 Angka Rata-Rata Lama Sekolah selama 5 Tahun Teakhir
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Dari kedua gambar diatas yang mewakili dua unsur pada aspek pendidikan, terlihat bahwa masing-masing indikator baik Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) maupun Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, meskipun kenaikan pada AHLS terbilang sangat kecil dengan rata-rata kenaikan 0,01 tahun per tahunnya.

c) Aspek Kehidupan yang Layak

Aspek Kehidupan yang Layak diukur dari indikator Pengeluaran per Kapita yang dinilai dalam satuan Ribu Rupiah (Rp). Pengeluaran per kapita yang semakin tinggi tiap tahunnya menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik.



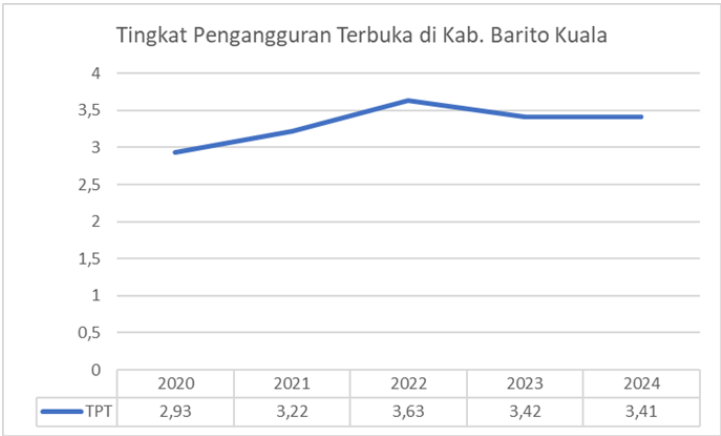
Gambar 2.14 Pengeluaran per Kapita selama 5 Tahun Teakhir

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Dari gambar di atas, terlihat pada mulai tahun 2022, Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Barito Kuala sudah menyentuh angka 10 juta, dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 tercapai pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp. 11.168.000, menunjukkan indikasi kuat perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang semakin membaik tiap tahunnya.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikitsatu jam dalam seminggu yang lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Kuala. Data angkat tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai berikut.

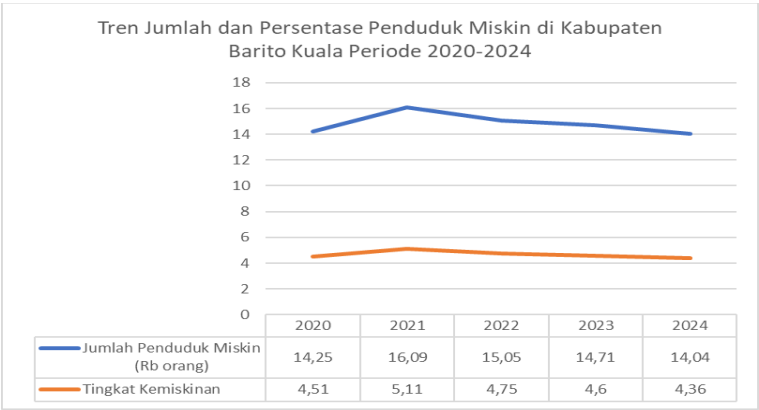


Gambar 2.15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 Tahun Terakhir
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2022 menunjukkan peningkatan 0,29% pada 2021 dan terus meningkat sebesar 0,41% pada 2022. Akan tetapi, angka TPT ini mulai menurun sebesar 0,21% pada 2023 jika dibandingkan dengan 2022. Sedangkan dari tahun 2023 ke 2024, capaian TPT terbilang cukup stagnan di angka 3,4 dengan penurunan relatif kecil sebesar 0,01%.

D. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2.16 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Kuala Periode 2020-2024
Sumber data: BPS Kabupaten Barito Kuala

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dibandingkan 2020, dan baru mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan 2020, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan 2021, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan 2022, dan terakhir untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan 2023

E. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan gabungan dari beberapa indikator lingkungan hidup, seperti kualitas air, udara, dan lahan. Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, dengan Komponen-komponen yang diukur antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.75
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Barito Kuala

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	54,13	63,21	63,41	63,12	64,01

Sumber data: DLH Kab. Barito Kuala

Melihat data pada gambar di atas, selama 5 tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dari tahun 2020 menuju 2021, ini dimungkinkan karena faktor Pandemi COVID-19 yang menyebabkan mobilitas masyarakat menurun yang berujung pada rendahnya produksi polusi yang disebabkan kendaraan bermotor. Selanjutnya nilai IKLH mulai meningkat dan menyentuh angka 64 menunjukkan komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menjaga Kualitas Lingkungan Hidup.

F. Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayahIndonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia. Indeks ini juga sering digunakan oleh pemerintah, lembaga bantuan, dan organisasi internasional untuk

merencanakan langkah-langkah mitigasi serta distribusi bantuan ke daerah yang lebih rawan bencana. Capaian Indeks Resiko Bencana terhadap target selama periode RPD ini dapat dilihat pada tabel dibawah, yang mana capaian ini diambil dari laman <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, dan selanjutnya berdasar Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-06.22/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025, capaian Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut

Tabel 2.76

Indeks Resiko Bencana Barito Kuala

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	155,45	155,96	140,65	149,6	156,15

Sumber: Sumber data: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Melihat data pada gambar di atas, selama 5 tahun Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama dari tahun 2021 menuju 2022, ini dimungkinkan karena salah satu bencana alam yang sangat berdampak di Kabupaten Barito Kuala yaitu banjir bandang yang menerpa beberapa kecamatan, sudah teratasi derngan baik berkatkerja dan kinerja yang dilaksanakan sejumlah pihak, terutama dari Dinas PUPR. Namun indeks ini kembali menguat pada tahun 2023 yang mana beberapa faktor terutama masalah perairan dan tanah yang masih rentan terjadi bencana walau dengan skala kecil.

G. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.77

Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	52,47	53,88	56,71	68,54	77,04

Sumber data: LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari KemenpanRB, Bagian Organisasi Setda Pemkab. Barito Kuala

Melihat data pada tabel di atas, selama 5 tahun Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 menuju 2023, namun sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam LHE Pelaksanaan RB di Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 bahwa hasil evaluasi tahun 2023 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan berdasar Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan, sehingga perbandingan baru bisa dilakukan kembali untuk tahun 2023 dan seterusnya.

2.2.3 Evaluasi Kegiatan Pendukung Prioritas Nasional

A. Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan Makan Bergizi Gratis merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah

dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

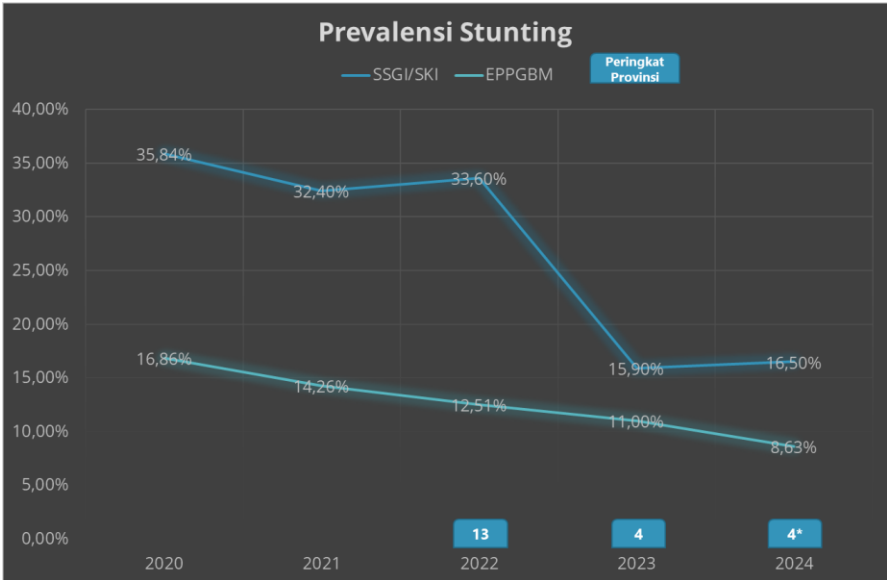
Tujuan daripada kegiatan ini adalah:

- 1. Meningkatkan gizi masyarakat, terutama yang rawan stunting atau kekurangan gizi;
- 2. Mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak, terutama di masa pertumbuhan;
- 3. Meringankan beban ekonomi keluarga yang tidak mampu membeli makanan bergizi;
- 4. Meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah karena mereka tidak belajar dalam keadaan lapar.

Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah dimulai dengan fokus pada siswa sekolah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa kota/kabupaten telah melakukan percontohan dan pelaksanaan program ini. Beberapa sekolah di Banjarmasin dan Banjarbaru telah menerima makan bergizi gratis, dan program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting. Namun sayangnya program ini masih belum berjalan di Kabupaten Barito Kuala, dimana program tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas sektoral dan pihak-pihak yang mungkin akan terlibat.

B. Penurunan Angka Stunting

Penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala ditindaklanjuti oleh Tim Penurunan Prevalensi Stunting (TPPS) yang diketuai langsung oleh Wakil Bupati Barito Kuala. Berikut diperlihatkan pergerakan angka prevalensi stunting selama tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan dari SSGI/SKI (Survey Status Gizi Indonesia/Survey Kesehatan Indonesia) dan EPPGBM (Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)



Gambar 2.17 Pergerakan Prevalensi Stunting Selama 5 Tahun (2020-2024)
Sumber: SSGI/SKI dan EPPGBM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasar SSGI/SKI (garis atas), angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 dengan kenaikan sebesar 0,6%, namun hal yang berbeda justru dapat dilihat dari EPPGBM dimana pada tahun 2023 ke 2024, Angka Prevalensi Stunting justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan penurunan sebesar 2,37%.

Terlepas daripada perbedaan versi data, Kabupaten Barito Kuala telah melakukan aksi penurunan angka prevalensi stunting yang terbagi dalam 8 Aksi Konvergensi, yaitu:

1. Aksi 1: Analisis Situasi

Aksi ini merupakan analisa kondisi yang ditandai dengan ditetapkanya 31 desa di 8 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala sebagai Lokus Prioritas Penurunan Stunting, seperti yang tertuang dalam

Keputusan Barito Kuala Nomor 188.45/241/KUM/2023 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penangan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

2. Aksi 2: Penyusunan Rencana Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya keras dalam menurunkan stunting dengan menyusun program kegiatan yang berfokus pada upaya intervensi 1000 HPK, dengan total anggaran sebesar Rp 37.140.425.583 yang terdiri atas APBD Kabupaten sebesar Rp 30.059.085.583 dan APBD Desa sebesar Rp 7.081.340.000. Pelaksanaan Konvergensi tidak hanya melibatkan SKPD akan tetapi juga melibatkan Seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

3. Aksi 3: Pelaksanaan Rembuk Stunting

Pelaksanaan rembuk stunting dilaksanakan untuk memastikan konvergensi program, memperkuat Komitmen dan Dukungan semua pihak, menentukan Prioritas dan Rencana Aksi, serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di ke-17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang dimulai di Kecamatan Rantau Badauh pada Senin, 4 Maret 2024 (Rembuk I)/Senin 21 Oktober 2024 (Rembuk II) dan diakhiri di Kecamatan Kuripan pada Kamis, 14 Maret 2024(Rembuk I)/Kamis, 31 Oktober 2024 (Rembuk II). Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Ketua TPPS Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan rembuk stunting tidak hanya di tingkat kecamatan, ia juga dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan mengundang unsur Forkopimda, Seluruh Pimpinan SKPD, Seluruh Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Tim Pendamping Keluarga Kader Posyandu, Dunia Usaha dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aksi konvergensi, dimana pada acara tersebut dilaksanakan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting.

4. Aksi 4: Peraturan Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, Pada Tahun 2024 dilakukan revisi Peraturan Bupati dengan menetapkan target Penurunan Prevalensi Stunting menjadi 14%. Ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024. Selain itu juga ada Peraturan Bupati nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang menandakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembenahan sanitasi.

5. Aksi 5: Pembinaan Pelaku Pemerintah Desa/Kelurahan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan Kapasitas Pelaku di Tingkat Desa/Kelurahan;
- Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- Mengintegrasikan Program dan Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan;
- Meningkatkan Komitmen dan Kepemimpinan Lokal;
- Memperkuat Peran Masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh Lurah/Kepala Desa, Tenaga Pendamping Sosial PKH (Program Keluarga Harapan), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Penyuluh keluarga berencana, Bidan, dan Petugas Gizi.

6. Aksi 6: Sistem Manajemen Data Stunting

Sistem manajemen data adalah pengelolaan data yang akan digunakan untuk mendukung Pelaksanaan aksi-aksi integrasi penurunan stunting. Untuk meningkatkan sistem manajemen data Setiap SKPD terkait untuk memetakan kebutuhan dan penggunaan data serta menyediakan data program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap 3 bulan dilakukan Koordinasi pembahasan kesenjangan data untuk meningkatkan kualitas data di Aplikasi Aksi Bina Bangda.

7. Aksi 7: Pengukuran dan Publikasi Stunting

Hasil Pengukuran dan Penimbangan Serentak yang Dilaksanakan Pada Bulan Juni 2024 menghasilkan data bahwa Balita yang mengalami Stunting adalah sebesar 8,63%, dari Balita yang diukur mencapai 99,13% dari total Balita yang ada. Capaian pengukuran yang tidak mencapai 100% dikarenakan ketidakhadiran balita dan ibunya ke Posyandu dengan beberapa alasan:

- Dilarang oleh suami
- Suami-isteri telah cerai dan kemudian anak dipelihara oleh nenek, sehingga tidak ada yang mengantar.
- Buku KIA hilang
- Jarak ke posyandu terlalu jauh
- Takut kalau hasil pengukuran anaknya rendah/jelek
- Orang tua kedua-duanya bekerja
- Orang tuanya memang malas dengan berbagai alasan pribadi
- Kehadiran di posyandu tidak dijadikan dasar penyaluran PKH.

Selanjutnya agar informasi sampai keseluruh masyarakat, dilakukan publikasi dengan memanfaatkan sarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8. Aksi 8: Reviu Kinerja Tahunan

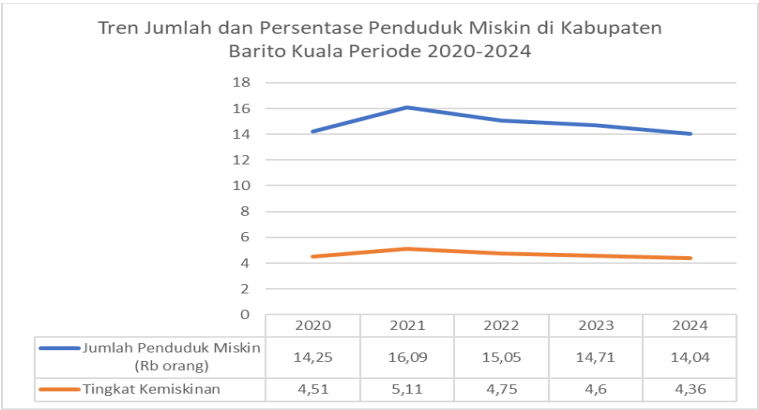
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai kinerja, mengidentifikasi tantangan, memperbaiki strategi intervensi dan memastikan keberlanjutan upaya penurunan stunting.

Selain dari aksi konvergensi di atas, juga dilaksanakan beberapa inovasi yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penurunan angka stunting, diantaranya:

1. Pencanangan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Tahun 2025;
2. Bekerja Sama dengan PT Adaro untuk meningkatkan Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitif;
3. Kerjasama dengan Kementerian Agama dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam rangka penyuluhan bagi calon pengantin;
4. Program PERMATA BUNDA (Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Anak Balita) adalah salah satu upaya pemenuhan zat gizi spesifik dalam rangka mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita, serta mendorong terwujudnya generasi Barito Kuala yang tumbuh sehat dan bebas stunting. Program PERMATA BUNDA merupakan hasil kerjasama bersama dengan Pemerintah Desa setempat;
5. Kerjasama dengan BAZNAS dalam upaya peningkatan intervensi spesifik;
6. Monitoring TPPPS ke Desa untuk Memastikan Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitif Tepat Sasaran;
7. Diseminasi audit kasus stunting bersama tim pakar dan SKPD konvergensi.

C. Penanggulangan Kemiskinan Daerah / Ekstrem

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, capaian penanggulangan kemiskinan daerah dan ekstrem terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.18 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Kuala Periode 2020-2024
Sumber data: BPS Kabupaten Barito Kuala

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dibandingkan 2020, dan baru mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,6% jika dibandingkan dengan 2020, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan 2021, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15% jika dibandingkan dengan 2022, dan terakhir untuk tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan 2023.

Hasil angka jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang selalu mengalami penurunan tiap tahunnya yang terhitung stabil merupakan hasil kerja keras bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tergabung dalam TPKD yang terbagi dalam 3 Strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran

SKPD yang terlibat dan program yang dilaksanakan dalam strategi ini adalah sebagai berikut:

- Dinas Sosial: Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Dinas Pendidikan: Program Pengelolaan Pendidikan
- DPPKBP3A: Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Dinas Pertanian TPH: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian
- Dinas Kesehatan: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatkan Pendapatan

SKPD yang terlibat dan program yang dilaksanakan dalam strategi ini adalah sebagai berikut:

- DPUPR: Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Disbunnak: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Dinas PMD: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Dinas Koperindag: Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan

SKPD yang terlibat dan program yang dilaksanakan dalam strategi ini adalah sebagai berikut:

- DPUPR: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Dinas Perkim: Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Pengembangan Perumahan.

D. UMKM dan Ketahanan Pangan

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun 2024, UMKM di Kabupaten Barito Kuala telah mencapai 4.417 usaha berdasar yang sudah diterbitkan izinnya oleh aplikasi OSS RBA, yang terdiri dari 4.414 usaha yang masih berstatus Usaha Mikro dan Kecil, dan 3 usaha yang sudah berstatus Menengah. Selanjutnya sudah ada 37 usaha yang sudah termasuk usaha skala besar, sehingga di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh UMKM dengan persentase cakupan sebesar 99,17%. Karenanya, untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha berupa kegiatan pelatihan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produksi yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

Ketahanan Pangan dikelola utamanya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang memiliki kinerja utama yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Produksi Perikanan baik Budidaya maupun Tangkap. Selain itu, ketahanan pangan juga dibantu oleh Dinas Pertanian TPH dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung padi bagi provinsi Kalimantan Selatan. Lahan sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 seluruhnya merupakan lahan non irigasi dengan total luasan 114.256 Ha, dimana Kecamatan Tamban menjadi yang terluas dengan 10.763 ha dan Kecamatan Marabahan menjadi yang terkecil dengan hanya 1.895 ha. Pada tahun 2024 produksi padi di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 219.963 ton GKG (Gabah Kering Giling) dengan luas panen sebesar 58.873 ha. Beras Anjir menjadi produk/komoditas unggulan di Kabupaten Barito Kuala dan banyak diperjualbelikan hingga ke luar daerah.

Selain itu di Kabupaten Barito Kuala juga menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Total produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 sebesar 7.153 ton dengan produksi terbersarnya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Wanaraya. Selanjutnya adalah total produksi kacang tanah tahun 2024 adalah sebesar 73,6 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya, total produksi ubi kayu tahun 2024 sebesar 9.056,44 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Mekarsari, dan terakhir total produksi ubi jalar tahun 2024 sebanyak 113,3 ton yang sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Wanaraya dan Marabahan

Selain dari sektor pertanian, dalam rangka menjaga ketahanan pangan juga diperlukan peran serta peternakan dan perikanan. Populasi ternak pada tahun 2024 di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Sapi Potong, yakni sebanyak 7.336 ekor. Sapi Potong tersebut sebagian besar terdapat di Kecamatan Wanaraya dan Kecamatan Mandastana. Selain Sapi Potong, terdapat juga ternak kambing dengan populasi sebanyak 1.476 ekor yang terdapat pada semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kuripan. Sebaliknya di Kecamatan Kuripan terdapat ternak yang tidak ada pada kecamatan lain, yaitu Kerbau sebanyak 1.633 ekor. Di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat ternak Babi, yakni sebanyak 40 ekor yang hanya berada di Kecamatan Wanaraya dan Barambai. Selama tahun 2024, total ternak yang telah dipotong adalah sebanyak 589 ekor Sapi, 28 ekor Kerbau, dan 97 ekor Kambing yang mana sebagian besar dilaksanakan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya total produksi daging ternak selama tahun 2024 adalah 1.408,5 kw dari Sapi Potong, 60,23 kw dari Kerbau, dan 17,78 kw dari Kambing.

Selanjutnya adalah unggas yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun 2024 adalah Ayam Pedaging sebanyak 1.276.464 ekor, Ayam Kampung sebanyak 1.070.534 ekor, Itik sebanyak 52.955 ekor, dan

Itik Manila sebanyak 1.557 ekor. Adapun unggas tersebut ada yang diambil dagingnya, maupun telurnya. Total unggas yang telah dipotong adalah sebanyak 15.022 ekor Ayam Kampung, 311.780 ekor Ayam Pedaging, 200 ekor Itik, dan 63 ekor Itik Manila yang dari pemotongan tersebut dihasilkan produksi daging unggas selama tahun 2024 adalah 195,57 kw dari Ayam Kampung, 17.906,3 kw dari Ayam Pedaging, 1,75 kw dari Itik dan 0,86 kw dari Itik Manila. Kemudian telur yang dihasilkan dari unggas ini adalah 847.388,37 kg dari Ayam Kampung dengan produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Pasar, 372.865 kg dari Itik dengan produksi terbanyak di Kecamatan Anjir Muara, 7.969 kg dari Itik Manila dengan produksi terbanyak di Kecamatan Tamban.

Sebagai wilayah yang dilalui salah satu sungai terpanjang, yakni Sungai Barito, serta berbatasan langsung dengan wilayah laut, maka masyarakat Kabupaten Barito Kuala cukup banyak yang mengusahakan perikanan tangkap. Pada tahun 2024, tercatat ada sekitar 859 rumah tangga yang melakukan penangkapan perikanan laut dengan produksi sebesar 3.404 ton. Selain itu, terdapat 1.145 rumah tangga yang melakukan penangkapan di perairan umum dengan total produksi sebesar 5.772,76 ton.

Selain perikanan tangkap, di Kabupaten Barito Kuala juga banyak rumah tangga yang melakukan budidaya perikanan, di mana sebagian besar menggunakan kolam. Adapun produksi perikanan budidaya sepanjang 2024 adalah sebesar 11.940,27 ton (*sumber: Barito Kuala dalam Angka 2025*)

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada sub bagian ini akan diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan sejumlah sasaran dan terget kinerja, baik yang berkenaan dengan tingkat capaian prioritas dan sasaran prioritas sesuai dengan indikator dan target kinerja daerah maupun yang berkenaan dengan pelaksanaan beberapa urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintah daerah.

Kabupaten Batola sudah mengalokasikan ketentuan mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Alokasi anggaran kesehatan dari APBD 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yaitu 0,75% (0,75 persen) dari total belanja APBD untuk daerah yang APBD nya Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus juta milyar rupiah), sesuai Permendagri Pedoman Penyusunan APBD

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tentunya sesuai dengan prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025. Prediksi dilakukan terhadap indikator makro pembangunan berdasarkan tema RKPD Kab. Barito Kuala tahun 2025 yaitu “MEMANTAPKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA” maka prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
- 2) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Berdasarkan 4 prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, maka ditetapkan target pembangunan Kabupaten Barito Kuala dengan mengacu pada target RKPD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Target dan Capaian Indikator Makro Kabupaten Barito Kuala

NO	INDIKATOR MAKRO	2024		2025	2026
		TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	5,02	4,5**	4,7**
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	4,36	4,33*	4,21*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26	3,41	3,8**	3,6**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,84	71,40	71,2**	72**
5	Gini Rasio	0,245	0,272	0,380**	0,370**
6	Intensitas EGRK	62,66	-	-	-

Sumber: * Perubahan RPD Kab. Barito Kuala 2023-2026; ** Rancangan Awal RPJMD Kab. Barito Kuala 2025-2030; LPPD Kab. Barito Kuala 2024

Permasalahan yang diperkirakan muncul dari prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.* Masalah yang menyebabkan masih rendahnya konektivitas dan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala adalah:
 - Tingginya *unit cost* pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan berakibat pada belum optimalnya besaran output pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa.
 - Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk disamping kebutuhan orientasi bisnis properti yang semakin berkembang.
 - Masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana atau utilitas lainnya
- 2) *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah.* Permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala adalah:
 - Meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Selatan, berakibat meningkatnya permintaan dan kebutuhan pangan terutama terhadap bahan pangan pokok.
 - Belum optimalnya perdagangan produk olahan berbahan baku lokal.
 - Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan terhadap perolehan PDRB dalam perekonomian Barito Kuala. Sementara PDRB yang bergantung pada sektor primer (usaha hulu) tanpa pengembangan sektor skunder (usaha hilir) berakibat terhadap akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum
- 3) *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional.* Permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Barito Kuala adalah:
 - Capaian pembangunan yang tergambar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada peringkat 13 dari 13, atau paling bawah di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2024, meskipun sudah menyandang status “Tinggi”
 - Capaian indikator makro Usia Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020 berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di tahun 2024, dengan selisih lebih baik 0,03 Tahun dari Hulu Sungai Utara
 - Rata-rata lama sekolah berada pada peringkat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan di

tahun 2024, berada di atas Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kotabaru.

- Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi terutama pencemaran air yang berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, salah satunya adalah masih banyaknya pemanfaatan jamban sebagai sarana sanitasi masyarakat yang berpengaruh pada kualitas air sungai, yang mana masih menjadi sumber air masyarakat
- 4) *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani*. Permasalahan yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum yang termasuk dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani di Kabupaten Barito Kuala adalah:
- Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap lembaga yang memberikan pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan.
 - Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 - Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 - Rotasi pegawai yang terjadi menyebabkan penyusunan kegiatan perencanaan di lingkungan SKPD seringkali mengalami penyesuaian ulang karena kapasitas pegawai yang menangani pengelolaan perencanaan tidak selalu sama

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Permasalahan Strategis Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa permasalahan yang dihadapi yang mungkin saja mempengaruhi proses SKPD dalam mencapai target kinerjanya, seperti sebelumnya telah dibahas pada subbab Faktor Penghambat Kinerja SKPD.

- a) Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, selain karena cakupan area yang memiliki skala besar, juga kendala proses administrasi pengadaan dan pengerjaan fisik yang cukup panjang menyebabkan realisasi kegiatan berbasis infrastruktur lambat.
- b) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dari sisi penjagaan kualitas cemaran air dikarenakan masih banyak cemaran yang diterima di sungai-sungai, selain daripada limbah perkebunan, juga karena perilaku sebagian masyarakat yang masih memanfaatkan sungai sebagai sarana sanitasi (jamban)
- c) Pada sektor pertanian dan perkebunan, selain masih kurangnya pemutahiran teknologi pertanian guna meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, juga masih minimnya diversifikasi produk yang lebih luas guna meningkatkan nilai akhir dari sebuah produk pertanian maupun perkebunan. Kebanyakan produk pertanian maupun perkebunan yang dihasilkan hanya dijual dan dipasarkan dalam bentuk asalnya saja tanpa adanya pengolahan yang memungkinkan penambahan nilai jual. Ini juga berlaku pada sektor peternakan dan perikanan.
- d) Indeks Pembangunan Manusia/IPM di Kabupaten Barito Kuala menjadi yang terendah dari semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, hal ini karena masih rendahnya peningkatan komponen penyusun IPM terutama Usia Harapan Hidup dan Angka Harapan Sekolah.

- e) Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan, termasuk belum meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan antar wilayah di Barito Kuala.
- f) Masih rendahnya jumlah UMKM dan IKM di Barito Kuala yang aktif sehingga belum memberikan peran yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian di Barito Kuala, dimana sektor industri kreatif di Kabupaten Barito Kuala masih didominasi usaha perorangan.
- g) Masih rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan yang diperlukan oleh pangsa kerja. Saat ini tenaga kerja yang ada mayoritas adalah tenaga kerja pada sektor pertanian.
- h) Adanya rencana efisiensi anggaran atas Instruksi Presiden No.I / 2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan SKPD terpaksa direncanakan ulang untuk memenuhi syarat-syarat efisiensi anggaran.
- i) Permasalahan administrasi kegiatan, terutama yang terkait dengan keuangan kurang dipahami SKPD sehingga banyak kegiatan sejatinya sudah terlaksana namun proses penyelesaian keuangannya tertunda.
- j) Minimnya SDM ASN di beberapa SKPD maupun Kecamatan sehingga banyak kegiatan baik yang bersifat administratif maupun kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat tidak terlaksana dengan maksimal.
- k) Beberapa sarana prasarana pendukung kegiatan di SKPD, terutama yang berhubungan dengan pelayanan ke masyarakat sudah ada yang tidak layak pakai, dan untuk pemugaran maupun pembaruan sarana prasarana membutuhkan anggaran lebih yang seringkali tidak menjadi prioritas.
- l) Proses perencanaan kerja di SKPD masih banyak yang belum maksimal. Proses perencanaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini selain karena minimnya SDM yang betul-betul memahami proses perencanaan, konflik kepentingan di internal SKPD dan juga proses waktu pelaksanaan kegiatan perencanaan yang seringkali singkat juga menyebabkan proses perencanaan kerja di SKPD tidak maksimal.

2.3.3 Transisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Terbaru

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dimana pada tahun ini berlaku perubahan rencana pembangunan baik dalam skala panjang (20 Tahunan) dan skala menengah (5 Tahunan). Kebijakan Pemerintah Pusat yang menyeragamkan periodisasi perencanaan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota baik itu untuk skala panjang maupun menengah, menyebabkan beberapa daerah baik Provinsi, Kota, sampai Kabupaten di Indonesia mengalami periode kekosongan kepala daerah yang digantikan sementara dengan Penjabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan ini kemudian mempengaruhi struktur penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, karena pada saat kepala daerah dipegang oleh Penjabat, tidak ada visi-misi baru karena itu hanya bisa digagaskan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari sinilah lahir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang mana menjadi substitusi dari RPJMD untuk Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah.

Bagi Kabupaten Barito Kuala, tahun 2025 adalah transisi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Hal ini terjadi karena Kepala Daerah definitif Barito Kuala sebelumnya berakhir di tahun 2022, dan selama rentang 2023 hingga Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah terpilih yang menjabat dari 2025 hingga 2030, Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Bupati yang akhirnya melahirkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026.

Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala untuk menjabat dari 2025 hingga 2030 menyebabkan proses transisi dari RPD 2023-2026 menuju RPJMD 2025-2029 yang disusun berdasar visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Transisi dari RPD 2023-2026 kepada RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.79
Transisi RPD 2023-2026 kepada RPJMD 2025-2029 Kabupaten Barito Kuala

Tujuan RPD 2023-2026	Tujuan RPJMD 2025-2029	Misi RPJMD 2025-2029
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (Tujuan 1)	Meningkatkan Investasi Strategis dan Pengembangan Kawasan Industri	Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri Berbasis Inovasi (Misi 2)
	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM	
	Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat	
	Meningkatkan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Mengembangkan Konektivitas Wilayah–Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara (Misi 3)
	Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu	
	Membangun Infrastruktur Pendukung IKN	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana (Tujuan 2)	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (Misi 5)
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani (Tujuan 3)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital	Membangun Kualitas Pelayanan Publik melalui Pendidikan Unggul, Kesehatan Komprehensif, dan Tata Kelola Pemerintahan Digital (Misi 4)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan 4)	Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan	Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur (Misi 1)
	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Religius serta Pelestarian Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala	

Sumber: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGANDAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pemerintahan Daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada Awalnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek penting, Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan mengakibatkan penyesuaian kebijakan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, walaupun di dalam Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberi kesempatan selama maksimal 5 tahun untuk menyesuaikan.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, akan diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 diprioritaskan sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan

- Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sesuai dengan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memaastikan kesesuaian penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita presiden dan wakil presiden kedalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 dan perubahan APBD tahun 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

- 1. Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan
- 2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
- 4. Pengendalian Inflasi di Daerah
- 5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- 6. Dukungan swasembada pangan
- 7. Pengembangan industry kerajinan, memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan indsutri kerajinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
- 2. Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik
- 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 3. Meningkatkan Petumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah
- 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Melayani Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ketahanan pangan.

Target Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Barito Kuala

NO	INDIKATOR MAKRO	2024		2025 (TARGET)	
		TARGET	REALISASI	SEBELUM	SESUDAH
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	5,02	4,5	4,3 – 4,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	4,36	4,33	3,41 - 4,25

NO	INDIKATOR MAKRO	2024		2025 (TARGET)	
		TARGET	REALISASI	SEBELUM	SESUDAH
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26	3,41	3,8	3,39
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,84	71,40	71,2	72
5	Gini Rasio	0,245	0,272	0,380	0,3 – 0,289
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,66	64,02	66,36	66,57
7	Penurunan Intensitas GRK	-	-	-	74,97
8	Indeks Daya Saing Daerah	-	3,77	-	3,22- 3,54

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2025 diselaraskan dengan fokus pembangunan provinsi Kalimantan Selatan dan fokus pembangunan Nasional serta penyesuaian visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Untuk pelaksanaan program MBG Kabupaten Barito Kuala telah menyiapkan lahan yg tersebar di 3 Kecamatan yaitu : Marabahan, Alalak dan Tabunganen. Untuk prioritas nasional seperti penurunan stunting Kabupaten Barito Kuala terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam penurunan angka stunting di Barito Kuala. Penguatan UMKM dan ketahanan pangan juga merupakan salah satu program prioritas bupati yaitu pembentukan kawasan UMKM Baiman, Pupuk Bersubsidi dan pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk dijadikan area pertanian.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan dinamika kebijakan keuangan nasional yang berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah terutama yang berkenaan dengan pos pendapatan daerah dari dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, DID dan pos dana transfer lainnya, maka kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 tetap mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah
3. Meningkatkan koordinasi antara pusat – daerah untuk pengelolaan Dana Perimbangan dan Non Perimbangan
4. Meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat untukmemenuhi kewajiban pajak dan retribusi
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset secara profesional
6. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
7. Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut (pajak/retribusi) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

A. Kebijakan Belanja Daerah

Guna alokasi anggaran dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, belanja daerah tahun 2025 akan diprioritaskan pada belanja wajib dan mendesak dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karena itu kebijakan belanja tahun

2025 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Fokus pada program/kegiatan pembangunan wajib dan mendesak dalam rangka optimalisasi pendapatan
2. Memantapkan beberapa ruas jalan strategis yang menghubungkan antar wilayah dengan permasalahan dan potensi yang memerlukan intervensi pembangunan guna meningkatkan perkembangan wilayah Pembangunan secara komprehensif
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kecamatan termasuk melanjutkan pembangunan Klinik Utama Setara
4. Memperbanyak desa mandiri yang didukung oleh Bumdes dan Bumdesma aktif.
5. Memenuhi penyesuaian *mandatory budget* Urusan Pendidikan (20%), infrastruktur (40%) (mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022), Inspektorat (0,75%), dan Peningkatan Kompetensi ASN (0,16%).

Pada Perubahan RKPD ini juga penyesuaian visi, misi dan prioritas bupati terpilih mulai dilaksanakan serta telah mengakomodir indikator-indikator Rancangan Awal RPJMD 2025 – 2029. Untuk pelaksanaan program prioritas nasional (Asta Cita) Kabupaten Barito Kuala telah mengakomodir kegiatan untuk penurunan stunting, peningkatan kualitas UMKM dan Ketahanan Pangan.

B. Analisis Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Perubahan Anggaran Tahun 2025, maka dibuat data terkait pertumbuhan pendapatan, persentase sumber pendapatan, dan kinerja realisasi pendapatan. Sehingga proyeksi yang disusun menjadi lebih realistis dan penuh perhitungan yang logis, analitik dan sistematis.

1) Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama dua tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel. Jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 maka terlihat pertumbuhannya sebesar 5,84%. Tren pertumbuhan positif ini dimana pendapatan pada jenis pendapatan transfer Pemerintahan Pusat merupakan faktor utama yang penyebab kenaikan trens.

Pendapatan asli daerah pada tahun TA. 2024 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,08%. Pembaharuan aturan pemungutan pendapatan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PAD.

Jika dilihat dari perkembangan kenaikan pendapatan riilnya maka terlihat bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini mengikuti perkembangan pendapatan nasional sehubungan jenis pendapatan yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah adalah pendapatan dari dana transfer Pemerintah Pusat diikuti Pendapatan Asli Daerah.

2) Proporsi Pendapatan Daerah

Gambaran tentang proporsi sumber pendapatan dilakukan untuk

mengetahui kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap pendapat keseluruhan. Melalui data ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyusun rencana kerja daerah.

Di bawah ini disajikan Tabel Proporsi Pendapatan Daerah:

Tabel 3.1 (TC – 20)
 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Uraian	REALISASI APBD	REALISASI APBD	PROYEKSI APBD P	PROYEKSI	PROYEKSI
	2023 (audited)	2024 (Un audited)	2025	2026	2027
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.380.866.592	112.617.357.440	136.800.616.893	145.068.181.807	153.499.272.985
Pajak daerah	28.953.674.232	30.822.327.264	65.028.850.000	71.796.414.914	79.268.281.608
Retribusi Daerah	3.648.113.310	2.977.143.727	3.105.471.000	3.105.471.000	3.105.471.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.892.720.398	11.516.297.184	11.892.720.398	13.392.720.398	14.351.944.882
Lain-lain PAD yang Sah	52.886.358.652	67.301.589.265	56.773.575.495	56.773.575.495	56.773.575.495
Pendapatan Transfer	1.418.780.185.035	1.801.965.643.220	1.549.892.100.000	1.549.892.100.000	1.644.411.661.500
Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat	1.286.165.274.506	1.658.977.093.232	1.454.147.100.000	1.454.147.100.000	1.548.666.661.500
Pendapatan Transfer Antar Daerah	132.614.910.529	142.988.549.988	95.745.000.000	95.745.000.000	95.745.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.635.000	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	89.635.000	-	-	-	-
Jumlah pendapatan	1.516.250.686.627	1.914.583.000.660	1.686.692.716.893	1.694.960.281.807	1.797.910.934.485

3) Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2025 diperkirakan turun sebesar 12 % jika dibandingkan dengan APBD TA.2024. Namun kenaikan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah yang naik sebesar 21 %. Adapun pada kelompok pendapatan transfer Pemerintahan Pusat dan lain- lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan turun seperti tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyesuaian dana perimbangan dari dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
5. Peningkatan dana penyesuaian dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, seperti dana untuk desa dan dana untuk kelurahan.
6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

C. Analisis dan Perhitungan Pengeluaran Wajib Daerah

Sebelum menghitung proyeksi pengeluaran wajib daerah, berikut rata- rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah selama dua tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tren pertumbuhan belanja yang wajib disediakan daerah. Di bawah ini disajikan tabel realisasi belanja 2 tahun sebelumnya dan proyeksi perhitungan belanja 3 tahun ke depan

Tabel 3.2 (TC-21)
Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja Kabupaten Barito Kuala Tahun

Uraian	REALISASI APBD	REALISASI APBD	PROYEKSI APBD P	PROYEKSI	PROYEKSI
	2023 (audited)	2024 (Un audited)	2025	2026	2027
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.015.788.222.154	1.249.822.757.265	1.294.986.858.805	1.224.685.056.966	1.251.258.950.356
Belanja Pegawai	597.465.705.627	721.592.920.259	784.428.867.080	885.796.446.359	912.370.339.750
Belanja Barang dan Jasa	355.946.017.093	448.377.642.261	425.103.459.725	234.093.374.955	234.093.374.955
Belanja Hibah	58.063.419.640	78.535.761.402	81.357.910.000	96.649.229.063	96.649.229.063
Belanja Bantuan Sosial	4.313.079.794	1.316.433.343	4.096.622.000	8.146.006.588	8.146.006.588
BELANJA MODAL	319.480.087.021	364.967.168.093	275.747.948.793	373.891.234.106	373.891.234.106
Belanja Modal Tanah	1.764.136.373	8.641.969.686	2.907.548.340	9.887.186.231	9.887.186.231
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.730.827.143	813.879.380	26.890.335.887	33.636.683.235	33.636.683.235
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.496.171.237	142.482.443.020	87.492.033.083	149.028.277.701	149.028.277.701
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	151.926.623.257	208.499.077.592	154.778.752.483	177.542.641.921	177.542.641.921
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.019.078.919	423.108.025	396.579.000	513.745.018	513.745.018
Belanja Modal Aset Lainnya	1.543.250.092	4.106.690.390	3.282.700.000	3.282.700.000	3.282.700.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.546.266.050	360.250.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	1.546.266.050	360.250.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
BELANJA TRANSFER	238.038.642.266	280.386.045.450	259.594.512.337	259.594.512.337	259.594.512.337
Belanja Bagi Hasil	2.928.080.492	3.260.178.705	6.823.810.137	6.823.810.137	6.823.810.137
Belanja Bantuan Keuangan	235.110.561.774	277.125.866.745	252.770.702.200	252.770.702.200	252.770.702.200
Jumlah Belanja	1.574.853.217.491	1.895.536.220.808	1.840.329.319.935	1.868.170.803.409	1.894.744.696.800

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2024, belanja tahun 2025 diproyeksikan naik. Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 81.3 Milyar Rupiah. Hibah ini diperuntukkan kepada Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda), untuk lembaga pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi lainnya.

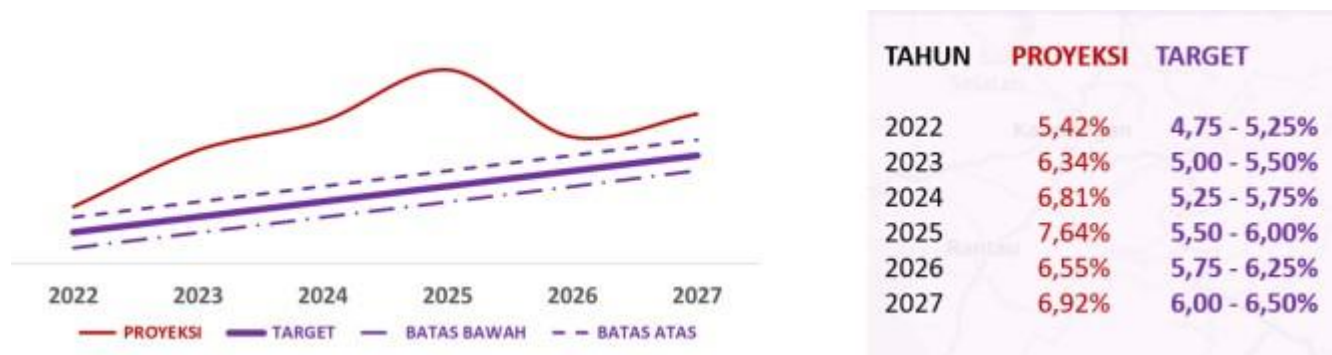
Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 4 Milyar Rupiah. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah seperti bedah rumah, beasiswa untuk siswa tidak mampu, keluarga veteran dan lain-lainnya.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar 10 milyar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penurunan belanja modal mengindikasikan masih perlunya prioritas ulang kegiatan infrastruktur, terutama yang mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi local, selain itu penurunan PAD mendorong pentingnya penguatan inovasi pendapatan daerah

Tabel 3.3 (TC-22)
 Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala Tahun

Uraian	REALISASI APBD	REALISASI APBD	PROYEKSI APBD P	PROYEKSI	PROYEKSI
	2023 (audited)	2024 (Un audited)	2025	2026	2027
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	287.620.555.052	221.164.744.955	221.164.744.955	80.000.000.000	96.833.762.315
Pencairan Dana Cadangan					
Penerimaan Kembali Pinjaman Angsuran Berjangka					
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	7.646.720.767	7.540.412.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Jumlah I (Penerimaan Pembiayaan)	295.267.275.819	228.705.156.955	229.164.744.955	88.000.000.000	104.833.762.315
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000				
Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000		8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Pinjaman Angsuran Berjangka		7.581.681.000			
Jumlah II (Pengeluaran Pembiayaan)	15.500.000.000	7.581.681.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
Total PEMBIAYAAN NETO (I-II)	279.767.275.819	221.123.475.955	221.164.744.955	80.000.000.000	96.833.762.315

Gambar Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2027



Sumber : Kajian indikator makro Kabupaten Barito Kuala 2023

Berdasarkan hasil proyeksi, target Pertumbuhan Ekonomi yang direkomendasikan adalah 5,00% untuk tahun 2022, 5,25% tahun 2023, 5,50% tahun 2024, 5,75% tahun 2025, 6,00% tahun 2026 dan 6,25% tahun 2027

PDRB Lapangan Usaha (dari Barito Kuala dalam angka 2023)	2022	2023	2024*
	3,59	4,07	5,02
Pertanian	0,93	2,30	4,80
Pertambangan	4,10	3,53	0,69
Industri	1,69	0,82	3,94
Listrik & Gas	5,75	6,06	4,60
Air	5,32	5,13	3,96
Konstruksi	6,89	6,88	5,89
Perdagangan	6,92	6,65	4,36
Transportasi	4,36	4,11	6,29
Akomodasi & Makan Minum	8,47	6,39	8,44
Infokom	6,73	6,33	5,80
Jasa Keuangan	-0,87	7,17	5,12
Real Estate	5,79	7,56	5,85
Jasa Perusahaan	7,26	5,97	5,66
Administrasi Pemerintahan	0,32	2,63	4,18
Jasa Pendidikan	5,07	3,80	5,70
Jasa Kesehatan	5,46	5,83	4,76
Jasa Lainnya	6,09	4,80	6,29

PDRB Pengeluaran	2022	2023*	2024
	3,59	4,07	5,02
Konsumsi Rumah Tangga	5,46	4,91	6,24
Konsumsi LNPRT	4,32	7,81	17,83
Konsumsi Pemerintah	-1,59	3,38	6,22
Investasi	6,19	4,9	4,7
Perubahan Inventori	-	-	-
Net Ekspor-Impor	-	-	-

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/167/KUM/2023 tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026 tema RKPD tahun 2025 adalah Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan SDM sesuai hasil konsultasi public tanggal 17 Januari 2024 disepakati tanpa mengubah makna memperbaiki narasi tema RKPD 2025 menjadi “**MEMANTAPKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**”.

Penyusunan tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu kepada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 – 2029

Visi Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas"**

Berikut adalah misi Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 yang ditetapkan untuk mewujudkan visi daerah:

1. Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur.
2. Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri Berbasis Inovasi.
3. Mengembangkan Konektivitas Wilayah–Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara.
4. Membangun Kualitas Pelayanan Publik melalui Pendidikan Unggul, Kesehatan Komprehensif, dan Tata Kelola Pemerintahan Digital
5. Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan dan sasaran yang telah dihasilkan dari serangkaian metode *cascade*, dikaji lagi dengan berbagai ketersediaan sumber data, program kinerja dan kemampuan fiskal daerah untuk penetapan target setiap indikator tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.1
Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

No	MISI	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur	Penguatan karakter berbasis nilai-nilai religious dan budaya melalui berbagai kebijakan dan program yang lebih sistematis
2	Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri Berbasis Inovasi	Peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, menciptakan peluang kerja yang lebih luas, serta mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala
3	Mengembangkan Konektivitas Wilayah – Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara	Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan efisiensi distribusi barang dan jasa.
4	Membangun Kualitas Pelayanan Publik melalui Pendidikan Unggul, Kesehatan Komprehensif, dan Tata Kelola Pemerintahan Digital	Meningkatkan pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Dengan digitalisasi yang lebih luas, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan dapat terus berkembang secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.
5	Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperkuat ketahanan ekonomi yang lebih baik di wilayah perdesaan, dengan pemberdayaan masyarakat untuk terus didorong dalam menciptakan lingkungan yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

Agenda Pembangunan Nasional 2025-2045 adalah:

- 1. Mewujudkan Transformasi Sosial
- 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
- 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
- 4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimimpinan Indonesia
- 5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilyahan yang merata dan berkeadilan
- 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas nomor 2 tahun 2024 tentang Rnacngan Rencana Kerja Pememerintah tahun 2025 menetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi diangka 5,3 s.d. 5,6, Indeks Modal Manusia diangka 0,56, Nilai Tukar Petani diangka 113 s.d. 115, Nilai Tukar Nelayan diangka 104 s.d. 105, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka diangka 4,5 s.d. 5,0, Rasio Gini diangka 0,379 s,d, 0,382, Tingkat Kemiskinan diangka 7,0 s,d, 8,0, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemrintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sesuai dengan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memaastikan kesesuaian penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita presiden dan wakil presiden kedalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 dan perubahan APBD tahun 2025.

Sinkronisasi Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional dengan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih antara lain :

NASIONAL	DAERAH
1. Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan	1. Insentif kaum mesjid dan guru TPA 2. Layanan Mobil Keliling 3. Kartu Beasiswa Batola 4. Kartu siap Kerja Batola
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	1. UMKM Baiman

3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	1. Desa Peduli Stunting 2. Simfoni PPA 3. UMKM Baiman 4. Tanah Bengkok 5. Pupuk Subsidi dan ATM beras 6. Batola Respon Cepat
4. Pengendalian Inflasi di Daerah	1. Pupuk Subsidi dan ATM beras
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	1. Menciptakan Kawasan Industri Khusus 2. UMKM Baiman 3. Jalanan Beton
6. Dukungan swasembada pangan	1. Pupuk subsidi dan ATM Beras 2. Tanah Bengkok
7. Pengembangan industry kerajinan, memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan indsutri kerajinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Menciptakan Kawasan Industri Khusus 2. UMKM Baiman

Sumber : Ranwal RPJMD Barito Kuala dan olahan

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kalsel Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tema RKPD tahun 2025 adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan” dengan prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu:

- 1) Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas Dan Energi Berkelanjutan
- 2) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
- 3) Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Ekonomi
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Dan Investasi
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan visi dan misi sebagai berikut.

Visi adalah KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan)SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA)

Misi terbagi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi PekertiLuhur.
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
- 3) Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
- 4) Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
- 5) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat KetahananBencana.

3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

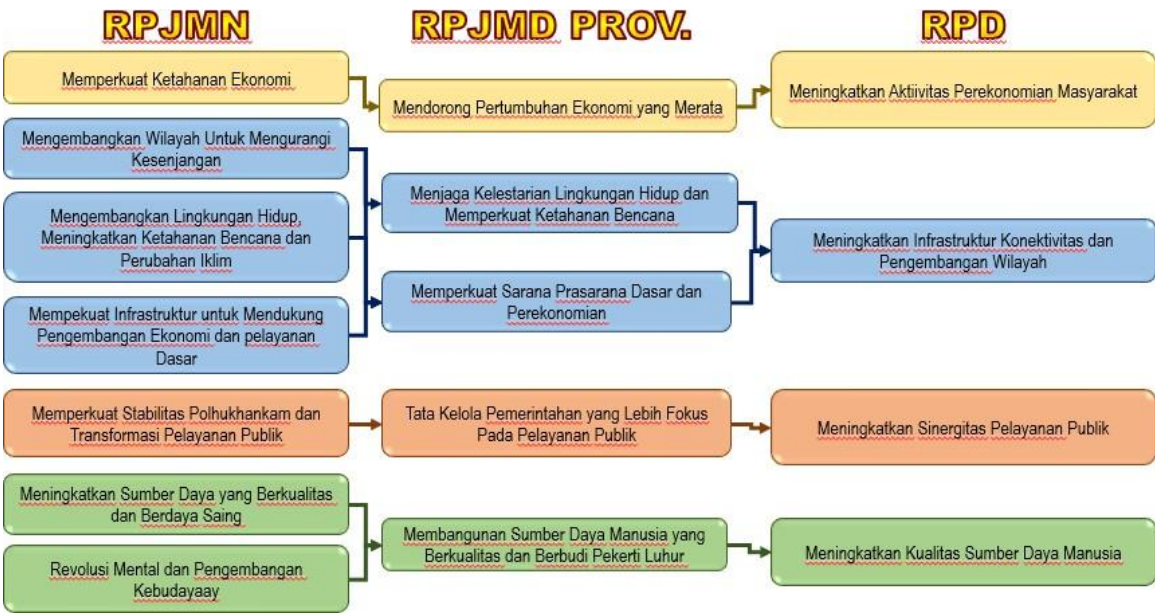
Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tabel 4.2 Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 akan difokuskan

TEMA PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah
	3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional
	4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2023-2026

Gambar 4.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Barito Kuala



Sumber : RPD Bappelitbang Kab. Barito Kuala Tahun 2023-2026

Berikut disajikan tabel Sinkronisasi Program RKPD Kabupaten BaritoKuala Tahun 2025 yang mendukung Prioritas Daerah:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Barito Kuala Tahun2025
Yang Mendukung Prioritas Daerah

NO	TUJUAN	PROGRAM	SKPD
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah			
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dpupr
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dpupr
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dpupr
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dpupr
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dpupr
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dpupr

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dpupr
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dpupr
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dpupr
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Disperkim
Program Pengembangan Kebudayaan	Disporabudpar
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disporabudpar
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporabudpar
Program Pemasaran Pariwisata	Disporabudpar
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan Tph
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan Tph
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan Tph
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan Tph
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distan Tph
Program Penyuluhan Pertanian	Distan Tph
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Diskoperindag
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diskoperindag
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Diskoperindag
Program Pengembangan Umkm	Diskoperindag
Program Perizinan Usaha Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbunak
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disbunak
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
Program Kawasan Permukiman	Disperkim
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Disperkim
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dpmd

		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dpmd
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bp2rd
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Disnakertrans
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Diskoperindag
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Diskoperindag
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskoperindag
		Program Promosi Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbunak
		Program Penyuluhan Pertanian	Disbunak
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Penanganan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dlh
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dlh
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dlh
		Program Pengelolaan Sampah	Dlh
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dlh
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dlh
		Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Penanggulangan Bencana	Bpbd
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kapabel, Akuntabel Dan Melayani	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh Skpd
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Program Koordinasi Dan Sin Kronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang

Program Penelitian Dan Pengembangan	Bappelitbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disbunak
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Seluruh Skpd
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat
Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bkpp
Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
Program Dukungan Pelaksanaan Dan Tugas Fungsi Dprd	Set Dprd
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinkes
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol Pp
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol Pp
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dkpp
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dkpp
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dkpp
Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dpmd
Program Penataan Desa	Dpmd
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Diskominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Diskominfo

		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pembinaan Perpustakaan	Disperpusip
		Program Pengelolaan Arsip	Disperpusip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Disperpusip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Disperpusip
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disperpusip
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dppkbp3a
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pengendalian Penduduk	Dppkbp3a
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporabudpar
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporabudpar
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Disporabudpar
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Diskoperindag
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskoperindag
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskoperindag
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bkpp
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Dukungan Pelaksanaan Dan Tugas Fungsi Dprd	Set Dprd

		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol Pp
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol Pp
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dkpp
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dkpp
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dkpp
		Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dpmd
		Program Penataan Desa	Dpmd
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
		Program Pengelolaan Pelayanan	Dishub
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Diskominfo
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Pembinaan Perpustakaan	Disperpusip
		Program Pengelolaan Arsip	Disperpusip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Disperpusip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Disperpusip
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disperpusip
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan

		Program Pembinaan Dan Pengawasan PemerintahanDesa	Seluruh Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia UntukMendukung Pembangunan Berkelanjutan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp)Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dppkbp3a
		Program Pengarusutamaan Gender Dan PemberdayaanPerempuan	Dppkbp3a
		Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pengendalian Penduduk	Dppkbp3a
		Program Pengembangan Kapasitas Daya SaingKepemudaan	Disporabudpar
		Program Pengembangan Kapasitas Daya SaingKeolahragaan	Disporabudpar
		Peningkatan Kapasitas Organisasi KepramukaanTingkat Daerah	Disporabudpar
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok DanBarang Penting	Diskoperindag
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk DalamNegeri	Diskoperindag
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskoperindag

Sumber: RPD Kab. Barito Kuala tahun 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, juga menjadi periode keempat dari RPJPD 2005-2025. Pembangunan pada tahun 2025 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 diarahkan pada upaya mewujudkan tema “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

Tahun 2025 juga merupakan tahun peralihan antara RPJPD Tahun 2005 – 2025 ke RPJPD tahun 2025 – 2045 dan RPD Tahun 2023 – 2026 ke RPJMD tahun 2025 – 2029. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri terkait dampak dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga dalam penyusunan dokumen perubahan RKPD tahun 2025 agar mulai menyesuaikan dengan visi, misi, dan arah kebijakan serta program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

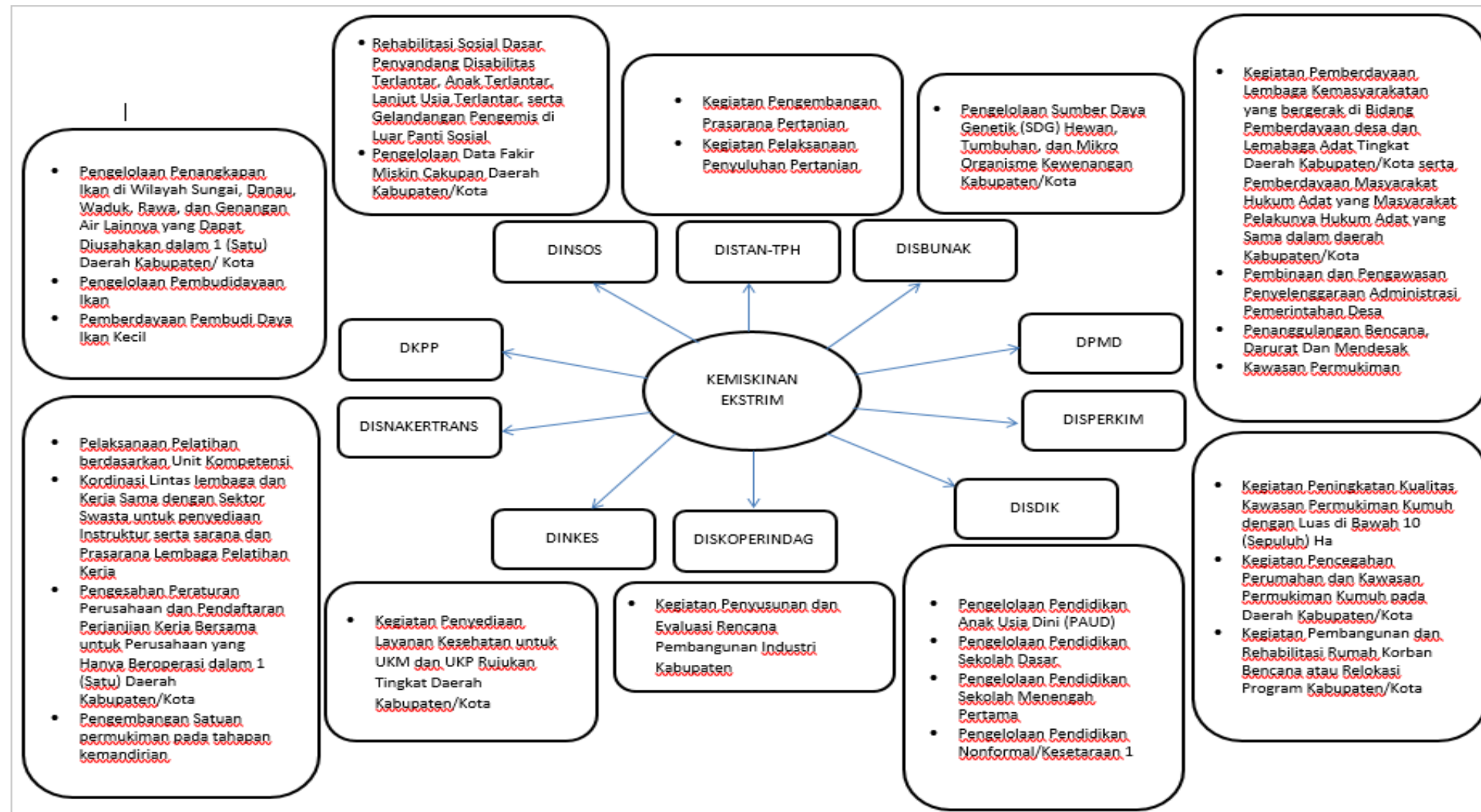
Perubahan program dan kegiatan tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan hasil evaluasi Triwulan I, perubahan proyeksi fiskal daerah, serta arah kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dan program prioritas nasional

Sesuai dengan Tema diatas Pembangunan tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala ditetapkan paket strategis sebagai kegiatan prioritas pembangunan diantara lain:

1. Pembangunan Gedung Inspektorat
2. Pengembangan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan (lanjutan)
3. Pembangunan Puskesmas Anjir Pasar
4. Pembangunan Puskesmas Mandastana
5. Pembangunan Depo Arsip

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tetap berfokus pada pencapaian indikator Makro dan Program Strategis yaitu Penurunan Angka Stunting, Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Pembangunan Desa, Penataan Kota dan Program Strategis lainnya. Dibawah ini di sampaikan program kegiatan antar SKPD terkait Prgoram tersebut.

CASCADING KEMISKINAN EKSTRIM



ASERSI KEMISKINAN EKSTREM

A. PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN

No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
1	DINAS SOSIAL	Penyediaan alat bantu (orang)	53	183.963.177,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan penyandang disabilitas yang mandiri. (kursi roda 3 buah, rumah singgah pemberian makanan, layanan rujukan kebutuhan (odgj, terlantar)
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (orang)	195	162.789.585,00	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan penyandang disabilitas yang mandiri
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (KK)	10.180	487.302.476,00	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid Persentase Keluarga Penerima Manfaat KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha dan keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (KK)	9.591	1.245.715.887,00	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid Persentase Keluarga Penerima Manfaat KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha dan keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan
	JUMLAH		20.019,00	2.079.771.125,00		

No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
2	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Dana BOP PAUD	420 Satuan Pendidikan	6.396.780.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi Minimal B Sebanyak 34.37 Persen
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13 Unit	1.851.989.850,00	Kab. Barito Kuala, Kec. Anjir Pasar, Kec. Mandastana, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Belawang, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen

					Cerbon, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Barambai,	
		Penyediaan Biaya Prosenil Peserta Didik (Beasiswa)	2 Peserta Didik	485.000.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Penyediaan Dana BOS SD	274 Satuan Pendidikan	29.427.900.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600 Paket	338.940.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	6 Ruang	1.285.092.000,00	Kab. Barito Kuala, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Alalak	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit	1.015.700.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Belawang, Kecamatan Alalak, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Wanaraya	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	52 Ruang	9.195.539.800,00	Kab. Barito Kuala, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Tamban, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Bakumpai	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Terakreditasi Minimal B Sebanyak 72.99 Persen
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Unit	1.637.116.700,00	Kab. Barito Kuala, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Tabunganen	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Rehabilitasi Ruang Kelas	49 Ruang	9.260.302.000,00	Kab. Barito Kuala, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Belawang, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Tamban, Kecamatan Barambai, Kecamatan Alalak	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	9 Unit	873.692.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (Beasiswa)	2 Peserta Didik	505.000.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Penyediaan Dana BOS SMP	62 Satuan Pendidikan	10.482.240.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen

		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5 Ruang	1.281.748.400,00	Kab. Barito Kuala, Kecamatan Alalak, Kecamatan Tabunganen	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	645 Paket	340.140.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi Minimal B Sebanyak 91.94 Persen
		Penyediaan Dana BOP Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	1.960.430.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal Terakreditasi Minimal B Sebanyak 77.88 Persen
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Kesetaraan (Penyelenggaraan Paket & Kursus)	216 Peserta Didik	318.489.400,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan/ Non Formal Terakreditasi Minimal B Sebanyak 77.88 Persen
	JUMLAH		220	76.656.100.150,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemasangan implan, IUD, MOW (Medis Operasi Wanita) dan MOP (Medis Operasi Pria).	478	156.587.000,00	Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB MKJP	Menurunnya unmet need (kebutuhan ber KB yang belum terlayani)
	JUMLAH		478	156.587.000,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
4	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pengembangan padi unggul siam madu 2.000 Ha	20.000 Kg	395.039.000,00	Bantuan Benih Padi	Peningkatan Produksi Padi
		Pengembangan 1 ha cabai rawit dan 1 Ha cabai besar	2 paket saprodi	15.377.400,00	Bantuan paket Saprodi	Peningkatan Produksi Cabai
		Kegiatan Optimasi Lahan 175 Ha untuk pembelian Dekomposer 550 liter	550 Liter	53.323.600,00	Bantuan Dekomposer	Peningkatan Produktivitas Tanaman
		Kegiatan Optimasi Lahan 175 Ha untuk pembelian Nutrisi Tanah 550 liter	550 Liter	60.500.000,00	Bantuan Nutrisi Tanah	Peningkatan Produktivitas Tanaman
		Sosialisasi Optimasi Lahan	2 poktan	3.037.500,00	Pengetahuan/pemahaman Petani bertambah	Peningkatan Produktivitas Tanaman
		Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Pengembangan Lahan	8 poktan	6.576.800,00	Pengembangan Lahan Pertanian	Peningkatan Produktivitas

		Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura pada 101.358 Ha Lahan Pertanian	20 poktan	155.301.815,00	Pengendalian OPT dan DPI terhadap tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Luas Panen
		PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)	3.000 Ha	108.000.000,00	Premi Asuransi Usaha Tani	TerCovernya Lahan Padi
	JUMLAH		30	797.156.115,00		

No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
5	DINAS KESEHATAN	Target sebanyak 114.162 orang	114.162	35.227.038.000,00	Pembayaran Premi PBI dan Bantuan Premi Peserta Mandiri Kelas 3	Terbayarnya Premi PBI dan Bantuan Premi Peserta Mandiri Kelas 3
	JUMLAH			35.227.038.000,00		

	TOTAL		134.909	114.916.652.390,00		
--	--------------	--	----------------	---------------------------	--	--

B. MENAMBAH PENDAPATAN

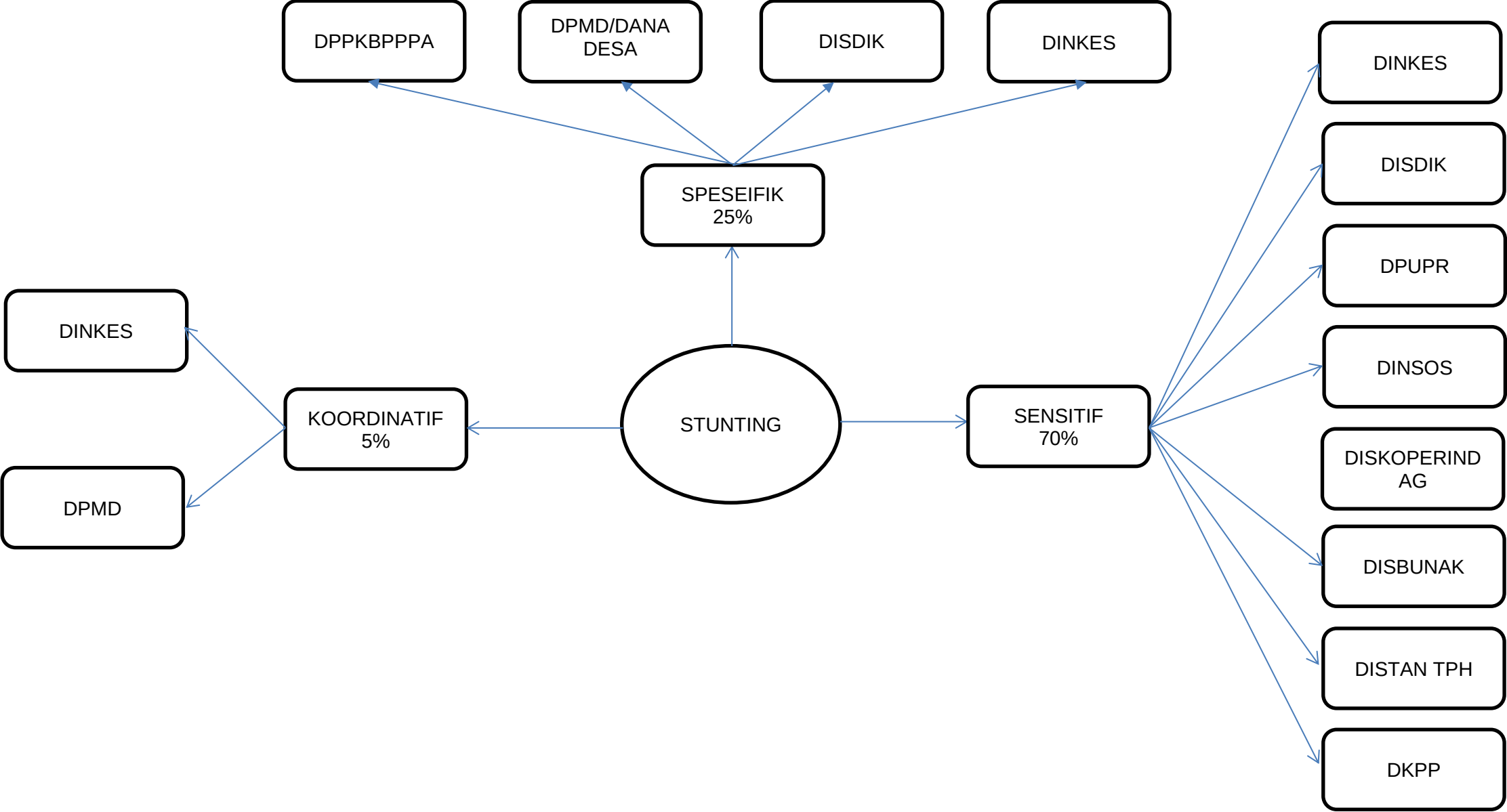
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan jaringan irigasi	390	780.000.000,00	Jumlah yang melaksanakan pekerjaan pembersihan jaringan irigasi	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin
	JUMLAH		390	780.000.000,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelatihan Keterampilan Non Institusional PHP Kecamatan Belawang (16 Orang)	16	71.535.700,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Non Institusional Keterampilan Otomotif Kec. Wanaraya (16 Orang)	16	80.788.500,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Non Institusional Keterampilan Otomotif Kec. Tabungan	16	88.834.800,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Keterampilan Institusional OTOMOTIF BLK Barito Kuala	16	82.259.000,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Keterampilan Institusional PROCESSING BLK Barito Kuala	16	59.939.000,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Keterampilan Institusional TIK BLK Barito Kuala	16	72.379.000,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Pelatihan Keterampilan Institusional GARMENT BLK Barito Kuala	16	75.939.000,00	diperolehnya angkatan kerja terlatih dari pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang kerja bagi angkatan kerja yang berakibat menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) serta akan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Yang Belum Terdaftar Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	1000	203.616.000,00	jumlah informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

		Pelatihan Service Elektronik Desa Bantuil Kec. Cerbon	12	15.992.710,00	Jumlah Kepala Keluarga yang dibina (60 Kepala keluarga)	Meningkatnya perkembangan SDM di kawasan Transmigrasi
		Pelatihan Konten Kreator bagi Pemuda untuk 5 Desa di Kawasan Transmigrasi	24	18.551.470,00	Jumlah Kepala Keluarga yang dibina (60 Kepala keluarga)	Meningkatnya perkembangan SDM di kawasan Transmigrasi
		Pelatihan Desain Sablon untuk Perwakilan 5 Desa di Kawasan Trans	24	28.052.945,00	Jumlah Kepala Keluarga yang dibina (60 Kepala keluarga)	Meningkatnya perkembangan SDM di kawasan Transmigrasi
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sudut Kreasi Kemasan ke Unit Pelaksana Teknis Industri (UPTI) Makanan dan Minuman Sidoarjo Privinsi Jawa Timur	1	23.059.250,00	Jumlah Kepala Keluarga yang dibina (60 Kepala keluarga)	Meningkatnya perkembangan SDM di kawasan Transmigrasi
	JUMLAH		1173	820.947.375,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
8	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	600 ekor (ayam buras dan itik petelur)	104.007.000,00	Jumlah ternak ayam buras dan itik petelur yang dialokasikan untuk masyarakat berkategori miskin ekstrim	Jumlah rumah tangga terkategori miskin ekstrim yang mendapatkan bantuan ternak (100 orang)
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10 ekor (kambing)	32.553.500,00	Jumlah ternak kambing yang dialokasikan untuk masyarakat berkategori miskin ekstrim	Jumlah rumah tangga terkategori miskin ekstrim yang mendapatkan bantuan ternak (30 orang)
	JUMLAH		610	136.560.500,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pembinaan dan rakor BUMDESA	195	75.689.916,00	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan BUMDesa	Peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD Desa
		Pendampingan dan monev penyusunan APBDesa	195	45.517.152,00	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan APBDesa	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
	JUMLAH		195	121.207.068,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	143 unit	346.790.145,00	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap untuk peningkatan pendapatan

		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4 unit	164.595.980,00	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pendapatan
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	8 kelompok	19.650.000,00	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil untuk peningkatan pendapatan
	JUMLAH		2	531.036.125,00		
	TOTAL		1.695	2.389.751.068,00		

C. MENGURANGI KANTONG-KANTONG KEMISKINAN

No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
11	DPUPR	Pembangunan sarana air minum beserta jaringan pipa dan sambungan rumah	30	400.000.000,00	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum	Terpenuhi nya kebutuhan dasar masyarakat dalam pelayanan air minum, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana air minum (kesempatan bekerja dilapangan)
		Pembangunan tangki septik individual skala rumah tangga	944	11.948.000.000,00	Jumlah rumah tangga yang terlayani air limbah	Terpenuhi nya kebutuhan dasar masyarakat dalam pelayanan air limbah, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana air limbah (kesempatan bekerja dilapangan)
	JUMLAH		974	12.348.000.000,00		
No	Nama OPD	Aktivitas	Target	Anggaran	Output	Outcome
				(Rp)		
1	2	3	4	6	9	10
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	54 unit	1.641.231.500,00	jumlah rumah yang tidak layak huni yang di perbaiki	Persentase luas penurunan pemukiman kumuh
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.	36	1.701.784.375,00	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh diluar kawasan pe mukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya pada kawasan kumuh
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	40	1.294.960.000,00		persentase Pembangunan dan Rehabilitas Rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
	JUMLAH			4.637.975.881,00		
	TOTAL			16.985.975.881,00		



ASERSI STUNTING

N O	NAMA OPD	KODE PROGRA M	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATA N	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SASARAN	LOKASI
Intervensi Spesifik											
1A	Dinas Kesehatan	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita	1.418.340.000	Balita	Desa
1B	Dinas Kesehatan	01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK	2.107.860.000	Ibu Hamil KEK	Desa
2	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Pertemuan edukasi isi piringku dan Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Remaja Putri (SG)	27.680.550	Remaja Putri	Kabupaten
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2	Bidang Pembangunan	2,02	Sub Bidang Kesehatan	02.02.90	Pencegahan Stunting Desa Dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil	Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil	3.275.479.000	Ibu Hamil	195 Desa

4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2	Bidang Pembangunan	2,02	Sub Bidang Kesehatan	02.02.91	Pencegahan Stunting Desa Dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Balita	Pemberian Makanan Tambahan untuk anak balita	3.580.780.000	Balita	195 Desa
5	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Bina Keluarga Balita KIT Stunting	300.000.000	Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita)	Barito Kuala

Intervensi Sensitif

6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten	10.000.000.000	673 SR	Kec. Anjir Muara, Kec. Anjir Pasar
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah di Kabupaten	11.948.000.000	994 SR	Desa Sungai Telan Kecil, Desa Karya Baru, Desa Tabunganen Pemurus, Desa Tabunganen Kecil, Desa Tabunganen Tengah, Desa

8	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bantuan Stimulan Jamban Sehat	283.009.143	Kepala Keluarga yang masih BABS	Desa
9	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kegiatan Lomba Posyandu dalam mendukung Sosialisasi Stunting	99.952.500	Posyandu	Desa
10	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam penggunaan alat USG di Puskesmas (SG)	63.952.350	Tenaga Kesehatan (Dokter/Bidan)	Kabupaten
11	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pendampingan Tim Ahli (SpA & SPOG) ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal dan neonatal	22.198.800	Tenaga Kesehatan (Dokter/Bidan)	Puskesmas

12	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Gerakan cegah Stunting	18.600.000	Masyarakat	Kabupaten
13	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi	18.600.000	Siswi Sekolah	Sekolah
14	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Penyediaan Media KIE untuk Posyandu Alat Bantu Kader	59.270.000	Kader Posyandu	Posyandu/Desa
15	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Jambore Kader Posyandu tingkat Kabupaten	46.070.000	Kader Posyandu	Kabupaten

16	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengujian laboratorium pangan segar asal tumbuhan	93.997.500	produk pangan yang beredar di pasar tradisional dan produsen sayur	Marabahan , Alalak, Anjir Pasar dan Tamban
17	Dinas Sosial	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi pendataan jika terdapat balita stunting oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	292.200.000	Keluarga Fakir Miskin dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bantuan Sosial	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sosialisasi pemanfaatan hasil olahan produk peternakan	4.934.000	25 orang petani yang termasuk dalam keluarga stunting dan atau rentan stunting	Desa Badandan Kec. Cerbon
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kunjungan lintas desa dalam rangka menunjang antisipasi stunting	23.691.500	Gapoktan, Kelompok Tani	Desa Karang Bunga Kec. Mandastana
20	Dinas Koperasi, Perindustrian &	3.31.02	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	3.31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Pelatihan pembuatan snack anak stunting	8.867.250	20 Orang Keluarga yang memiliki	Kelurahan Lepasn Kecamatan Bakumpai

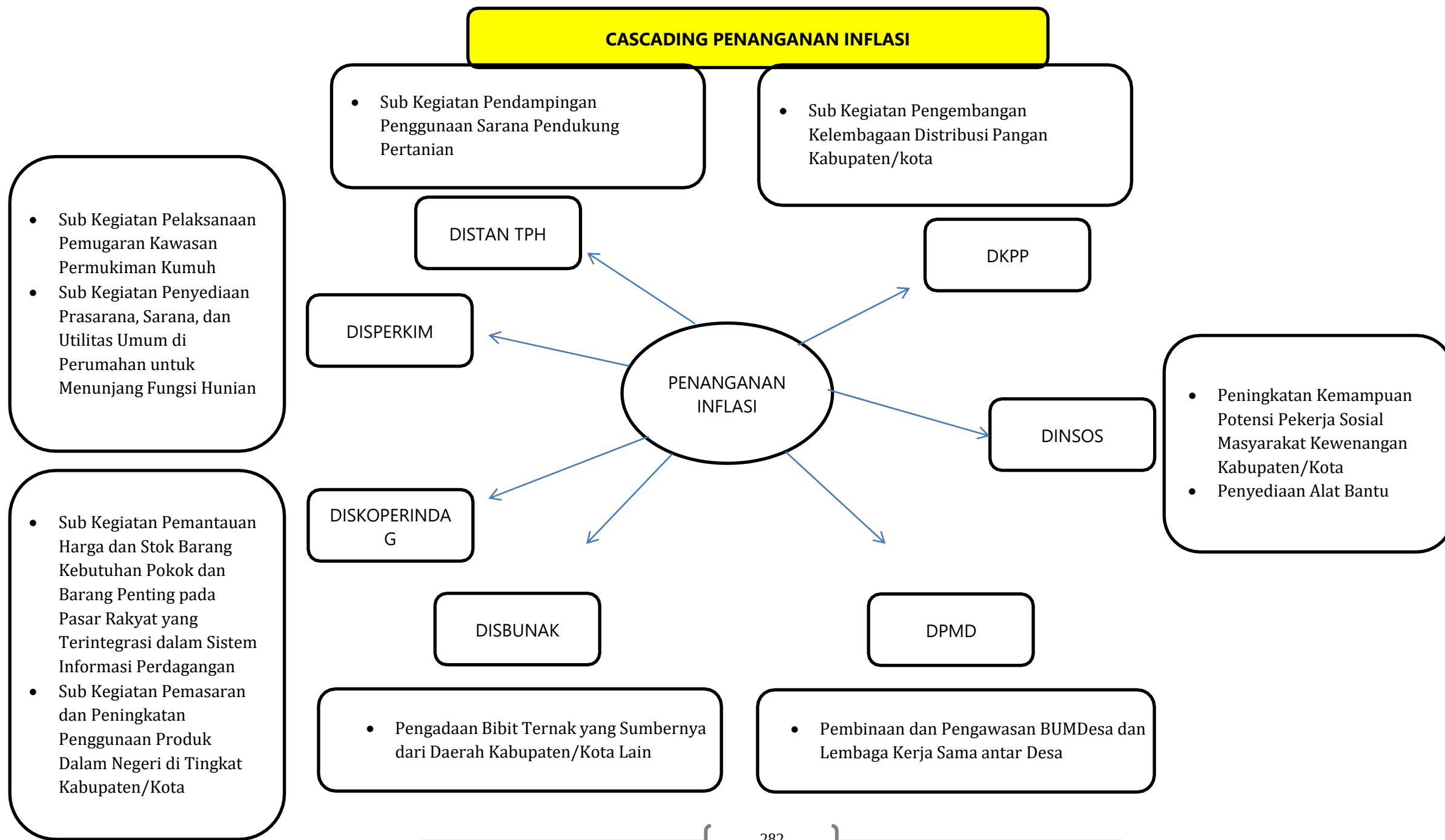
	Perdagangan				Industri Kabupaten/Kota		dan Peran Serta Masyarakat			Balita/Anak Stunting	
21	Dinas Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting bagi Pendidik PAUD	157.540.000	Pendidik PAUD	Lembaga PAUD
22	Dinas Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Makanan tambahan dalam rangka penurunan stunting	60.000.000	Peserta Didik PAUD	Lembaga PAUD
23	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Honor Tim Pendamping Keluarga (TPK)	877.800.000	Keluarga/PUS yang Beresiko Stunting	Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala

24	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pembelian Paket Data Internet untuk penginputan ELSIMIL	798.000.000	Data Keluarga yang Beresiko Stunting	Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala
Koordinatif											
25	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Workshop Pencegahan dan penanggulangan stunting	27.750.000	TPPS Kabupaten	Kabupaten
26	Dinas Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	1.02.05.2.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Pertemuan Konsultasi Teknis (perkornis) & Pembinaan Program Gizi	3.554.030	Tenaga pelaksana Gizi Puskesmas	Kabupaten
27	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	1.02.05.2.01.0001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi Program Kerja Pokjanal Posyandu Kabupaten	63.493.610	Pokjanal Kab dan Kec	Kabupaten

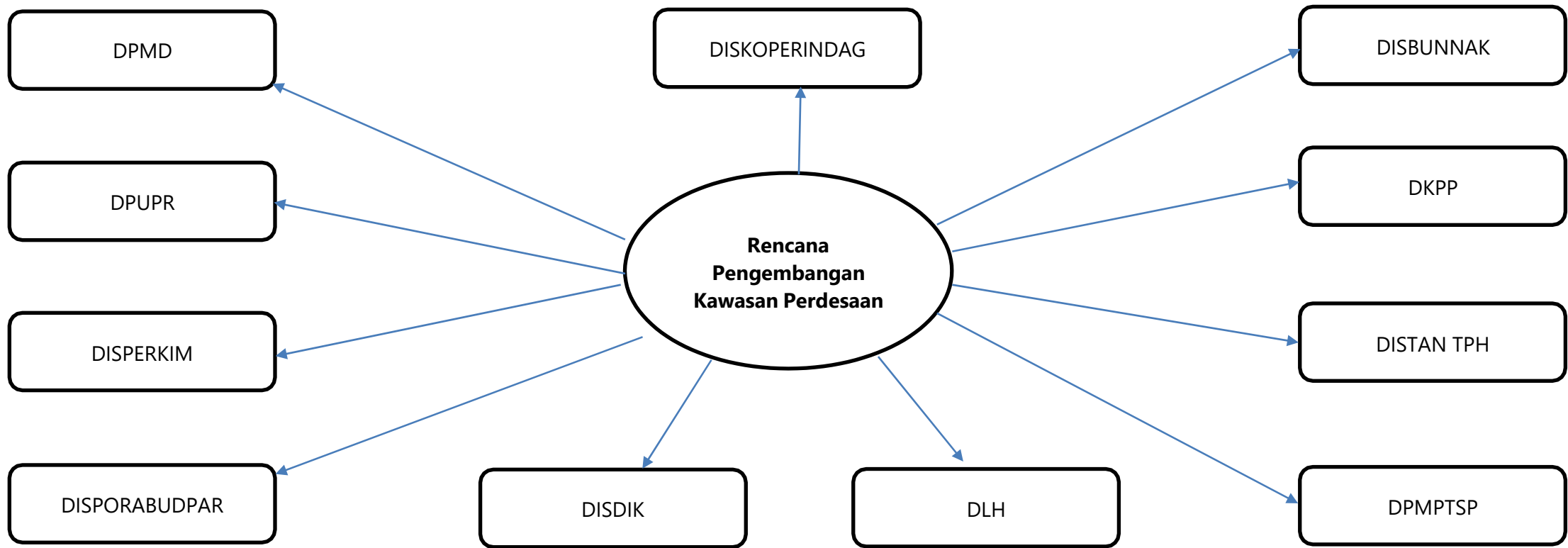
					Tingkat Kabupaten/Kota						
28	Dinas Kesehatan	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.001	Program Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	Pertemuan Advokasi Posynadu Terintegrasi (siklus hidup)	1.080.000	Pokjanal Posyandu Kab	Kabupaten
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45.517.152	Desa	195 Desa
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Hukum Adat	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lemabaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Peemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	2.13.05.2.01.003	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	14.974.748	Kader Posyandu/Kader KPM	2 Kecamatan

					Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota						
31	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten Barito Kuala	250.000.000	Stakeholders dan Mitra Kerja	Barito Kuala
32	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Audit Kasus Stunting (AKS 1)	80.000.000	Keluarga Berisiko Stunting	Barito Kuala
33	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mini Lokakarya	255.000.000	Keluarga Berisiko Stunting	Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala

34	Dinas Pendidikan	1.01.01	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan Koordinasi Pencegahan Stunting	5.100.000	Peserta Didik PAUD	Lembaga PAUD
Jumlah									36.333.292.133		



CASCADING RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN



TABEL 5.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.			URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (PRKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	55,86 Persen	121.647.772.751	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	55,86 Persen	72.084.795.840	49.562.976.911	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100 Persen	143.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100 Persen	-	143.500.000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67,27 Persen	20.500.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67,27 Persen	8.815.000	11.685.000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	85 Persen	89.225.092.399	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	85 Persen	15.272.474.183	73.952.618.216	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
				Nilai UHC (Universal Helath Coverge)	95 Persen	63.225.092.399		Nilai UHC (Universal Helath Coverge)	95 Persen	141.188.359.692	(77.963.267.293)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA

1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkat Kompetensinya	75 Persen	170.344.730	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkat Kompetensinya	75 Persen	61.925.318.839	(61.754.974.109)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 Persen	2.913.133.597	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 Persen	439.955.515	2.473.178.082	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	255.275.032	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	17.869.724.049	(17.614.449.017)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik	78 Persen	16.812.138.228	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik	78 Persen	38.758.313.525	(21.946.175.297)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	78 Persen	18.044.624.359	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	78 Persen	15.537.268.000	2.507.356.359	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	96 Persen	2.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	96 Persen	-	2.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	13 Persen	5.307.152.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	13 Persen	11.812.989.500	(6.505.837.500)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	30 Persen	450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	30 Persen	200.000.000	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	91 Persen	9.401.942.350	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	91 Persen	31.277.612.318	(21.875.669.968)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Tertata	97,61 Persen	11.344.675.043	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Tertata	97,61 Persen	2.700.000.000	8.644.675.043	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	67,75 Persen	151.419.175.397	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	67,75 Persen	37.468.000.000	113.951.175.397	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	71 Persen	485.067.977	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	71 Persen	800.000.255	(314.932.278)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	72,22 Persen	1.009.200.638	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	72,22 Persen	1.004.651.375	4.549.263	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-	
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	23 Persen	173.617.605	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	23 Persen	-	173.617.605	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio peningkatan luas permukiman Layak Huni	0,8757 Nilai	2.500.770.141	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio peningkatan luas permukiman Layak Huni	0,8757 Nilai	10.874.058.980	(8.373.288.839)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	88,499 Persen	608.328.679	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	88,499 Persen	2.599.412.029	(1.991.083.350)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	55,06 Persen	21.358.062.334	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	55,06 Persen	28.830.000.435	(7.471.938.101)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA

1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang ditangani	100 Persen	919.752.320	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang ditangani	100 Persen	5.527.586.125	(4.607.833.805)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				-	
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100 Persen	104.950.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100 Persen	918.823.995	(813.873.995)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	100 Persen	1.817.540.310	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	100 Persen	1.105.375.345	712.164.965	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100 Persen	199.777.960	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100 Persen	317.465.040	(117.687.080)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				-	

1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	217.800.327	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	1.679.965.668	(1.462.165.341)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100 Persen	178.463.809	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100 Persen	2.894.446.836	(2.715.983.027)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	100 Persen	748.989.831	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	100 Persen	1.205.059.210	(456.069.379)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100 Persen	598.949.671	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100 Persen	223.174.297	375.775.374	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-	
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				-	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100%	1.753.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100%	587.441.100	1.165.558.900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100%	732.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100%	93.888.900	638.111.100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Aturan Ketenagakerjaan	100%	243.750.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Aturan Ketenagakerjaan	100%	1.837.131.700	(1.593.381.700)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				-	

2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	100 Persen	52.050.705	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	100 Persen	25.000.000	27.050.705	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	129.827.886	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	372.762.748	(242.934.862)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100 Persen	384.133.313	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100 Persen	45.000.000	339.133.313	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 Persen	295.932.565	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 Persen	72.000.000	223.932.565	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	232.050.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	177.935.000	54.115.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				-	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase lumbung pangan yang berfungsi	93 Persen	5.631.155.426	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase lumbung pangan yang berfungsi	93 Persen	-	5.631.155.426	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase lumbung pangan dengan stock gabah diatas 3 ton	65,5 Persen	94.999.680	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase lumbung pangan dengan stock gabah diatas 3 ton	65,5 Persen	868.128.032	(773.128.352)	
				Skor Pola Pangan Harapan (skor) Ketersediaan	93 Skor	524.436.106		Skor Pola Pangan Harapan (skor) Ketersediaan	93 Skor		524.436.106	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100 Persen	38.634.050	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100 Persen	53.788.535	(15.154.485)	

2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-	
2	10	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100 Persen	10.000.000	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100 Persen	-	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persen	5.000.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persen	3.446.907.690	1.553.092.310	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	100 Persen	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	100 Persen	-	20.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	100 Persen	1.032.449.850	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	100 Persen	1.199.819.625	(167.369.775)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
						195.000.000					195.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

						58.932.279					58.932.279	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100 Persen	80.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100 Persen	1.299.556.600	(1.219.556.600)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100 Persen	617.986.387	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100 Persen	1.125.000.000	(507.013.613)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	939.342.595	(839.342.595)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	292.100.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	218.636.475	73.463.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang bersih dan nyaman	100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang bersih dan nyaman	100 Persen	134.729.050	15.270.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen	60.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 Persen	23.193.750	36.806.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penanganan dan pengurangan sampah	29,257 Persen	7.270.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penanganan dan pengurangan sampah	29,257 Persen	14.341.176.025	(7.071.176.025)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
											-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				-	
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	1.605.965.251	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	1.199.444.704	406.520.547	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standart	100 Persen	132.842.010	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standart	100 Persen	152.244.660	(19.402.650)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100 Persen	83.030.538	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100 Persen	262.830.250	(179.799.712)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA

2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	34.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	-	34.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	98 Persen	253.201.536	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	98 Persen	110.293.100	142.908.436	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	30 Persen	550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	30 Persen	-	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	94 Persen	3.648.541.766	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	94 Persen	2.630.692.696	1.017.849.070	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	45 Persen	1.000.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	45 Persen	579.697.127	420.302.873	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-	

2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	100 Persen	88.301.595	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	100 Persen	1.982.909.980	(1.894.608.385)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unneed Need	100 Persen	764.756.661	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unneed Need	100 Persen	3.753.271.060	(2.988.514.399)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unneed Need	100 Persen	232.976.334	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unneed Need	100 Persen	2.087.307.300	(1.854.330.966)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				-	

2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	905.690.324	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	10.466.608.784	(9.560.918.460)	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	1.467.210.852	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	3.946.115.727	(2.478.904.875)	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-	
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100 Persen	2.199.137.700	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100 Persen		2.199.137.700	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	83 Persen	1.955.621.735	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	83 Persen		1.955.621.735	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-	
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkembang	38,01 Persen	44.809.130	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkembang	38,01 Persen	53.857.750	(9.048.620)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	44,62 Persen	6.570.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	44,62 Persen	14.835.000	(8.265.000)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	42,36 Persen	252.714.755	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	42,36 Persen	208.167.625	44.547.130	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	42,36 Persen	92.611.600	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	42,36 Persen	98.139.625	(5.528.025)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				-	
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Proyek Perencanaan Investasi	100 Persen	127.760.775	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Proyek Perencanaan Investasi	100 Persen	74.045.770	53.715.005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	12,5 Persen	273.400.795	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	12,5 Persen	115.326.750	158.074.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100 Persen	532.040.450	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100 Persen	92.242.650	439.797.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA

2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	100 Persen	352.398.630	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	100 Persen	300.122.968	52.275.662	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Informasi Penanaman Modal	4 media	17.173.500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Informasi Penanaman Modal	4 media	16.583.250	590.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				-	
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi	70 Persen	666.533.300	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi	70 Persen	538.771.500	127.761.800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	18%	4.242.662.205	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	18%	6.092.679.300	(1.850.017.095)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA

2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	600.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	300.000.000	300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-	
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang direkomendasikan dan dapat diakses	75 Persen	170.041.106	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang direkomendasikan dan dapat diakses	75 Persen	67.772.500	102.268.606	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-	
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	100 Persen	207.961.705	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	100 Persen	69.809.750	138.151.955	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-	
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	63,64 Persen	1.690.610.875	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	63,64 Persen	2.213.501.000	(522.890.125)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA

2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen	366.529.800	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen	354.906.560	11.623.240	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				-	
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100 Persen	433.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100 Persen	839.749.422	(406.749.422)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK dan Berbasis TIK	100 Persen	230.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK dan Berbasis TIK	100 Persen	404.726.502	(174.726.502)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen	165.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen	30.464.500	134.535.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100 Persen	23.000.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100 Persen	-	23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-	

3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				-	
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	0.021 Persen	523.887.974	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	0.021 Persen	480.980.180	42.907.794	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	1 Persen	850.669.924	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	1 Persen	777.753.045	72.916.879	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				-	
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	41,7 Persen	696.637.594	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	41,7 Persen	674.825.554	21.812.040	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	7,8 Persen	369.010.780	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	7,8 Persen	557.244.000	(188.233.220)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
3	27		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				-	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				-	

3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Hortikultura	7.726,65 Ha	1.558.368.905	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Hortikultura	7.726,65 Ha	5.781.727.235	(4.223.358.330)	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Luas Tanam Tanaman Pangan	109.454,02 Ha	3.600.623.438		Luas Tanam Tanaman Pangan	109.454,02 Ha		3.600.623.438	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen	77.851.642		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen		77.851.642	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Persentasepeningkat an populasi ternak	2.53 Persen	102.797.184		Persentasepeningkat an populasi ternak	2.53 Persen		(749.121.521)	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA
				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen	149.506.390		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen		851.918.705	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Produktivitas Tanaman Pangan	99,39 Ha	343.150.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Produktivitas Tanaman Pangan	99,39 Ha		343.150.000	

			PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas LahanPertanian PanganBerkelanjuta n	12 Dokumen	343.150.000	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas LahanPertanian PanganBerkelanjuta n	12 Dokumen		343.150.000	
				Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen	102.797.184		Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen		102.797.184	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	8.25 Persen	474.033.309	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	8.25 Persen		474.033.309	
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Hortikultura	5.328,11 Ha	66.715.050	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Hortikultura	5.328,11 Ha		66.715.050	
				Luas Panen Tanaman Pangan	106.170,48 Ha	114.541.990		Luas Panen Tanaman Pangan	106.170,48 Ha		114.541.990	
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen	49.871.995	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen		49.871.995	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	22.25 Persen	673.261.600	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	22.25 Persen		673.261.600	
				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen	84.845.164		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen		84.845.164	
				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak	4.00 Persen	13.395.063		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak	4.00 Persen		13.395.063	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				-	

3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya kelancaran distribusi barang	1.5 Persen	548.770.150	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya kelancaran distribusi barang	1.5 Persen	262.464.937	286.305.213	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase bahan pokok yang di pasarkan di operasi pasar/pasar murah	55 Persen	88.584.800	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase bahan pokok yang di pasarkan di operasi pasar/pasar murah	55 Persen	44.114.896	44.469.904	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang di tera ulang	1.5 Persen	82.095.775	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang di tera ulang	1.5 Persen	406.605.620	(324.509.845)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	35 Persen	171.146.600	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	35 Persen	577.812.025	(406.665.425)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-	
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jenis Produk yang di terima Pasar	1.87 Persen	347.336.315	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jenis Produk yang di terima Pasar	1.87 Persen	827.426.634	(480.090.319)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

				Persentase produk yang berkualitas	1.87 Persen	202.624.700		Persentase produk yang berkualitas	1.87 Persen		202.624.700	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	48,3 Persen	25.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	48,3 Persen	32.179.824	(7.179.824)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	72 Persen	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	72 Persen	26.860.000	13.140.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-	
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja	100 Persen	195.387.590	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja	100 Persen	250.482.735	(55.095.145)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
				Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi	100Persen	97.612.410		Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi	100Persen		97.612.410	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-	
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				SEKRETARIAT DAERAH				-	

4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100 Persen	6.576.522.100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100 Persen	14.477.104.974	(7.900.582.874)	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase kebijakan bidang Pemerintahan yang diimplementasikan	100 Persen	3.410.020.300		Persentase kebijakan bidang Pemerintahan yang diimplementasikan	100 Persen		3.410.020.300	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100 Persen	704.300.544		Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100 Persen		704.300.544	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100 Persen	1.455.666.700	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100 Persen	2.488.855.945	(1.033.189.245)	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	100 Persen	367.890.000		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	100 Persen		367.890.000	SEKRETARIAT DAERAH
				Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100 Persen	586.450.890		Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100 Persen		586.450.890	SEKRETARIAT DAERAH
Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				-	
4	2		SEKRETARIAT DPRD				SEKRETARIAT DPRD				-	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi tugas fungsi DPRD yang berjalan efektif	100 Persen	2.301.743.750	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi tugas fungsi DPRD yang berjalan efektif	100 Persen	14.630.141.800	(12.328.398.050)	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-	
5	1		PERENCANAAN				PERENCANAAN				-	

5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100 Persen	889.266.143	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100 Persen	890.178.430	(912.287)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00	86.96Persen	360.619.611	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00	86.96Persen	433.866.800	(73.247.189)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5	2		KEUANGAN				KEUANGAN				-	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2 Persen	6.940.417.311	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2 Persen	2.280.981.164	4.659.436.147	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	100 Persen	272.162.280.785	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	100 Persen	271.528.314.812	633.965.973	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	100 Persen	859.204.060	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	100 Persen	1.380.585.769	(521.381.709)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	3		KEPEGAWAIAN				KEPEGAWAIAN				-	

5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang Berkualitas	100 Persen	1.214.061.200	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang Berkualitas	100 Persen	2.073.554.000	(859.492.800)	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA
5	4		SUMBER DAYA MANUSIA				SUMBER DAYA MANUSIA				-	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100 Persen	2.774.651.780	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100 Persen	2.769.683.250	4.968.530	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	631.949.560	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	438.788.800	193.160.760	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
6	1		PENGAWASAN				PENGAWASAN				-	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler yang tepat waktu	92.63 Persen	4.465.355.634	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler yang tepat waktu	92.63 Persen	3.968.121.250	497.234.384	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
				Persentase Penyelesaian TLHP APIP	92.63 Persen	162.000.000		Persentase Penyelesaian TLHP APIP	92.63 Persen		162.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
				Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	85 Persen	162.000.000		Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	85 Persen		162.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

				Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	108.000.000		Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen		108.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	70 Persen	534.816.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	70 Persen	1.589.798.720	(1.054.982.720)	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks	77.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks	71.540.000	6.260.000	Kecamatan Tabunganen
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	281.203.500		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	72.766.800	208.436.700	Kecamatan Tamban
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	81.676.330		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	110.571.600	(28.895.270)	Kecamatan Mekarsari
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	82.000.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	95.839.600	(13.839.600)	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	66.978.225		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	71.050.000	(4.071.775)	Kecamatan Anjir Muara
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	115.812.636		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	137.907.075	(22.094.439)	Kecamatan Alalak
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	68.600.500		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	533.088.000	(464.487.500)	Kecamatan Mandastana
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	118.372.800		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	84.300.375	34.072.425	Kecamatan Belawang
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	106.256.603		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	82.363.000	23.893.603	Kecamatan Wanaraya
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	138.375.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	138.675.000	(300.000)	Kecamatan Barambai
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	70.854.696		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	52.808.325	18.046.371	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	65.000.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	64.971.500	28.500	Kecamatan Cerbon
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	94.575.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	65.503.225	29.071.775	Kecamatan Bakumpai
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	81.424.349		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	78.277.855	3.146.494	Kecamatan Marabahan

7	1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	129.406.075	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	79.031.400	50.374.675	Kecamatan Tabukan
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	109.911.122		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	192.690.000	(82.778.878)	Kecamatan Kuripan
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	65.625.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	59.670.825	5.954.175	Kecamatan Jejangkit
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	23.911.000		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	9.200.000	14.711.000	Kecamatan Tabunganen
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	57.612.550		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	2.131.040	55.481.510	Kecamatan Tamban
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	43.685.753		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	211.033.035	(167.347.282)	Kecamatan Mekarsari
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	90 Persen	52.490.625		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	90 Persen	19.973.250	32.517.375	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	38.827.285		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	7.053.500	31.773.785	Kecamatan Anjir Muara
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	774.579.612		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	425.078.800	349.500.812	Kecamatan Alalak
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	30.000.000		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	26.494.500	3.505.500	Kecamatan Mandastana
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	19.600.000		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	13.922.450	5.677.550	Kecamatan Belawang
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	15.547.250		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	17.502.250	(1.955.000)	Kecamatan Wanaraya
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	41.003.137		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	18.419.750	22.583.387	Kecamatan Barambai
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	0	-		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	0	13.988.650	(13.988.650)	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	16.977.880		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	25.600.375	(8.622.495)	Kecamatan Cerbon
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	224.500.000		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	264.541.250	(40.041.250)	Kecamatan Bakumpai
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	2.818.993.519		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	420.902.850	2.398.090.669	Kecamatan Marabahan

7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	27.111.563		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	8.000.000	19.111.563	Kecamatan Tabukan
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		35.215.160		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		25.357.250	9.857.910	Kecamatan Kuripan
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	25.352.550		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	20.885.150	4.467.400	Kecamatan Jejangkit
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	94 Persen	14.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	94 Persen	20.100.000	(5.700.000)	Kecamatan Tabunganen
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	37.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	23.400.000	13.938.275	Kecamatan Tamban
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	30.000.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	14.400.000	15.600.000	Kecamatan Mekarsari
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	27.494.800		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	23.450.000	4.044.800	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	24.400.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	24.080.000	320.000	Kecamatan Anjir Muara
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	18.222.600		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.900.000	(4.677.400)	Kecamatan Alalak
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	80 Persen	16.000.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	80 Persen	24.208.750	(8.208.750)	Kecamatan Mandastana
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	15.600.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	17.580.000	(1.980.000)	Kecamatan Belawang
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	11.752.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	8.400.000	3.352.000	Kecamatan Wanaraya
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	15.600.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.200.000	(6.600.000)	Kecamatan Barambai

7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Indeks	19.795.600		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Indeks	15.605.000	4.190.600	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	27.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	21.000.000	6.338.275	Kecamatan Cerbon
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	7.500.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.250.000	(14.750.000)	Kecamatan Bakumpai
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Nilai	36.443.460		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Nilai	26.025.000	10.418.460	Kecamatan Marabahan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	41.285.200		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.730.000	18.555.200	Kecamatan Tabukan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	27.941.200		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	28.576.200	(635.000)	Kecamatan Kuripan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	27.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	22.000.000	5.338.275	Kecamatan Jejangkit
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	33.299.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.250.000	15.049.600	Kecamatan Tabunganen
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	22.260.000		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	9.380.000	12.880.000	Kecamatan Tamban
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	40.319.700		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	30.439.685	9.880.015	Kecamatan Mekarsari
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	95 Persen	41.802.500		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	95 Persen	21.120.000	20.682.500	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	36.690.000		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	25.000.000	11.690.000	Kecamatan Anjir Muara

7	1	6	UNSUBSIDIR	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	28.151.074	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.693.850	9.457.224	Kecamatan Alalak
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.000.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.788.750	(788.750)	Kecamatan Mandastana
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	34.600.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	19.135.000	15.465.000	Kecamatan Belawang
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100Persen	3.836.500	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100Persen	11.700.000	(7.863.500)	Kecamatan Wanaraya
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	12.600.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	17.138.150	(4.538.150)	Kecamatan Barambai
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	49.570.675	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	10.608.500	38.962.175	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	13.878.255	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	15.000.000	(1.121.745)	Kecamatan Cerbon
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 persen	19.500.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 persen	5.478.175	14.021.825	Kecamatan Bakumpai
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	37.521.819	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	34.022.600	3.499.219	Kecamatan Marabahan
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	72.418.415	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	19.075.000	53.343.415	Kecamatan Tabukan
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	68.255.600	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	16.977.300	51.278.300	Kecamatan Kuripan
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	35.245.025	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	17.697.700	17.547.325	Kecamatan Jejangkit
8			UNSUBSIDIR				UNSUBSIDIR			-	

8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-	
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi kecamatan yang dibina terhadap ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bagsa	81,35 Persen	897.070.375	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi kecamatan yang dibina terhadap ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bagsa	81,35 Persen	1.781.603.580	(884.533.205)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	81,35 Persen	2.145.779.390	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	81,35 Persen	1.854.301.423	291.477.967	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100 Persen	2.145.779.390	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100 Persen		2.145.779.390	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	81,35 Persen	365.674.460	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	81,35 Persen	223.134.154	142.540.306	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100Persen	4.326.695.788	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100Persen	1.391.208.040	2.935.487.748	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
X											-	
X	X X										-	

X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	17 Laporan	97.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	17 Laporan	1.716.499.796.76 1	(1.716.402.796.76 1)	SELURUH SKPD
X	XX	1		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	83,01 Nilai	28.933.812.330		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	83,01 Nilai		28.933.812.330	SELURUH SKPD
X	XX	1		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00 Persen	469.811.300		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00 Persen		469.811.300	SELURUH SKPD
X	XX	1		Persentase fasilitas Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan yang diimplementasikan	100 Persen	2.840.100.520		Persentase fasilitas Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan yang diimplementasikan	100 Persen		2.840.100.520	SELURUH SKPD
X	XX	1		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	91,49 Persen	807.650.500		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	91,49 Persen		807.650.500	SELURUH SKPD
X	XX	1		Rata-rata Nilai Sakip Perangkat daerah	100 Persen	433.021.550		Rata-rata Nilai Sakip Perangkat daerah	100 Persen		433.021.550	SELURUH SKPD

Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SDGs di Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sudah menyusun arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rencana Aksi SDGs

NO	KINERJA RPJPD	TARGET	CAPAIAN	%	PERMASALAHAN	Arah Kebijakan Rancangan RPJPD 2025-2045
1	ANGKA HARAPAN HIDUP	70,00	66,27	94,67	Masih ada masyarakat yang belum sadar pentingnya kesehatan	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2	HARAPAN LAMA SEKOLAH	12,99	12,54	96,54	PermasalahanKesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah (semakin meratanya kualitas sarana pendidikan swasta (Pondok Pesantren /setara) serta tinggi minat anak sekolah dikota lain. Sehingga data keberlanjutan belajar tidak ada, masih adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai)	-Penerapan Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 9 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,00	67,37	89,83	•kekurangan SDM Kesehatan, permasalahan kesehatan ibu dan anak (termasuk masalah gizi), dan permasalahan lingkungan •Kendala geografis terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk layanan sanitasi, nutrisi, dan layanan prenatal dan postnatal bagi ibu hamil. •Pemenuhan kelengkapan fasilitas Kesehatan daerah terisolir untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan, pembentukan tim percepatan penurunan stunting, layanan imunisasi dasar serta pemenuhan gizi balita.	-Peningkatan pemenuhan dan distribusi tenaga medis dan kesehatan -Penyediaan layanan kesehatan primer dan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis -Peningkatan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah
					Solusi : •Formasi ASN atau P3K untuk SDM Kesehatan secara bertahap untuk mencukupi rasio tenaga Kesehatan dengan jumlah penduduk •Optimalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak sejak pelayanan di tingkat desa sehingga mudah dijangkau masyarakat. •Intervensi lingkungan yang bekerjasama dengan sektor lain yaitu rumah sehat dan jamban sehat.	-Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat -Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk daerah terpencil dengan mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK -Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor

					•Meningkatkan pengadaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi Masyarakat	
4	SARANA IBADAH	22,00	20,00	90,91	•Sistem pendataan sarana ibadah di sekolah yang belum optimal dan terintegrasi •Alokasi penganggaran yang belum berbasis kebutuhan dari pendataan berkala terkait kebutuhan dan kondisi sarana ibadah	Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
5	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	51,52	63,41	100,00	•Indeks Kualitas Air (IKA) - Belum meratanya persebaran titik pengambilan sampel di seluruh wilayah Barito kuala, dikarenakan banyaknya aliran sungai yang ada. - Kurangnya titik pemantauan kualitas air - Masih banyaknya aktifitas masyarakat yang melakukan kegiatan buang air besar di sungai •Indeks Kualitas Udara - Masih sedikitnya frekuensi Pemantauan kualitas udara, yakni hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun	Pemantapan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal Pemantapan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah
					•Indeks Kualitas Tutupan Lahan Terbatasnya lokasi penanaman di kawasan pesisir tabunganen akibat pasang surut Pada saat musim hujan, lahan hutan kota seringkali menjadi tergenang air yang cukup tinggi, sementara pada saat musim panas atau kemarau rentan terbakar.	Perwujudan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD
6	RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN				•Persebaran RTH yang belum merata •Belum maksimalnya fungsi RTH sebagai pengatur iklim, produsen oksigen, penyerap air serta sebagai penyedia habitat satwa dengan baik	Perwujudan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkungan pemerintahan

		15,00	15,00	100,00	•Terbatasnya lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH •Keterbatasan dana dalam pengembangan RTH	daerah termasuk koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD
7	TINGKAT PENGANGGURAN	2,01	3,63	100,00	•Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan keadaan berapa banyak proporsi jumlah penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan dan belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki usaha. TPT juga merefleksikan keadaan ekonomi daerah di mana perekonomian yang sedang ekspansi cenderung membuka lapangan kerja lebih besar sedangkan yang sedang melambat dan krisis lapangan kerja yang tersedia cenderung kurang	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
8	PERSENTASE KAWASAN YG SESUAI TATA RUANG	25,00	25,00	100,00	1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial; 2. Belum terpenuhinya perencanaan tata ruang yang baik sebagai acuan pembangunan 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala yang masih bersifat general atau lingkup kabupaten sudah tersusun 1 dokumen. Tetapi dokumen tersebut tidaklah cukup untuk menjelaskan perencanaan wilayah kabupaten secara keseluruhan 5. Dalam proses perencanaan tata ruang, pola pikir para pemberi kebijakan dan para konsultan masih mengalami kendala karena minimnya keilmuan tentang perencanaan wilayah dan kota	Pemantapan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah
9	TINGKAT KEMISKINAN	4,25	4,75	89,47	Permasalahannya dikarenakan : Pemanfaatan usaha yang berkaitan dengan pertanian belum optimal	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian

10	PERTUMBUHAN EKONOMI	6,25	6,25	100,00	Keterampilan tenaga kerja di wilayah tersebut kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau industri, hal ini dapat membatasi pertumbuhan sektor-sektor yang lebih maju dan inovatif. Ketidaksetaraan ekonomi jika terdapat ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi, hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani Percepatan pengembangan pusat- pusat industri di berbagai wilayah melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
11	PANJANG JALAN KABUPATEN YANG BERKUALITAS BAIK	68,46	68,46	100,00	1. Kerusakan jalan jauh lebih cepat pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Banjir yang kerap terjadi di awal dan di akhir tahun ditengarai menjadi faktor sulitnya mempertahankan kondisi jalan untuk mencapai kondisi optimal. 2. Dampak dari cuaca extreme dan perubahan iklim terhadap infrastruktur sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat bahkan juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan konstruksi dan penanganan pasca bencana. 3. Optimalisasi penyelenggaraan jalan kabupaten juga terkendala pada prasyarat pengadaan tanah, Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks.	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas Penyusunan strategi pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten dan pembebasan lahan untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan
12	GINI RASIO	0,32	0,29	100,00	•Distribusi pendapatan yang kurang merata, baik distribusi antar golongan, sektoral maupun regional di Kabupaten Barito Kuala •Dominasi sektor pertanian yang diiringi dengan lahan pasang surut masih dalam "kondisi marginal", sehingga daya dan hasil gunanya sangat terbatas. Hal ini mendorong penduduk untuk tidak menggunakan lahan ini secara maksimal.	Pembangunan dan pengembangan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian

13	PROSENTASE LUAS WILAYAH IRIGASI KONDISI BAIK	70,00	70,60	99,15	•Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, jaringan sawah beririgasi yang terbangun seluruhnya sudah berfungsi, namun demikian masih ada jaringan irigasi yang belum berfungsi maksimal	Pembangunan irigasi baru terutama pada rawa dan sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya
14	PROSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP	68,46	67,00	97,87	•Kerusakan jalan jauh lebih cepat pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Banjir yang kerap terjadi di awal dan di akhir tahun ditengarai menjadi faktor sulitnya mempertahankan kondisi jalan untuk mencapai kondisi optimal. Dampak dari cuaca extreme dan perubahan iklim terhadap infrastruktur sangat signifikan mulai dari genangan, banjir hingga dampak kerusakan infrastruktur yang lebih cepat bahkan juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan konstruksi dan penanganan pasca bencana.	Pengembangan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas
					•Optimalisasi penyelenggaraan jalan kabupaten juga terkendala pada prasyarat pengadaan tanah, Pengadaan lahan membutuhkan perencanaan yang sistematis, pembiayaan/ anggaran yang cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta kendala sosial ekonomi dan keperdataan yang cukup kompleks	Penyusunan strategi pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten dan pembebasan lahan untuk memperjepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan
15	CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM	79,12	66,47	84,01	•Kurangnya akses air minum untuk masyarakat di perkotaan •Masih ada Kecamatan Kuripan dan Mekarsari yang tidak terbangun IPA (IKK), namun terlayani SPAM perdesaan PAMSIMAS. •Sistem penyediaan air minum perdesaan masih belum mencapai target dikarenakan anggaran APBD yang terbatas dan anggaran dari tahun 2017 hingga 2021 diprioritaskan untuk pekerjaan relokasi atau pemindahan pipa akibat adanya pelebaran jalan Nasional	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah Pemantapan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
					Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	

16	CAKUPAN AIR BERSIH DAN SANITASI	70,00	79,12	100,00	•Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum •rendahnya kualitas air bersih bagi masyarakat pedesaan	Peningkatan pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah
					•Belum optimalnya pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui pengelolaan air limbah dan Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi	Pemantapan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
					•pelayanan IPLT dan sedot lumpur tinja terjadwal masih terkendala penyusunan perda air limbah dan kelembagaannya.	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
					•capaian terkait penanganan pengelolaan limbah kawasan masih sangat rendah, kurang dari 10%. Salah satu faktor permasalahan masih rendahnya capaian tersebut, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga masih banyak masyarakat dan rumah penduduk tidak memiliki jamban sehat apalagi layak.	
17	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	80,00	55,71	69,64	•Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. •Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur. •Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan Selatan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

18	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	95,00	85,04	89,52	•Pergeseran pelayanan public dari konsep person to person dimana antara aparaturnya/ pelayanan dengan masyarakat/konsumen yang dulunya berorientasi terjadi di kantor, kini posisi pemerintah selaku pemberi layanan dituntut untuk semakin dekat dengan masyarakat, pemberian pelayanan secara elektronik menjadi salah satu alternatif efektif dalam pemberian pelayanan yang makin efisien kepada masyarakat. •Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat berbasis digital
19	OPINI BPK	100,00	100,00	100,00	•Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. •Belum terwujudnya SKPD Yang Mendapatkan Predikat WBK	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah
20	NILAI SAKIP PEMKAB BATOLA	78,25	68,94	88,10	•Belum optimalnya penyelesaian TLHP APIP dan BPK RI. •Masih dijumpai adanya pengaduan masyarakat yang belum tertangani. •Belum Optimalnya Nilai AKIP SKPD •Belum optimalnya Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Evaluasi Internal. •Belum optimalnya Nilai SAKIP Inspektorat	Pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

21	PENYELESAIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN,KEINDAHAN	100,00	73,40	73,40	•Masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh Pelanggaran pemasangan reklame, dan perizinan IMB serta perizinan pendirian toko dan tempat usaha	Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
----	--	--------	-------	-------	--	---

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Awal tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2025

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET PERUBAHAN 2025
1	2	3	4	5	6	
1	Gini Rasio	persen	0,312	0,245	0,225	0,289 - 0,3
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,91	5,02	4,78	4,3 - 4,3
3	PDRB per kapita (juta)	Rupiah dalam juta	32,387	34,29	35,81	35,81
4	Tingkat Kemiskinan (%)	persen	4,6	4,36	4,33	3,41 - 4,25
5	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	persen	4,33	4,33	4,33	4,33
6	Peningkatan PAD (%)	persen	1,14	1,14	1,14	1,14
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,42	3,41	3,01	3,39
8	Rasio penduduk yang bekerja	persen	69,44	68,82	69,26	69,28
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,12	64,82	63,44	66,36
10	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,55	53,57	53,67	53,67
11	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,87	93,92	93,96	93,96
12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	24,42	29,4	30,82	30,82
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	149,6	132	129	129
14	Persentase daerah korban bencana yang di rekonstruksi	persen	100	100	100	100
15	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Indeks	68,54	88	88,36	88,36
16	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Nilai SAKIP	nilai	68,53	73,01	74,94	74,94
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,25	87,5	88	88
19	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,67	70,67	73,01	72
20	Usia Harapan Hidup	tahun	72,28	72,48	72,62	72,62
21	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,42	13,48	13,59	13,59
22	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,74	7,77	7,8	7,8
23	Pengeluaran per kapita	Rupiah	15.042.192	16.227.852	17.413.512	17.413.512

Sumber: Bappelitbang

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2025

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	REALISASI	Target		Target Perubahan	SKP D
		2023	2024	2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(9)
	APSEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan PDRB	3,91	5,25-5,75	5,25-5,75	5,25-5,75	
2	Laju Inflasi	3,03	3,6	3.57	3.57	
3	PDRB Perkapita (Triliun)	32,39	6,93	7.27	7.27	
4	Indeks Gini	0.312	0.245	0,225	0,289 - 0,3	
5	Presentase Penduduk miskin	4.6	4,45	4,33	3,41 - 4,25	
6	Indeks Pembangunan Manusia	70.67	72,42	73.01	72	
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,74	7,78	7,8	7,8	
8	Angka Usia harapan Hidup	72,28	72,48	72.62	72.62	
9	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	174.389	171.225	173.249	173.249	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.89%	70,93%	71,09%	71,09%	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	3.26	3.01	3,39	
12	Rasio Penduduk yang bekerja	69.44	68,82	69.26	69,28	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,25	87,5	88	88	
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	6.42	5,03	5,18	5,18	
15	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	90.65	92	93	93	DKPP
17	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87.8	87,5	88	88	DKPP
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/perikanan terhadap PDRB	26,07	4,35	4,72	4,72	BPS/DISTAN TPH/DISBUNAK/DKPP
19	Produksi sektor Pertanian	417.521,03	585.203,42	707.870,03	707.870,03	DISTAN TPH
20	Produksi sektor perkebunan	21,734	19.942	20.241	20.241	DISBUNAK
21	Produksi sektor Perikanan	21609.332	20.255	20.365	20.365	DKPP
22	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,57	8,05	8,06	8,06	
23	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	14,53	1,02	1,05	1,05	
24	Pertumbuhan Industri	3,4	3,5	3,75	3,75	
25	Kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB	3,5	5,75	6,2	6,2	
26	Kontribusi sektor Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	2,48	5,85	6.3	6.3	

	APSEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	23.228.423,8	15.276.827	16.040.668	16.040.668	BPS
2	Nilai tukar petani	113,16	111,53	113.53	113.53	DISTAN TPH
3	Persentase desa berstatus swasembada/Mandiri terhadap total desa	14.87%	16,41%	21.54%	21.54%	DPMD
4	Rasio ketergantungan	0,458	0,445	0.439	0.439	DISDUKCAPIL
	ASPEK PELAYANAN UMUM (LAYANAN WAJIB URUSAN DASAR)					
	PENDIDIKAN					
1	Angka partisipasi kasar	115.64	92,56	92.66	92.66	DISDIK
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.50	99,53	99,56	99,56	DISDIK
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	94.03	94,08	94,11	94,11	DISDIK
4	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.18	99,96	99,97	99,97	DISDIK
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	96.49	96,99	97,00	97,00	DISDIK
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.22	23,56	34.03	34.03	DISDIK
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.59	27,44	39,63	39,63	DISDIK
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,69	99,71	99,71	DISDIK
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	98,96	98,99	98,99	DISDIK
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.88	98,89	98,91	98,91	DISDIK
11	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94.58	52,92	56,57	56,57	DISDIK
13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	66.10	85,08	85,10	85,10	DISDIK
14	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	746.25	716,29	740,53	740,53	DISDIK
15	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	74.62	71,63	74,05	74,05	DISDIK
16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	81.22	83,22	83,24	83,24	DISDIK
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.83	97,00	98,00	98,00	DISDIK
	KESEHATAN					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12	12	10	10	DINKES
2	Angka kelangsungan hidup bayi	0.988	-11	-9	-9	DINKES
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	1	1	1	DINKES
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	9	8	7	7	DINKES
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	143	60	60	60	DINKES
6	Rasio posyandu per satuan balita	17.69	14,94	14,98	14,98	DINKES
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	5,86	6,4	6,8	6,8	DINKES
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0308	0,0442	0,0559	0,0559	DINKES
9	Rasio dokter per satuan penduduk	0.1880	5,6	5,8	5,8	DINKES
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4.43	8,55	8,65	8,65	DINKES

11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	DINKES
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75,6	82	83	83	DINKES
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	79,10	80	82	82	DINKES
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	DINKES
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	69,61	90	92	92	DINKES
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	11,1	80	80	80	DINKES
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	39,8	95	95	95	DINKES
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per100.000 penduduk)	111,25	190	170	170	DINKES
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per100.000 penduduk)	6,78	8,49	8,49	8,49	DINKES
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	40,56	95	95	95	DINKES
21	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	91	80	80	80	DINKES
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	96	100	100	100	DINKES
23	Penderita diare yang ditangani	52,3	80	80	80	DINKES
24	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	DINKES
25	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	DINKES
26	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	DINKES
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	DINKES
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.0247	0,001	0,001	0,001	DINKES
29	Cakupan kunjungan bayi	99,95	90	90	90	DINKES
30	Cakupan puskesmas	111,8	111,8	111,8	111,8	DINKES
31	Cakupan pembantu puskesmas	30,84	28,9	28,9	28,9	DINKES
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	70,54	75	80	80	DINKES
33	Cakupan pelayanan nifas	75,93	79	80	80	DINKES
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	DINKES
35	Cakupan pelayanan anak balita	90,87	77	78	78	DINKES
36	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	DINKES
37	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	98,48	100	100	100	DINKES
38	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	100	100	100	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	67.25	67,5	67,75	67,75	DPUPR

2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	67.25	67,5	67,75	67,75	DPUPR
3	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	0	0	0	0	DPUPR
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	74	76	78	78	DPUPR
5	Persentase penduduk berakses air minum	66,82	82,17	86,17	86,17	DPUPR
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.00797675	0,655	0,660	0,660	DPUPR
7	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasanperkotaan	0.000004933	0,787	0,7993	0,7993	DPUPR
8	Rasio bangunan ber- PBG per satuan bangunan	100	100	100	100	DPUPR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Rasio rumah layak huni	0.227	0,227	0,227	0,227	DISPERKIM
2	Rasio permukiman layak huni	0.875	0,875	0,876	0,876	DISPERKIM
3	Cakupan ketersediaanrumah layak huni	0.886	0,888	0,890	0,890	DISPERKIM
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	12,52%	12,509%	12,434%	12,434%	DISPERKIM
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2.62%	2,660%	2,826%	2,826%	DISPERKIM
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)	100	100	100	100	SATPOL PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	54.21	100	100	100	SATPOL PP, BAKESBANGPOL
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	SATPOL PP, BPBD
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	3.9	100	100	100	SATPOL PP
5	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	SATPOL PP
	SOSIAL					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	107.2	100	100	100	DINSOS
2	Persentase PMKS yang tertangani	7.39	100	100	100	DINSOS
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	66.97	100	100	100	DINSOS
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usahabersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	105	115	145	145	DINSOS
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasaranapelayanan kesehatan sosial	1	1	1	1	DINSOS

6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	DINSOS
	LAYANAN WAJIB NON URUSAN DASAR					
	TENAGA KERJA					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	1	1	1	DISNAKERTRANS
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	100	DISNAKERTRANS
3	Besaran pencari kerjayang terdaftar yang ditempatkan	83,87	52,08	61.12	61.12	DISNAKERTRANS
4	Keselamatan dan perlindungan	100	40,54	47.30	47.30	DISNAKERTRANS
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100	85,59	89.87	89.87	DISNAKERTRANS
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	DISNAKERTRANS
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100	100	100	100	DISNAKERTRANS
8	Besaran tenaga kerjayang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	34,00	53,93	53,93	53,93	DISNAKERTRANS
9	Besaran tenaga kerjayang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	100	100	100	DISNAKERTRANS
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	DISNAKERTRANS
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	22.86	3,75	4	4	DPPKBP3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	0.23	0,23	0,29	0,29	DPPKBP3A
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	20.5	21	23	23	DPPKBP3A
4	Rasio KDRT	0.16	0,09	0,09	0,09	DPPKBP3A
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	DPPKBP3A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	55.96	62	64	64	DPPKBP3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A

9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkatpenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
	PANGAN					
1	Ketersediaan pangan utama	74.11	57,207	59,127	59,127	DKPP
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	90%	90%	90%	DKPP
	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	Ada	Ada	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	tidak ada	ada	Ada	Ada	DLH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kabupaten/kota	ada	ada	Ada	Ada	DLH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	52.55	53,57	53,67	53,67	DLH
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.87	93,92	93,96	93,96	DLH
6	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24.42	29,4	30,82	30,82	DLH
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangdiawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan olehPemerintah Daerah Kab/kota	100	100	100	100	DLH
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah(PPLHD) di Kab/Kota	0	2	2	2	DLH
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	3	10	10	10	DLH
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ADA	ada	ada	ada	DLH
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan olehPemerintah daerah provinsi, lokasi usahadan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	DLH
12	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	ADA	ada	ada	ada	DLH
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27.81	24	26	26	DLH
14	Persentase cakupan area pelayanan	70.59	76,47	81,35	81,35	DLH

15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	49.24	53,84	51,84	51,84	DLH
16	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA dikabupaten/kota	75	75	75	75	DLH
17	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	100	100	100	100	DLH
18	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	DLH
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99.27	99,5	99,6	99,6	DISDUKCAPIL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Cakupan sarana prasarana perkantoranpemerintahan desa yang baik	48.71%	48,20%	48,20%	48,20%	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.29	0,35	0,41	0,41	DPMD
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0.25	0,33	0,40	0,40	DPMD
4	Persentase LSM aktif	100	97,44	100	100	DPMD
5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	DPMD
6	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	DPMD
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	DPMD
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	DPMD
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Total Fertility Rate (TFR)	2.33	2,5	2,48	2,48	DPPKBP3A
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerahmelalui Kampung KB	34.21	35,5	40,5	40,5	DPPKBP3A
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan RancanganInduk Pengendalian Penduduk	24.61	20,25	20,5	20,5	DPPKBP3A
4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentangpengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	1	DPPKBP3A
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksipenduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7	7	7	7	DPPKBP3A
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yangmelakukan pendidikan kependudukan	2	3	3	3	DPPKBP3A
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.3	2,5	2,48	2,48	DPPKBP3A
8	Ratio Akseptor KB	2.3	2,5	2,48	2,48	DPPKBP3A
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	82.39	84,87	86,87	86,87	DPPKBP3A
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun(ASFR 15–19)	20.7	51,25	49,75	49,75	DPPKBP3A

11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	20.2	19,5	19,25	19,25	DPPKBP3A
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7.71	8,8	8,7	8,7	DPPKBP3A
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.52	16,47	17,47	17,47	DPPKBP3A
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	2.55	2,12	2,16	2,16	DPPKBP3A
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	88.24	87,68	88,18	88,18	DPPKBP3A
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	91.74	88,62	88,82	88,82	DPPKBP3A
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	86.27	83,91	84,22	84,22	DPPKBP3A
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	100	100	100	DPPKBP3A
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	86.11	100	100	100	DPPKBP3A
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	89.82	86,9	87,10	87,10	DPPKBP3A
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	DPPKBP3A
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	73.9	74,25	74,92	74,92	DPPKBP3A
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	18.8	19	19,5	19,5	DPPKBP3A
	PERHUBUNGAN					
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	1858	1758	1858	1858	DISHUB
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	42	37	39	39	DISHUB
3	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	25.61	1758	1858	1858	DISHUB
4	Pemasangan Rambu-rambu	57100	60%	80%	80%	DISHUB
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0052	64,702	65,252	65,252	DISHUB
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di TingkatKecamatan	7.96	50,75	77,11	77,11	DISKOMINFO
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	72.25	70,15	71,64	71,64	DISKOMINFO
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase koperasi aktif	30.75	31,40	33,06	33,06	DISKOPERINDAG
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	1,3	1,32	1,33	1,33	DISKOPERINDAG
3	Persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	DISKOPERINDAG
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	0.81	0,822	0,825	0,825	DISKOPERINDAG
	PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	104	100	100	100	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	549,78 Milyar	405 Milyar	486 Milyar	486 Milyar	DPMPTSP
3	Rasio daya serap tenaga kerja	23,19	13,4	13,6	13,6	DPMPTSP
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	21%	20%	20%	20%	DPMPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0,0344%	2,23%	2,23%	2,23%	DISPORABUDPAR
2	Persentase wirausaha muda	0,0163%	2,17%	2,18%	2,18%	DISPORABUDPAR
3	Cakupan pembinaan olahraga	24%	13%	16%	16%	DISPORABUDPAR
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	66%	63%	70%	70%	DISPORABUDPAR
5	Cakupan pembinaan atletmuda	62%	60%	65%	65%	DISPORABUDPAR
6	Jumlah atlet berprestasi	36 orang	20 orang	25 orang	25 orang	DISPORABUDPAR
7	Jumlah prestasi olahraga	9 cabor	6 cabor	7 cabor	7 cabor	DISPORABUDPAR
	STATISTK					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
3	Buku ”PDRB”	ada	ada	ada	ada	DISKOMINFO
	PERSANDIAN					

1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	63.83	100,00	100,00	100,00	DISKOMINFO
	KEBUDAYAAN					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	DISPORABUDPAR
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	14 buah	14 buah	14 buah	14 buah	DISPORABUDPAR
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	2000 orang	2000 orang	2000 orang	2000 orang	DISPORABUDPAR
	PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0.02	0,021	0,022	0,022	DISPERPUSIP
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.4	0,5	0,6	0,6	DISPERPUSIP
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	2.16	2,17	2,18	2,18	DISPERPUSIP
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0.025	0,026	0,027	0,027	DISPERPUSIP
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27.487	27,637	27,787	27,787	DISPERPUSIP
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0.001	0,002	0,003	0,003	DISPERPUSIP
	KEARSIPAN					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	53,21	19,15	21,28	21,28	DISPERPUSIP
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	3	3	DISPERPUSIP
	LAYANAN URUSAN PILIHAN					
	PARIWISATA					
1	Kunjungan wisata	193034	100	100	100	DISPORABUDPAR
2	Lama kunjungan Wisata	0,27	179.102	180,102	180,102	DISPORABUDPAR
	PERTANIAN					
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0.9	0,87	0,87	0,87	DISTAN TPH
2	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	1	1	1	1	DISTAN TPH
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	32.28	35,05	35,07	35,07	DISTAN TPH
4	Cakupan bina kelompok petani	0.12	0,07	0,07	0,07	DISTAN TPH
	PERDAGANGAN					

1	Ekspor Bersih Perdagangan	87.650	\$ 58.329	\$ 61,245	\$ 61,245	DISKOPERINDAG
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	23	30	32	32	DISKOPERINDAG
	PERINDUSTRIAN					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	13.79	5,5	6,2	6,2	DISKOPERINDAG
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi Perikanan	107.26	100	100	100	DKPP
2	Cakupan bina kelompok nelayan	2.38	3,66	3,66	3,66	DKPP
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	45.02	46,21	45,97	45,97	DKPP
	PENUNJANG URUSAN					
	PERENCANAAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANG
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA/SK	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANG
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANG
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	DPUPR
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	DPUPR
	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Persentase SILPAterhadap APBD	13.05	19,28	19,28	19,28	BPKAD
3	Persentase program/kegiatan yangtidak terlaksana	4.9	126	126	126	BPKAD
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	30.73	33,12	33,12	33,12	BPKAD
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	15.95	14,66	14,66	14,66	BPKAD

6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	43.31	54,68	54,68	54,68	BPKAD
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0.19	0,22	0,22	0,22	BP2RD
8	Penetapan APBD	27 Desember 2022	30 Desember 2023	30 Desember 2024	30 Desember2024	BPKAD
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikandan pelatihan	4.06	5,1	5,1	5,1	BKPP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal	0.0083	0,04	0,04	0,04	BKPP
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0.09	7,1	7,1	7,1	BKPP
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	29	34	34	34	BKPP
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	403	465	465	465	BKPP
6	Jumlah pemangku jabatan fungsionaltertentu pada instansi pemerintah	3005	3485	3485	3485	BKPP
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%	100%	BAPPELITBANG
	PENGAWASAN					
1	Persentase tindak lanjut temuan	94,08%	92,63%	92,63%	92,63%	INSPEKTORAT
2	Persentase Temuan BPK	81,16%	80%	80%	80%	INSPEKTORAT
	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	SET DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	SET DPRD

3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	SET DPRD
4	Persentase layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95.55	83	85	85	SET DPRD
5	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama DPRD	7	10	10	10	SET DPRD
SEKRETARIAT DAERAH						
1	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	88.78	16,14	16,14	16,14	SETDA BAG PPBJ
2	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk usaha mikro, usaha kecil, dankoperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	129.97	6,22	6,22	6,22	SETDA BAG PPBJ
3	Peringkat LPPD	9	3	2	2	SETDA
4	Nilai SAKIP Kabupaten	68,53	73,01	76,01	76,01	SETDA

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Barito Kuala sesuai hasil LPPD

No.IKK	IKK Output	capaian 2024	target 2025	target perub 2025
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
- Pendidikan				
1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAU	92,91	92,91	92,91
1.a.2	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik j	98,60	98,60	98,60
1.a.3	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik j	95,16	95,16	95,16
1.a.4	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah pese	85,81	85,81	85,81
- Kesehatan				
1.b.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	0,58	0,58	0,58
1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	100,00	100,00	100,00
1.b.3	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	92,10	92,10	92,10
1.b.4	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	99,11	99,11	99,11
1.b.5	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	98,68	98,68	98,68
1.b.6	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,19	86,19	86,19
1.b.7	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	97,74	97,74	97,74

1.b.8	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	84,71	84,71	84,71
1.b.9	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	90,01	90,01	90,01
1.b.10	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
1.b.11	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
1.b.12	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
1.b.13	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
1.b.14	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.c.1	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawa	54,28	54,28	54,28
1.c.2	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawa	0,00	0,00	0,00
1.c.3	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kond	74,12	74,12	74,12
1.c.4	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tida	73,17	73,17	73,17
1.c.5	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelay	78,76	78,76	78,76

1.c.6	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun	100,00	100,00	100,00
1.c.7	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan	67,50	67,50	67,50
1.c.8.1	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlat	74,72	74,72	74,72
1.c.8.2	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlat	100,00	100,00	100,00
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.d.1	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena benca	100,00	100,00	100,00
1.d.2	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang	100,00	100,00	100,00
1.d.3	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	62,63	62,63	62,63
1.d.4	1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pemban	13,79	13,79	13,79
1.d.5	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah	58,00	58,00	58,00
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1.e.1	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumla	100,00	100,00	100,00
1.e.2		100,00	100,00	100,00

1.e.3	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	100,00	100,00	100,00
1.e.4	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara	100,00	100,00	100,00
1.e.5	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah pe	100,00	100,00	100,00
1.e.6	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Ter	100,00	100,00	100,00
1.e.7		6,82	6,82	6,82
- Sosial				
1.f.1	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM d	100,00	100,00	100,00
1.f.2	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permaka	100,00	100,00	100,00
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
- Tenaga Kerja				
2.a.1	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kab	100,00	100,00	100,00
2.a.2	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikatkompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persent	4,35	4,35	4,35
2.a.3	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	3840435854,70	3840435854,70	3840435854,70
2.a.4	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfe	78,05	78,05	78,05

2.a.5	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumla	87,67	87,67	87,67
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.g.1	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	12,10	12,10	12,10
2.g.2	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah m	100,00	100,00	100,00
2.g.3	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	18,44	18,44	18,44
- Pangan				
2.h.1	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya	96,63	96,63	96,63
- Pertanian				
2.i.1	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Keleb	100,00	100,00	100,00
2.i.2	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	96,38	96,38	96,38
2.i.3	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	100,00	100,00	100,00
2.i.4	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	100,00	100,00	100,00
2.i.5	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan	100,00	100,00	100,00

2.i.6	1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Keleb	0,00	0,00	0,00
- Lingkungan Hidup				
2.j.1	1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,02	64,02	64,02
2.j.2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	75,33	75,33	75,33
2.j.3	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH	0,00	0,00	0,00
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.k.1.1	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	99,28	99,28	99,28
2.k.1.2	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	91,93	91,93	91,93
2.k.1.3	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	95,93	95,93	95,93
2.k.1.4	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	13,33	13,33	13,33
- Pemberdayaan masyarakat dan desa				
2.l.1	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa ta	100,00	100,00	100,00
2.l.2	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa ta	79,25	79,25	79,25
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana				
2.m.1	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran R	2,28	2,28	2,28

2.m.2	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang	84,71	84,71	84,71
2.m.3	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	7,24	7,24	7,24
- Perhubungan				
2.n.1	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam	0,89	0,89	0,89
2.n.2	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam	0,37	0,37	0,37
- Komunikasi dan Informatika				
2.o.1	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah y	100,00	100,00	100,00
2.o.2	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara	10,13	10,13	10,13
2.o.3		64,04	64,04	64,04
- Koperasi, usaha kecil dan menengah				
2.p.1	1. Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 2. Persentase fasilitas penerbitan izin p	62,50	62,50	62,50
2.p.2	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang be	48,83	48,83	48,83
- Penanaman Modal				
2.q	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanama	6,37	6,37	6,37
- Kepemudaan dan Olahraga				
2.r.1	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	1,69	1,69	1,69

2.r.2	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan m	4,46	4,46	4,46
2.r.3	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10,00	10,00	10,00
- Statistik				
2.s.1	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral y	100,00	100,00	100,00
2.s.2	1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral y	100,00	100,00	100,00
- Persandian				
2.t	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase system elektronik yan	60,93	60,93	60,93
- Kebudayaan				
2.u	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan	100,00	100,00	100,00
- Perpustakaan				
2.v.1	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	68,24	68,24	68,24
2.v.2	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya	76,57	76,57	76,57
- Kearsipan				
2.w.1	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu	75,43	75,43	75,43
2.w.2	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibu	100,00	100,00	100,00

3. Urusan Pilihan				
- Kelautan dan Perikanan				
3.a	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudiday	97,48	97,48	97,48
- Pariwisata				
3.b.1	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	-32,50	-32,50	-32,50
3.b.2	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	1,85	1,85	1,85
3.b.3	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	18,69	18,69	18,69
3.b.4	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	2,57	2,57	2,57
3.b.5	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha	2,72	2,72	2,72
- Pertanian				
3.c.1	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah u	355,27	355,27	355,27
3.c.2	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	-0,20	-0,20	-0,20
- Kehutanan				
3.d	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	100,00	100,00	100,00
- Energi dan Sumber Daya Mineral				
3.e	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0,00	0,00	0,00
- Perdagangan				

3.f.1	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang ya	72,97	72,97	72,97
3.f.2	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	41,50	41,50	41,50
3.f.3	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100,00	100,00	100,00
- Perindustrian				
3.g.1	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	6,99	6,99	6,99
3.g.2	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	72,30	72,30	72,30
3.g.3	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah y	100,00	100,00	100,00
3.g.6	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan K	125,00	125,00	125,00
- Transmigrasi				
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
- Perencanaan dan Keuangan				
4.a.1		16,20	16,20	16,20
4.a.2		5,88	5,88	5,88
4.a.3		3,00	3,00	3,00
4.a.4		3,00	3,00	3,00
4.a.5		60,30	60,30	60,30
4.a.6		9,00	9,00	9,00
- Pengadaan				
4.b.1		0,00	0,00	0,00
4.b.2		83,15	83,15	83,15
4.b.3		38,13	38,13	38,13
4.b.4		27,18	27,18	27,18
- Kepegawaian				
4.c.1		70,23	70,23	70,23

	4.c.2		22,25	22,25	22,25
	4.c.3		34,42	34,42	34,42
- Manajemen Keuangan					
	4.d.1		16,87	16,87	16,87
	4.d.2		24,96	24,96	24,96
	4.d.3		4,00	4,00	4,00
	4.d.4		13,64	13,64	13,64
- Transparansi dan Partisipasi Publik					
	4.e.1		97,22	97,22	97,22
	4.e.2		100,00	100,00	100,00

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Barito Kuala
sesuai hasil Rakortek 2025

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025
1	0000001 - Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	92.30	100	93.56	100	100	8.250.171.800
2	0000002 - Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	99.00	100	98.25	100.00	100	11.440.937.352
3	0000003 - Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	75.28	100	86.14	100	100	1.078.312.852
4	0000009 - Iklim Keamanan SMP Urusan Provinsi :		72.88	68.66	72.00	70.44	75.34	77.54	430.242.834

	- Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>								
5	0000010 - Iklim Kebhinekaan SD Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		81.49	69.72	72.21	72.41	74.70	80.96	1.108.337.837
6	0000011 - Iklim Kebinekaan SMP Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		81	66.78	68.99	71.65	73.98	76.30	430.242.834
7	0000012 - Iklim Inklusivitas SD Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		57	57.31	60.41	55.79	62.56	64.71	1.108.337.837
8	0000013 - Iklim Inklusivitas SMP Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		58	55.97	59.07	55.85	62.07	65.06	430.242.834
9	000008 - Iklim Keamanan SD Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		76	71.80	75.34	74.21	78.88	82.08	1.108.337.837

	02096 - Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023								
10	Urusan Provinsi : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50	-	40	40	40	40	151.109.400	
11	02098 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Urusan Provinsi : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	90	100	90	100	92	93	93.997.500	
12	02099 - Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan Urusan Provinsi : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	-	-	2	-	-	-	
13	02207 - Jumlah Produksi Jagung Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.591.512	7.031	7.055	7.062	7.083	7.200	343.150.000	

14	03281 - Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		80.50	100	100	100	100	100	554.375.200
15	03299 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Urusan Provinsi : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.09-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		11	22.3	21.3	23.38	21.2	21.1	-
16	03300 - Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		99.60	99	95	99	95	98	181.257.040
17	03301 - Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		98	98	98	99.5	98	98	181.257.040

18	03302 - Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>		47	75	75	75	75	75	181.257.040
19	03303 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>		93.10	99.44	95	98.46	95	98	-
20	03304 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>		71	97	97	98	97	98	-
21	03305 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota :		40	75	75	75	75	75	-

	3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
22	03306 - Jumlah Produksi Padi Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		56.046.664	240.519	241863.49	317.092	243.200	250.000	343.150.000
23	03307 - Jumlah Produksi Kedelai Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		334.308	190.95	-		-	-	343.150.000
24	03308 - Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		17.037.783	-	-	-	-	1.000	343.150.000
25	03309 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		3.070.000	189.33	171.01	173.70	176.52	181.73	-
26	03310 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah		2.000.000	21	-	0.5	-	1	-

	Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
27	03311 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		772.058	-	-	-	-	-	-
28	03312 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		2.893.808	2.850.907	2.865.162	2.795.982	2.809.962	2.824.012	-
29	03313 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		641.207	-	-	-	-	-	-
30	03314 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		2.702.421	1.693.049	1.718.445	1.668.500	1.693.528	1.718.931	-

	Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
31	03315 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		70.520	-	-	-	-	-	-
32	03316 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		43.877	-	-	-	-	-	-
33	03317 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		135.448	-	-	-	-	-	-
34	03319 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) Urusan Provinsi : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		4.966.247	1.958.051	2.122.250	2.276.018	2.478.100	2.682.543	200.115.025

35	03320 - Jumlah Produksi Susu Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>		855.569	-	-	-	-	-	200.115.025
36	03321 - Jumlah Produksi Telur Urusan Provinsi : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.27-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>		7.446.401	46.45	46.70	47.64	47.90	49.10	200.115.025
37	088 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Urusan Provinsi : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>		95	1	1	1	1	1	350.000.000
38	1010001 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Urusan Provinsi : <i>1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i> Urusan Kabupaten/Kota :		66.93	82.42	82.48	82.48	82.54	82.61	16.600.933.731

	1.04-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
39	101002 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Urusan Provinsi : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Urusan Kabupaten/Kota : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		20	10	12	41.79	14	15	51.379.130
40	101003 - Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Urusan Provinsi : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Urusan Kabupaten/Kota : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		4	7.43	7.99	1.14	8.56	8.56	-
41	1010033 - Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	-	-	-	-	-	-

42	1010034 - Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20	-	-	-	-	-	-
43	1010036 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		74						467.320.924
44	1010037 - Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	100	100	100	100	100	663.838.310
45	101004 - Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor		75	1	3	0.25	5	5	92.611.600

	Urusan Provinsi : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Urusan Kabupaten/Kota : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
46	1010044 - Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	-	-	-	-	-	-
47	1010045 - Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		85		100			100	39.450.000
48	1010046 - Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program		85		80	100	100	100	-

	Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
49	1010048 - Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	-	-	-	-	-	-
50	101005 - Pertumbuhan Wirausaha Urusan Provinsi : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Urusan Kabupaten/Kota : 2.17-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		2.90	0.7	0.8	0.6	0.9	0.9	-
51	1010051 - Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Urusan Provinsi :		50	-	-	-	-	-	-

	-								
	Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
52	1010054 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	-	-	-	-	-	-	
53	101006 - Nilai Realisasi Penanaman Modal Urusan Provinsi : 2.18-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Urusan Kabupaten/Kota : 2.18-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.650	1	0	1	1	1	94.381.075	
54	1010060 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	-	-	-	-	-	-	

55	1010061 - Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		30						1.287.899.895
56	1010065 - Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	-	-	-	-	-	-
57	1010066 - Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi Urusan Provinsi : 2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Kabupaten/Kota :		85						467.320.924

	2.16-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
58	1011 - Pertumbuhan nilai ekspor non migas Urusan Provinsi : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		7.86	11.00	15.00	0.0	20.00	20.00	-
59	1012 - Persentase penanganan pengaduan konsumen Urusan Provinsi : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		92	100	100	0.0	100	100	-
60	1020044 - Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita) Urusan Provinsi : 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Urusan Kabupaten/Kota : 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		13.5	15.51	16	10.18	14	13	47.499.071.635
61	1020045 - Penemuan Kasus TBC Urusan Provinsi : 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Urusan Kabupaten/Kota : 1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		90	29.24	90	35.85	90	90	468.211.410
62	1020046 - Angka Kematian Ibu (AKI)		180	70	194	143	183	184	2.302.833.125

	Urusan Provinsi : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>								
63	1020047 - Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin Urusan Provinsi : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	95	95	100	98.80	95	95	8.460.931.521	
64	1020048 - Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna Urusan Provinsi : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	78	100	100	100	100	100	2.437.922.995	
65	1020049 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	67.37	5.26	10.6	84	84	84	2.437.922.995	
66	1020050 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. Urusan Provinsi :	60	65	100	94	100	100	-	

	- Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>								
67	1020051 - Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. Urusan Provinsi : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.02-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>		75	100	100	100	100	100	-
68	1033 - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Urusan Provinsi : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>		6.62	3.99	6.87	1.93	7.35	7.62	549.961.015
69	1034 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB Urusan Provinsi : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>		18.15	18.6	20.69	14.53	21.05	21.41	549.961.015
70	1037 - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Urusan Provinsi : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>		21.21	4.862	12.120	4.927	12.310	12.503	549.961.015

	Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>								
71	105001 - Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana Urusan Provinsi : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>		38				18	18	-
72	105002 - Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Urusan Provinsi : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>		38				18	18	-
73	105003 - Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana Urusan Provinsi :		100	47	100	79	100	100	-

	1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Kabupaten/Kota : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
74	105301 - Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Urusan Provinsi : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Kabupaten/Kota : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100				100	100	-
75	105302 - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana Urusan Provinsi : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Kabupaten/Kota : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	80	100	98	100	100	277.121.610

	105304 - Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi								
76	Urusan Provinsi : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Kabupaten/Kota : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	1	1	1	1	1	43.857.950	
77	1082.1 - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	75	84.38	84.38	84.38	84.38	297.067.000		
78	1084 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) Urusan Provinsi : 2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan Kabupaten/Kota : 2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	91.95	89	90	87	87	87	1.100.000.000	

79	11001 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Urusan Provinsi : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>		72.94	63.41	64.42	63.12	65.45	66.36	295.932.304
80	11002 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Urusan Provinsi : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>		0.44					0.398	80.000.000
81	11003 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Urusan Provinsi : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>		72		60		61	62	2.900.000.000
82	11004 - Persentase Penurunan Emisi GRK Urusan Provinsi : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.11-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>		28.15					22.95	-
83	111111 - Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1.30	0.0167	0.0167	0.0163	0.0167	0.0169	144.697.650

	Urusan Provinsi : <i>2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>								
84	1126 - Indeks Perlindungan Anak (IPA) Urusan Provinsi : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>		65.03	69.91	70	70	71	71	1.360.946.042
85	1127 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Urusan Provinsi : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>		95	1	1	1	1	1	-
86	1128 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Urusan Provinsi :		0.43		-	-	0	0	1.100.000.000

	<i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>								
87	1129 - Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Urusan Provinsi : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>		601		601		601	601	510.946.042
88	1132 - Persentase ARG Urusan Provinsi : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>		10.0	1	1	1	1	1	250.000.000
89	1174.1 - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya Urusan Provinsi : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i> Urusan Kabupaten/Kota :		2.100.000	9.250	10.250		11.684		-

	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
90	1181 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Urusan Provinsi : 3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Urusan Kabupaten/Kota : 3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		57.50	63	73	70	75.03	77	207.619.485
91	11899 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		71.63	12.27	12.32	12.41	12.41	12.60	1.850.000.000
92	1190 - Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.08-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		601	562	915	714	950	975	510.946.042
93	11900 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		8.6	0.137	4.325	4.419	4.513	4.701	1.972.888.700

	Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
94	11902 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		1.67	1.271	1.272	1.271	1.274	1.277	1.850.000.000
95	11903 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		19.91	-	22.82	-	23.06	-	1.972.888.700
96	11904 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		65.50	58	71	79	83	88	2.022.888.700
97	11905 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan Urusan Provinsi :		0.66	-	0.46	-	0.56	-	1.850.000.000

	2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
98	11906 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni Urusan Provinsi : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.22-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		0.3	0.32	1.03	1.04	1.05	1.06	1.850.000.000
99	1207 - Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Urusan Provinsi : 3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		882	477.4	510	220	525	525	65.000.000
100	1208 - Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) Urusan Provinsi : 3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.31-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		244.79	55.55	24.28	24.48	24.60	24.80	549.961.015
101	1237 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi		46.10						207.619.485

	Urusan Provinsi : 3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Urusan Kabupaten/Kota : 3.32-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
102	1285 - Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Urusan Provinsi : 3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Urusan Kabupaten/Kota : 3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		#####	1.052.505.184	1.500.000.000	1.949.592.248	2.000.000.000	2.100.000.000	-
103	1300 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	100% (6 Orang)	100% (3 Orang)	100% (3 Orang)	100% (5 Orang)	100% (7 Orang)	326.667.162
104	1301 - Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	100% (190 Orang)	100% (136 Orang)	100% (136 Orang)	100% (48 Orang)	100% (96 Orang)	326.667.162
105	1302 - Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Urusan Provinsi :		100		100% (102 Orang)	88.23% (90 Orang)	100% (119 Orang)	100% (119 Orang)	326.667.162

	1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
106	1303 - Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	100% (7 Orang)	100% (8 Orang)	100% (8 Orang)	100% (15 Orang)	100% (15 Orang)	326.667.162
107	1304 - Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	32.5% (65 Paket)	200 Paket	59% (118 Paket)	200 Paket	200 Paket	458.497.690
108	1305 - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Urusan Provinsi : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Kabupaten/Kota : 1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		70	100% (17 Kecamatan)	100% (17 Kecamatan)	100% (17 Kecamatan)	100% (17 Kecamatan)	100% (17 Kecamatan)	455.468.065
109	1306 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		83	1	100% (240 orang)	100% (240 orang)	100% (91 KK)	100% (100 Orang)	567.604.839

	Urusan Provinsi : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>								
110	1307 - Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Urusan Provinsi : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>	73	100% (4 Lembaga)	100% (4 Lembaga)	100% (4 Lembaga)	100% (4 Lembaga)	100% (4 Lembaga)	-	
111	1308 - Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya Urusan Provinsi : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>	100.000	80	65	65	83	25	799.065.635	
112	1309 - Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Urusan Provinsi : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.06-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i>	100	14.275 KPM (Oktober - Desember)		12.929 KPM (Oktober - Desember)			374.291.530	
113	1500 - Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Urusan Provinsi :	60	91.26	92.76	115.03	94.26	95.76	82.095.775	

	- Urusan Kabupaten/Kota : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
114	1502 - pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 3.30-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-
115	1999 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Urusan Provinsi : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan Kabupaten/Kota : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		61	59	60	60	65	70	745.069.005
116	2000 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Urusan Provinsi : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan Kabupaten/Kota : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		18	27	25	21	21	21	1.595.069.005
117	2024 - Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		67.32	0.00040	0.00053	0.00093	0.00094	0.00095	694.697.650

	Urusan Provinsi : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kabupaten/Kota : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
118	2025 - Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Urusan Provinsi : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kabupaten/Kota : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		75.79	0.0216	0.0334	0.0344	0.0351	0.0353	400.000.000
119	2026 - Peningkatan Prestasi Olahraga Urusan Provinsi : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Kabupaten/Kota : 2.19-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		40.00	0	0	0	0	0	2.764.847.325
120	2121 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Urusan Provinsi : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota :		99.5	94.23	97	94.90	99	100	99.205.325

	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL								
121	2122 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Urusan Provinsi : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		100	49.62	100	53.90	100	100	99.205.325
122	2123 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Urusan Provinsi : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		100	100	100	100	100	100	99.205.325
123	2124 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan Urusan Provinsi :		100	28.84	100	30.65	100	100	99.205.325

	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL								
124	2125 - Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan Urusan Provinsi : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		62	77.25		87			99.205.325
125	2126 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Urusan Provinsi : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		30						564.093.784
126	2127 - Jumlah data profil kependudukan yang disusun Urusan Provinsi :		2	2	2	2	2	2	-

	2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Kabupaten/Kota : 2.12-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
127	2131 - Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Urusan Provinsi : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.000	7	7	7	7	7	-
128	2132 - Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital Urusan Provinsi : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1.500	0.0	0.0	0.0	15	15	1.068.485.788
129	2133 - Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek Urusan Provinsi :		3.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.000.000

	2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
130	2134 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Urusan Provinsi : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		800	195	195	195	195	195	25.000.000
131	2135 - Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes Urusan Provinsi : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		4.350	195	195	195	195	195	-
132	2136 - Persentase Desa Mandiri Urusan Provinsi : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Kabupaten/Kota : 2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		19.64	6.15	11.28	14.87	16.41	21.54	275.000.000

133	2137 - Persentase Kemiskinan di Perdesaan Urusan Provinsi : <i>2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>		10.88	5.66	2.00	1.59	1.31	1.31	75.000.000
134	2138 - Persentase BUM Desa Maju Urusan Provinsi : <i>2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.13-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>		8.28	0.6	0.0	0.0	0.6	0.6	150.000.000
135	220201 - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	92.30	100	93.56	100	100	8.250.171.800
136	220202 - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	99	100	98.25	100	100	1.082.187.852

137	220203 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		59	53.71	56.40	57.90	59.08	62.16	4.969.582.482
138	220204 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		48	41.02	42.66	46.60	47.63	48.66	4.959.332.482
139	220205 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		69	64.50	67.73	67.01	70.95	74.55	2.527.993.060
140	220206 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		61	54.31	67.08	59.47	67.08	69.45	728.190.066
141	220207 - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		62	58.16	58.19	61.20	61.23	61.26	891.045.161

	Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
142	220208 - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		62	60.51	61.61	65.05	66.15	66.95	309.221.026
143	2401 - Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Urusan Provinsi : 2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.24-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		60		60	53.21	60	70.1	147.433.350
144	25000 - Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum Urusan Provinsi : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Kabupaten/Kota : 1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		552	18	18	18	18	18	285.167.895

145	25001 - Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" Urusan Provinsi : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>		552	18	18	18	18	18	263.588.940
146	25003 - Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* Urusan Provinsi : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.05-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i>		552	18	18	18	18	18	-
147	3261 - Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Urusan Provinsi : <i>3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>		1.250.000.000	178.102	189.375	193	189.910	192.047	604.510.780
148	3262 - Rasio PDB Pariwisata Urusan Provinsi : <i>3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>		4.5	6.71	6.84	8.72	7.02	7.19	604.510.780

	Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.26-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>								
149	4123123 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>		100	99	100	98.25	100	100	13.019.169.443
150	461.1 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Urusan Provinsi : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i>		6.648.453	9.250	10.250	11.684	11.684		-
151	470 - Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja Urusan Provinsi : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i>		2.315.250						-
152	470.1 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Urusan Provinsi : <i>2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i> Urusan Kabupaten/Kota :		55.000	188	238		288		-

	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
153	470.2 - Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		75	90	90		90		-
154	484.2 - Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		70	-	-		-		-
155	500.1 - Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		60						-
156	5221 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Urusan Provinsi : 2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Urusan Kabupaten/Kota :		2.6		1.5	1.66	1.7	1.9	26.652.100

	2.20-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
157	5232 - Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Urusan Provinsi : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		300	60	60	30	47	47	31.800.590
158	5233 - Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi Urusan Provinsi : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		325						31.800.590
159	5234 - Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi Urusan Provinsi : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.21-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		275						31.800.590
160	524 - Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota :		2						-

	2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
161	525 - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Urusan Provinsi : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Kabupaten/Kota : 2.07-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		250.000		20	20	40		-
162	656 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Urusan Provinsi : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan Kabupaten/Kota : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.1	2.31	2.29	2	2.29	2	1.550.000.000
163	657 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Urusan Provinsi : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan Kabupaten/Kota : 2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		63.41	86.84	87	82	86	87	682.023.850

164	658 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Urusan Provinsi : <i>2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.14-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>		7.1	9	9	8	8	8	1.112.023.850
165	663 - Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>		0.763	1	1	1	1	1	2.670.143.900
166	665 - Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>		29	-	44	44	46	50	13.358.505.080
167	667 - Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani pada Jalan Kabupaten/Kota Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>		100						-

168	668 - Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Urusan Provinsi : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		120						-
169	669 - Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		125	3	3	3	3	4	81.328.000
170	67 - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.01-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	92.30	100	93.56	100	100	8.250.171.800
171	670 - Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		9	1	1	1	1	1	195.125.000

172	671 - Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		1.157.808		1.810	1.820	1.830	1.840	195.125.000
173	7780 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Urusan Provinsi : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.15-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		88.5	-			78	79	27.465.000
174	8011 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Urusan Provinsi : 8.01-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Urusan Kabupaten/Kota : 8.01-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		38					1 Kabupaten	-
175	8012 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Urusan Provinsi : 8.01-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Urusan Kabupaten/Kota : 8.01-KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		38					1 Kabupaten	-
176	852 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		70.5	60.36	70	70.02	75	80	91.086.970

	Urusan Provinsi : 2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
177	858 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Urusan Provinsi : 2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.23-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		71.5		70	57.85	75	80	56.750.000
178	BM2 - Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota Urusan Provinsi : - Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		65	67	67.25	67.25	68	67.75	92.290.372.962
179	CK01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		12.5	9	10	9.91	11.50	13	11.636.355.250
180	CK02 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah		24	77	77.84	77.84	78.69	79.53	100.000.000

	Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>								
181	CK12 - Persentase angka BABS di tempat terbuka Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		2.5	31.44	31	30.97	30	29	11.636.355.250
182	CK2 - Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		33	0.0	25	0.0	25	25	30.580.501.670
183	CK4 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		28	53.80	54.71	54.71	56.32	59	30.580.501.670

184	Jakon3 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		7.925	0.0	30	30	30	30	100.000.000
185	Jakon4 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		45.300	74	245	245	250	250	100.000.000
186	Jakon5 - Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		70	62	65	65	68	71	150.000.000
187	Jakon6 - Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi Urusan Provinsi :		60	62	65	65	68	71	-

	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
188	Jakon7 - Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		70	62	65	65	68	71	50.000.000
189	Jakon8 - Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		50	62	65	65	68	71	-
190	KP_04 - Produksi Perikanan Tangkap Urusan Provinsi : 3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Kabupaten/Kota : 3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		6.000.000	9348.74	9.358	9.727.729	9.360	9.362	-

191	KP_05 - Produksi Perikanan Budidaya Urusan Provinsi : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>		19.539.705	10.685.608	10.788	11.882	10.895	11.003	850.669.924
192	KP_06 - Angka Konsumsi Ikan Urusan Provinsi : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>		43.30	-	-	-	-	-	-
193	KP_07 - Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Urusan Provinsi : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>3.25-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>		98	-	-	-	-	-	-
194	P1 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi Urusan Provinsi : <i>2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i>		286.339	750	900	900	1.000	500	-
195	P2 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		148.800	300	300	300	500		-

	Urusan Provinsi : 2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Urusan Kabupaten/Kota : 2.10-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
196	PR1 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60	1	1	1	1	1	-	
197	PR11 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120					2	-	
198	PR12 - Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33					1	-	

199	PR2 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		106	3	1	1		2	-
200	PR5 - Penetapan RTRW Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		50					1	-
201	PR6 - Penetapan RDTR Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>		89		3				-
202	SDA10 - Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun Urusan Provinsi : <i>1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i> Urusan Kabupaten/Kota :		200	12	45.6	45.6	31	20	500.000.000

	1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
203	SDA7 - Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		350.000	1.910	1.200	1.200	1.620	1.500	15.109.840.450
204	SDA8 - Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		50.000	700	1.630	1.630	680	500	23.488.854.753
205	SDA9 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Urusan Provinsi : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Kabupaten/Kota : 1.03-URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		5						-

BAB VII

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 ini menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga merupakan dokumen transisi awal untuk pelaksanaan RPJMD Kab. Barito Kuala Tahun 2025 – 2029 sehingga didalamnya telah tercantum visi, misi dan arah kebijakan Bupati terpilih serta telah disinkronisasikan dengan tema pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas asti cita

Dokumen Perubahan RKPD ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala serta berfungsi sebagai:

1. Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan RKA Perangkat daerah Tahun 2025, dan
2. Pedoman dalam rangka Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) tahun 2025

Bupati Barito Kuala



H. Dr. BAHRUL ILMI, SH, MH



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 430 /KUM/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan adanya perubahan pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang mengakibatkan perbuahan nomenklatur jabatan dari anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan total;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diawali dengan proses penyusunan RKPD tahun 2026 serta Perubahan RKPD 2025;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan pasal 55 Peraturan bupati Nomor 64 Tahun 2019 bahwa penyusunan dokumen RKPD diawali dengan pembentukan tim penyusun RKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Meningat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rancangan dan Perubahan RKPD tahun 2025, berdasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005–2025 dan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah 2024-2025 sesuai dengan Kelompok Kerja yang disusun dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - Tim Penyusun Materi Perubahan RKPD
Melakukan penyusunan dokumen secara umum berdasarkan format baku sesuai perundangan dengan materi yang disediakan Pokja lainnya.
 - Kelompok Kerja Bidang Data Pembangunan daerah
Menyediakan informasi beserta Data-data indikator pembangunan makro maupun data-data statistic sektoral lainnya secara time series yang akan digunakan pada bagian gambaran umum kondisi daerah
 - Kelompok kerja Bidang Evaluasi Pembangunan
Menyediakan informasi mengenai evaluasi dan capaian pembangunan yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan tahun 2026 serta komparasi RKPD 2025 dengan RKP 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025
 - Kelompok kerja Bidang Anggaran Pembangunan Daerah
Menyediakan Informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan dan alokasi anggaran untuk tahun perencanaan 2025.
- b. Menyusun rancangan dan Perubahan RKPD tahun 2025 sesuai sistematika yang sudah di atur oleh perturan perundang-undangan.
- c. Melakukan finalisasi Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2024

- d. Melaksanakan fasilitasi Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 bersama Tim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Melakukan finalisasi Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025
- f. Menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan dokumen Perubahan RKPD tahun 2025

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 430 /KUM/2024
Tanggal 17 Oktober 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

No.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina
A	Tim Penyusun Materi RKPD	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Penanggung Jawab
3	Kepala Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Ketua
4	Kabid. Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Barito Kuala	Sekretaris
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Barito Kuala	anggota
6	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Kuala	Anggota
8	Perencana Muda Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Herni Yanti, SKM, M.Kes)	Anggota
9	Perencana Muda Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Juniartinah, SE)	Anggota
10	Perencana Muda Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Khairul Arifin, S.IP, M.IP)	Anggota
11	Perencana Pertama Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Agisna Fauzia, S.Kom)	Anggota
12	Perencana Pertama Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Muhammad Ridha, ST)	Anggota
B	Kelompok Kerja Bidang Data Pembangunan Daerah	
13	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Ketua
14	Perencana Muda Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Mulyani, S.Sos)	Anggota
15	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
16	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
C	Kelompok Kerja Bidang Evaluasi Pembangunan	
17	Kabid. Evaluasi dan Pengendalian Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Ketua
18	Perencana Muda Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Ahmad Riadi, S.Pi)	Anggota
19	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
20	Perencana Pertama Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Abdurrasyid Ridho, S.Kom)	Anggota
21	Perencana Pertama Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Handoko Wijaya, SE))	Anggota

D	Kelompok Kerja Bidang Anggaran Pembangunan Daerah	
22	Sekretaris Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Ketua
23	Sekretaris BP2RD Kab. Barito Kuala	Anggota
24	Kepala Bidang Anggaran BPAKD Kab. Barito Kuala	Anggota
25	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Aset Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota
26	Ahli Pertama - Analis Anggaran Bappelitbang Kab. Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Tabel T.C-19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (2025 Triwulan I) Kabupaten Barito Kuala

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Out put)	Capaian Kinerja RPJMD (RPD) Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2025 Triwulan I			Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD (RPD) s.d Tahun 2025 Tri I (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				(K)	Satuan	(Rp)	(K)	Satuan	(Rp)	(K)	Satuan	(Rp)	(K)	Satuan	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	Satuan	(Rp)	(K)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(8)			(9)		(10)			(11)		(12)	(13)
(1) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	57,68	%	480.662.131.681,00	54,04	%	126.273.714.903,29	55,86	%	75.195.302.790,00	18,23	%	24.674.227.892,00	32,64	32,81	18,23	%	150.947.942.795,29	31,61	31,40	DINAS PENDIDIKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100	%	430.587.500,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	68,36	%	61.512.500,00	0	%	-	67,27	%	20.250.350,00	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
4	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan Nilai UHC	100	%	577.350.554.394,00	91,58	%	101.079.887.948,00	100	%	130.807.844.833,00	5,34	%	12.290.469.027,00	5,34	9,40	5,34	%	113.370.356.975,00	5,34	19,64	DINAS KESEHATAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
5	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	100	%	681.378.920,00	25	%	1.465.333.747,00	50	%	1.380.361.455,00	5,27	%	19.521.520,00	10,54	1,41	30,27	%	1.484.855.267,00	30,27	217,92	DINAS KESEHATAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
6	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	%	11.652.534.388,00	70,83	%	284.608.640,00	100	%	453.493.295,00	5,27	%	1.271.875,00	5,27	0,28	5,27	%	285.880.515,00	5,27	2,45	DINAS KESEHATAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
7	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	%	1.021.100.128,00	195,24	%	1.162.241.737,00	100	%	347.397.205,00	4,17	%	1.715.100,00	4,17	0,49	4,17	%	1.163.956.837,00	4,17	113,99	DINAS KESEHATAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
8	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	80	%	68.955.750.484,00	94,24	%	59.313.843.951,00	78	%	41.786.446.525,00	4,49	%	4.735.926.464,00	5,76	11,33	98,73	%	64.049.770.415,00	123,41	92,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
9	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	90,57	%	72.963.033.853,00	82,17	%	36.698.087.030,00	86,17	%	15.537.268.000,00	7,32	%	1.581.038.686,00	8,49	10,18	89,49	%	38.279.125.716,00	98,81	52,46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	98	%	7.020.218.500,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
11	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	14,5	%	25.514.093.900,00	11,5	%	15.933.871.254,00	13	%	11.812.989.500,00	0,5	%	99.575.122,00	3,85	0,84	12,00	%	16.033.446.376,00	82,76	62,84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
12	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	40	%	1.300.000.000,00	0	%	-	30	%	200.000.000,00	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
13	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	93	%	67.386.457.100,00	89	%	49.081.401.049,00	91	%	46.160.176.750,00	13	%	5.158.113.845,00	14,29	11,17	102,00	%	54.239.514.894,00	109,68	80,49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
14	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Terlata	100	%	49.031.753.704,00	95,23	%	12.249.669.868,00	97,61	%	2.700.000.000,00	0	%	-	0	0,00	95,23	%	12.249.669.868,00	95,23	24,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
15	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	68	%	492.406.385.150,00	67,27	%	119.384.767.163,00	67,25	%	72.268.748.000,00	0,13	%	33.638.000,00	0,19	0,05	67,40	%	119.418.405.163,00	99,12	24,25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
16	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	75	%	1.773.250.256,00	68	%	1.102.264.939,00	71	%	800.000.255,00	7,77	%	50.750.100,00	10,94	6,34	75,77	%	1.153.015.039,00	101,03	65,02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
17	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	72,22	%	4.065.454.717,00	55,56	%	628.006.550,00	72,22	%	1.004.651.375,00	4,82	%	44.561.750,00	6,67	4,44	60,38	%	672.568.300,00	83,61	16,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								

18	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang ditangani	100	%	13.950.222.050,00	100	%	1.978.371.902,00	100	%	5.527.586.125,00	1,33	%	9.076.875,00	1,33	0,16	1,33	%	1.987.448.777,00	1,33	14,25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
19	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio peningkatan luas permukiman Layak Huni	0,8766	%	4.318.308.133,00	0,8749	%	6.427.306.594,00	0,8757	%	10.874.058.980,00	0,012	%	18.530.600,00	1,37	0,17	0,89	%	6.445.837.194,00	101,17	149,27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
20	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	88,524	%	7.565.561.205,00	88,475	%	2.782.560.315,00	88,499	%	2.599.412.029,00	1,327	%	2.217.400,00	1,50	0,09	89,802	%	2.784.777.715,000	101,44	36,81	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
21	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	63,48	%	8.489.371.336,00	46,91	%	37.993.326.435,00	55,06	%	28.830.000.435,00	0,41	%	20.931.853,00	0,74	0,07	47,32	%	38.014.258.288,00	74,54	447,79	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran
22	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengebang Perumahan Skala Kecil	23,05	%	45.338.866.150,00	22,95	%	44.093.461,00	0	%	-	0	%	-	-	-	22,95	%	44.093.461,00	99,57	0,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
23	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kualitas Penanggulangan Bencana oleh BPBD	100	%	4.087.898.355,00	97,32	%	2.390.009.319,00	100	%	1.154.210.995,00	5,77	%	78.963.500,00	5,77	6,84	5,77	%	2.468.972.819,00	5,77	60,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
24	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	100	%	7.347.234.615,00	100	%	1.599.693.792,00	100	%	1.181.916.990,00	20,14	%	141.928.950,00	20,14	12,01	20,14	%	1.741.622.742,00	20,14	23,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
25	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100	%	1.708.311.840,00	100	%	629.030.275,00	100	%	421.954.760,00	25	%	4.120.000,00	25	0,98	25	%	633.150.275,00	25,00	37,06	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
26	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100	%	53.373.786.767,00	100	%	1.090.111.598,00	100	%	1.844.151.982,00	2,39	%	73.325.634,00	2,39	3,98	2,39	%	1.163.437.232,00	2,39	2,18	DINAS SOSIAL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
27	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100	%	726.471.524,00	69,33	%	612.898.347,00	100	%	3.046.524.181,00	14,98	%	712.490.250,00	14,98	23,39	14,98	%	1.325.388.597,00	14,98	182,44	DINAS SOSIAL	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
28	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	100	%	1.568.936.051,00	100	%	972.770.344,00	100	%	1.293.823.235,00	8	%	104.468.450,00	8	8,07	8	%	1.077.238.794,00	8,00	68,66	DINAS SOSIAL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
29	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100	%	2.368.607.055,00	100	%	527.583.540,00	100	%	270.653.387,00	6,5	%	14.568.275,00	6,5	5,38	6,5	%	542.151.815,00	6,50	22,89	DINAS SOSIAL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(2) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
30	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100	%	20.301.483.299,00	100	%	739.675.725,00	100	%	587.441.100,00	8,27	%	60.575.300,00	8,27	10,31	8,27	%	800.251.025,00	8,27	3,94	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV

31	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100	%	5.991.000.000,00	100	%	66.306.300,00	100	%	93.888.900,00	0	%	-	-	-	100	%	66.306.300,00	100,00	1,11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
32	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Aturan Ketenagakerjaan	100	%	975.000.000,00	100	%	151.772.473,00	100	%	1.837.131.700,00	13,33	%	94.576.200,00	13,33	5,15	13,33	%	246.348.673,00	13,33	25,27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
33	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	100	%	207.732.040,00	100	%	23.491.900,00	100	%	25.000.000,00	0	%	-	0	0,00	100	%	23.491.900,00	100,00	11,31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
34	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100	%	518.137.301,00	100	%	438.618.205,00	100	%	372.762.748,00	1,42	%	9.000.000,00	1,42	2,41	1,42	%	447.618.205,00	1,42	86,39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
35	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100	%	1.533.058.913,00	100	%	67.248.805,00	100	%	45.000.000,00	0	%	-	0	0,00	100	%	67.248.805,00	100,00	4,39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
36	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak/KLA	100	%	1.181.053.661,00	100	%	137.963.502,00	100	%	72.000.000,00	0	%	2.420.000,00	0	3,36	100	%	140.383.502,00	100,00	11,89	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
37	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100	%	808.386.000,00	100	%	164.437.425,00	100	%	177.935.000,00	0	%	-	0	0,00	100	%	164.437.425,00	100,00	20,34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
38	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi	96,5	%	16.893.466.278,00	0	%	0	0	%	0	0	%	0	-	-	-	%	-	-	-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
39	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94	Skor	2.952.463.713,00	92	Skor	783.744.957,00	93	Skor	1.024.906.871,00	0	Skor	45.650.295,00	0	4,45	92	Skor	829.395.252,00	97,87	28,09	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
40	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100	%	154.536.200,00	100	%	93.220.551,00	100	%	91.110.645,00	0	%	12.539.000,00	0	13,76	100	%	105.759.551,00	100,00	68,44	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																								
41	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100	%	521.003.851,00	0	%	0	0	%	0	0	%	0	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
42	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	%	5.030.000.000,00	100	%	8.226.221.040,00	100	%	3.446.907.690,00	0	%	10.000.000,00	0	0,29	100	%	8.236.221.040,00	100,00	163,74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV

43	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	100	%	15.000.000.000,00	0	%	0	0	%	0	0	%	0	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
44	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCERAMAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	100	%	1.140.550.783,00	89,91	%	1.581.832.195,00	100	%	1.546.936.200,00	0,37	%	74.067.325,00	0,37	4,79	0,37	%	1.655.899.520,00	0,37	145,18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
45	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100	%	675.500.000,00	100	%	37.134.100,00	100	%	1.358.309.050,00	0	%	252.592.548,00	0	18,60	100	%	289.726.648,00	100,00	42,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
46	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100	%	617.211.967,00	75	%	393.065.465,00	100	%	421.519.575,00	12,5	%	68.230.000,00	12,5	16,19	12,5	%	461.295.465,00	12,50	74,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
47	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	1.777.959.327,00	75	%	183.318.490,00	100	%	226.117.270,00	15,44	%	28.382.750,00	15,44	12,55	15,44	%	211.701.240,00	15,44	11,91	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
48	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	%	460.457.800,00	75	%	256.281.488,00	100	%	368.650.000,00	12,5	%	38.773.200,00	12,5	10,52	12,5	%	295.054.688,00	12,50	64,08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
49	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang bersih dan nyaman	100	%	963.583.250,00	75	%	178.565.610,00	100	%	204.808.400,00	100	%	2.737.625,00	100	1,34	100	%	181.303.235,00	100,00	18,82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
50	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	%	444.943.775,00	100	%	19.437.625,00	100	%	46.800.000,00	25	%	5.460.000,00	25	11,67	25	%	24.897.625,00	25,00	5,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
51	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penanganan dan pengurangan sampah	30,01	%	4.536.120.756,00	32,95	%	10.478.805.640,00	30,01	%	14.065.053.075,00	6,47	%	1.690.268.000,00	21,56	12,02	6,47	%	12.169.073.640,00	21,56	268,27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
52	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100	%	6.407.009.736,00	138,88	%	1.533.214.693,00	100	%	1.231.329.104,00	29,05	%	400.811.360,00	29,05	32,55	29,05	%	1.934.026.053,00	29,05	30,19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
53	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standar	100	%	606.852.665,00	13,25	%	261.006.545,00	100	%	214.688.320,00	12,97	%	20.708.560,00	12,97	9,65	12,97	%	281.715.105,00	12,97	46,42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
54	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100	%	402.122.152,00	99,11	%	233.506.410,00	100	%	397.584.327,00	7,15	%	23.415.100,00	7,15	5,89	7,15	%	256.921.510,00	7,15	63,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
55	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100	%	112.000.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																								
56	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	100	%	1.922.866.170,00	98	%	224.988.751,00	98	%	159.693.125,00	20	%	9.620.000,00	20,41	6,02	20,00	%	234.608.751,00	20,00	12,20	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
57	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	35	%	1.210.207.469,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	-	-	%	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya

58	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	96	%	3.808.900.453,00	92	%	2.702.427.502,00	94	%	2.907.491.296,00	20	%	547.088.656,00	21,28	18,82	20,00	%	3.249.516.158,00	20,83	85,31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
59	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yangaktif	50	%	8.468.124.683,00	40	%	1.824.188.259,00	45	%	928.179.282,00	13	%	232.678.500,00	28,89	25,07	13	%	2.056.866.759,00	26,00	24,29	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
60	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertilty Rate/TFR	1,9	%	352.407.725,00	2,1	%	1.075.031.184,00	2,0	%	1.982.909.980,00	0,08	%	377.700.739,00	4,00	19,05	0,08	%	1.452.731.923,00	101,86	412,23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
61	2.14.03	PORGRAM PEMBINAAN KELUARHA BERENCANA (KB)	Unmeed Need	11,8	%	3.052.109.712,00	11,9	%	2.675.991.046,00	11,85	%	2.087.307.300,00	0	%	11.930.400,00	0,00	0,57	0	%	2.687.921.446,00	113,38	88,07	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
62	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeed Need	11,8	%	929.798.154,00	11,9	%	2.022.580.700,00	11,85	%	3.753.271.060,00	0,76	%	195.892.665,00	6,41	5,22	0,76	%	2.218.473.365,00	112,52	238,60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																								
63	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,61	%	3.643.734.934,00	82,41	%	8.896.917.502,00	82,61	%	10.728.856.255,00	22,99	%	8.896.917.502,00	27,83	82,93	22,99	%	17.793.835.004,00	27,50	488,34	DINAS PERHUBUNGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
64	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,61	%	6.059.953.362,00	77,9	%	2.360.104.079,00	82,61	%	3.602.301.979,00	10,33	%	2.360.104.079,00	12,50	65,52	10,33	%	4.720.208.158,00	12,35	77,89	DINAS PERHUBUNGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																								
65	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100	%	7.359.579.275,00	100	%	1.674.928.559,00	100	%	2.451.666.548,00	39	%	139.645.800,00	39,00	5,70	39	%	1.814.574.359,00	39,00	24,66	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
66	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	83	%	7.066.283.817,00	95,45	%	2.929.739.879,00	83	%	3.632.503.770,00	62,25	%	495.716.360,00	75,00	13,65	62,25	%	3.425.456.239,00	75,00	48,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
67	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkembang	39,66	%	109.008.125,00	36,36	%	59.064.815,00	38,01	%	53.857.750,00	14,69	%	2.940.000,00	38,65	5,46	14,69	%	62.004.815,00	37,04	56,88	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
68	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	49,58	%	134.427.390,00	39,66	%	6.449.850,00	44,62	%	14.835.000,00	8,92	%	-	19,99	0,00	8,92	%	6.449.850,00	17,99	4,80	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV

69	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	42,83	%	206.458.130,00	41,88	%	183.987.305,00	42,36	%	208.167.625,00	11,3	%	11.713.150,00	26,68	5,63	11,3	%	195.700.455,00	26,38	94,79	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
70	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	42,83	%	768.144.265,00	41,88	%	49.604.930,00	42,36	%	98.139.625,00	0	%	-	0,00	0,00	41,88	%	49.604.930,00	97,78	6,46	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																								
71	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Proyek Perencanaan Investasi	100	%	2.323.760.775,00	100	%	228.016.090,00	100	%	127.358.470,00	5	%	6.300.350,00	5,00	4,95	5	%	234.316.440,00	5,00	10,08	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
72	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	12,5	%	656.683.120,00	12,5	%	291.896.223,00	12,5	%	168.040.750,00	1,25	%	11.220.000,00	10,00	6,68	1,25	%	303.116.223,00	10,00	46,16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
73	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan (DAU dan DAK)	100	%	1.352.242.835,00	104,17	%	117.767.826,00	100	%	195.608.125,00	16,24	%	10.580.350,00	16,24	5,41	16,24	%	128.348.176,00	16,24	9,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
74	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	100	%	1.409.594.520,00	165,28	%	506.558.056,00	100	%	404.457.220,00	53,72	%	83.898.700,00	53,72	20,74	53,72	%	590.456.756,00	53,72	41,89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
75	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Informasi Penanaman Modal (Media)	5	Media	68.694.000,00	1,92	Media	17.061.350,00	4	Media	34.877.500,00	0	Media	1.660.000,00	0,00	4,76	1,92	Media	18.721.350,00	38,40	27,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
76	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi	45,45	%	1.912.133.200,00	33,33	%	576.364.929,00	40	%	650.000.000,00	2	%	43.207.900,00	5,00	6,65	35,33	%	619.572.829,00	77,73	32,40	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	
77	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	20	%	15.390.648.820,00	15,67	%	5.838.779.606,00	18	%	6.041.334.821,00	1,44	%	251.655.100,00	8,00	4,17	17,11	%	6.090.434.706,00	85,55	39,57	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	
78	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100	%	2.200.000.000,00	100	%	399.832.000,00	100	%	300.000.000,00	25	%	75.000.000,00	25,00	25,00	25	%	474.832.000,00	25,00	21,58	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																								
79	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terkompilasinya Data Statistik Sektoral SKPD	2	Kompilasi	603.687.028,00	2,72	Kompilasi	86.684.800,00	2	Kompilasi	156.661.700,00	0	Kompilasi	15.229.930,00	0,00	9,72	0	Kompilasi	101.914.730,00	0,00	16,88	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																								
80	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100	%	779.889.420,00	135	%	125.645.050,00	100	%	250.753.718,00	62,5	%	14.838.300,00	62,50	5,92	62,5	%	140.483.350,00	62,50	18,01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
81	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	72,73	%	1.768.445.675,00	54,55	%	2.393.347.216,00	63,64	%	2.366.240.400,00	31,82	%	618.540.000,00	50,00	26,14	31,82	%	3.011.887.216,00	43,75	170,31	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
82	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100	%	5.047.751.550,00	93,75	%	337.499.600,00	100	%	361.503.970,00	12,5	%	22.000.000,00	12,50	6,09	12,5	%	359.499.600,00	12,50	7,12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								

83	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100	%	1.565.078.420,00	100	%	1.085.336.464,00	100	%	926.572.158,00	3,61	%	154.262.800,00	3,61	16,65	3,61	%	1.239.599.264,00	3,61	79,20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																								
84	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK dan Berbasis TIK	100	%	849.209.920,00	100	%	430.034.900,00	100	%	633.000.746,00	12,81	%	122.935.150,00	12,81	19,42	12,81	%	552.970.050,00	12,81	65,12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
85	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100	%	571.826.540,00	100	%	107.207.750,00	100	%	61.072.500,00	22,22	%	16.086.400,00	22,22	26,34	22,22	%	123.294.150,00	22,22	21,56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
86	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100	%	70.665.000,00	100	%	660.000,00	0	%	-	0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	%	660.000,00	100,00	0,93	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
(3) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
87	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	0,021	%	783.402.474,00	0,021	%	693.899.631,00	0,021	%	622.074.185,00	0	%	109.083.130,00	0,00	17,54	0,021	%	802.982.761,00	100,00	102,50	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
88	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	1	%	1.871.575.800,00	1	%	830.839.135,00	1	%	892.488.059,00	0,15	%	137.182.525,00	15,00	15,37	0,15	%	968.021.660,00	15,00	51,72	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
89	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	95	%	3.191.373.683,00	85	%	596.207.097,00	90	%	520.159.550,00	22,5	%	68.903.596,00	25,00	13,25	22,5	%	665.110.693,00	23,68	20,84	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
90	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang terlaksana dan diikuti	100	%	2.346.717.348,00	100	%	803.323.514,00	100	%	704.510.780,00	100	%	8.340.000,00	100,00	1,18	100	%	811.663.514,00	100,00	34,59	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
91	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (Ha)	117.744,31	Ha	10.141.411.649,00	115.041,98	Ha	3.359.281.296,00	117.176,67	Ha	6.522.392.813,00	47.040,14	Ha	84.944.325,00	40,14	1,30	47.040,14	Ha	3.444.225.621,00	39,95	33,96	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
92	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak	2,58	%	13.680.087.915,00	2,56	%	1.350.718.274,00	2,57	%	569.148.505,00	0,65	%	24.779.950,00	25,29	4,35	0,65	%	1.375.498.224,00	25,19	10,05	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,5	%	4,01		%	1,5		%	1,1		%	73,33		1,1		%	73,33					
93	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw/Ha)	1.513,13	Kw/Ha	946.211.796,00	1.413,80	Kw/Ha	321.181.338,00	1.512,33	Kw/Ha	576.835.500,00	257,99	Kw/Ha	-	17,06	0,00	257,99	Kw/Ha	321.181.338,00	17,05	33,94	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
94	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak	2,58	%	2.038.899.368,00	2,56	%	650.481.706,00	2,57	%	297.698.800,00	0,65	%	28.076.650,00	25,29	9,43	0,65	%	678.558.356,00	25,19	33,28	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV; Indikator "Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan" pada tahun 2025 tidak digunakan sehingga capaian diposisikan pada "0"
		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	33,33	%	20		%	25		%	0		%	0,00		0,00		%	0,00					

95	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	8,75	%	1.722.363.065,00	13,62	%	1.079.408.749,00	8,25	%	709.040.150,00	2,09	%	70.302.225,00	25,33	9,92	2,09	%	1.149.710.974,00	23,89	66,75	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
96	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	112.049,87	Ha	1.967.253.846,00	105.185,19	Ha	418.765.494,00	111.498,59	Ha	506.689.358,00	8.942,21	Ha	85.355.787,00	8,02	16,85	8.942,21	Ha	504.121.281,00	7,98	25,63	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
97	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,5	%	384.842.495,00	4,01	%	152.952.384,00	1,5	%	270.621.399,00	0,402	%	8.706.975,00	26,80	3,22	0,40	%	161.659.359,00	26,80	42,01	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
98	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	28,61	%	1.508.527.643,00	18,2	%	867.645.097,00	22,25	%	1.758.242.700,00	2,02	%	74.125.000,00	9,08	4,22	20,22	%	941.770.097,00	70,67	62,43	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
99	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1,5	%	786.375.400,00	3,97	%	127.373.732,00	1,5	%	90.539.200,00	1,1	%	5.590.000,00	73,33	6,17	1,1	%	132.963.732,00	73,33	16,91	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
			Persentase peningkatan populasi ternak	2,58	%		2,56	%		2,57	%		0,65	%		25,29		0,65	%		25,19			
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																								
100	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya kelancaran distribusi barang	2	%	1.887.442.625,00	1,5	%	1.949.467.158,00	1,5	%	262.464.937,00	0,6	%	14.599.655,00	40	5,56	0,6	%	1.964.066.813,00	30,00	104,06	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
101	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase bahan pokok yang di pasarkan di operasi pasar/pasar murah	60	%	305.998.725,00	55	%	158.750.195,00	55	%	44.114.896,00	13,75	%	3.917.400,00	25	8,88	13,75	%	162.667.595,00	22,92	53,16	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
102	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTTP yang di tera ulang	1,5	%	323.042.150,00	1,5	%	100.926.079,00	1,5	%	406.605.620,00	0,03	%	-	2	0,00	0,03	%	100.926.079,00	2,00	31,24	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
103	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	40	%	1.177.662.000,00	30	%	668.745.587,00	35	%	577.812.025,00	0	%	399.804.575,00	0	69,19	0	%	1.068.550.162,00	0,00	90,73	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																								
104	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jenis Produk yang diterima Pasar dan Persentase produk yang berkualitas	100	%	1.104.826.062,00	100	%	1.090.373.527,00	100	%	827.426.634,00	30	%	214.186.798,00	30	25,89	30	%	1.304.560.325,00	30,00	118,08	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
105	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	52	%	836.552.974,00	43	%	87.994.765,00	48,3	%	32.179.824,00	0,096	%	-	0,20	0,00	43,10	%	87.994.765,00	82,88	10,52	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
106	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	75	%	85.371.000,00	68,42	%	12.641.000,00	72	%	26.860.000,00	0,144	%	-	0,20	0,00	68,56	%	12.641.000,00	91,42	14,81	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																								
107	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi & Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja	100	%	852.500.000,00	100	%	212.425.402,00	100	%	250.482.735,00	16,67	%	16.810.490,00	16,67	6,71	16,67	%	229.235.892,00	16,67	26,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(4) URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
4.01 SEKRETARIAT DAERAH																								
108	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100	%	40.111.797.609,00	99,11	%	19.282.767.912,00	100	%	14.477.104.974,00	56,32	%	7.486.407.513,00	56,32	51,71	56,32	%	26.769.175.425,00	56,32	66,74	SEKRETARIAT DAERAH	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
109	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	%	8.786.393.805,00	100	%	3.039.522.379,69	100	%	2.488.855.945,00	36,67	%	762.643.485,00	36,67	30,64	36,67	%	3.802.165.864,69	36,67	43,27	SEKRETARIAT DAERAH	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
4.02 SEKRETARIAT DPRD																								

110	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi tugas fungsi DPRD yang berjalan efektif	100	%	9.206.975.000,00	100	%	33.665.771.559,00	100	%	27.904.060.050,00	22,26	%	5.951.485.552,00	22,26	21,33	22,26	%	39.617.257.111,00	22,26	430,30	SEKRETARIAT DPRD	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(5) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
	5.01	PERENCANAAN																						
111	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	91,3	%	3.963.432.601,00	82,61	%	2.311.655.030,00	86,96	%	1.072.858.623,00	10,87	%	134.315.797,00	12,5	12,52	10,87	%	2.445.970.827,00	11,91	61,71	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
112	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00	100	%	1.635.714.110,00	100	%	347.229.222,00	100	%	624.999.000,00	0	%	34.751.368,00	0	5,56	0	%	381.980.590,00	0,00	23,35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
	5.02	KEUANGAN																						
113	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	2	%	8.611.162.824,00	1,69	%	1.959.130.645,00	2	%	3.149.290.000,00	0,321	%	507.480.956,00	16,05	16,11	0,321	%	2.466.611.601,00	16,05	28,64	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
114	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	100	%	225.791.320.212,00	100	%	286.243.995.164,00	100	%	275.585.074.847,00	12,75	%	110.538.087.270,00	12,75	40,11	12,75	%	396.782.082.434,00	12,75	175,73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
115	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	100	%	818.608.927.531,00	100	%	2.185.445.832,00	100	%	1.719.669.762,00	5,83	%	166.919.932,00	5,83	9,71	5,83	%	2.352.365.764,00	5,83	0,29	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
	5.03	KEPEGAWAIAN																						
116	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang Berkualitas	95	%	4.429.446.099,00	82,35	%	2.778.825.120,00	90	%	2.317.066.250,00	14,535	%	176.959.000,00	16,15	7,64	14,535	%	2.955.784.120,00	15,30	66,73	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																						
117	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	96	%	10.237.485.622,00	89	%	1.724.014.856,00	92	%	2.769.683.250,00	46	%	1.724.014.856,00	50,00	62,25	46	%	3.448.029.712,00	47,92	33,68	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
118	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%	3.092.113.723,00	100	%	934.322.827,00	100	%	590.380.000,00	0	%	43.348.250,00	0,00	7,34	0	%	977.671.077,00	0,00	31,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(6) UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																								
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH																						
119	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan/rekomendasi APIP dan BPK RI yang selesai ditangani sesuai ketentuan	100	%	17.090.300.302,00	100	%	2.687.551.292,00	100	%	3.968.121.250,00	23,89	%	326.023.106,00	23,89	8,22	23,89	%	3.013.574.398,00	23,89	17,63	INSPEKTORAT	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
120	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	70	%	695.351.060,00	70	%	2.047.007.208,00	70	%	1.589.798.720,00	0,742	%	16.233.500,00	1,06	1,02	0,742	%	2.063.240.708,00	1,06	296,72	INSPEKTORAT	Kemungkinan Penyesuaian Anggaran; Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(7) UNSUR KEWILAYAHAN																								
	7.01	KECAMATAN																						
121	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	Indeks	6.995.776.395,00	90,16	Indeks	4.475.071.771,00	92	Indeks	2.297.624.814,00	0	Indeks	13.700.000,00	0,00	0,60	0	Indeks	4.488.771.771,00	0,00	64,16	17 KECAMATAN	Penilaian IKM dilaksanakan pada tiap semester
122	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100	%	16.606.143.438,00	99,47	%	3.362.505.355,00	100	%	1.945.646.450,00	25,82	%	108.393.533,00	25,82	5,57	25,82	%	3.470.898.888,00	25,82	20,90	17 KECAMATAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
123	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketertaman dan Keamanan lingkungan	100	%	1.267.554.239,00	96,07	%	370.539.670,00	100	%	395.643.590,00	12,92	%	24.150.000,00	12,92	6,10	12,92	%	394.689.670,00	12,92	31,14	17 KECAMATAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV

124	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	%	2.050.868.071,00	97,14	%	409.844.951,00	100	%	379.332.960,00	26,51	%	57.270.850,00	26,51	15,10	26,51	%	467.115.801,00	26,51	22,78	17 KECAMATAN	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(8) UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																						
125	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	82,35	%	3.537.569.840,00	80	%	1.970.173.445,00	81,35	%	953.912.380,00	20,34	%	2.900.000,00	25,00	0,30	20,34	%	1.973.073.445,00	24,70	55,77	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
126	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	82,35	%	92.555.585.998,00	80	%	27.047.522.873,00	81,35	%	2.029.867.396,00	20,34	%	46.351.050,00	25,00	2,28	20,34	%	27.093.873.923,00	24,70	29,27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
127	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	82,35	%	538.008.157,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	-	0	%	-	0,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program mungkin baru ada di Perubahan 2025 atau Tahun Selanjutnya
128	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	82,35	%	1.926.552.902,00	80	%	81.293.541,00	81,35	%	141.507.705,00	20,34	%	9.058.986,00	25,00	6,40	20,34	%	90.352.527,00	24,70	4,69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
129	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	82,35	%	17.062.193.723,00	80	%	4.535.671.749,00	81,35	%	1.611.588.155,00	20,34	%	126.208.990,00	25,00	7,83	20,34	%	4.661.880.739,00	24,70	27,32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV
(X) UNSUR PENUNJANG																								
	X.XX	UNSUR PENUNJANG																						
130	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu & Nilai SAKIP SKPD	100	%	2.992.600.504.686,00	100	%	870.069.984.018,66	100	%	923.506.877.022,00	19,41	%	201.086.458.075,00	19,41	21,77	19,41	%	1.071.156.442.093,66	19,41	35,79	SEMUA SKPD	Tingkat capaian terhadap RPJMD baru bisa dilihat pada capaian akhir tahun/Tri IV

LAMPIRAN 3: Form 1 s.d. 3 dan 6

FORM 1
DASAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	DASAR PERUBAHAN	RKPD 2025	PERUB RKPD TAHUN 2025
1	2	3	4
1	KERANGKA EKONOMI		
2	KEUANGAN DAERAH		
A	PENDAPATAN	1.682.183.754.138	1.686.692.716.893
B	PENGELUARAN	1.776.430.749.947	1.907.857.461.848
C	PEMBIAYAAN	94.246.995.809	221.164.744.955
3	PRIORITAS PEMBANGUNAN		

FORM 2
KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

NO.	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				PERUB RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Gini Rasio	%	0,22 - 0,30	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Gini Rasio	%	0,289 - 0,3	
		Tingkat Kemiskinan (%)	%	4,08 - 4,58		Tingkat Kemiskinan (%)	%	3,41 - 4,25	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,76-3,01		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,39	
	Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	laju pertumbuhan ekonomi	%	4,78	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	laju pertumbuhan ekonomi	%	4,3 - 4,3	
	Sasaran Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	%	35,81	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	juta	35,81	
	Sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	%	4,33	Menurunkan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	%	4,33	
	Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD (%)	%	1,14	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD (%)	%	1,14	
	Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio penduduk yang bekerja	%	98	Menurunnya tingkat pengangguran	Rasio penduduk yang bekerja	%	69,28	
2	Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	63,44	Meningkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	66,36	
		Indeks Risiko Bencana	%	129		Indeks Risiko Bencana	%	129	
	Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Indeks Kualitas Air	%	53,67	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Indeks Kualitas Air	%	53,67	
		Indeks Kualitas Udara	%	90,16		Indeks Kualitas Udara	%	93,96	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	30,82		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	30,82	
	Sasaran Meningkatnya rekonstruksi daerah korban bencana	Persentase daerah korban bencana yang di rekonstruksi	%	100	Meningkatnya rekonstruksi daerah korban bencana	Persentase daerah korban bencana yang di rekonstruksi	%	100	

3	Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	%	88,36	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	%	88,36	
	Sasaran Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	opini	WTP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	opini	WTP	
		Nilai SAKIP	%	74,94		Nilai SAKIP	%	74,94	
	Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88	
4	Tujuan Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,01	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72	
	Sasaran Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	%	72,12	Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	%	72,62	
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,59		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,59	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	7,8		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	7,8	
	Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita (dalam juta)	rupiah	12.169.000	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita (dalam juta)	rupiah	17,41	

FORM 3

PERBANDINGAN PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.			URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (PRKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	55,86 Persen	121.647.772.751	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	55,86 Persen	72.084.795.840	49.562.976.911	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100 Persen	143.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100 Persen	-	143.500.000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67,27 Persen	20.500.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	67,27 Persen	8.815.000	11.685.000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	85 Persen	89.225.092.399	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	85 Persen	15.272.474.183	73.952.618.216	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA

			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC (Universal Helath Coverge)	95 Persen	63.225.092.399	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai UHC (Universal Helath Coverge)	95 Persen	141.188.359.692	(77.963.267.293)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	75 Persen	170.344.730	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	75 Persen	61.925.318.839	(61.754.974.109)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 Persen	2.913.133.597	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 Persen	439.955.515	2.473.178.082	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	255.275.032	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	17.869.724.049	(17.614.449.017)	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik	78 Persen	16.812.138.228	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik	78 Persen	38.758.313.525	(21.946.175.297)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	78 Persen	18.044.624.359	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	78 Persen	15.537.268.000	2.507.356.359	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	96 Persen	2.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	96 Persen	-	2.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	13 Persen	5.307.152.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	13 Persen	11.812.989.500	(6.505.837.500)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	30 Persen	450.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	30 Persen	200.000.000	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	91 Persen	9.401.942.350	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	91 Persen	31.277.612.318	(21.875.669.968)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Tertata	97.61 Persen	11.344.675.043	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Tertata	97.61 Persen	2.700.000.000	8.644.675.043	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	67,75 Persen	151.419.175.397	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	67,75 Persen	37.468.000.000	113.951.175.397	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	71 Persen	485.067.977	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	71 Persen	800.000.255	(314.932.278)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	72,22 Persen	1.009.200.638	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	72,22 Persen	1.004.651.375	4.549.263	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-	
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	23 Persen	173.617.605	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	23 Persen	-	173.617.605	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA

1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio peningkatan luas permukiman Layak Huni	0,8757 Nilai	2.500.770.141	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio peningkatan luas permukiman Layak Huni	0,8757 Nilai	10.874.058.980	(8.373.288.839)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	88,499 Persen	608.328.679	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	88,499 Persen	2.599.412.029	(1.991.083.350)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	55,06 Persen	21.358.062.334	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	55,06 Persen	28.830.000.435	(7.471.938.101)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang ditangani	100 Persen	919.752.320	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang ditangani	100 Persen	5.527.586.125	(4.607.833.805)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				-	

1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100 Persen	104.950.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100 Persen	918.823.995	(813.873.995)	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	100 Persen	1.817.540.310	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang diawasi	100 Persen	1.105.375.345	712.164.965	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100 Persen	199.777.960	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, ENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100 Persen	317.465.040	(117.687.080)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				-	
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	217.800.327	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	1.679.965.668	(1.462.165.341)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100 Persen	178.463.809	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100 Persen	2.894.446.836	(2.715.983.027)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	100 Persen	748.989.831	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	100 Persen	1.205.059.210	(456.069.379)	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100 Persen	598.949.671	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100 Persen	223.174.297	375.775.374	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-	
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				-	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100%	1.753.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100%	587.441.100	1.165.558.900	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA

2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100%	732.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100%	93.888.900	638.111.100	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Aturan Ketenagakerjaan	100%	243.750.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Aturan Ketenagakerjaan	100%	1.837.131.700	(1.593.381.700)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				-	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasika n PPRG dalam RKA	100 Persen	52.050.705	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase SKPD yang mengimplemtasika n PPRG dalam RKA	100 Persen	25.000.000	27.050.705	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	129.827.886	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	372.762.748	(242.934.862)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100 Persen	384.133.313	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100 Persen	45.000.000	339.133.313	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 Persen	295.932.565	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100 Persen	72.000.000	223.932.565	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	232.050.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100 Persen	177.935.000	54.115.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				-	
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase lambung pangan yang berfungsi	93 Persen	5.631.155.426	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase lambung pangan yang berfungsi	93 Persen	-	5.631.155.426	
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase lambung pangan dengan stock gabah diatas 3 ton	65,5 Persen	94.999.680	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase lambung pangan dengan stock gabah diatas 3 ton	65,5 Persen	868.128.032	(773.128.352)	
				Skor Pola Pangan Harapan (skor) Ketersediaan	93 Skor	524.436.106		Skor Pola Pangan Harapan (skor) Ketersediaan	93 Skor		524.436.106	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100 Persen	38.634.050	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100 Persen	53.788.535	(15.154.485)	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-	

2	10	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100 Persen	10.000.000	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	100 Persen	-	10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persen	5.000.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persen	3.446.907.690	1.553.092.310	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	10	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	100 Persen	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	100 Persen	-	20.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	100 Persen	1.032.449.850	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan layanan informasi status kualitas air, tanah dan udara	100 Persen	1.199.819.625	(167.369.775)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
						195.000.000					195.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

						58.932.279					58.932.279	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1 1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100 Persen	80.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang memenuhi standar	100 Persen	1.299.556.600	(1.219.556.600)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1 1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100 Persen	617.986.387	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	100 Persen	1.125.000.000	(507.013.613)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1 1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	939.342.595	(839.342.595)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1 1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	292.100.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Persen	218.636.475	73.463.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1 1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang bersih dan nyaman	100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa/kota yang bersih dan nyaman	100 Persen	134.729.050	15.270.950	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

2	1	1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup	100 Persen	60.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup	100 Persen	23.193.750	36.806.250	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penanganan dan pengurangan sampah	29,257 Persen	7.270.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah penanganan dan pengurangan sampah	29,257 Persen	14.341.176.025	(7.071.176.025)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
		1									-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2	1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL				-	
2	1	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	1.605.965.251	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	1.199.444.704	406.520.547	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KAB. BARITO KUALA
2	1	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standart	100 Persen	132.842.010	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standart	100 Persen	152.244.660	(19.402.650)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KAB. BARITO KUALA

2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100 Persen	83.030.538	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100 Persen	262.830.250	(179.799.712)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	34.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100 Persen	-	34.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-	
2	1 3	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	98 Persen	253.201.536	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	98 Persen	110.293.100	142.908.436	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	1 3	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	30 Persen	550.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	30 Persen	-	550.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	1 3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	94 Persen	3.648.541.766	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	94 Persen	2.630.692.696	1.017.849.070	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA

2	1 3	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	45 Persen	1.000.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	45 Persen	579.697.127	420.302.873	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-	
2	1 4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	100 Persen	88.301.595	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 Tahun)	100 Persen	1.982.909.980	(1.894.608.385)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	1 4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeed Need	100 Persen	764.756.661	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeed Need	100 Persen	3.753.271.060	(2.988.514.399)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2	1 4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeed Need	100 Persen	232.976.334	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeed Need	100 Persen	2.087.307.300	(1.854.330.966)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				-	
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	905.690.324	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,61 Persen	10.466.608.784	(9.560.918.460)	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.61 Persen	1.467.210.852	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.61 Persen	3.946.115.727	(2.478.904.875)	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-	
2	1 6	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100 Persen	2.199.137.700	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi pemerintah yang dikelola	100 Persen		2.199.137.700	
2	1 6	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	83 Persen	1.955.621.735	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah	83 Persen		1.955.621.735	

2	1 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-	
2	1 7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkembang	38,01 Persen	44.809.130	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkembang	38,01 Persen	53.857.750	(9.048.620)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	44,62 Persen	6.570.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	44,62 Persen	14.835.000	(8.265.000)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	42,36 Persen	252.714.755	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang berdaya sain	42,36 Persen	208.167.625	44.547.130	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	42,36 Persen	92.611.600	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang berkembang	42,36 Persen	98.139.625	(5.528.025)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				-	

2	1 8	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Proyek Perencanaan Investasi	100 Persen	127.760.775	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Proyek Perencanaan Investasi	100 Persen	74.045.770	53.715.005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	1 8	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	12,5 Persen	273.400.795	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor	12,5 Persen	115.326.750	158.074.045	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	1 8	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100 Persen	532.040.450	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100 Persen	92.242.650	439.797.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	1 8	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	100 Persen	352.398.630	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai standar pelayanan	100 Persen	300.122.968	52.275.662	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA

2	1 8	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Informasi Penanaman Modal	4 media	17.173.500	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Layanan Informasi Penanaman Modal	4 media	16.583.250	590.250	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2	1 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				-	
2	1 9	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi	70 Persen	666.533.300	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi	70 Persen	538.771.500	127.761.800	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	1 9	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	18%	4.242.662.205	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	18%	6.092.679.300	(1.850.017.095)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	1 9	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	600.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100 Persen	300.000.000	300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA

2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-	
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang direkomendasikan dan dapat diakses	75 Persen	170.041.106	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang direkomendasikan dan dapat diakses	75 Persen	67.772.500	102.268.606	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-	
2	2	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	100 Persen	207.961.705	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	100 Persen	69.809.750	138.151.955	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-	
2	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	63,64 Persen	1.690.610.875	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	63,64 Persen	2.213.501.000	(522.890.125)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA

2	2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen	366.529.800	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100 Persen	354.906.560	11.623.240	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2	2	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				-	
2	2	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100 Persen	433.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100 Persen	839.749.422	(406.749.422)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	2	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-	
2	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK dan Berbasis TIK	100 Persen	230.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD yang penyelenggaraan Kearsipan sesuai NSPK dan Berbasis TIK	100 Persen	404.726.502	(174.726.502)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	2	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen	165.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen	30.464.500	134.535.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2	2	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100 Persen	23.000.000	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100 Persen	-	23.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA

3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-	
3	2	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				-	
3	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	0.021 Persen	523.887.974	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	0.021 Persen	480.980.180	42.907.794	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	1 Persen	850.669.924	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	1 Persen	777.753.045	72.916.879	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3	2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				-	
3	2	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	41,7 Persen	696.637.594	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	41,7 Persen	674.825.554	21.812.040	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
3	2	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	7,8 Persen	369.010.780	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	7,8 Persen	557.244.000	(188.233.220)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA

3	2		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				-	
3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				-	
3	2	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Hortikultura	7.726,65 Ha	1.558.368.905	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Tanaman Hortikultura	7.726,65 Ha	5.781.727.235	(4.223.358.330)	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Luas Tanam Tanaman Pangan	109.454, 02 Ha	3.600.623.438		Luas Tanam Tanaman Pangan	109.454, 02 Ha		3.600.623.438	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen	77.851.642		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen		77.851.642	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
				Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen	102.797.184		Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen	851.918.705	(749.121.521)	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA

				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen	149.506.390		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen		149.506.390	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan	99,39 Ha	343.150.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Tanaman Pangan	99,39 Ha		343.150.000	
				Luas LahanPertanian PanganBerkelanjutan	12 Dokumen	343.150.000		Luas LahanPertanian PanganBerkelanjutan	12 Dokumen		343.150.000	
				Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen	102.797.184		Persentase peningkatan populasi ternak	2.53 Persen		102.797.184	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	8.25 Persen	474.033.309	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	8.25 Persen		474.033.309	
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Hortikultura	5.328,11 Ha	66.715.050	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Panen Tanaman Hortikultura	5.328,11 Ha		66.715.050	
				Luas Panen Tanaman Pangan	106.170,48 Ha	114.541.990		Luas Panen Tanaman Pangan	106.170,48 Ha		114.541.990	
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen	49.871.995	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1.50 Persen		49.871.995	
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	22.25 Persen	673.261.600	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	22.25 Persen		673.261.600	
				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen	84.845.164		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil perkebunan	20.00 Persen		84.845.164	

				Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak	4.00 Persen	13.395.063		Persentase peningkatan kelompok tani yang menjalankan usaha produk olahan hasil ternak	4.00 Persen		13.395.063	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				-	
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya kelancaran distribusi barang	1.5 Persen	548.770.150	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya kelancaran distribusi barang	1.5 Persen	262.464.937	286.305.213	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase bahan pokok yang di pasarkan di operasi pasar/pasar murah	55 Persen	88.584.800	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase bahan pokok yang di pasarkan di operasi pasar/pasar murah	55 Persen	44.114.896	44.469.904	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTP yang di tera ulang	1.5 Persen	82.095.775	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Peningkatan Alat UTP yang di tera ulang	1.5 Persen	406.605.620	(324.509.845)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	35 Persen	171.146.600	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase keterisian gudang SRG	35 Persen	577.812.025	(406.665.425)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

3	3	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					-	
3	3	1	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jenis Produk yang di terima Pasar	1.87 Persen	347.336.315	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jenis Produk yang di terima Pasar	1.87 Persen	827.426.634	(480.090.319)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
					Persentase produk yang berkualitas	1.87 Persen	202.624.700		Persentase produk yang berkualitas	1.87 Persen		202.624.700	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	3	1	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	48,3 Persen	25.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	48,3 Persen	32.179.824	(7.179.824)	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	3	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	72 Persen	40.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	72 Persen	26.860.000	13.140.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3	3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-	

3	3	2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja	100 Persen	195.387.590	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja	100 Persen	250.482.735	(55.095.145)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
					Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi	100Persen	97.612.410		Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi	100Persen		97.612.410	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				SEKRETARIAT DAERAH				-	
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100 Persen	6.576.522.100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100 Persen	14.477.104.974	(7.900.582.874)	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase kebijakan bidang Pemerintahan yang diimplementasikan	100 Persen	3.410.020.300		Persentase kebijakan bidang Pemerintahan yang diimplementasikan	100 Persen		3.410.020.300	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100 Persen	704.300.544		Persentase Produk Hukum Daerah yang diimplementasikan	100 Persen		704.300.544	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100 Persen	1.455.666.700	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang diimplementasikan	100 Persen	2.488.855.945	(1.033.189.245)	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	100 Persen	367.890.000		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	100 Persen		367.890.000	SEKRETARIAT DAERAH

				Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100 Persen	586.450.890		Persentase pelaksanaan Kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100 Persen		586.450.890	SEKRETARIAT DAERAH	
Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan				-		
4	2			SEKRETARIAT DPRD			SEKRETARIAT DPRD				-		
4	2	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi tugas fungsi DPRD yang berjalan efektif	100 Persen	2.301.743.750	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi tugas fungsi DPRD yang berjalan efektif	100 Persen	14.630.141.800	(12.328.398.050)	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					-	
5	1			PERENCANAAN			PERENCANAAN					-	
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100 Persen	889.266.143	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100 Persen	890.178.430	(912.287)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00	86.96Persen	360.619.611	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur perencanaan minimal 23,00	86.96Persen	433.866.800	(73.247.189)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5	2			KEUANGAN			KEUANGAN					-	

5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2 Persen	6.940.417.311	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2 Persen	2.280.981.164	4.659.436.147	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	100 Persen	272.162.280.785	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar	100 Persen	271.528.314.812	633.965.973	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	100 Persen	859.204.060	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase SKPD melaksanakan Pengelolaan BMD yang benar	100 Persen	1.380.585.769	(521.381.709)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA
5	3		KEPEGAWAIAN				KEPEGAWAIAN				-	
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang Berkualitas	100 Persen	1.214.061.200	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang Berkualitas	100 Persen	2.073.554.000	(859.492.800)	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA
5	4		SUMBER DAYA MANUSIA				SUMBER DAYA MANUSIA				-	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100 Persen	2.774.651.780	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100 Persen	2.769.683.250	4.968.530	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-	

5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	631.949.560	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen	438.788.800	193.160.760	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
6	1		PENGAWASAN				PENGAWASAN				-	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler yang tepat waktu	92.63 Persen	4.465.355.634	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler yang tepat waktu	92.63 Persen	3.968.121.250	497.234.384	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
				Persentase Penyelesaian TLHP APIP	92.63Persen	162.000.000		Persentase Penyelesaian TLHP APIP	92.63Persen		162.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
				Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	85 Persen	162.000.000		Persentase Penyelesaian TLHP BPK-RI	85 Persen		162.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
				Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen	108.000.000		Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	100 Persen		108.000.000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentse SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	70 Persen	534.816.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentse SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	70 Persen	1.589.798.720	(1.054.982.720)	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks	77.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Indeks	71.540.000	6.260.000	Kecamatan Tabunganen
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	281.203.500		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	72.766.800	208.436.700	Kecamatan Tamban

7	1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	81.676.330	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	110.571.600	(28.895.270)	Kecamatan Mekarsari
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	82.000.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	95.839.600	(13.839.600)	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	66.978.225		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	71.050.000	(4.071.775)	Kecamatan Anjir Muara
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	115.812.636		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	137.907.075	(22.094.439)	Kecamatan Alalak
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	68.600.500		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	533.088.000	(464.487.500)	Kecamatan Mandastana
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	118.372.800		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	84.300.375	34.072.425	Kecamatan Belawang
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	106.256.603		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	82.363.000	23.893.603	Kecamatan Wanaraya
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	138.375.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	138.675.000	(300.000)	Kecamatan Barambai
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	70.854.696		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	52.808.325	18.046.371	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	65.000.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Persen	64.971.500	28.500	Kecamatan Cerbon
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	94.575.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	65.503.225	29.071.775	Kecamatan Bakumpai
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	81.424.349		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	78.277.855	3.146.494	Kecamatan Marabahan
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	129.406.075		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	79.031.400	50.374.675	Kecamatan Tabukan
7	1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	109.911.122	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	192.690.000	(82.778.878)	Kecamatan Kuripan
7	1	2		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	65.625.000		Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	59.670.825	5.954.175	Kecamatan Jejangkit
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	23.911.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	9.200.000	14.711.000	Kecamatan Tabunganen

7	1	3	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	57.612.550	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	2.131.040	55.481.510	Kecamatan Tamban
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	43.685.753		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	211.033.035	(167.347.282)	Kecamatan Mekarsari
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	90 Persen	52.490.625		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	90 Persen	19.973.250	32.517.375	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	38.827.285		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	7.053.500	31.773.785	Kecamatan Anjir Muara
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	774.579.612		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	425.078.800	349.500.812	Kecamatan Alalak
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	30.000.000		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	26.494.500	3.505.500	Kecamatan Mandastana
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	19.600.000		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	13.922.450	5.677.550	Kecamatan Belawang
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	15.547.250		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	17.502.250	(1.955.000)	Kecamatan Wanaraya
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	41.003.137		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	18.419.750	22.583.387	Kecamatan Barambai
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	0	-		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	0	13.988.650	(13.988.650)	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	16.977.880		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	25.600.375	(8.622.495)	Kecamatan Cerbon
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	224.500.000		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	264.541.250	(40.041.250)	Kecamatan Bakumpai
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	2.818.993.519		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	420.902.850	2.398.090.669	Kecamatan Marabahan
7	1	3		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	27.111.563		Persentase Organisasi Desa yang Aktif	100 Persen	8.000.000	19.111.563	Kecamatan Tabukan
7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		35.215.160		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif		25.357.250	9.857.910	Kecamatan Kuripan

7	1	3		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	25.352.550		Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100 Persen	20.885.150	4.467.400	Kecamatan Jejangkit
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	94 Persen	14.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	94 Persen	20.100.000	(5.700.000)	Kecamatan Tabunganen
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	37.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	23.400.000	13.938.275	Kecamatan Tamban
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	30.000.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	14.400.000	15.600.000	Kecamatan Mekarsari
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	27.494.800		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	23.450.000	4.044.800	Kecamatan Anjir Pasar
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	24.400.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	24.080.000	320.000	Kecamatan Anjir Muara
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	18.222.600		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.900.000	(4.677.400)	Kecamatan Alalak
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	80 Persen	16.000.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	80 Persen	24.208.750	(8.208.750)	Kecamatan Mandastana
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	15.600.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	17.580.000	(1.980.000)	Kecamatan Belawang
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	11.752.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	8.400.000	3.352.000	Kecamatan Wanaraya
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	15.600.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.200.000	(6.600.000)	Kecamatan Barambai

7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Indeks	19.795.600		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Indeks	15.605.000	4.190.600	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	27.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	21.000.000	6.338.275	Kecamatan Cerbon
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	7.500.000		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.250.000	(14.750.000)	Kecamatan Bakumpai
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Nilai	36.443.460		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Nilai	26.025.000	10.418.460	Kecamatan Marabahan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	41.285.200		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100 Persen	22.730.000	18.555.200	Kecamatan Tabukan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	27.941.200		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100	28.576.200	(635.000)	Kecamatan Kuripan
7	1	4		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	27.338.275		Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	92 Persen	22.000.000	5.338.275	Kecamatan Jejangkit
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	33.299.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.250.000	15.049.600	Kecamatan Tabunganen
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	22.260.000		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	9.380.000	12.880.000	Kecamatan Tamban
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	40.319.700		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	30.439.685	9.880.015	Kecamatan Mekarsari
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	95 Persen	41.802.500		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	95 Persen	21.120.000	20.682.500	Kecamatan Anjir Pasar

7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	36.690.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	25.000.000	11.690.000	Kecamatan Anjir Muara
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	28.151.074	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.693.850	9.457.224	Kecamatan Alalak
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.000.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	18.788.750	(788.750)	Kecamatan Mandastana
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	34.600.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	19.135.000	15.465.000	Kecamatan Belawang
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100Persen	3.836.500	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100Persen	11.700.000	(7.863.500)	Kecamatan Wanaraya
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	12.600.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	17.138.150	(4.538.150)	Kecamatan Barambai
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	49.570.675	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	10.608.500	38.962.175	Kecamatan Rantau Badauh
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	13.878.255	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	15.000.000	(1.121.745)	Kecamatan Cerbon
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 persen	19.500.000	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 persen	5.478.175	14.021.825	Kecamatan Bakumpai
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	37.521.819	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	34.022.600	3.499.219	Kecamatan Marabahan
7	1	6	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	72.418.415	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	19.075.000	53.343.415	Kecamatan Tabukan

7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	68.255.600		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100	16.977.300	51.278.300	Kecamatan Kuripan
7	1	6		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	35.245.025		Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100 Persen	17.697.700	17.547.325	Kecamatan Jejangkit
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				-	
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-	
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi kecamatan yang dibina terhadap ideoligi, wwasan kebangsaan dan karakter bagsa	81,35 Persen	897.070.375	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentasi kecamatan yang dibina terhadap ideoligi, wwasan kebangsaan dan karakter bagsa	81,35 Persen	1.781.603.580	(884.533.205)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	81,35 Persen	2.145.779.390	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	81,35 Persen	1.854.301.423	291.477.967	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100 Persen	2.145.779.390	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	100 Persen		2.145.779.390	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA

8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	81,35 Persen	365.674.460	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perentase kecamatan yang dibina terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	81,35 Persen	223.134.154	142.540.306	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflim sosial yang diselesaikan	100Persen	4.326.695.788	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflim sosial yang diselesaikan	100Persen	1.391.208.040	2.935.487.748	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
X											-	
X	X	X									-	
X	X	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	17 Laporan	97.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu	17 Laporan	1.716.499.796.761	(1.716.402.796.761)	SELURUH SKPD
X	X	1		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	83,01 Nilai	28.933.812.330		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	83,01 Nilai		28.933.812.330	SELURUH SKPD
X	X	1		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00 Persen	469.811.300		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00 Persen		469.811.300	SELURUH SKPD
X	X	1		Persentase fasilitas Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan yang diimplementasikan	100 Persen	2.840.100.520		Persentase fasilitas Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan yang diimplementasikan	100 Persen		2.840.100.520	SELURUH SKPD
X	X	1		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	91,49 Persen	807.650.500		Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	91,49 Persen		807.650.500	SELURUH SKPD
X	X	1		Rata-rata Nilai Sakip Perangkat daerah	100 Persen	433.021.550		Rata-rata Nilai Sakip Perangkat daerah	100 Persen		433.021.550	SELURUH SKPD

FORM 6

DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN
KABUPATEN KABUPATEN BARITO KUALA

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET KABUPATEN/KOTA SESUAI PERUBAHAN RKPD PROVINSI TAHUN 2025	TARGET RKPD TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
1	2	3	4	4
SASARAN PEMBANGUNAN				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,4	4,78	4,3 - 4,3
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,44 - 3,94	4,33	3,41 - 4,25
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86 - 4,25	3,01	3,39
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,7	73,01	72
5.	Rasio Gini	0,29 - 0,301	0,225	0,289 - 0,3
6.	Penurunan Emisi GRK	75,97		74,97



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 73, Marabahan, Barito Kuala, 70513 Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0511) 4799222, Email : bappelitbang@baritokualakab.go.id

Marabahan, 29 April 2025

Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan

di
Banjarbaru

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 050/132/Evdal-Bappelitbang/2025

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Evaluasi RKPD Triwulan I TA 2025 Kabupaten Barito Kuala	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan selanjutnya, Terima Kasih

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Barito Kuala



Nama
NIP.

MUNADI, ST
Pembina Utama Muda/lv.c
NIP. 196907161998031005

Nomor telepon:



LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO KUALA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO KUALA**

2025

**LAPORAN EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BARITO KUALA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA
2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kerjasama yang baik antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Barito Kuala, Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lingkup Kabupaten Barito Kuala pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk penyampaian hasil pencapaian kerja dan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sampai dengan akhir Triwulan I 2025. Pada laporan ini juga disertakan faktor pendorong dan faktor penghambat (permasalahan) yang dialami SKPD dalam mencapai target kerjanya.

Semoga dengan laporan ini dapat menjadi perwujudan tanggung jawab dan hasil kerja SKPD masing-masing baik secara fisik maupun keuangan, dan menjadi evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Demikian disampaikan, terima kasih.

Marabahan, 28 April 2025

Kepala Bappelitbang
Kabupaten Barito Kuala,



MUNADI, ST

Pemimpin Muda/IV.c
NIP. 19690716 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	5
BAB II. GAMBARAN SINGKAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025.....	7
2.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD 2025.....	7
2.2 PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMBANGUNAN 2025.....	21
BAB III. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BARITO KUALA TRIWULAN I 2025.....	29
3.1 RINGKASAN HASIL EVALUASI RKPD TRIWULAN I 2025.....	29
3.2 RINGKASAN HASIL PROYEK STRATEGIS DAERAH	70
3.3 REKAP CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I 2025.....	70
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT	74
4.1 KESIMPULAN	74
4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	8
Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Barito Kuala Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Pembangunan 2025.....	22
Tabel 3.1.1 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Barito Kuala Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 3.2.1 Ringkasan Hasil Kegiatan Proyek Strategis Daerah	70
Tabel 3.3.1 Rekap Capaian Fisik dan Keuangan SKPD Kab. Barito Kuala sampai Triwulan I 2025	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah atau 5 (lima) tahun dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Selanjutnya, RKPD yang disusun untuk setiap tahun perencanaan, selama berjalannya diperlukan evaluasi berkala yang ditetapkan dalam periode triwulanan. Ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 pada Pasal 305 ayat 5.

Pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD ini kemudian merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Bupati/Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

- b) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 dilakukan melalui penilaian pelaksanaan RKPD 2025 dan Renja SKPD 2025, yang dilaksanakan sesuai dengan periodisasi penilaian yang dibagi atas triwulanan, dalam laporan ini adalah periode Triwulan I 2025.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Barito Kuala Triwulan I 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

- h. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terawal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
- n. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional;
- o. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pemberian SDM Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
- w. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutawaran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :400.5/8476/SJ Perihal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035;

- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12);
- dd. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026
- ee. Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.7.5/314/BAPPEDA/2025 tanggal 8 April 2025 terkait Permintaan Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2025
- ff. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 000.3.6/168/Setda-Bappelitbang/2025 tanggal 24 Maret 2025 terkait Permohonan Evaluasi Renja SKPD/RFK Maret 2025 dan Evaluasi Triwulan I 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala 2025 memiliki maksud dan tujuan untuk:

- a. Mengetahui capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala 2025 secara berkala triwulanan;
- b. Mengetahui kendala/permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan periode perencanaan;
- c. Menyusun kesimpulan hasil evaluasi RKPD; dan
- d. Merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyajian

**BAB II GAMBARAN SINGKAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

- 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 2.2. Program Prioritas dan Strategis Pembangunan 2025

**BAB III HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TRIWULAN I 2025**

- 3.1. Ringkasan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I 2025
- 3.2. Ringkasan Hasil Proyek Strategis Daerah
- 3.3. Rekap Capaian Fisik dan Keuangan Triwulan I 2025

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN SINGKAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD 2025

Penyusunan tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani. Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/167/KUM/2023 tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala nomor 18 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026, tema RKPD tahun 2025 adalah “PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SDM”. Kemudian sesuai hasil konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 disepakati tanpa mengubah makna memperbaiki narasi, tema RKPD 2025 disempurnakan menjadi “MEMANTAPKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam periode 2023 - 2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

No	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah					
	Meningkatkan pendapatan per kapita	Meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap	Meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
		Meningkatkan sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	Meningkatkan sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
		Meningkatkan penduduk yang mendapat akses air minum	Meningkatkan penduduk yang mendapat akses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
		Meningkatkan cakupan pelayanan sampah kabupaten	Meningkatkan cakupan pelayanan sampah kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR
		Meningkatkan Luasan bangunan publik berwawasan lingkungan yang terbangun dan terpelihara	Meningkatkan Luasan bangunan publik berwawasan lingkungan yang terbangun dan terpelihara	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR
		Meningkatkan luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	Meningkatkan luas lahan pertanian yang terlayani irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
		Meningkatkan kawasan yang sesuai dengan tata ruang	Meningkatkan kawasan yang sesuai dengan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR
		Meningkatkan rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	Meningkatkan rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
		Meningkatkan tenaga konstruksi yang berdaya saing	Meningkatkan tenaga konstruksi yang berdaya saing	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

	Meningkatkan panjang drainase dalam kondisi baik	Meningkatkan panjang drainase dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pengembang Perumahan	Meningkatkan ketersediaan persil penunjang pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Disperkim
	Meningkatkan seni budaya yang menjadi daya tarik wisata	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DISPORABUDPAR
	Meningkatkan Cagar Budaya yang dilestarikan		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DISPORABUDPAR
	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORABUDPAR
	Meningkatkan pemasaran pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORABUDPAR
	Meningkatkan Luas Tanam Tanaman Pangan	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Utama	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISTAN TPH
	Meningkatnya Luas Tanam Tanaman Hortikultura		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISTAN TPH
	Meningkatkan Luas Panen Tanaman Hortikultura		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISTAN TPH
	Meningkatkan Luas Panen Tanaman Pangan		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISTAN TPH
	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan Utama		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISTAN TPH
	Meningkatkan Kualitas Kelompok Tani		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISTAN TPH

		Meningkatkan Koperasi yang Berkembang	Meningkatkan koperasi yang berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan SDM Koperasi yang Kompeten		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan usaha mikro yang berdaya saing	Meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan UMKM yang berkembang		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak	Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISBUNAK
	Menurunkan tingkat kemiskinan	Meningkatkan jumlah rumah layak huni penunjang kualitas lingkungan hunian	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DISPERKIM
		Meningkatkan Luas Kawasan Permukiman Layak Huni		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DISPERKIM
		Meningkatkan PSU yang mendukung aksesibilitas Perumahan secara Layak dan Memadai		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DISPERKIM
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

		Meningkatkan pelayanan terhadap penanganan bencana		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS
		Meningkatkan persentase rehabilitasi sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS
		Meningkatkan Jumlah Desa yang Melaksanakan Kerjasama antar Desa	Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DPMD
		Meningkatkan Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BP2RD
	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
		Meningkatkan Sapras yang mantap di kawasan Transmigrasi	Meningkatkan Sapras yang mantap di kawasan Transmigrasi		DISNAKERTRANS
		Meningkatkan Produk yang berkualitas	Meningkatkan IKM yang Berdaya saing	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan Jenis Produk yang di terima Pasar			DISKOPERINDAG
		Meningkatkan perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	DISKOPERINDAG

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

		Meningkatkan Perusahaan industri yang tertib Laporan		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan Investor yang Berinvestasi	Meningkatkan investasi daerah (PMDN/PMA)	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Meningkatkan Proyek Perencanaan Investasi		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Meningkatkan kualitas pengendalian perizinan umum dan perizinan Penanaman Modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPPTSP
		Meningkatkan Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan		Program Penyuluhan Pertanian	DISBUNAK
		Meningkatkan Usaha Produk Olahan Perkebunan dan Peternakan		Program Penyuluhan Pertanian	DISBUNAK
	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana				
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	DLH
		Meningkatkan luasan wilayah yang bersih dan nyaman		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
		Meningkatkan SDM yang terampil dalam pengelolaan lingkungan hidup		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH

		Menurunnya tingkat pencemaran sampah dilingkungan		Program Pengelolaan Sampah	DLH
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Meningkatkan pelayanan pengelolaan Limbah B3		Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	DLH
		Meningkatkan kualitas fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	DLH
	Meningkatkan penanggulangan bencana	Meningkatkan jumlah rumah korban bencana dan/atau relokasi akibat program pemerintah yang di intervensi.	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DISPERKIM
		Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Meningkatkan usaha mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			BPBD
		Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			BPBD
	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani				
	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)	Meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler yang tepat waktu	Meningkatkan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Reguler	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

	Meningkatkan Penyelesaian pengaduan masyarakat	yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan bmd yang profesional,transparan dan Akuntabel			BPKAD
	Meningkatkan kualitas laporan keuangan	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	SELURUH SKPD
	Meningkatkan SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	Meningkatkan SKPD yang mendapatkan predikat WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam APBD	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbang
	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan SKPD		PROGRAM KOORDINASI DAN SIN KRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbang
	Meningkatkan rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Implementasi Rencana Kelitbang	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Bappelitbang
	Meningkatkan kualitas laporan kinerja SKPD	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISBUNAK
	Meningkatkan kualitas laporan kinerja SKPD	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	BKPP
	Meningkatkan kualitas laporan Kinerja SKPD	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD		SELURUH SKPD
	Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja SKPD	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat

	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Aparatur	Meningkatkan Pemenuhan Formasi Pegawai dan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP
		Meningkatkan Kompetensi PNS		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPP
		Meningkatkan Kualitas Aparatur	Meningkatkan Pelayanan Aparatur yang berkualitas	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP
		Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Pelayanan Kepada Anggota DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan dan Tugas Fungsi DPRD	Set DPRD
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SELURUH KECAMATAN
		Meningkatkan Ketentraman di Wilayah Kecamatan		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	SELURUH KECAMATAN
		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	DINKES
		Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	DINKES
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
		Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DINKES
		Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
		Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban dalam mendukung kegiatan Ekonomi	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP

	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA			SATPOL PP
	Meningkatkan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOL PP
	Meningkatkan sarana dan prasarana lumbung pangan yang difungsikan	Meningkatkan kemandirian, diversifikasi dan keamanan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DKPP
	Meningkatkan lumbung pangan dengan stock gabah diatas 3 ton		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP
	Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan			DKPP
	Meningkatkan Pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKPP
	Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala		Program pendaftaran penduduk	DUKCAPIL
	Meningkatkan Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standart		Program pencatatan sipil	DUKCAPIL
	Meningkatkan pengelolaan dan penyajian data Administrasi Kependudukan		Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	DUKCAPIL
	Tersusunnya profil dan data kependudukan berskala Kabupaten Barito Kuala		Program Pengelolaan Profil kependudukan	DUKCAPIL
	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Desa yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD
	Meningkatkan Jumlah Desa yang terlaksana Pernataan Desa		PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan Darat	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB
	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan Laut, Sungai, dan Penyeberangan	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan Laut, Sungai, dan Penyeberangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		Program Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
	Terkompilasinya Data Statistik Sektor SKPD		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	DISKOMINFO
	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	DISKOMINFO
	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah		Program Aplikasi Informatika	DISKOMINFO
	Meningkatkan pelayanan perizinan Umum dan Penanaman Modal sesuai standar pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
	Meningkatkan Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal		Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPSTP
	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	DISPERPUSIP
	Meningkatkan Pemanfaatan Arsip Daerah	Meningkatkan Pemanfaatan Arsip daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DISPERPUSIP
	Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DISPERPUSIP
	Meningkatkan SOP Perizinan Penggunaan Arsip		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DISPERPUSIP

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DISPERPUSIP
		Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	SELURUH KECAMATAN
		Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SELURUH KECAMATAN
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				
	Meningkatkan kualitas Kesehatan dan pendidikan	Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	DINKES
		Terpenuhi nya Hak Anak	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPKBP3A
				Program Perlindungan Khusus Anak	DPPKBP3A
				Program Perlindungan Perempuan	DPPKBP3A
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPKBP3A
		SKPD yang meimplementasikan PPRG dalam RKA	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPKBP3A
		Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Peserta KB	Terkendalnya Angka Kelahiran	Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKBP3A
		Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Peserta KB		Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPKBP3A
		Meningkatkan penggerakan Keluarga Berencana	Terkendalnya angka kelahiran melalui kegiatan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPKBP3A

		Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk	Mengendalikan angka kelahiran melalui kegiatan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Program Pengendalian Penduduk	DPPKBP3A
		Meningkatkan prestasi SDM kepemudaan	Meningkatkan kualitas SDM kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORABUDPAR
		Meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPORABUDPAR
		Meningkatkan Pembinaan Kepramukaan		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	DISPORABUDPAR
		Meningkatkan Kualitas Satuan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
		Meningkatkan Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru		Program Pengembangan Kurikulum	DISDIK
		Meningkatkan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK
	Meningkatkan Standar Hidup Layak	Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	Program Hubungan Industrial	DISNAKERTRANS
		Menjaga kelancaran distribusi barang	Terwujudnya Stabilitas Harga bahan pokok dan barang penting dan Standardisasi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISKOPERINDAG
		Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DISKOPERINDAG
		Meningkatkan keterisian gudang SRG		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DISKOPERINDAG

		Meningkatkan Alat UTP yang di tera ulang		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DISKOPERINDAG
--	--	--	--	--	---------------

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 -2026

2.2 PROGRAM PRIORITAS DAN STRATEGIS PEMBANGUNAN 2025

Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026, juga menjadi periode keempat dari RPJPD 2005-2025. Pembangunan pada tahun 2025 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 diarahkan pada Upaya mewujudkan tema “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

Sesuai dengan Tema diatas Pembangunan tahun 2025 di Kabupaten Barito Kuala direncanakan paket strategis sebagai kegiatan prioritas pembangunan diantara lain:

1. Pengembangan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan (lanjutan)
2. Pembangunan Puskesmas Anjir Muara dan Anjir Pasar
3. Pembangunan Fasilitas Pendidikan
4. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
5. Rehabilitasi DIR Tinggiran Darat dan Tabunganen Pemurus
6. Rekontruksi Jalan Sidomulyo Ray 15 – Suryakanta (Ruas No 068)
7. Rekontruksi Jalan Pindahan Baru – Danda Besar (Ruas No 079)
8. Penggantian Jembatan Danda jaya (Ruas No 079)
9. Pembangunan Gedung Inspektorat
10. Pembangunan Prarasana, Sarana dan Fasilitas Umum untuk menunjang fungsi hunian
11. Penambahan Kapasitas IPA 100L/detik IKK Alalak – Mandastana
12. Pemasangan Jaringan perpipaan IKK Alalak

Setelah melalui pertimbangan dan hasil koordinasi bersama MCP KPK, maka didapat Proyek Strategis Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Inspektorat
2. Pengembangan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan (lanjutan, pembangunan poliklinik RSUD H. Abdul Aziz Marabahan)
3. Pembangunan Puskesmas Anjir Pasar (Penambahan Ruangan)
4. Pembangunan Puskesmas Mandastana (Penambahan Ruangan)
5. Pembangunan Gedung Depo Arsip.

Kemudian berdasarkan penjelasan tujuan dan sasaran pembangunan sebelumnya, maka dapat dilihat program prioritas pembangunan di tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Program RKPD Kab. Barito Kuala Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas
Pembangunan 2025

NO	TUJUAN	PROGRAM	SKPD
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah			
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dpupr
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dpupr
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dpupr
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dpupr
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dpupr
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dpupr
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dpupr
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dpupr
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dpupr
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Disperkim
		Program Pengembangan Kebudayaan	Disporabudpar
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disporabudpar
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporabudpar
		Program Pemasaran Pariwisata	Disporabudpar
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan Tph

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan Tph
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan Tph
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan Tph
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distan Tph
Program Penyuluhan Pertanian	Distan Tph
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Diskoperindag
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diskoperindag
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Diskoperindag
Program Pengembangan Umkm	Diskoperindag
Program Perizinan Usaha Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Disbunak
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbunak
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disbunak
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
Program Kawasan Permukiman	Disperkim
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Disperkim
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dpmd
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dpmd
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bp2rd
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnakertrans
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Disnakertrans
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Diskoperindag
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Diskoperindag
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskoperindag
Program Promosi Penanaman Modal	Dpmptsp
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dpmptsp

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dpmptsp
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Disbunak
		Program Penyuluhan Pertanian	Disbunak
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Penanganan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dlh
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dlh
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dlh
		Program Pengelolaan Sampah	Dlh
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dlh
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dlh
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dlh
		Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Penanggulangan Bencana	Bpbd
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kapabel, Akuntabel Dan Melayani	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh Skpd
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Program Koordinasi Dan Sin Kronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang
		Program Penelitian Dan Pengembangan	Bappelitbang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disbunak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Seluruh Skpd
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bkpp
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Dukungan Pelaksanaan Dan Tugas Fungsi Dprd	Set Dprd
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinkes
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol Pp
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol Pp
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dkpp
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dkpp
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dkpp
	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dpmd
	Program Penataan Desa	Dpmd
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Diskominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Diskominfo
	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dpmptsp
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dpmptsp
	Program Pembinaan Perpustakaan	Disperpusip
	Program Pengelolaan Arsip	Disperpusip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Disperpusip
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Disperpusip
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disperpusip
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dppkbp3a
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pengendalian Penduduk	Dppkbp3a
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporabudpar
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disporabudpar
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Disporabudpar
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Diskoperindag
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskoperindag
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskoperindag
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bkpp
		Program Kepegawaian Daerah	Bkpp
		Program Dukungan Pelaksanaan Dan Tugas Fungsi Dprd	Set Dprd
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

		Masyarakat	
		Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satpol Pp
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol Pp
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dkpp
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dkpp
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dkpp
		Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Dukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dpmd
		Program Penataan Desa	Dpmd
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dishub
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan	Diskominfo
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dpmpstsp
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dpmpstsp
		Program Pembinaan Perpustakaan	Disperpusip
		Program Pengelolaan Arsip	Disperpusip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Disperpusip
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Disperpusip
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disperpusip
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (Ukp) Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Ukm)	Dinkes
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dppkbp3a
		Program Perlindungan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dppkbp3a
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dppkbp3a
		Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dppkbp3a

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

	Program Pengendalian Penduduk	Dppkbp3a
	Program Pengembangan Kapasitas Daya SaingKepemudaan	Disporabudpar
	Program Pengembangan Kapasitas Daya SaingKeolahragaan	Disporabudpar
	Peningkatan Kapasitas Organisasi KepramukaanTingkat Daerah	Disporabudpar
	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
	Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
	Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok DanBarang Penting	Diskoperindag
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk DalamNegeri	Diskoperindag
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskoperindag

Sumber: RPD Kab. Barito Kuala 2023-2026 dan RKPD Kab. Barito Kuala 2025

BAB III
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BARITO KUALA TRIWULAN I 2025

3.1 RINGKASAN HASIL EVALUASI RKPD TRIWULAN I 2025

Berikut disampaikan evaluasi capaian fisik dan keuangan dari Program SKPD/Kecamatan yang menjadi Program Prioritas Pembangunan sampai dengan Triwulan I 2025, dan beberapa faktor pendorong dan penghambat SKPD/Kecamatan dalam mencapai target programnya, serta tindak lanjut yang disarankan untuk mengatasi penghambat yang ditemui, seperti pada tabel dibawah.

Tabel 3.1.1
Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Barito Kuala Triwulan I Tahun 2025

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
TUJUAN 1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (DINAS PUPR)							
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	100%	0,2%	33.638.000,00 (0,05%)			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG (DPUPR)							
2	Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar	100%	14,29%	5.158.113.845,00 (11,17%)			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (DPUPR)							
3	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	100%	8,5%	1.581.038.686,00 (10,18%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL (DPUPR)							
4.	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	100%	0%	0%			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya.
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (DPUPR)							
5	Persentase Bangunan Berwawasan Lingkungan yang terbangun dan Tertata	100%	0%	0%			

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (DPUPR)							
6	Persentase Daerah irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	100%	5,76%	4.735.926.464,00 (11,33%)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (DPUPR)							
7	Persentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	100%	6,67%	44.561.750,00 (4,44%)			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (DPUPR)							
8	Persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi	100%	3,83%	99.575.122,00 (0,84%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (DPUPR)							
9	Persentase tenaga konstruksi yang berdaya saing	100%	10,94%	50.750.100,00 (6,34%)			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE (DPUPR)							
10	Persentase drainase dalam kondisi baik	100%	0%	0 (0%)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (DPUPR)							
11	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	100%	0,2%	33.638.000,00 (0,05%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DISPERKIM)							
12	Persentase Layanan Orang/Badan Usaha Pengembang Perumahan Skala Kecil	100%	0%	0%			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN (DISPERKIM)							
13	Persentase Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	100%	0%	10.000.000,00 (0,29%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (DISPORBUDPAR)							
14	Persentase jenis seni budaya yang menjadi obyek wisata	100%	50%	618.540.000,00 (26,14%)			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA (DISPORBUDPAR)							
15	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	12,5%	22.000.000,00 (6,09%)			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (DISPORBUDPAR)							
16	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi wisata	100%	25%	68.903.596,00 (13,25%)			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (DISPORBUDPAR)							
17	Persentase pemasaran	100%	14,29%	8.340.000,00 (1,18%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	pariwisata yang terlaksana dan diikuti						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (DISTAN TPH)							
18	Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Utama (Ha)	115.565 Ha	47.040,14 Ha (40,70%)	84.944.325,00 (1,3%)			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (DISBUNNAK)							
19	Persentase peningkatan populasi ternak	2,57%	0,65% (25,29%)	24.779.950,00 (4,35%)			
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	4,1%	1,1% (26,83%)				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DISTAN TPH)							
20	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw/Ha)	1.512,67 Kw/Ha	257,99 Kw/Ha (17,06%)	0 (0%)			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (DISBUNNAK)							
21	Persentase peningkatan populasi ternak	2,57%	0,65% (25,29%)	28.076.650,00 (9,43%)			
	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	4,1%	1,1% (26,83%)				

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (DISTAN TPH)							
22	Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ha)	105.202 Ha	8.942,21 Ha (8,5%)	85.355.787,00 (16,85%)			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (DISBUNNAK)							
23	Persentase peningkatan penyediaan daging ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	14%	3,55% (25,36%)	70.302.225,00 (9,92%)			
	Persentase peningkatan populasi ternak	2,57%	0,65% (25,29%)				
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN (DISBUNNAK)							
24	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	4,1%	1,1% (26,83%)	8.706.975,00 (3,22%)			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (DISTAN TPH)							
25	Prosentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	21,59%	1,96% (9,08%)	74.125.000,00 (4,22%)			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (DISBUNNAK)							
26	Persentase jenis produk olahan perkebunan yang	100%	25%	5.590.000,00 (6,17%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	diterima pasar						
	Persentase jenis produk olahan peternakan yang diterima pasar	100%	25%				
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI (DISKOPERINDAG)							
27	Persentase Koperasi yang Berkembang	100%	38,64%	2.940.000,00 (5,46%)		1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus / Pengelola Koperasi relative masih rendah dan sering terjadi pergantian, karena habis masa jabatan 2. Kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisipasi terhadap kegiatan Koperasi masih rendah terutama dalam upaya pemupukan modal sendiri.	1. Perlunya peningkatan kapasitas pengurus pengelola koperasi 2. Perlunya peningkatan kesadaran anggota koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (DISKOPERINDAG)							
28	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	100%	20%	0 (0%)		1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus / Pengelola Koperasi relative masih rendah dan sering terjadi pergantian, karena habis masa jabatan 2. Kesadaran Anggota Koperasi untuk berpartisipasi terhadap kegiatan Koperasi masih rendah terutama dalam upaya pemupukan modal sendiri.	1. Perlunya peningkatan kapasitas pengurus pengelola koperasi 2. Perlunya peningkatan kesadaran anggota koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (DISKOPERINDAG)							
29	Persentase usaha mikro yang berdaya saing	100%	26,67%	11.713.150,00 (5,63%)		1. Pelaku Usaha Mikro sebagian masih belum memiliki jaminan yang memadai untuk memanfaatkan kredit program Pemerintah 2. Masih lemahnya SDM pelaku usaha, terutama jiwa kewirausahaan, sehingga lambat dalam mengembangkan usahanya	1. Perlu adanya koordinasi antara SKPD, untuk membina pelaku usaha UMK, yang dikoordinir oleh sekretariat Pemerintah Daerah (Bidang Ekonomi Pembangunan) 2. Perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi secara rutin, untuk mengembangkan dan meevaluasi pembangunan

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
							bidang ekonomi yang dikoordinir oleh Sekretariat Pemerintah Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (DISKOPERINDAG)							
30	Persentase UMKM yang berkembang	100%	0%	0%		1. Tidak semua produk usaha Mikro menjadi Display pameran karena kemasan masih belum standar 2. Masih lemahnya SDM pelaku usaha, terutama jiwa kewirausahaan, sehingga lambat dalam mengembangkan usahanya 3. Masih terbatasnya wawasan pelaku usaha untuk memasarkan produknya	Perlu adanya koordinasi antara SKPD, untuk membina pelaku usaha UMK, yang dikoordinir oleh sekretariat Pemerintah Daerah (Bidang Ekonomi Pembangunan)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (DISPERKIM)							
31	Persentase rumah layak huni	100%	1,5%	2.217.400,00 (0,09%)			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN (DISPERKIM)							
32	Persentase Peningkatan Luas Permukiman Layak Huni	100%	1,38%	18.530.600,00 (0,17%)			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) (DISPERKIM)							
33	Persentase PSU yang Layak dan Memadai	100%	0,75%	20.931.853,00 (0,07%)			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (DINAS SOSIAL)							
34	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi	100%	8%	104.468.450,00 (8,07%)		Honorarium Petugas Fasilitator dan Petugas Puskesmas baru bisa direalisasikan pada Tri III dan IV	Agar kegiatan dapat disesuaikan dengan arus kasnya

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid						
PROGRAM PENANGANAN BENCANA (DINAS SOSIAL)							
35	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	100%	6,5%	14.568.275,00 (5,38%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (DINAS SOSIAL)							
36	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	100%	14,98%	712.490.250,00 (23,39%)		Data penerima bantuan sosial dari desa terkadang masih belum valid	Perlunya dari Dinas Sosial untuk validasi langsung
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (DINAS SOSIAL)							
37	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga	100%	2,39%	73.325.634,00 (3,98%)		Adanya usulan/permohonan yang diterima dari masyarakat/desa terlalu banyak, sehingga tidak semua	Diharapkan usulan dapat direalisasikan se-optimal mungkin dengan anggaran yang ada

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola					dapat terealisasi karena kendala anggaran	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA (DPMD)							
38	Persentase Desa yang Melaksanakan Kerjasama Antar Desa	100%	0	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (DPMD)							
39	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif	100%	28,89%	232.678.500,00 (25,07%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPRD)							
40	Persentase Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	16,05%	507.480.956,00 (16,11%)		1. Kurang disiplinnya sebagian SKPD Penghasil dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan setiap bulannya sesuai dengan	1. Diharapkan peran aktif seluruh SKPD Penghasil agar melaporkan realisasi penerimaannya segera di awal bulan.

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						batasan waktu/tanggal yang sudah ditetapkan. 2. Belum terfasilitasinya untuk pelayanan pajak daerah secara keliling karena adanya efesiensi anggaran padahal sebelumnya kegiatan ini sudah di anggarkan 3. Perbup Tappin Box, Perbup Pengelolaan Rumah Dinas, Perbup Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian dan Perbup Pengelolaan Retribusi Daerah masih dalam tahap rancangan sehingga sosialisasi PDRD belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025, hal ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Kurang disiplin Wajib Pajak Daerah dalam hal penyetoran penerimaan PAD yang tepat waktu	2. Penyesuaian dengan efisiensi anggaran 3. Perlunya percepatan penyelesaian perbup sebagaimana yang dimaksud 4. Perlu dilakukannya pembinaan kepada wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai dengan penerimaan yang diterima pada setiap Bulan Berjalan.
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (DISNAKERTRANS)							
41	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	100%	8,27%	60.575.300,00 (10,31%)			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA (DISNAKERTRANS)							
42	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Fasilitasi	100%	0	0 (0%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS)							
43	Persentase Jalan yang di bangun di kawasan transmigrasi &	100%	16,67%	16.810.490,00 (6,71%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	Persentase Pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi yang mendapatkan Pelatihan dengan Target Indikator Kinerja						
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (DISKOPERINDAG)							
44	Persentase Jenis Produk yang diterima Pasar dan Persentase produk yang berkualitas	100%	30%	214.186.798,00 (25,89%)		1. Keterampilan dan Kreatifitas Pelaku IKM yang masih rendah 2. Pemasaran produk IKM masih terbatas	1. Pelaku IKM yang mengikuti Pelatihan perlu diberikan Bantuan Peralatan dalam berproduksi 2. Perlunya Perhatian dan Pemerintah Daerah dalam Memperluas Pasar terhadap produk IKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI (DISKOPERINDAG)							
45	Persentase perusahaan industri yang memiliki Perizinan Industri	100%	0,2%	0 (0%)		Minimnya SDM dan Anggaran Pemantauan serta Pengawasan terhadap perusahaan Industri	Perlunya penambahan Anggaran untuk kegiatan dan SDM pegawai
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (DISKOPERINDAG)							
46	Persentase Perusahaan industri yang tertib Laporan	100%	0,2%	0 (0%)		Minimnya SDM dan Anggaran Pemantauan serta Pengawasan terhadap perusahaan Industri	Perlunya penambahan Anggaran untuk kegiatan dan SDM pegawai
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
47	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Diikuti	100%	10%	11.220.000,00 (6,68%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
48	Persentase Iklim Investasi yang Kondusif	100%	5%	6.300.350,00 (4,95%)		1. Kegiatan masih dalam tahap menyusun dan merencanakan timeline pembuatan SOP kebijakan	1. Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat diakselerasi seoptimal mungkin

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						2. Juknis dari pusat belum turun, sehingga kegiatan belum bisa sinkron antara provinsi dan kabupaten	2. Perlunya koordinasi ke instansi vertical lebih intens sehingga tidak hanya tergantung pada juknis saja.
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
49	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	100%	16,24%	10.580.350,00 (5,41%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (DKPP)							
50	Aggregat persentase produksi perikanan tangkap	61%	12% (19,67%)	109.083.130,00 (17,54%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (DKPP)							
51	Aggregat persentase produksi perikanan budidaya	13%	2% (15%)	137.182.525,00 (15,37%)		1. Akses jalan menuju BBI sedang diperbaiki dan adanya informasi mengenai kualitas benih ikan dari BBI yang kurang baik, sehingga menyebabkan penjualan benih yang terdistribusi tidak maksimal 2. Menurunnya kualitas air di kolam pemeliharaan indukan ikan karena adanya endapan di dasar kolam 3. Adanya kerusakan di beberapa kolam induk ikan 4. Fasilitas untuk indoor pemijahan dan pendederan ikan lele dan gurami rusak total 5. Kurangnya kualitas SDM untuk menangani suatu komoditas	1. Evaluasi kondisi kualitas benih ikan dari BBI 2. Pemeliharaan terhadap kolam pemeliharaan indukan ikan 3-4. Perbaikan kolam induk ikan dan fasilitas pemijahan dan pendederan ikan lele dan gurami yang rusak 5. Perlunya penambahan SDM untuk menangani suatu komoditas.

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENANGANAN BENCANA							
PROGRAM PENGENDALIAN PENCERAMAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)							
1	Persentase sampel air dan Udara yang memenuhi baku mutu	78,95%	0,37%	74.067.325,00 (4,79%)			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (DLH)							
2	Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian	100%	100%	2.737.625,00 (1,34%)			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (DLH)							
3	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	12,5%	38.773.200,00 (10,52%)			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) (DLH)							
4	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup	100%	15,44%	28.382.750,00 (12,55%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (DLH)							
5	Persentase Sampah Terkelola	79,53%	21,56%	1.690.268.000,00 (12,02%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) (DLH)							
6	Persentase limbah B3 yang dikelola	100%	12,5%	68.230.000,00 (16,19%)			Ada BLUD Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 1.125.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) (DLH)							
7	Persentase RTH yang memenuhi standar	100%	0%	252.592.548,00 (18,6%)			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP (DLH)							
8	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup	100%	25%	5.460.000,00 (11,67%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (DISPERKIM)							
9	Persentase rumah korban bencana atau relokasi yang ditangani	100%	1,33%	9.076.875,00 (0,16%)			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)							
10	Persentase Kualitas Penanggulangan Bencana oleh BPBD	100%	5,77%	78.963.500,00 (6,84%)		1. Kurangnya SDM Penyuluh Kebencanaan di Masyarakat 2. Beberapa peralatan penunjang kegiatan sudah kurang memadai 3. Kondisi geografis alam dan waktu kejadian bencana alam tidak dapat di prediksi atau tidak mengenal waktu	1. Penambahan SDM Penyuluh Kebencanaan 2-3. Perlunya pembaharuan/pemugaran peralatan penunjang kegiatan 3. Perlunya penambahan SDM yang berfokus pada penanggulangan bencana alam
TUJUAN 3. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, KAPABEL, AKUNTABEL DAN MELAYANI							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (INSPEKTORAT)							
1	Persentase temuan/rekomend	100%	23,89%	2.778.825.120,00 (8,22%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	asi APIP dan BPK RI yang selesai ditangani sesuai ketentuan						
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (INSPEKTORAT)							
2	Persentase SKPD yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah untuk diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM (%)	100%	1,06%	16.233.500,00 (1,02%)			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPELITBANG)							
3	Prosesntasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan	100%	12,5%	134.315.797,00 (12,52%)		1. Kesibukan masing-masing SKPD mitra dengan aktivitas mereka masing-masing, sehingga koordinasi kegiatan sering terhambat 2. Sering bergantinya pihak yang dapat dihubungi ketika diminta data, sehingga membuat pihak SKPD mitra kebingungan terhadap data yang diminta 3. Keterlambatan sebagian kecil SKPD dalam mengumpulkan evaluasi yang diminta	1-2. Koordinasi yang lebih intens dengan SKPD mitra sekalipun tidak bisa secara formal, koordinasi juga bisa dilaksanakan secara non formal (melalui media sosial) 3. Pengawasan berkala terhadap dokumen yang diminta dan memastikan agar SKPD mengumpulkan tepat waktu
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPELITBANG)							
4	Persentase SKPD dengan Nilai Sakip dari unsur nperencanaan minimal 23,00	100%	0%	34.751.368,00 (5,56%)		1. Padatnya jadwal kegiatan Bupati sehingga terkadang mengganggu agenda perencanaan 2. Kurangnya pemahaman baik cara peinginputan pada aplikasi	1. Koordinasi dengan pihak protokol pimpinan daerah lebih diintensifkan 2-3. Dilaksanakan workshop input usulan pada SIPD dan rapat terbatas bagi SKPD

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						SIPD maupun kesesuaian dengan tahapan perencanaan 3. Input usulan di SIPD seringkali melebihi dari waktu yang telah ditetapkan sedangkan tahapan perencanaan tetap berjalan sehingga banyak pekerjaan yang tumpang tindih yang mengakibatkan kualitas perencanaan jauh dari yang diharapkan.	terkait usulan Pokir dan usulan masyarakat.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANG)							
5	Persentase rekomendasi penelitian/kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	0%	43.348.250,00 (7,34%)			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (BKPP)							
6	Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%	16,15%	176.959.000,00 (7,64%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPP)							
7	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100%	50%	1.293.140.500,00 (46,69%)			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (SEKRETARIAT DPRD)							
8	Persentase layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	22,26%	5.951.485.552,00 (21,33%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)							
9	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	100%	10,55%	19.521.520,00 (1,41%)			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)							
10	Persentase Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan Nilai UHC	100%	5,34%	12.290.469.027,00 (9,4%)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)							
11	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	4,17%	1.715.100,00 (0,49%)			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (DINAS KESEHATAN)							
12	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	5,27%	1.271.875,00 (0,28%)			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATPOL PP)							
13	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	20,14%	141.928.950,00 (12,01%)		1. Permasalahanan dilapangan banyak Lapak PKL yang sudah dilakukan penertiban tetapi kembali lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak adanya tempat relokasi yang memadai untuk menampung PKL serta mengakibatkan terjadinya kemacetan yang mengganggu	1. Perlunya penertiban berkala Lapak PKL yang melanggar peraturan 2. Perlunya koordinasi yang lebih intens antara Satpol PP dengan Protokol Forkopim, dan perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung 3. Perlunya akselerasi pembentukan dan legalisasi

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						pengguna jalan kurangnya peran serta SKPD terkait. Saran nya perlu adanya sosialisasi Peraturan dan sinegritas antar Instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan tersebut. (berdasarkan aduan masyarakat melalui E Lapor) 2. Terjadinya perubahan jadwal kegiatan pimpinan yang tidak di Informasikan ke Satpol PP dan maslaah lainnya adalah terjadi alih fungsi anggota Satpol PP dan terjadinya keterlambatan Satpol PP di tempat acara karena sarana dan prasarana tidak mendukung 3. Tidak semua Desa se Kabupaten Barito Kuala memiliki Satlinmas Desa ada beberapa Desa sudah membentuk Satlinmas Desa tetapi belum dibuatkan SK Satlinmas oleh Kepala Desa	Satlinmas Desa terutama bagi desa yang belum terbentuk sama sekali
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (SATPOL PP)							
14	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100%	25%	4.120.000,00 (0,98%)		Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Program kegiatan	Perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (DKPP)							
15	Persentase lumbung pangan yang berfungsi	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (DKPP)							
16	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93	0 (0%)	45.650.295,00 (4,45%)		1. Ketidakstabilan harga pangan di pasar 2. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat tertunda karena adanya efisiensi anggaran	1. Perlunya pendataan rutin harga pasar dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait 2-3. Memaksimalkan anggaran yang tersisa

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						3. Kegiatan sosialisasi B2SA terdapat kendala teknis akibat efisiensi anggaran, dimana awalnya ditargetkan 5 desa menjadi 3 desa	3. Nilai PPH keluar di akhir tahun/Triwulan IV
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (DKPP)							
17	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100%	0%	12.539.000,00 (13,76%)			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (DISDUKCAPIL)							
18	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100%	29,05%	400.811.360,00 (32,55%)			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)							
19	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standar	100%	12,97%	20.708.560,00 (9,65%)			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)							
20	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100%	7,15%	23.415.100,00 (5,89%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)							
21	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	Kabupaten Barito Kuala						
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DPMD)							
22	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	100%	21,28%	547.088.656,00 (18,82%)			Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
PROGRAM PENATAAN DESA (DPMD)							
23	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	100%	20,41%	9.620.000,00 (6,02%)			Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (DINAS PERHUBUNGAN)							
24	Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) / Persentase Angkutan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan*	100%	27,78%	2.760.159.562,00 (25,73%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (DINAS PERHUBUNGAN)							
25	Persentase Angkutan Sungai dan Penyeberangan Laik operasional sesuai standar keselamatan / Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas	100%	12,5%	56.374.675,00 (1,56%)			

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	laut, sungai dan penyeberangan*						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (DISKOMINFO)							
26	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	100%	39%	139.645.800,00 (5,7%)		Kurang maksimalnya koordinasi internal di bidang IKP terkait penyusunan konten dikarenakan kurangnya personal untuk peliputan	1. Perlu dimaksimalkan koordinasi internal bidang IKP terkait penyusunan konten dan penambahan dari segi personil dan anggaran untuk peliputan. 2. Perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dengan memfasilitasi ASN/non ASN bidang IKP secara berkala sehingga memiliki sertifikasi kemampuan kompetensi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA (DISKOMINFO)							
27	Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	100%	75%	495.716.360,00 (13,65%)		1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola TIK yang belum memiliki kompetensi khusus di bidang DNS, keamanan domain dan pengelolaan hosting 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten yaitu Terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mendukung tugas penyelenggaraan SPBE dalam mengelola kebijakan dan infrastruktur TI pemerintah 3. Keterbatasan kapasitas server dan perangkat keras yang tidak memadai untuk menangani beban data yang	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan TIK bisa melalui Bimtek, sertifikasi atau kerjasama dengan perguruan tinggi/TIK profesional. 2. Fokus pada pelatihan dan pengembangan SDM melalui program sertifikasi dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang TI 3. Tingkatkan kapasitas server dengan investasi pada teknologi cloud atau server fisik yang lebih modern dan Perkuat jaringan dengan membangun infrastruktur tambahan seperti peningkatan bandwidth

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						terus bertambah dan Infrastruktur jaringan yang lambat atau tidak stabil, terutama di daerah terpencil 4. Aplikasi rentan terhadap serangan siber atau kebocoran data karena kurangnya fitur keamanan	4. Terapkan langkah-langkah keamanan berlapis, seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan ancaman secara real-time
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (DISKOMINFO)							
28	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,6	0 (0%)	15.229.930,00 (9,72%)		1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada bidang Statistik 2. Admin data SKPD berganti setiap tahun, sehingga sedikit kesulitan untuk pendataan kegiatan pengolahan data sektoral yang ada di SKPD	1. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan dapat mendukung Indikator Kinerja Utama Pimpinan SKPD 2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan dapat mendukung Indikator Kinerja Utama Pimpinan SKPD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN (DISKOMINFO)							
29	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	62,5%	14.838.300,00 (5,92%)		Masalah keamanan seringkali kurang mendapatkan perhatian bahkan kadang berada di urutan paling akhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Jika tidak mengganggu performa sistem, maka masalah keamanan sistem seringkali tidak begitu diutamakan. Keberadaan	Adanya dukungan Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan serta sumber dana dari Anggaran Kegiatan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terealisasi dan mendukung Indikator Kinerja

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						internet telah menciptakan suatu revolusi tersendiri di berbagai sektor, Para pengguna internet semakin lama semakin meningkat jumlahnya. dan saat ini internet menjadi kebutuhan pokok sebagaimana peran telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. faktor resiko terbesar adalah terjadinya insiden keamanan siber yang tidak diinginkan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja	Utama Pimpinan SKPD
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
30	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	53,72%	83.898.700,00 (20,74%)		1. Permasalahan koneksi internet kurang stabil 2. Kurang maksimalnya sarpras untuk pelayanan penanaman modal 3. Tidak sinkronnya data pelaku usaha dengan database kependudukan	1. Perlunya peningkatan sarpras pelayanan penanaman modal, terutama akses internet 2. Perlu sinkronisasi Kembali data pelaku usaha / pemohon dengan database kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
31	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	15,38%	1.660.000,00 (4,76%)		Pengelolaan data perijinan usaha masih manual	Diharapkan ada peningkatan pengelolaan data perijinan usaha berbasis elektronik
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (DISPERPUSIP)							
32	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	100%	3,61%	154.262.800,00 (16,65%)		1. Kondisi geografis perpustakaan menyebabkan pelayanan perpustakaan tidak maksimal 2. Banyaknya tenaga perpustakaan yang tidak berlatarbelakang pustakawan	2. Perlunya pendataan para tenaga perpustakaan dan pustakawan untuk diikutkan dalam pelatihan/bimtek perpustakaan 3. Perlu lebih ditingkatkannya komunikasi sehingga pada

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						3. Masih rendahnya komunikasi, hal itu mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan seperti kegiatan lomba bercerita dan menulis cerpen menjadi kurang maksimal dalam hal jumlah peserta 4. Belum terpenuhinya / optimalnya sarana perpustakaan	akhirnya akan semakin menambah motivasi dan inovasi dalam kegiatan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca. 4. Perlunya pemenuhan terhadap sarana Perpustakaan sehingga akan memberikan layanan yang optimal untuk para pemustaka
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
33	Persentase SKPD yang Arsipnya Tertata dengan baik	100%	12,81%	122.935.150,00 (19,42%)		1. Masih banyaknya arsip yang belum dikelola dengan baik di SKPD 2. SDM Arsiparis masih banyak belum mengerti tentang pengelolaan arsip 3. Kurangnya perhatian SKPD terhadap pentingnya arsip 4. Kurangnya sarpras dan anggaran penataan arsip	1. SDM Arsiparis harus mengetahui tugas dan fungsinya 2. SKPD harus mengalokasikan dana untuk penataan arsip dan sarana dan prasarana kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
34	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100%	22,22%	16.086.400,00 (26,34%)		1. Penyusutan/ pemusnahan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah masih arsip yang tersimpan di depo arsip 2. Banyaknya arsip yang kena bencana di Kecamatan/Desa belum dilaporkan ke Lembaga kearsipan daerah 3. Banyaknya arsip yang kena bencana di Kecamatan/Desa belum dilaporkan ke Lembaga kearsipan daerah 4. Banyaknya arsip pembubaran dan penggabungan SKPD belum di tata pada SKPD yang bersangkutan	1. SKPD yang memiliki arsip yang sudah sampai masa retensi arsipnya agar segera melakukan penyusutan/ Pemusnahan Arsipnya 2. SKPD/Kecamatan/ Kelurahan/Desa dapat bekerjasama dengan Lembaga kearsipan untuk melaporkan arsip yang terkena bencana 3. Kedepannya agar SKPD yang telah digabungkan ataupun dibubarkan, serta yang mekarkan dapat menyerahkan arsipnya ke Lembaga Kearsipan Daerah

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
35	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (17 KECAMATAN)							
36	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100%	25,82%	108.393.533,00 (5,57%)	Di Beberapa Kecamatan, partisipasi masyarakat mengikuti musrenbang kecamatan mengalami kemajuan sehingga menyebabkan usulan yang masuk di desa banyak yang terakomodir dalam musrenbang kabupaten	Untuk Kegiatan atau Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap pengurusan dengan pihak terkait.	Agar kepengurusan barang tersebut dipercepat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (17 KECAMATAN)							
37	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100%	26,51%	57.270.850,00 (15,1%)		Masih minimnya pemahaman kecamatan mengenai pengelolaan tata keuangan desa dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku	Diharapkan adanya Pelatihan/ sosialisasi sehingga aparatur Kecamatan memiliki wawasan dan potensi yang memadai tentang tata kelola keuangan desa dan pengawalan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (17 KECAMATAN)							
38	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100%	12,92%	24.150.000,00 (6,1%)		1. Beberapa kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dst. 2. Kegiatan linmas di beberapa kecamatan tidak aktif	1. Sesuaikan kegiatan dengan arus kasnya 2. Perlunya digalakkan kembali kegiatan linmas di masyarakat supaya keamanan daerah kembali terjamin
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (17 KECAMATAN)							
39	Persentase Kepuasan Masyarakat / IKM	100%	3,43%	13.700.000,00 (0,6%)		1. Kuesioner yang diterima dari Desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian	1. Jika perlu pihak kecamatan bisa langsung turun ke desa untuk mengambil kembali kuesioner yang dibagikan

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan perlu anggaran yang besar mengingat melibatkan berbagai pihak. 3. Beberapa kecamatan sarana pelayanan publiknya mengalami kerusakan 4. Di Kecamatan Tabunganen, Peserta kafilah MTQ yang dikirim masih wajah lama karena kurangnya seleksi dan pencarian bakat untuk menjadi kafilah MTQ kecamatan	2-3. Dapat dipertimbangkan untuk penambahan anggaran 4. Perlunya peremajaan peserta MTQ di Kecamatan Tabunganen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (SELURUH SKPD DAN KECAMATAN)							
40	Persentase Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat waktu & Nilai SAKIP SKPD	100%	19,41%	201.086.458.075,00 (21,77%)	1. Kerjasama yang baik antara internal SKPD maupun dengan pihak eksternal 2. Kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal perencanaan	1. Sebagian kegiatan dilaksanakan di triwulan selanjutnya 2. Hasil rekonsiliasi aset yang terlambat 3. Pertanggungjawaban keuangan belum maksimal karena, kegiatan rapat, fotocopy dokumen ikut kegiatan rutin sekretariat 4. Perubahan pada system pengadaan menggunakan e-katalog v.6 5. Adanya rencana efisiensi anggaran sehingga SKPD berhati-hati dalam merealisasikan kegiatan 6. Beberapa kegiatan ada yang baru dimulai di triwulan II dst 7. Minimnya ASN di beberapa SKPD/Kecamatan menyebabkan rangkap tugas yang dilaksanakan oleh ASN yang ada	1. Penyesuaian arus kas sesuai pelaksanaan berdasarkan triwulan 2. Rekonsiliasi aset agar secepatnya dilaksanakan 3. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban 4. Penyesuaian dengan aplikasi baru 5. Agar anggaran efisiensi segera disahkan untuk kelancaran kegiatan 6. Sesuaikan dengan arus kas yang ada 7. Perlunya penambahan personil ASN/PPPK di beberapa instansi 8. Perlunya penambahan anggaran koordinasi/konsultasi terkhusus kecamatan yang berada jauh dari pusat ibukota kabupaten

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						8. Minimnya anggaran koordinasi/konsultasi untuk beberapa kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kabupaten 9. Di Kecamatan Mekarsari, akses air PDAM masih sangat minim bahkan di Kantor Kecamatan itu sendiri 10. Di Kecamatan Tabunganen, penjual peralatan ATK Kantor sangat sedikit sehingga sedikit-banyak menghambat kinerja administrasi kecamatan	9. Perlunya akselerasi cakupan pelayanan PDAM di beberapa kecamatan, khususnya di Kecamatan Mekarsari 10. Agar menjadi perhatian kabupaten untuk pemerataan distribusi perdagangan di daerahnya
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (BAKESBANGPOL)							
41	Persentase partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	100%	25%	2.900.000,00			
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (BAKESBANGPOL)							
42	Persentase Partisipasi Masyarakat dibidang politik	100%	25%	46.351.050,00 (2,28%)			
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (BAKESBANGPOL)							
43	Persentase Meningkatnya Kesadaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat, Pelajar/Mahasiswa dan	100%	25%	9.058.986,00 (6,4%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	Generasi Milenial Terhadap ketahanan Ekonomi/Produk dalam Negari, Sosial, Budaya, Agama dan Penyalah Gunaan Narkotika di Kabupaten Barito Kuala						
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (BAKESBANGPOL)							
44	Persentase Penanganan Potensi Konflik yang tidak menjadi Konflik	100%	25%	126.208.990,00 (7,83%)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)							
45	Persentasi SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan yang benar	100%	12,75%	110.538.087.270 (40,11%)		1. Permasalahan koneksi internet saat input RKA di SIPD 2. Masih ada SKPD yang salah input rekening belanja pada RKA-nya 3. Sesuai Permendagri 77 Tahun 2021, dalam aplikasi SIPD tidak ada lagi laporan BUD, BKU dan Posisi Kas Daerah Sehingga kesulitan memantau Pengeluaran dan Penerimaan serta Saldo terakhir 4. Sebagian SKPD terlambat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran karena baru mulai proses melengkapi dokumen persyaratan di akhir batas waktu penyampaian dokumen persyaratan 5. Setiap tahun selalu ada Update Aplikasi baru dalam	1. Memastikan koneksi internet aman saat input RKA 2. Asistensi lebih ketat terkait RKA SKPD 3-4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak pusat, provinsi maupun pihak lainnya diharapkan tetap sesuai aturan yang berlaku, sehingga data laporan yang disajikan akurat, cepat dan tepat 5. Bendahara pengeluaran dan Pengelola Gaji SKPD di sarankan untuk menambah kemampuan dan wawasan bisa mengikuti FGD/ Bimtek/Workshop/Sosialisasi dan berkoordinasi/berkomunikasi/ sharing-sharing dengan pihak -pihak yang

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
						Penatausahaan Pengelolaan Keuangan PEMDA.	berkompeten baik dalam daerah maupun luar daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIKI DAERAH (BPKAD)							
46	Persentase Jumlah SKPD yang mencatat barang milik daerah tepat waktu	100%	5,83%	166.919.932,00 (9,71%)		1. Harga dan Biaya yang cenderung berubah 2. Sebagian SKPD ada yang tidak mengusulkan RKBMD sampai saat ini, maupun Usulan RKBMD SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD 3. Adanya kesulitan dalam pengumpulan data dukung dalam hal ini bukti spj pembelian baik belanja barang jasa dan belanja modal. Pengurus barang terkadang terlambat dalam mengumpulkan data dukung tersebut bahkan tidak diberi data, sehingga terlambat juga dalam penyusunan laporan BMD.	1. Perlunya analisa lebih lanjut untuk 3 bulan ke depan 2. Sebelum mengusul harus SKPD harus membandingkan aset yang tercatat pada SKPDnya dengan kebutuhan 3. Agar Pengguna Barang SKPD bisa memahami pentingnya penatausahaan Barang Milik Daerah, sehingga Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD SKPD tersampaikan tepat waktu
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SEKRETARIAT DAERAH)							
47	Persentase pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	56,32%	7.486.407.513,00 (51,71%)			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (SEKRETARIAT DAERAH)							
48	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100%	36,67%	762.643.485,00 (30,64%)			

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
TUJUAN 4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)							
1	Persentase Capaian Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dan Nilai UHC	100%	5,34%	12.290.469.027,00 (9,4%)			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (DPPKBP3A)							
2	Persentase desa yang memiliki Forum anak Desa	100%	0%	2.420.000,00 (3,36%)			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (DPPKBP3A)							
3	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi anak korban kekerasan yang diselesaikan	100%	0%	0 (0%)			
PROGRAM PERLIDUNGAN PEREMPUAN (DPPKBP3A)							
4	Persentase Realisasi Layanan Rujukan Bagi perempuan korban kekerasan yang diselesaikan	100%	1,42%	9.000.000,00 (2,41%)			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA (DPPKBP3A)							
5	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	100%	0	0 (0%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DPPKBP3A)							
6	Persentase SKPD yang mengimplemtasikan PPRG dalam RKA	100%	0	0 (0%)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) (DPPKBP3A)							
7	Persentase Capaian Indeks Pembangunan Keluarga	100%	0%	11.930.400,00 (0,57%)			
PORGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) (DPPKBP3A)							
8	Unmeet Need	100%	6,38%	195.892.665,00 (5,22%)			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK (DPPKBP3A)							
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR)	100%	4%	377.700.739,00 (19,05%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN (DISPORBUDPAR)							
10	Persentase Peningkatan pemuda yang berprestasi	100%	5%	43.207.900,00 (6,65%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN (DISPORBUDPAR)							
11	Persentase atlet yang berprestasi	100%	8,01%	251.655.100,00 (4,17%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN (DISPORBUDPAR)							
12	Persentase Pembinaan Kepramukaan	100%	25%	75.000.000,00 (25%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN)							
13	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	100%	32,63%	24.674.227.892,00 (32,81%)			Sebagian kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan seterusnya

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (DINAS PENDIDIKAN)							
14	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Terbaru	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN)							
15	Persentasi Ketersediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100%	0%	0 (0%)			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (DISNAKERTRANS)							
16	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	13,33%	94.576.200,00 (5,15%)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (DISKOPERINDAG)							
17	Persentase meningkatnya sarana perdagangan yang refresentatif	100%	40%	14.599.655,00 (5,56%)		Tidak adanya anggaran sosialisasi kepada pedagang pasar, sehingga menyebabkan pedagang kurang mentaati peraturan yang berlaku	Penambahan Anggaran untuk Rapat / Sosialisasi perihal penataan Pedagang Pasar
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (DISKOPERINDAG)							
18	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Sesuai Kebutuhan Masyarakat	100%	25%	3.917.400,00 (8,88%)		Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu distribusi LPG 3 kg dan barang tidak standar (kadaluarsa)	Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha/konsumen tentang perlindungan konsumen.
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGI KONSUMEN (DISKOPERINDAG)							
19	Persentase peningkatan alat	100%	2%	0 (0%)		1. Belum tersediannya gudang/tempat khusus penyimpanan Alat standar kemetrolgian	1. Penambahan tenaga Reparatir 2. Pembangunan gudang/ruangan tempat

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
	UTTP yang ditera / tera ulang					2. Masih belum bisa menabab ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang untuk timbangan jembatan	penyimpanan Alat standar kemetrologian yang refresentatif. 3. Menambah ruang lingkup pelayanan Tera/Tera Ulang Timbangan Jembatan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (DISKOPERINDAG)							
20	Persentase keterisian gudang SRG	100%	0%	399.804.575,00 (69,19%)		Fasilitas penunjang SRG masih belum lengkap.	Perlu tambahan Anggaran untuk peningkatan fasilitas penunjang SRG.
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (BKPP)							
21	Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%	16,15%	176.959.000,00 (7,64%)			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPP)							
22	Persentase PNS yang memenuhi kompetensi	100%	50%	1.293.140.500,00 (46,69%)			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (SEKRETARIAT DPRD)							
23	Persentase layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	22,26%	5.951.485.552,00 (21,33%)			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (17 KECAMATAN)							
24	Persentase Ketentraman dan Keamanan lingkungan	100%	12,92%	24.150.000,00 (6,1%)		1. Beberapa kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dst. 2. Kegiatan linmas di beberapa kecamatan tidak aktif	1. Sesuaikan kegiatan dengan arus kasnya 2. Perlunya digalakkan kembali kegiatan linmas di masyarakat supaya keamanan daerah kembali terjamin

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (17 KECAMATAN)							
25	Persentase Kepuasan Masyarakat / IKM	100%	3,43%	13.700.000,00 (0,6%)		1. Kuesioner yang diterima dari Desa sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan perlu anggaran yang besar mengingat melibatkan berbagai pihak. 3. Beberapa kecamatan sarana pelayanan publiknya mengalami kerusakan 4. Di Kecamatan Tabunganen, Peserta kafilah MTQ yang dikirim masih wajah lama karena kurangnya seleksi dan pencarian bakat untuk menjadi kafilah MTQ kecamatan	1. Jika perlu pihak kecamatan bisa langsung turun ke desa untuk mengambil kembali kuesioner yang dibagikan 2-3. Dapat dipertimbangkan untuk penambahan anggaran 4. Perlunya peremajaan peserta MTQ di Kecamatan Tabunganen
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)							
26	Persentase SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensinya	100%	10,55%	19.521.520,00 (1,41%)			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)							
27	Persentase Potensi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	4,17%	1.715.100,00 (0,49%)			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (DINAS KESEHATAN)							
28	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	5,27%	1.271.875,00 (0,28%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SATPOL PP)							
29	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	20,14%	141.928.950,00 (12,01%)		1. Permasalahanan dilapangan banyak Lapak PKL yang sudah dilakukan penertiban tetapi kembali lagi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak adanya tempat relokasi yang memadai untuk menampung PKL serta mengakibatkan terjadinya kemacetan yang mengganggu pengguna jalan kurangnya peran serta SKPD terkait. Saran nya perlu adanya sosialisasi Peraturan dan sinegritas antar Instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan tersebut. (berdasarkan aduan masyarakat melalui E Lapor) 2. Terjadinya perubahan jadwal kegiatan pimpinan yang tidak di Informasikan ke Satpol PP dan maslaah lainnya adalah terjadi alih fungsi anggota Satpol PP dan terjadinya keterlambatan Satpol PP di tempat acara karena sarana dan prasarana tidak mendukung 3. Tidak semua Desa se Kabupaten Barito Kuala memiliki Satlinmas Desa ada beberapa Desa sudah membentuk Satlinmas Desa tetapi belum dibuatkan SK Satlinmas oleh Kepala Desa	1. Perlunya penertiban berkala Lapak PKL yang melanggar peraturan 2. Perlunya koordinasi yang lebih intens antara Satpol PP dengan Protokol Forkopim, dan perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung 3. Perlunya akselerasi pembentukan dan legalisasi Satlinmas Desa terutama bagi desa yang belum terbentuk sama sekali
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (SATPOL PP)							
30	Persentase Penanggulangan Kebakaran	100%	25%	4.120.000,00 (0,98%)		Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Program kegiatan	Perlunya peremajaan/pembaharuan sarpras pendukung kegiatan

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (DKPP)							
31	Persentase lumbung pangan yang berfungsi	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (DKPP)							
32	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93	0 (0%)	45.650.295,00 (4,45%)		1. Ketidakstabilan harga pangan di pasar 2. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat tertunda karena adanya efisiensi anggaran 3. Kegiatan sosialisasi B2SA terdapat kendala teknis akibat efisiensi anggaran, dimana awalnya ditargetkan 5 desa menjadi 3 desa	1. Perlunya pendataan rutin harga pasar dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait 2-3. Memaksimalkan anggaran yang tersisa 3. Nilai PPH keluar di akhir tahun/Triwulan IV
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (DKPP)							
33	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan dan keamanan	100%	0%	12.539.000,00 (13,76%)			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (DISDUKCAPIL)							
34	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	100%	29,05%	400.811.360,00 (32,55%)			
PROGRAM PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)							
35	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil yang sesuai standar	100%	12,97%	20.708.560,00 (9,65%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)							
36	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	100%	7,15%	23.415.100,00 (5,89%)			
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (DISDUKCAPIL)							
37	Persentasi Penyajian Data dan profil Kependudukan Kabupaten Barito Kuala	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (DPMD)							
38	Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik	100%	21,28%	547.088.656,00 (18,82%)			Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
PROGRAM PENATAAN DESA (DPMD)							
39	Persentase Desa yang Terlaksananya Penataan Desa	100%	20,41%	9.620.000,00 (6,02%)			Sebagian kegiatan baru dimulai pada Triwulan II dan III
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (DINAS PERHUBUNGAN)							
40	Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) / Persentase Angkutan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan*	100%	27,78%	2.760.159.562,00 (25,73%)			

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN (DINAS PERHUBUNGAN)							
41	Persentase Angkutan Sungai dan Penyeberangan Laik operasional sesuai standar keselamatan / Persentase Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas laut, sungai dan penyeberangan*	100%	12,5%	56.374.675,00 (1,56%)			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (DISKOMINFO)							
42	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi yang dipublikasikan	100%	39%	139.645.800,00 (5,7%)			
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA (DISKOMINFO)							
43	Persentase pengelolaan Domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE	100%	75%	495.716.360,00 (13,65%)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (DISKOMINFO)							
44	Indeks Pembangunan Satistik Sektoral	2,6	0 (0%)	15.229.930,00 (9,72%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN (DISKOMINFO)							
45	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	62,5%	14.838.300,00 (5,92%)			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
46	Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	53,72%	83.898.700,00 (20,74%)		1. Permasalahan koneksi internet kurang stabil 2. Kurang maksimalnya sarpras untuk pelayanan penanaman modal 3. Tidak sinkronnya data pelaku usaha dengan database kependudukan	1. Perlunya peningkatan sarpras pelayanan penanaman modal, terutama akses internet 2. Perlu sinkronisasi Kembali data pelaku usaha / pemohon dengan database kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)							
47	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	15,38%	1.660.000,00 (4,76%)		Pengelolaan data perijinan usaha masih manual	Diharapkan ada peningkatan pengelolaan data perijinan usaha berbasis elektronik
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (DISPERPUSIP)							
48	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Perpustakaan	100%	3,61%	154.262.800,00 (16,65%)			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
49	Persentase SKPD yang Arsipnya Tertata dengan baik	100%	12,81%	122.935.150,00 (19,42%)			

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan I 2025		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut/Saran
	Indikator	Target	Fisik	Keuangan			
1	2		3		4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
50	Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100%	22,22%	16.086.400,00 (26,34%)			
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP (DISPERPUSIP)							
51	Persentase Peningkatan SOP Perizinan Penggunaan Arsip	100%	0%	0 (0%)			Program ini tidak ada anggaran sehingga tidak ada kegiatannya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (17 KECAMATAN)							
52	Persentase Organisasi Desa Yang Aktif	100%	25,82%	108.393.533,00 (5,57%)	Di Beberapa Kecamatan, partisipasi masyarakat mengikuti musrenbang kecamatan mengalami kemajuan sehingga menyebabkan usulan yang masuk di desa banyak yang terakomodir dalam musrenbang kabupaten	Untuk Kegiatan atau Belanja Yang Diserahkan Kepada Masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap pengurusan dengan pihak terkait.	Agar kepengurusan barang tersebut dipercepat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (17 KECAMATAN)							
53	Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	100%	26,51%	57.270.850,00 (15,1%)		Masih minimnya pemahaman kecamatan mengenai pengelolaan tata keuangan desa dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku	Diharapkan adanya Pelatihan/ sosialisasi sehingga aparatur Kecamatan memiliki wawasan dan potensi yang memadai tentang tata kelola keuangan desa dan pengawasan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sumber: Laporan Evaluasi Renja SKPD Triwulan I 2025

3.2 RINGKASAN HASIL PROYEK STRATEGIS DAERAH

Selanjutnya ditampilkan Tabel Capaian Program Strategis Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, berdasarkan ketetapan Bupati nomor ... tanggal ... (SK masih dalam proses).

Tabel 3.2.1
Ringkasan Hasil Kegiatan Proyek Strategis Daerah

No.	Proyek Strategis	Keterangan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan Per 31 Maret/Tri I 2025 (Rp.)	Persen Realisasi Keuangan	Persen Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kab. Barito Kuala	Pembangunan Gedung	7.810.293.108	2.343.087.932	30,00%	54,475%
		Jasa Konsultan Pengawas	388.957.408	-	0,00%	
2	Lanjutan Pembangunan Poliklinik RS Abdul Aziz	Pembangunan Gedung	5.200.000.000	2.475.049.121	47,60%	14,79%
		Jasa Konsultan Pengawas	100.000.000	-	0,00%	
3	Penambahan Ruangan Puskesmas Anjir Pasar	Pembangunan Gedung	6.254.131.540	-	0,00%	0%
		Jasa Konsultan Perencanaan	53.231.699	-	0,00%	
		Jasa Konsultan Pengawas	109.430.090	-	0,00%	
4	Penambahan Ruangan Puskesmas Mandastana	Pembangunan Gedung	2.433.091.080	-	0,00%	0%
		Jasa Konsultan Perencanaan	66.903.540	-	0,00%	
		Jasa Konsultan Pengawas	42.574.980	-	0,00%	
5	Pembangunan Gedung Depo Arsip	Pembangunan Gedung	4.800.000.000	-	0,00%	0%
		Jasa Konsultan Perencanaan	100.000.000	-	0,00%	
		Jasa Konsultan Pengawas	100.000.000	-	0,00%	

Sumber: Bappelitbang, BPKAD, dan Dinas PUPR Kab. Barito Kuala

3.3 REKAP CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN I 2025

Setelah pada dua subbab sebelumnya dibahas capaian program prioritas dan strategis pembangunan di tahun 2025, pada subbab ini dapat dilihat rekap capaian fisik dan keuangan SKPD sampai dengan triwulan I 2025, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.3.1
Rekap Capaian Fisik dan Keuangan SKPD Kab. Barito Kuala sampai Triwulan I 2025

No	SKPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	Sisa Anggaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan	510.991.421.660	122.799.243.971	24,03	29,94	388.192.177.689
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	286.693.631.097	112.196.297.737	39,13	39,50	174.497.333.360
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.383.648.823	13.830.285.224	6,83	7,07	188.553.363.599
4	Dinas Kesehatan (Termasuk RSUD, FKTP, dan KLINIK)	311.844.258.523	52.581.581.089	16,86	20,00	259.262.677.434
5	Sekretariat DPRD	63.145.126.289	13.855.496.816	21,94	22,80	49.289.629.473
6	Sekretariat Daerah	59.493.974.018	20.054.471.085	33,71	37,98	39.439.502.933
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Termasuk Dana DAK Non Fisik Ketahanan Pangan-Pertanian)	32.051.666.391	5.370.007.027	16,75	19,72	26.681.659.364
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.789.952.410	1.083.597.266	15,96	17,25	5.706.355.144
9	Dinas Lingkungan Hidup	26.072.428.409	3.717.048.047	14,26	16,49	22.355.380.362
9	<i>Dinas Lingkungan Hidup (BLUD)</i>	1.125.000.000	-	-	0,00	1.125.000.000
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.303.113.232	1.696.706.100	18,24	20,60	7.606.407.132
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	17.260.788.651	2.153.139.767	12,47	21,26	15.107.648.884
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.510.262.203	1.246.459.239	9,96	12,25	11.263.802.964
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	59.889.627.807	1.063.337.780	1,78	8,99	58.826.290.027
14	Inspektorat	20.084.374.387	2.604.566.382	12,97	17,94	17.479.808.005
15	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11.534.550.761	1.554.039.809	13,47	15,69	9.980.510.952
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.884.632.823	1.279.310.670	16,23	18,25	6.605.322.153
17	Satuan Polisi Pamong Praja	11.484.358.536	1.853.256.741	16,14	23,23	9.631.101.795
18	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8.982.713.135	1.184.750.160	13,19	19,44	7.797.962.975
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.753.474.264	1.599.474.983	20,63	21,75	6.153.999.281

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	SKPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	Sisa Anggaran (Rp)
20	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	9.979.744.106	2.500.331.244	25,05	25,64	7.479.412.862
21	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	8.788.589.298	1.884.144.436	21,44	25,00	6.904.444.862
22	Dinas Perhubungan	20.869.287.218	4.428.186.823	21,22	22,72	16.441.100.395
23	Dinas Sosial	11.702.020.620	1.954.227.871	16,70	18,00	9.747.792.749
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.741.736.269	1.414.374.384	13,17	20,00	9.327.361.885
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.152.800.748	946.940.187	18,38	21,11	4.205.860.561
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.797.550.740	1.107.364.740	12,59	25,00	7.690.186.000
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.998.152.053	1.000.874.336	14,30	22,57	5.997.277.717
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.004.793.897	1.293.286.499	18,46	23,13	5.711.507.398
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.201.956.469	750.552.996	10,42	10,58	6.451.403.473
30	Kecamatan Alalak	8.701.865.272	1.804.116.483	20,73	25,00	6.897.748.789
31	Kecamatan Anjir Pasar	3.430.058.022	711.678.849	20,75	23,26	2.718.379.173
32	Kecamatan Marabahan	6.064.192.219	1.223.024.875	20,17	25,17	4.841.167.344
33	Kecamatan Bakumpai	2.928.564.843	480.201.467	16,40	17,44	2.448.363.376
34	Kecamatan Anjir Muara	2.833.930.359	537.165.908	18,95	21,36	2.296.764.451
35	Kecamatan Mandastana	3.459.163.592	569.938.346	16,48	18,50	2.889.225.246
36	Kecamatan Tabunganen	2.373.020.896	459.682.165	19,37	25,53	1.913.338.731
37	Kecamatan Tabukan	2.650.414.364	513.679.082	19,38	20,39	2.136.735.282
38	Kecamatan Kuripan	2.799.209.895	469.497.455	16,77	28,03	2.329.712.440
39	Kecamatan Belawang	2.475.821.072	385.920.802	15,59	24,76	2.089.900.270
40	Kecamatan Jejangkit	2.233.671.313	393.738.844	17,63	19,50	1.839.932.469
41	Kecamatan Rantau Badauh	2.465.593.683	514.771.062	20,88	23,37	1.950.822.621
42	Kecamatan Barambai	2.891.993.708	530.883.482	18,36	18,63	2.361.110.226
43	Kecamatan Cerbon	2.330.394.208	422.055.706	18,11	22,34	1.908.338.502
44	Kecamatan Tamban	2.616.116.104	494.185.404	18,89	20,00	2.121.930.700
45	Kecamatan Wanaraya	2.236.514.720	433.694.595	19,39	36,70	1.802.820.125

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

No	SKPD	APBD (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	Sisa Anggaran (Rp)
46	Kecamatan Mekarsari	2.767.957.786	319.922.778	11,56	15,00	2.448.035.008
JUMLAH		1.819.774.116.893	389.267.510.712	21,39	21,50	1.430.506.606.181

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Maret 2025

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1 KESIMPULAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan rutin tahunan yang menjadi pedoman seluruh SKPD di Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan, Sebagai sebuah dokumen perencanaan dan sudah menjadi siklus tetap dalam kegiatan perencanaan, evaluasi berkala harus dilaksanakan untuk memastikan target perencanaan berjalan sesuai rencana dan mengawasi kegiatan pembangunan yang berlangsung pada tahun berjalan. Dari hasil evaluasi untuk Triwulan I 2025 ini, didapat kesimpulan bahwa:

- A. Secara capaian fisik, rata-rata capaian fisik kegiatan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 21,5%. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tabel T.E-1 dan dengan asumsi target per triwulan I adalah 25%, maka setidaknya capaian fisik adalah sebesar 16,25% untuk dapat dikategorikan tercapai, sehingga dalam hali ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mencapai target triwulanannya. Sedangkan jika dilihat dari capaian masing-masing SKPD, ada 42 SKPD yang sudah berada di atas 16,25%, dan tersisa 4 SKPD yang masih dibawah 16,25%, sehingga persentase SKPD yang sudah mencapai target triwulan I adalaah 91,30%.
- B. Secara capaian keuangan, rata-rata capaian realisasi keuangan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 21,39%. Menurut Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 910/1/SETDA-BPKAD/2025 tanggal 31 Desember 2024, dimana ditetapkan pembagian anggaran untuk satu tahun 2025 yaitu 30:30:20:20; sehingga target untuk triwulan I adalah 30%, maka dapat dikategorikan untuk realisasi keuangan di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih dibawah target. Sedangkan jika dilihat dari capaian masing-masing SKPD, hanya ada 2 SKPD yang sudah memiliki realisasi keuangan di angka 30%-an yaitu Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selebihnya ada 10 SKPD yang realisasi keuangannya antara 20-29%, 32 SKPD yang realisasi keuangannya antara 10-19%, dan 2 SKPD yang realisasi keuangannya masih dibawah 10%.
- C. Beberapa faktor pendorong yang menunjang keberhasilan capaian kinerja diantaranya:

- Kerjasama yang baik antara internal SKPD maupun dengan pihak eksternal
- Kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal perencanaan
- Evaluasi rutin yang dilaksanakan internal SKPD sehingga dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam mencapai targetnya
- Pada Beberapa Kecamatan, partisipasi masyarakat mengikuti musrenbang kecamatan mengalami kemajuan sehingga menyebabkan usulan yang masuk di desa banyak yang terakomodir dalam musrenbang kabupaten

D. Beberapa faktor penghambat yang ditemui SKPD secara umum adalah sebagai berikut:

- Tertundanya beberapa kegiatan karena belum sesuai arus kas/jadwal perencanaan, sehingga ada beberapa kegiatan yang baru mulai di Triwulan II dan seterusnya
- Kurangnya SDM di beberapa SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Beberapa sarana dan prasarana pendukung kegiatan di SKPD ada yang sudah tidak layak pakai dan ada yang perlu peremajaan
- Keterbatasan anggaran di SKPD untuk pelaksanaan kegiatan, ditambah dengan masuknya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi anggaran semakin memperketat SKPD untuk selektif dalam pelaksanaan kegiatan.
- Kendala teknis yang ditemui dilapangan oleh beberapa SKPD teknis, seperti validasi data lapangan, koneksi internet, kondisi infrastruktur, kondisi sosial masyarakat, dan masalah lainnya.
- Proses administrasi keuangan yang seringkali mengalami hambatan, disebabkan beberapa hal seperti kurangnya pemahaman akan administrasi keuangan, aplikasi keuangan yang sering berganti, dan berkas untuk administrasi keuangan yang sering tidak lengkap sehingga memperlambat proses administrasi keuangan.
- Faktor koordinasi antar stakeholder yang terkadang mengalami miskomunikasi sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal.

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Melihat dari hasil kesimpulan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi tindak lanjut:

- A. Agar mempertahankan capaian fisik rata-rata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sudah bagus, dan untuk SKPD yang masih dibawah target untuk semakin memperkuat koordinasi dan konsolidasi untuk mencapai targetnya.
- B. Capaian Keuangan yang masih belum mencapai target realisasi agar untuk menjadi perhatian bersama, karena kondisi saat ini dimana adanya peraturan mengenai efisiensi anggaran belanja daerah, sehingga bukan hanya capaian yang diutamakan melainkan juga efisiensi anggaran kegiatan. Selain itu, masukan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mengkaji ulang pembagian 30:30:20:20 untuk anggaran dalam setahun karena beberapa SKPD mengeluhkan target yang terlalu tinggi terutama pada Triwulan I.
- C. Rekomendasi tindak lanjut untuk beberapa faktor penghambat umum yang ditemui diantaranya:
 - Perlunya perencanaan yang lebih matang dalam menentukan arus kas
 - Perlunya penambahan SDM di beberapa SKPD yang tentunya juga diiringi dengan SKPD yang harus segera mengusulkan keperluan penambahan SDM di SKPD nya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing jabatan yang diusulkan
 - Perlunya peremajaan maupun penggantian sarana prasaran pendukung kegiatan SKPD disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan dapat diusulkan penambahan jika memang dirasas sangat mendesak.
 - Mengingat adanya Instruksi mengenai efisiensi anggaran, maka SKPD dapat memilah untuk prioritas pelaksanaan kegiatan dan dapat memilih substitusi kegiatan tanpa perlu mengorbankan anggaran lebih banyak ataupun esensi dari kegiatan yang ingin dilaksanakan, missal menggunakan daring (ZOOM Meeting)
 - Kendala teknis yang ditemui dilapangan agar menjadi prioritas untuk diperbaiki ataupun dicarikan solusi alternatifnya agar kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai jadwal dan target.
 - Perlunya bimtek dan penguatan kapasitas berkala untuk Pengelola Administrasi Keuangan terutama untuk menyesuaikan dengan Aplikasi

Terbaru maupun Peraturan Mengenai Administrasi Keuangan yang Terbaru.

- Perlunya meningkatkan koordinasi antar stakeholder, terutama kepada Pimpinan Daerah melalui Protokol Forkopim, agar kegiatan yang akan melibatkan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan lancar.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I.
PERMOHONAN EVALUASI RKPD TRIWULAN I 2025 OLEH BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Dharma Praja I Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Telp : (0511) 6748643 Fax : (0511) 6749644 website : www.bappeda.kalselprov.go.id

Banjarbaru, 8 April 2025

Nomor : 000.7.5/ 314 /BAPPEDA/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2025

Yth. (Terlampir)

di-

Tempat

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2025, dengan ini dimohon agar saudara segera menyampaikan hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025.

Untuk efektivitas penyampaian hasil evaluasi, agar masing-masing Kabupaten/Kota dapat menyampaikan ringkasan hasil evaluasi RKPD triwulan IV sebagaimana format terlampir dalam lampiran II.

Hasil Evaluasi tersebut dapat disampaikan melalui Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy paling lambat diserahkan hari **Selasa, 15 April 2025** atau melalui Sdr. Gusti Rikki Ronanda. S.Kom (0852 4649 4748).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Dr. Ir. ARIADI NOOR,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199403 1 006

Tembusan Yth;

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
3. Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II.
PERMOHONAN EVALUASI RENJA TRIWULAN I SKPD KABUPATEN BARITO
KUALA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari, Nomor 1, Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan
70511, Laman baritokualakab.go.id, Email: sekretariat.daerah@baritokualakab.go.id

Marabahan, 24 Maret 2025

Nomor : 000.3.6/168/Setda-
Bappelitbang/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Evaluasi Renja
SKPD/RFK Maret 2025 dan
Evaluasi Triwulan I 2025

Yth.

1. Inspektur
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas
4. Direktur RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan
5. Kepala Bagian Umum Setda
6. Seluruh Camat

di -

Tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 303 tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota bahwa Kepala SKPD berkewajiban menyampaikan laporan evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA/BAPPELITBANG Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti hal di atas diharapkan Kepala SKPD dapat menyampaikan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Bulan Maret 2025 atau Triwulan I Tahun 2025 dalam Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Format I dan Format II, Laporan Formulir e.81, dan Form Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD/Camat Tahun 2025 per Triwulan I Tahun 2025, yang berdasar pada PK Tahun 2025. Laporan dapat diserahkan ke Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala paling lambat pada Hari Jumat, 11 April 2025.

LAPORAN EVALUASI RKPD 2025 TRI. I KAB. BARITO KUALA

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Kuala



Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc
Pembina Utama Madya / IV.d.
NIP. 196607051992031016

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PRKPD) TAHUN 2025

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD. Tujuan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) bertujuan adalah untuk memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah mencakup:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD);
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD);
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut untuk menilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan sekaligus menjadikan bahan rumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu 1) pengendalian kebijakan yang bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun 2025. Kedua kegiatan Pengendalian rencana kerja pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada formulir E.5 terlampir.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui tahapan demi tahapan dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyusunan PRKPD mulai tahapan dan tata cara penyusunan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

- b. PRKPD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten tahun 2025 – 2045 serta memperhatikan RKP tahun 2025;
- c. Perumusan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan provinsi selaras dengan prioritas pembangunan nasional; dan
- d. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah serta mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2025, dan ;
- e. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah dan rencana program dan kegiatan bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Formulir E.5 : Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Kuala

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah	✓			
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.	✓			
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.	✓			
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.	✓			
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten.	✓			
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten.	✓			
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.	✓			
10.	Perumusan RKPD Kabupaten sesuai dengan Tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten.	✓			
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.	✓			
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	✓			
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada Provinsi dan RKP	✓			
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.	✓			
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.	✓			
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah berpedoman pada kebijakan umum.	✓			
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaen telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	✓			
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten telah mengacu pada RKP.	✓			
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	✓			
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	✓			
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	✓			
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah memperhitungkan prakiraan maju	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.	✓			
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;	✓			
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten.	✓			
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.	✓			
25.	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD kabupaten.	✓			
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	✓			
27.	Dokumen PRKPD yang telah disahkan.		✓		Masih dalam proses penetapan Perkada

Marabahan, 09 Mei 2025
Kepala Bappelitbang
Kabupaten Barito Kuala


MUNADI, ST
NIP 196907161998031005

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

Pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025. yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Kepala Bappelitbang

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Narasumber sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil notulen, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu 17 Januari 2024

J a m : 12.00 WITA

Tempat : Aula Mufakat

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati Tema Pembangunan menjadi “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, program, kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD beserta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026.

KEDUA : Usulan dan saran peserta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang tercatat dalam notulen akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD tahun 2025.

KETIGA : Menyepakati Agenda Perencanaan Selanjutnya Sebagai Berikut

- a. Musrenbang Kecamatan Minggu ke Tiga Bulan Januari tahun 2024
- b. Forum SKPD Minggu ke Dua Bulan Februari 2024
- c. Musrenbang Kabupaten Minggu ke Empat Bulan Maret tahun 2024, menyesuaikan dengan Agenda Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 17 Januari 2024

Pimpinan Sidang
Sekretaris Daerah



Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19660705 199203 1 016

Menyetujui,
Wakil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

No	Nama	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1		Pj. Bupati	
2		DPRD	
3		Sekreris Daerah	
4		Kepala Bappelitbang	
5		Kepala Dinas	
6		Kepala Dinas	
7		Camat	
8		Camat	
9		Tokoh Masyarakat	
10		Pemuda	
11		PKK / DWP	
12		Anak	



**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Selidah Marabahan telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala.
2. Sambutan dan Pembukaan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemaparan materi oleh :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
 - b. Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
 - c. Ketua PPPK Universitas Gajah Mada
 - d. Dit PEIPD Bina Bangda Kemendagri
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD terhadap materi yang disampaikan dalam diskusi Musrenbang RKPD, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu

Jam : 12.30 Wita

Tempat : Aula Selidah Marabahan

Seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Kuala

MENYEPAKATI

KESATU : Sasaran dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten , serta rencana program dan kegiatan yang disertai

indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II berita Acara ini.

KEDUA : Usulan Pokok-pokok Pikiran Dewan dan Usulan Masyarakat / Kecamatan Tahun Rencana 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
Selaku Pimpinan Sidang Musrenbang RKPD

Kabupaten Barito Kuala



Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc

NIP. 196607051992031016

Mewakili peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Kuala :

No	Nama	Lembaga/instansi	Tanda Tangan
1.	Hendri Dyah Estiningrum, SH	DPRD	
2.	Munadi	Bappelitbang	
3.	H. Saberi Tanor	Kepala DPUPR	
4.	Zulfikar	Camat Kuripan	
5.	Dr. Hj. Ratna Rosana, M.Pd	Perwakilan Tim Penggerak PKK	
6.	Hj. Mispalah	Tokoh Masyarakat	
7.	Yudhi Marta Wijaya	Tokoh Pemuda	
8.	Gevherhan Weyla Putri	Forum Anak Daerah	



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	M. BASIR, S.Kom	198501032010011003	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Handiasty Eka Wardhani	198610202010012006	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
3	A.Budiansyah, SE	19870917 201001 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappelitbang Kab. Batola
4	M. Syaipuddin, S.Sos	19710228 199303 1 005	PLT SEKRETARIS	Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	380
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	3
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	7
4.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71.01	50
5.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
7.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 10 April 2025
Jam : 2:19:01 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
8.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
9.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	380
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	3
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	7
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71.01	50
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
17.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
18.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	4
Catatan Pembahasan : - target 4 lembaga dengan nilai pagu 119.290.180 - aktivitas untuk peningkatan kapasitas LKS berupa bimtek - bimtek bagi PSKS (karang taruna dan LKS)					
2.	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	47
Catatan Pembahasan : - PSM jumlah 30 orang, TSKS jumlah 17 orang di 17 kecamatan - Penyuluh sosial dan Peksos masih belum ada - untuk aktivitasnya dalam bentuk bimtek dan sosialisasi - untuk penentuan pagu nanti disesuaikan dengan nominal 119....					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65
Catatan Pembahasan : - target sub kegiatan dan pagu 119,790,180 - aktivitas KUBE 3 kelompok , UEP 5 orang dan pelatihan keterampilan usaha 2 angkatan @15 orang					
2.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6555
Catatan Pembahasan : rincian aktivitas: - pendampingan program keluarga harapan (PKH), - rakor PKH, - bakti sosial PKH - jumlah pendamping PKH adalah 39 orang					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	9
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, ST., MM	19810721 200903 2 000	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan
2	Hernalfy Patria Dharma, S.IP	19900329 201206 1 002	Kepala Seksi Pertanahan	Dinas PUPR Prov Kalsel
3	Fakhrurrijal, ST, MT	19771103 199903 1 003	Kabid PPD	Bapperida Kabupaten Barito Kuala
4	Vina Yunita, A.Md	19870618 200904 2 003	Plt. Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	197650	180
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	124000	100

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- 1. OUTCOME: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah
 - a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH

NO	ABSENTEE KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.10.06.2.01.00 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 11:37:46 AM

Catatan Pembahasan : Dinas PUPR Prov. Kalsel - Kegiatan mendukung kementerian ATR, Program kegiatan bidang tanah dan pembagian Aset Tanah - target sudah ditentukan oleh kementerian ATR pada saat Rakortek Provinsi sudah menyampaikan target untuk Kab/Kota terkait - utk kab. Barito Kuala Target Jumlah Bidang 200 Bidang Tanah, Kegiatan Sama dengan Kab/Kota Target yang dimasukan 1 Dokumen - kegiatan pelaksanaanya kementerian, dan Daerah hanya mendukung, memfasilitasi kegiatan dengan rapat-rapat koordinasi - Kegiatan masih Baru, mungkin bisa memasukan Pagu dari Bapperida Kab. Batola Bapperida Batola - Kegiatan Pertanahan ditangani disperkimtan Kab. Batola Disperkimtan Kab. Batola - untuk lampiran bidang tanah akan dikoordinasikan kembali dengan ATR/BPN Kab. Barito Kuala - untuk Pagu sesuai dengan ketersediaan anggaran di Daerah					
2.	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1
Catatan Pembahasan : Dinas PUPR Prov. Kalsel - Kegiatan mendukung kementerian ATR, Program kegiatan bidang tanah dan pembagian Aset Tanah - target sudah ditentukan oleh kementerian ATR pada saat Rakortek Provinsi sudah menyampaikan target untuk Kab/Kota terkait - utk kab. Barito Kuala Target Jumlah Bidang 200 Bidang Tanah, Kegiatan Sama dengan Kab/Kota Target yang dimasukan 1 Berita Acara, dengan jumlah kepala keluarga - target dari BPN Barito Kuala 0, mungkin bisa diusulkan kegiatan rapat untuk pendataan awal Disperkim Kab. Barito Kuala: - pagu dan target belum ada, karna sub kegiatan ini masih baru akan kami koordinasikan dulu dengan BPN Barito Kuala					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Relawanty, S.Kep, MM	19870105 200903 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Adethia Hailina SE.,ME	19790927 200501 2 011	Plt Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
3	Jakaria Kastalani, S.Sos	19751107 200701 1 009	Pustakawan	Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Barito Kuala
4	Juniartinah, SE	19680628 199802 2 005	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	77
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	71
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73.6	77
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75.4	71

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 3:13:39 PM

1.	2.23.02.2.01.00 13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	50
Catatan Pembahasan : - Dengan proyeksi pagu 28.157.000 - Disepakati dengan target 50 Perpustakaan					
2.	2.23.02.2.01.00 14	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	300
Catatan Pembahasan : Disepakati dengan target 300 eksemplar					

2. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.23.03.2.01.00 03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	0
Catatan Pembahasan : Belum ditemukan naskah kuno di Kabupaten Barito Kuala					
2.	2.23.03.2.01.00 04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	0
Catatan Pembahasan : Belum ditemukan naskah kuno di Kabupaten Barito Kuala					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., MM	19810721 200903 2 013	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewillayahan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel
2	Muhammad Kharis Elyani, S.E, MM	19870304 201101 1 001	Kasi Pengelolaan Data Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	PENATA Muda	Bappelitbang Kab. Batola
4	AZWAR ARSYADI, S.Kom	197311092005011007	PENATA TK. I	Diskominfo Kab. Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.6	2.8

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.20.02.2.01.00 18	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	20
Catatan Pembahasan : diskominfo kalsel apa kendala dalam penetapan target 20% diskominfo batola tahun 2023 target 1, untuk 2024 2,6 dan target 2026 20%. kendala keterbatasan personil, hanya ada 1 kapid dan 1 staff sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan. keterbatasan anggaran, sehingga koordinasi kurang maksimal, selama ini koordinasi lebih ke BPS dan bappelitbang. bappelitbang batola menyesuaikan arahan diskominfo dengan target 20%					
2.	2.20.02.2.01.00 19	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	80



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 12:02:37 PM

Catatan Pembahasan : kominfo kalsel
target provinsi 80% karena fokus utama dalam probabilitas

kominfo batola
target sama dengan provinsi di 80%
target inputan awal 0 disesuaikan dengan kesepakatan target yaitu 80%

bappelitbang batola
inputan ranwal renja 2026

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Muhammad Amril Syarif, ST, MT	19740627 200312 1 005	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalsel
2	Arief Hidayat, S.E.	19910330 201903 1 014	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
3	Arif Widodo STP MS	19710412 199803 1 009	Plt.Kadis Nakertrans	DISNAKERTRANS-BATOLA
4	Abdurasyid Ridho, S.Kom	199410082020121014	Perencana Pertama	Bapperida Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	34.99	35
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	11684
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	128
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	34.99	35
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15389510	11684



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283168	128

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	96
Catatan Pembahasan : Target 2026 sebanyak 64 orang untuk BLK dan sisanya merupakan non-institusional yang ada di desa (32 orang). Dengan kluster berupa otomotif, menjahit, komputer dan pengolahan hasil pertanian. Dana APBD dan juga APBN (BLK). Anggaran sebesar 1 Milyar. Perlu dilakukan pengecekan lagi terkait MTU apakah bagian dari sub kegiatan ini dan rasionalisasi anggaran.					

2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	0
Catatan Pembahasan : Selama ini tidak pernah dianggarkan namun untuk kegiatannya dilakukan pada sub kegiatan lain yaitu sebanyak 7-8 perusahaan (mayoritas perpanjangan).					
2.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	2396
Catatan Pembahasan : Selama ini belum dapat datanya dari BPJS. Untuk tahun ini sudah ada datanya sehingga untuk target 2026 sebesar 2396 orang (PU dan BPU). Biaya dianggarkan Rp.483.033.600.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	15389510	Orang
2.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35	Persentase
3.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pelatihan Vokasi bagi pencari kerja	283168	Orang
4.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pengukuran produktivitas tenaga kerja	38	Dokumen



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., MM	198107212009032013	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewillayahan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	RUSIDAH, S.T., M.T.	197508072006042022	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
3	MUHAMMAD RIDHA ST	19950516 2020121025	JF PERENCANA PERTAMA,	BAPPELITBANG KAB. BARITO KUALA
4	Vina Yunita, A.Md	19870618 200904 2 003	Plt. Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68.6	87.50

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			

Catatan Pembahasan :

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	20	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 7:43:40 PM

Catatan Pembahasan : - perhitungan target daerah masih berdasarkan menko PMK - Kab. Batola akan melakukan perhitungan target ulang kembali dengan menyesuaikan standar - target sudah berdasarkan renstra 20 unit (realisasi menyesuaikan anggaran 2026) - kegiatan berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan sosialisasi penyadaran publik tentang pencegahan kumuh - pagu sub kegiatan disesuaikan dengan target						
2.	1.04.04.2.01.00 04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : - tidak direncanakan pembangunan rumah baru untuk pencegahan kumuh ditahun 2026						

2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.04.05.2.01.00 11	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	25	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : - sudah tercover ditahun 2026 dalam renja						
2.	1.04.05.2.01.00 12	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	0	06.06.01 Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
Catatan Pembahasan : - tidak direncanakan penyediaan PSU ditahun 2026						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	68	%

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	1

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Jumat**, Tanggal **11** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Dr. Hj. Sarah Hidayani, S.P., M.P.	197507032000032003	Perencana Ahli Madya	Bappeda Prov Kalsel
2	Firmansyah, S.Sos., M.Si	196811101990101001	Sekretaris	Dinas Perindustrian Prov Kalsel
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	Perencana Ahli Pertama	Bappelitbang Kab. Barito Kuala
4	Siti Norlailawati, S. Ap M. Si	197403071994032004	Kabid Perindustrian	Diskoperindag Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	880.0	0.070
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	Persentase	71	0,046

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.31.02.2.01.00 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Untuk target disarankan 1 dokumen aktivitas yang mendukung tercapainya target pada RPIK Kab. Barito Kuala, agar sub kegiatan dimasukkan dalam dukungan Renstra dan Renja Dinas yang menangani urusan Perindustrian. Contohnya dokumen untuk mendukung kegiatan sentra Industri. Pagu anggaran akan disesuaikan sesuai kebutuhan.					
2.	3.31.02.2.01.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Untuk aktivitas yang mendukung kegiatan Dekranasda berupa pameran.Untuk target sub kegiatan berupa 1 dokumen					

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 11 April 2025
Jam : 10:17:46 AM

1.	3.31.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Untuk target dan pagu sudah sesuai.Untuk aktivitas yang dilakukan yaitu pengawasan terhadap IKM baru.					
2.	3.31.03.2.01.00 04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Untuk target sub kegiatan berupa 1 dokumen aktivitas berupa dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan sektor industri (verifikasi, validasi sampai dengan terfasilitasinya pemenuhan standar pada OSS). Sub kegiatan agar dimasukkan dalam dukungan Renstra dan Renja Dinas yang menangani urusan Perindustrian. Pagu anggaran akan disesuaikan sesuai kebutuhan.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	4	Industri
2.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	2	Industri
3.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor Elektronika dan Telematika	3	Industri
4.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Industri Logam	2	Industri

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	HENDRA, SE	198510232010011004	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov. Kalsel
2	Karyufa Ekalaksasmita, S.STP	19840219 2002121001	Sekretaris	Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	JF. PerencanaÂ Pertama	Bappelitbang Kab. Barito Kuala
4	Muhammad syarawi, S.STP	19820414200112100	Kasat PolIPP	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	73
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	65



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	73
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	65

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.03.2.02.00 27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.05.03.2.04.00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

2. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	4



Catatan Pembahasan : 1. Target 4 Laporan (per triwulan) 2. Target laporan merupakan laporan yang bersifat bulanan dengan cut off date pada tanggal lima dibulan berikutnya (dilaporkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya). 3. Sesuaikan lagi isi aktifitas pada subkegiatan ini sesuai dgn nama subkegiatan. 4. Untuk anggaran akan disesuaikan lagi karena byk aktifitas yg ada disubkegiatan lain yg harusnya masuk pada subkegiatan ini.					
2.	1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4
Catatan Pembahasan : 1. Target laporan merupakan laporan yang bersifat bulanan dengan cut off date pada tanggal lima dibulan berikutnya (dilaporkan setiap tanggal 5 setiap bulannya) 2. Laporan yang ditargetkan pemerintah daerah seperti penegakan perda-perkada dan pelaksanaan dengan target 4 laporan. 3. Saat ini jumlah PPNS di kab batola 2 orang. tiap daerah tiap daerah diharapkan bisa menganalisa kebutuhan PPNS					

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : 1. Pemda Banjar RISPKP belum ada, Akan menganggarkan guna menyusun dokumen RISPKP tahun 2026. 3. RISPKP merupakan tindak lanjut dari pengembangan dan RISPK sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PU dimana RISPKP saat ini lebih kepada mitigasi dan penyelamatan, dengan berpedoman pada Permendagri 14 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah (target 1 dokumen). 4. Penyusunan RISPKP ini dan pada tahun 2026 dapat berupa draft naskah akademis. 5. Untuk penganggaran akan dikoordinasikan lebih lanjut dgn Bappeda					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	5
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Evi Fitria Arianti	198901282011012004	Kasi PPSP Tempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel
2	Arief Hidayat, S.E.	19910330 201903 1 014	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
3	Arif Widodo STP MS	19710412 199803 1 009	Plt.Kadis Nakertrans	DISNAKERTRANS-BATOLA
4	ABDURRASYID RIDHO, S.Kom	199410082020121014	Perencana Ahli Pertama	Bapperida Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	45	45

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.32.03.2.01.00 10	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	
Catatan Pembahasan :					
2.	3.32.03.2.01.00 20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	
Catatan Pembahasan :					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.32.04.2.01.00 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	60
Catatan Pembahasan : Peningkatan Keterampilan Budidaya Jamur Tiram di desa Cahaya Baru di Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru sebanyak 60 KK.					



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 2:57:50 PM

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	51	Kegiatan
2.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi	10	Orang
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Calon Transmigrasi yang Dilatih	400	Orang
4.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi	50	Lembaga
5.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	7008	Orang
6.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	150	Orang
7.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	3	Kelompok Masyarakat
8.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Alternatif Pembiayaan dan Manajemen Keuangan mendukung pengembangan produk unggulan kawasan transmigrasi	150	Orang
9.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Badan Usaha
10.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Pengembangan Ekspor produk unggulan kawasan transmigrasi	1	Kesepakatan

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	10

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	HENDRA, SE	198510232010011004	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov. Kalsel
2	Iswantoro, S.KP, MM	19671106 1990031010	Sekretaris	BPBD Provinsi Kalimantan Selatan
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	JF. PerencanaÂ Pertama	Bappelitbang Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	73
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	65
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	73



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	70
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	65

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.03.2.02.00 27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : 1. Akan dianggarkan dengan target 1 Dokumen 2. Arahan dari pusat perlu dianggarkan penyusunan dokumen RPB 2026 untuk mensinergikan dengan RPJMD sesuai dengan prioritas kepala daerah terpilih 3. koordinasi lebih lanjut Dengan BPBD Provinsi					
2.	1.05.03.2.04.00 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2
Catatan Pembahasan : - Sudah dianggarkan dgn target 2 laporan - diprioritaskan untuk daerah2 yang rawan bencana					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

2. OUTCOME: Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.02.2.01.00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	
Catatan Pembahasan :					



2.	1.05.02.2.02.00 11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	
Catatan Pembahasan :					

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.05.04.2.01.00 13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	5
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., M.M.	19810721 200903 2 013	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Muhammad Nursjamsi, S.Pi., M.T.	19710621 199703 1 002	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan
3	M. Rum Mapawa, S.T.	19820326 201001 1 013	Kasi Pengaturan Pembinaan Pengawasan Penataan Ruang	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan
4	Shirley Adillah Al Kautsar, S.T.	19780709 201001 2 007	Kepala Seksi Penataan Ruang	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan
5	Fakhrurrijal, ST, MT	19771103 199903 1 003	Kabid Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida Kabupaten Barito Kuala
6	Nidya Octanazizah, S.T., M.T.	19831020 200904 2 004	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Dinas PUPR Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	-
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	17360
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 3:14:14 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	3
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	3
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	-
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	17360
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	1
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	3
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	3

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
- a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler
1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	
Catatan Pembahasan :					



2.	1.03.02.2.02.00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan :						
2.	1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR		02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	147000	Hektar

2. OUTCOME: Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.00 10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Kabupaten/kota direkomendasikan dapat melengkapi isian sub kegiatan pada tahapan penyusunan rancangan Renja/RKPD beserta targetnya. 1. Indikator Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tahun 2026 target 2 kasus. 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan pagu Rp 15 Juta 2. Indikator Penyelesaian Materi Teknis RDTR (Materi Teknis) target 2026 sebanyak 4 Materi Teknis RDTR (WP Perkotaan Rantau Badauh - Barambai (Rambai), WP Perkotaan Belawang - Wanaraya (Lawang Raya), WP Perkotaan Anjir Pasar - Anjir Muara (Anjir Raya), WP Kecamatan Tabukan 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan Pagu 2 Milyar 3. Indikator Penetapan RDTR (Perda/Perkada) Tahun 2026 ditargetkan 3 Perkada RDTR (RDTR Perkotaan Marabahan, RDTR Kawasan Strategis Alalak, RDTR Kecamatan Mandastana) 1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan pagu Rp 300 juta 4. Indikator Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah untuk Tahun 2026 target dinolkan karena sekretariat PPNS Penataan Ruang dikoordinasikan oleh Kanwil BPN					
2.	1.03.12.2.01.00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : 1. Indikator Penyelesaian Materi Teknis RTRW (Materi Teknis) untuk target tahun 2026 dinolkan, karena sudah dilaksanakan. 2. Indikator Penetapan RTRW Kabupaten/Kota untuk tahun 2026 target dinolkan karena penetapan RTRW Kabupaten Barito Kuala akan ditargetkan selesai Tahun 2025.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	1

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., MM	19810721 200903 2 013	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewillayahan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel
2	Abdul Hafizh, S.Kom	198705202015031001	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	PENATA Muda	Bappelitbang Batola
4	AZWAR ARSYADI, S.Kom	197311092005011007	PENATA TK. I	Diskominfo Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	30
2.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	30

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.21.02.2.01.00 07	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	47

Catatan Pembahasan : kominfo kalsel
opsi penambahan anggaran bisa digunakan argumen dalam pelayanan yang diberikan bertambah

kominfo batola
jumlah perangkat daerah dengan target 47 skpd terdiri dari 30 skpd dan 17 kecamatan
target 6 kelurahan tapi belum dimasukkan
akan bertambah apabila anggaran bertambah

bappelitbang batola
menyesuaikan arahan dari provinsi dan sepakat dengan hasil pembahasan



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 12:19:02 PM

2.	2.21.02.2.01.00 08	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : kominfo kalsel tidak mengunci di peraturan daerah kominfo batola tahun 2024 keputusan kepala dinas, tahun 2025 draft untuk peraturan bupati target 1 karena belum pasti terkait peraturan target bisa berubah menyesuaikan pagu bappelitbang batola setuju dengan hasil dan kesepakatan kominfo					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Administrasi Pemerintahan: Pemerintah Daerah	14	Daerah
2.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	4	Daerah

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	2

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Jumat**, Tanggal **11** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	HENDRA, SE	198510232010011004	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov. Kalsel
2	Fenty Mutianingrum, S.Kom	19910216 2015032001	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
3	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	JF Perencana Pertama	Bappelitbang Batola
4	Abdul Gani Majedi, S.IP, MM	197002141990021002	Kabid Poldagri, Ketahanan Eko, Sos, Bud dan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	79.53
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	81.28
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	79.53
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	81.28
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	(%)	82.12	79.53
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	81.28



B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	8.01.03.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Catatan Pembahasan : - target yang disepakati sebesar 400 orang, dengan pagu sekitar 1.596.447.396 (termasuk banpol sebesar 1.377.528.000) - Terkait penganggaran, agar berkoordinasi dengan Bappedalitbang kab Barito kuala, sedangkan terkait mekanisme pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bakesbangpol Prov Kalsel - sasaran semua kecamatan						

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	8.01.04.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	100	08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
Catatan Pembahasan : sub kegiatan baru, target disepakati 100 orang dengan perkiraan membutuhkan pagu anggaran sebesar 200.000.000 Terkait penganggaran, agar berkoordinasi dengan Bappedalitbang kab Barito kuala, sedangkan terkait mekanisme pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Bakesbangpol Prov Kalsel						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	3
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., MM	198107212009032013	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2	Emmy Ariani, ST	197812212005012013	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
3	H. FAKHRURRIJAL, ST, MT	197711031999031003	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbang Barito Kuala
4	ABDI MAULANA, S.STP, M.S	19840731 200212 1 002	Kepala Dinas	Kepala Lingkungan Hidup Kab. Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.67	66.57
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	72
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	37.5
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.67	66.57
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	72



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	37.5

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.11.03.2.01.00 07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	1	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
Catatan Pembahasan : Target 1 Lokasi untuk mewakili seluruh Kabupaten Barito Kuala Dengan detail pengambilan sampel : 1. Indeks Kualitas air : 14 titik sampel mewakili DAS Barito dilakukan sebanyak 2x setahun 2. Indeks Kualitas Udara Ambien : 4 lokasi mewakili transportasi, permukiman, perkantoran dan industri dilakukan sebanyak 2x setahun 3. Ada penambahan SPKUA (Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien) di 1 titik pantau (Tahun 2025) Sub Kegiatan sudah masuk di dalam Renja dan Renstra						
2.	2.11.03.2.01.00 12	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	2	02.17.01 Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
Catatan Pembahasan : -Sub Kegiatan belum dilaksanakan -Sub kegiatan yang sudah dilaksanakan : Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Tanah, Air, Udara dan Laut Indikator: Data dan Informasi Indeks Kualitas LH Satuan : Lokasi Target : 18 Lokasi - Sub kegiatan ini akan di masukkan kedalam Renja 2026 dengan target sebanyak 2 paket disesuaikan dengan 18 lokasi (2x dalam 1 tahun) sub kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Tanah, Air, Udara dan Laut						

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.11.11.2.01.00 12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	15512.5	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR



Catatan Pembahasan : - Sub kegiatan belum digunakan - Sub Kegiatan sebelumnya yang mendukung : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Satuan : Dokumen Target 1 Dokumen -Sub Kegiatan di TPA yang mendukung Penanganan Sampah melalui Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional Indikator : Jumlah Unit yang digunakan untuk pengangkutan sampah adalah 17 Unit x 2.5 ton x 1 ritase x 365 hari Total tonase yang terangkut 15.512,5 Ton (data sudah singkron dengan SIPSN tahun 2024)						
2.	2.11.11.2.01.00 16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	82.35	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
Catatan Pembahasan : -Sub kegiatan belum masuk di dalam Renja -Sub kegiatan lain yang mendukung (Renja 2025) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional Target : 10.585 Ton Indikator: Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional Satuan : Ton Untuk Layanan Persampahan sudah melayani sebanyak 14 kecamatan dari 17 kecamatan dengan target 2026 sebesar 82,35%						
3.	2.11.11.2.01.00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	2559	02.18.01 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
Catatan Pembahasan : - Sub kegiatan belum masuk di dalam Renja - Untuk penanganan sampah 18.071 ton - 15.512 ton = 2.559 ton (penanganan yang ditangani pemerintah daerah) - Total pengurangan sampah 9.946,9 ton Target sementara sebesar 2559 ton namun akan didiskusikan kembali						
4.	2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	16753	02.18.02 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR
Catatan Pembahasan : Sub kegiatan sudah ada di dalam renja Sumber data dari TPA (jumlah sampah sebesar 16753 ton/tahun) ada kekeliruan penginputan dan akan disesuaikan						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	6
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	H. Imam Subarkah,S.P., M.M	197409111999031002	Sekretaris	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Kamarudin SP	197011092006041014	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
3	Abdurrasyid Ridho, S.Kom	199410082020121014	Perencana Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Batola
4	Ghozali Ansyah	196803232000031001	kabid tanaman pangan	Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Kab. Barito Kuala
5	Rizqi Amalia, SP	19840402 201503 2 000	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22704470	7203
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	57534326	348693
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3084276	215
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2000158	0.0
5.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2890917	2817



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	633290	0.0
7.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	5109804	572.78
8.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Telur	Ton	7044963	391.42
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	16422126.32	114594.25

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya Produksi Pertanian

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		N I H I L			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	96	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Pagu 5.158.992.343						
2.	3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	96	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Pagu 5.158.992.343						



3.	3.27.02.2.01.00 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	96	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Pagu 5.158.992.343						
4.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	20	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala dengan Pagu 250.000.000 Sub Kegiatan Sumber Daya Genetik akan menyesuaikan Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.						
5.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	20	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala dengan Pagu 250.000.000 Sub Kegiatan Sumber Daya Genetik akan menyesuaikan Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.						
6.	3.27.02.2.01.00 03	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	20	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala dengan Pagu 250.000.000 Sub Kegiatan Sumber Daya Genetik akan menyesuaikan Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih.						



2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B dengan Pagu 343.150.000 akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya. Desk sub sektor Perkebunan dan Peternakan: 1. Target produksi Perkebunan dan Peternakan sudah sesuai dengan kesepakatan. 2.						
2.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B dengan Pagu 343.150.000 akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya. Desk sub sektor Perkebunan dan Peternakan: 1. Target produksi Perkebunan dan Peternakan sudah sesuai dengan kesepakatan. 2.						
3.	3.27.03.2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B dengan Pagu 343.150.000 akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya. Desk sub sektor Perkebunan dan Peternakan: 1. Target produksi Perkebunan dan Peternakan sudah sesuai dengan kesepakatan. 2.						



4.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	114594.25	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						
5.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	114594.25	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						
6.	3.27.03.2.01.00 05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	114594.25	02.10.07 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya 02.10.10 Pengembangan Pangan Hewani 02.10.11 Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan Pengelolaan LP2B, KP2B akan Menyesuaikan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian	177079180	Unit
2.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO)	825	Unit
3.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Padi	2100000	Ha
4.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Jagung	1000000	Ha
5.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Aneka Cabai	14788	Ha
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Padi Kaya Gizi (Blofortifikasi)	50000	Ha
7.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Bawang Merah	6514	Ha
8.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Kelapa	30202	Ha
9.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Kakao	17187	Ha
10.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Ruminansia Perah	910	Ekor



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
11.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Ruminansia Potong	5000	Ekor
12.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Unggas	640000	Ekor
13.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Bantuan Ternak Lainnya	3250	Ekor
14.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian	279	Rekomendasi
15.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	34177	Unit
16.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura	10800	Unit
17.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan	1258	Unit
18.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan	2980	Unit
19.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	800	Unit
20.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	125	Unit
21.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	4840	Unit
22.	KEMENTERIAN PERTANIAN	-Sarana Pengolahan Hortikultura	63	Unit
23.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prasarana Pengolahan Hortikultura	88	Unit
24.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	188	Unit

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	9
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	24

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Jumat**, Tanggal **11** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DORY AMANDA SARI, S.Kom, MM	198408302009012004	Pranata Komputer Ahli Muda	Bappeda Prov. Kalsel
2	Tutuk Munikah	19790602 201001 2 004	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas PMD Prov Kalsel
3	Irfan Rachmady, S.Kom	197905112005011011	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Kuala
4	KHAIRUL ARIFIN, S.IP, M.IP	199104172015031002	JF. Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	NIHIL					

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- OUTCOME: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENATAAN DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.13.02.2.01.00 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	2
Catatan Pembahasan : - Terbangunnya 2 unit kantor desa, dengan penganggaran melalui BKK yang ditempelkan pada APBDes.					

2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.13.04.2.01.00 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	20
Catatan Pembahasan : - Fasilitasi pembinaan BUMDesma LKD pada 17 kecamatan. - Jumlah BUMDes : 195. - Jumlah BUMDes aktif : 100 - Jumlah BUMDes tidak aktif : 95 - Jumlah BUMDesma yang tidak aktif : 1					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 11 April 2025
Jam : 9:53:33 AM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	0
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DORY AMANDA SARI, S.Kom, MM	198408302009012004	Pranata Komputer Ahli Muda	Bappeda Prov. Kalsel
2	Andrian Anwary,S.Sos., M.A.P	197207101999031010	Plt Sekretaris	DPPPAKB PROV.Kalsel
3	A. Budiansyah, SE	19870917 201001 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappelitbang Kab. Barito Kuala
4	Winda Rukmana, SSTP, MM	19870512 200602 2 001	Kabid Keluarga Berencana	DPPKBP3A Kab. Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65.8	60
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19	24,7
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.11	2,30
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85.3	81,30



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	65.0	
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	10.9	5

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2
Catatan Pembahasan : - pembinaan ke Puskesmas (2 kali di 19 puskesmas), dilakukan 2 kali 1 tahun - pelaporan dilakukan per semester - pagu anggaran 48.600.000					
2.	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	101
Catatan Pembahasan : - tahun 2025 ada 100 DAHSAT, dari 201 Kampung KB - target 2026 yaitu 101 unit DASHAT - Pagu Anggaran Rp. 770.000.000					

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	2
Catatan Pembahasan : - saat ini sudah ada di semua balai (17 PPKS) - laporan dilakukan 2 kali per semester - pagu anggaran disesuaikan					
2.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	14
Catatan Pembahasan : - 187 BKB, 71 BKR, 77 BKL, 36 PIKR, 49 UPPKA (tahun 2025) - target 2026 BKB harus ada di setiap desa (14 kelompok) - pagu menyesuaikan					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 3:02:49 PM

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	6
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DORY AMANDA SARI, S.Kom, MM	198408302009012004	Pranata Komputer Ahli Muda	Bappeda Prov. Kalsel
2	Andrian Anwary,S.Sos., M.A.P	197207101999031010	Plt Sekretaris	DPPPAKB PROV.Kalsel
3	A. Budiansyah, SE	19870917 201001 1 005	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappelitbang Kab. Barito Kuala
4	dr. Lisa Herawati, MM	197303032002122003	Kabid PPA	DPPKBP3A Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.421	
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase ARG Daerah	%	7	20 SKPD
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72.33	71.5



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 2:50:12 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	100
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	100
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92.11	89,9
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	601	800

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.08.02.2.01.00 11	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	51
Catatan Pembahasan : Melatih 20 OPD setiap tahun (dalam 1 tahun pendampingan untuk semua OPD yang ada guna mengejar mendapat APE) Jumlah OPD sebanyak 51 termasuk 17 kecamatan dan 34 OPD					
2.	2.08.02.2.02.00 09	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50
Catatan Pembahasan : Tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM sejak 2021 Sub kegiatan ini perlu dilakukan di tahun 2026 Ini merupakan target astacita. Target harus keterwakilkan sesuai dengan aktivitas.					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.08.07.2.01.00 07	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	2
Catatan Pembahasan : Ada 5 kegiatan dengan anggaran DAK nonfisik. Tidak ada APBD. Harus ada kontribusi pemda dalam mendukung astacita. target kegiatan tahun 2026 yaitu 2 kegiatan : lintas sektor dan kemasyarakatan.					
2.	2.08.07.2.02.00 13	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	50
Catatan Pembahasan : Target 2026 yaitu 50 orang (satuan orang, tapi capaian yaitu kewajiban pelayanan harus 100%) Pagu anggaran : APBD tahun 2024 sebesar Rp 100 juta					



b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi pelaksanaan kebijakan PUG	38	Daerah
2.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan dan Lingkungan yang Responsif Gender	6	Daerah
3.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	13	Daerah
4.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	6	Daerah
5.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA/RBI	38	Daerah
6.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Bidang Politik dan Hukum	4	Kegiatan
7.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kebijakan PUG bidang Sosial dan Budaya	6	Kegiatan
8.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG bidang Ekonomi	11	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA	100	Orang
10.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Bidang Sosial Budaya yang Dilatih tentang KGPA	162	Orang
11.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang KGPPA	600	Orang
12.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	300	Orang
13.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA	38	Daerah
14.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Penguatan Kesehatan Mental	38	Daerah
15.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	3	Daerah
16.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Kondisi Khusus	10	Daerah
17.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	17	Daerah
18.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak	20	Lembaga
19.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi Daycare Ramah Anak	15	Lembaga
20.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	15	Lembaga
21.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSIPA	18	Lembaga
22.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAKP	30	Lembaga



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
23.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak	10	Lembaga
24.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Standarisasi Lembaga Pemberi Layanan Perlindungan Khusus Anak (UPTD PPA)	25	Lembaga
25.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	AMPK Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tingkat Nasional	500	Orang
26.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129	1	Layanan

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	26

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Jumat**, Tanggal **11** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T., M.M.	198107212009032013	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Irwan yunizar ST	19780619 200904 1 002	Kepala Seksi Pembinaan Teknis PLP, Air Minum dan Bangunan	Kasi Bintelk PLP, Air Minum dan Bangunan
3	Ir. Nunuk Retnowulansari, S.T., M.T.	19780619 200904 1 002	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi	Kepala Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi
4	Khairul Arifin, S.IP, M.IP	199104172015031002	JF. Perencanaan Ahli Muda	Bappelitbang Kab.Â BaritoÂ Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	-
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	17360
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	1



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 11 April 2025
Jam : 9:20:55 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	3
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	3
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	-
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143897	17360
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	38	-
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	38	-
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	107	1
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RTRW	Perda/Perk ada	52	1
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	159	3
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perk ada	133	3

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
- a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler
1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0
Catatan Pembahasan : tidak ada kegiatan peningkatan					



2.	1.03.02.2.02.00 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	128
Catatan Pembahasan : Pelaksanaan Rehabilitasi Berlokus Daerah irigasi Rawa : Rehabilitasi DIR Murung Keramat Rehabilitasi DIR Bahalayung Rehabilitasi DIR Murung Raya Rehabilitasi DIR Ramania Rehabilitasi DIR Parimata Rehabilitasi DIR Binaan Baru Rehabilitasi DIR Jelapat Baru Rehabilitasi DIR Tamban Muara Baru Rehabilitasi DIR Tinggiran Darat Rehabilitasi DIR Tabunganen Tengah Rehabilitasi DIR Tabunganen Kecil Rehabilitasi DIR Tabunganen Pemurus Rehabilitasi DIR Sungai Teras Dalam Rehabilitasi DIR Marabahan Kota Normalisasi Sungai Desa Asia Baru Dengan total panjang keseluruhan sepanjang 128 Km dengan luas layanan sebesar 250 Ha dengan rencana pagu Rp 12.800.000.000					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan :						
2.	1.03.03.2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	200	02.12.05 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
Catatan Pembahasan : - untuk target air minum aman sebesar 30% adalah target dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk Kabupaten Barito Kuala - kabupaten barito kuala melakukan perhitungan data air minum aman untuk kondisi 5 Tahun kedepan dalam dokumen RPJMD dan Renstra PUPR - Pemerintah Kabupaten/kota harus menyiapkan penganggaran untuk pengujian kualitas air minum aman berdasarkan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No.2 Tahun 2023 - untuk penggaran Sambungan Rumah (SR) Kabupaten Barito Kuala mengandalkan alokasi penggaran melalui Dana DAK, adapun Target 500 SR dengan Pagu Rp 14.544.624.359 untuk pelaksanaan tahun 2025 - kabupaten barito kuala menganggarkan perluasan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.000 melalui dana APBD kabupaten Barito Kuala Untuk 200 SR						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	147000	Hektar

2. OUTCOME: Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.00 10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.12.2.01.00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)



NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	2
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	3
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	1

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yudhi Mahendera S.Pi, M.P	197512062001121000	Perencana Ahli Madya	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Faisal Amir, S.SiT., M.M	198209112003121004	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
3	Hj. Sri Minarni, S.Ap	196804031992032009	Kabid Pariwisata	Disporbudpar Kab. Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	220000000000	-
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1176000000	196530
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	4.7	-

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	

Catatan Pembahasan :



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 12:45:37 PM

2.	3.26.02.2.03.00 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4
Catatan Pembahasan : 1. Destinasi Ekopark, belanja bahan pemeliharaan, honor petugas pengelola, kebersihan dan keamanan 2. Makam H. Abdul Samad, honor petugas pengelola, kebersihan dan keamanan 3. RTH Jembatan Barito, honor petugas pengelola, kebersihan dan keamanan 4. Pusat Kuliner Marabahan, honor petugas pengelola, jaga malam, kebersihan dan keamanan Target disepakati menjadi 4 unit					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.26.04.2.02.00 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	3.26.04.2.02.00 12	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.26.02.2.01.00 06	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi		03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
Catatan Pembahasan :						
2.	3.26.02.2.01.00 09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen		03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramen
Catatan Pembahasan :						
3.	3.26.02.2.03.00 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi		03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
Catatan Pembahasan :						
4.	3.26.02.2.03.00 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
Catatan Pembahasan :						

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------	-----



1.	3.26.04.2.01.00 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit		03.05.01 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur Yogyakarta Prambanan
Catatan Pembahasan :						
2.	3.26.04.2.02.00 02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		03.05.05 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramen
Catatan Pembahasan :						
3.	3.26.04.2.02.00 16	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen		03.05.08 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
Catatan Pembahasan :						
4.	3.26.04.2.02.00 22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk		03.05.10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	2	Kegiatan
2.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.002 Koordinasi Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)	1	Kegiatan
3.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.003 Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	5	Kegiatan
4.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PBP.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional Terpadu (ITMP) Ekstensi Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (BYP)	1	Rekomendasi
5.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PBP.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional Terpadu (ITMP) Ekstensi Labuan Bajo-Flores (LBF)	1	Rekomendasi
6.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	325	Orang
7.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	2	Pedoman
8.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I	12	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	8	Kegiatan
10.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	2	Pedoman
11.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Bimbingan Teknis Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	240	Orang
12.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang
13.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Jejaring di Destinasi Pariwisata	24	Kegiatan
14.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata	13	Kegiatan
15.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.002 Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata	13	Kegiatan



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
16.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PFA.001 NSPK Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	4	Pedoman
17.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AFA.001 NSPK Industri Pariwisata	1	Pedoman
18.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.001 Rantai Pasok Industri Pariwisata	40	Industri
19.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.002 Tranformasi Digital Industri Pariwisata	5	Industri
20.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AEA.001 Koordinasi Jejaring Lintas Sektor Industri Pariwisata	1	Kegiatan
21.	KEMENTERIAN PARIWISATA	ABB.001 Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata	1	Rekomendasi
22.	KEMENTERIAN PARIWISATA	BDI.001 Dukungan Teknis dan Pendampingan Investasi Pariwisata	30	Industri
23.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDI.001 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	90	Industri
24.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEH.001 Promosi Investasi Pariwisata	3	Promosi
25.	KEMENTERIAN PARIWISATA	AFA.001 Penyusunan NSPK Usaha Pariwisata Berkelanjutan	3	Dokumen
26.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.001 Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan	30	Badan Usaha
27.	KEMENTERIAN PARIWISATA	PEA.001 Koordinasi Penerapan Usaha Pariwisata Berkelanjutan	1	Kegiatan
28.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.001 Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	75	Badan Usaha
29.	KEMENTERIAN PARIWISATA	QDH.002 Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	75	Badan Usaha

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	3
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	8
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	29

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MUHAMMAD FAHRIZAL, S.Kom	199108182024211017	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Wiwun Nur""aini, S.Hut., M. Ling	198101192010012004	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan
3	Juniartinah, SE .	196806281998022005	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Barito Kuala
4	Arie Deny Wahyudi, S.STP, M.AP	198503142006021001	Kabid pemuda dan olahraga	Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	77.55	0.12
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	5.91	0.02
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67	-
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	23.79	1.97



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 10 April 2025
Jam : 10:05:43 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	39.41	1.04
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	38	7
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	99	61.25
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	79	1.15

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	0
Catatan Pembahasan : - Untuk pengembangan kewirausahaan pemuda ini akan dianggarkan 100 juta dgn target 150 orang dgn fokus wirausaha pemuda (usia pemuda 16-30 tahun) , kegiatan berupa pelatihan dan sosialisasi.					
2.	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	0
Catatan Pembahasan : - Gabungan dari organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, sekitar 21 organisasi - Target 60 orang dengan pagu sekitar 100jt. - Provinsi meadakan pelatihan dgn peserta dari kabupaten/kota&					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1
Catatan Pembahasan : - Pembinaan untuk KORMI dengan anggaran 200jt - Mohon pembinaan dari Dispora Provinsi untuk Kab/ Kota					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------	-----



1.	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	150	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
Catatan Pembahasan : - Seleksi atlet daerah menyesuaikan dengan permintaan dari cabang olahraga di tingkat provinsi. - Pagu akan menyesuaikan, untuk pagu tahun sebelumnya 70jt. - Harus dianggarkan terlebih dahulu.						
2.	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	53	04.09.03 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
Catatan Pembahasan : - Dispora melakukan pembinaan beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, menembak dan dayung. - Untuk pembinaan dianggarkan 50jt. - Target : 53 orang.						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	10000	Orang
2.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan	100	Orang
3.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang Terfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	50	Lembaga
4.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepramukaan (Kwarnas/Saka/Sako) yang Terfasilitasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25	Lembaga
5.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Organisasi Kepemudaan yang Terfasilitasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	100	Lembaga
6.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Fasillitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	5000	Orang
7.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga yang Terstandardisasi	3	Kegiatan
8.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk	10	Kegiatan
9.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Sentra Olahragawan Muda Nasional yang Terbina	237	Orang
10.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Sentra Keolahragaan yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	1006	Orang
11.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Talenta Potensial Olahraga yang Difasilitasi dalam Pengembangan Bakat pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade	99	Orang
12.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/ Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	57	Lembaga
13.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Olahragawan Talenta Unggul yang terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	678	Orang

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	8
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	3
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	13

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	RINA, S.Kep Ns, M.Kes	197804032006042005	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov Kalsel
2	MUHAMMAD REZA FAISAR, SH	198506232010011010	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Kesehatan Prov. Kalsel
3	Agisna Fauzia, S.Kom	199007272019032006	JF. Perencana Pertama	Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
4	Bambang Dwi Atmojo, S.Kom	199112052022031007	Pranata Komputer	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	109	115
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98.7	99.39
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	19	1
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13.80	10
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase	17.5	16



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 10:52:40 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase lanjut usia yang mandiri	Persentase	77	85
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	1.4	0.5
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	11.4	7.1
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persentase	70	100
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	30	100
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	Persentase	28	84.2
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	45	100
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	22	100
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	71	100
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	46	46



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persentase	23.4	21.8
17.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/ Kota	100	1
18.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	55	100
19.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252	766

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Kesehatan Untuk Semua

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.02.02.2.01.00 22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Batola - Aktivitas nya yaitu peningkatan Klinik utama menjadi RS Tipe D - akan disesuaikan kembali target Dinas Kesehatan Provinsi - Pengajuan Klinik menjadi RS tipe D harus melakukan registrasi Reg Fasyankes dengan mempertimbangkan ASPAK dan BOR - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisik untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						



2.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
3.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						



4.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
5.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						



6.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
7.	1.02.02.2.01.00 23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas kesehatan Kabupaten Barito Kuala: - aktivitas terdiri dari 2 paket : BMHP 1 Paket dan Obat 1 Paket - belum ada BMHP dan alat untuk PKG Dinas Kesehatan Provinsi - Usulkan kebutuhan BMHP untuk kegiatan PKG, dapat juga memanfaatkan dana BOK Kesehatan - Optimalkan penggunaan dana DAK Fisk untuk pengembangan Rumah Sakit Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						



8.	1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	20	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - pagu 2.7M ini sudah termasuk dengan dinas dan puskesmas - untuk targetnya 19 yaitu 19 Puskesmas (dokumennya) Dinas Kesehatan Provinsi - Fokus rincian kegiatan untuk upaya pengendalian PM dan PTM yang kegiatannya berdampak langsung pada Masyarakat, serta memperhatikan target Sasaran program yang telah ditetapkan. Bappeda Provinsi - sesuaikan lagi targetnya Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
9.	1.02.02.2.02.00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	20	04.13.01 Penuntasan TBC 04.13.02 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - pagu 2.7M ini sudah termasuk dengan dinas dan puskesmas - untuk targetnya 19 yaitu 19 Puskesmas (dokumennya) Dinas Kesehatan Provinsi - Fokus rincian kegiatan untuk upaya pengendalian PM dan PTM yang kegiatannya berdampak langsung pada Masyarakat, serta memperhatikan target Sasaran program yang telah ditetapkan. Bappeda Provinsi - sesuaikan lagi targetnya Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
10.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - UHC 100,3% dengan Jumlah Peserta 326,382 (Data di ambil dari dashboard JKN) Dinas Kesehatan Provinsi - Lakukan koordinasi dengan Dinsos terkait verifikasi dan validasi data PBI, pencapaian UHC Kab. Barito Kuala Sudah mencapai 100,31 % (per 28 feb 2025) - Sebagai saran target yang ditetapkan adalah 12 Document yang merupakan Hasil kompilasi laporan setiap bulan dari Puskesmas Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
11.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - UHC 100,3% dengan Jumlah Peserta 326,382 (Data di ambil dari dashboard JKN) Dinas Kesehatan Provinsi - Lakukan koordinasi dengan Dinsos terkait verifikasi dan validasi data PBI, pencapaian UHC Kab. Barito Kuala Sudah mencapai 100,31 % (per 28 feb 2025) - Sebagai saran target yang ditetapkan adalah 12 Document yang merupakan Hasil kompilasi laporan setiap bulan dari Puskesmas Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
12.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - UHC 100,3% dengan Jumlah Peserta 326,382 (Data di ambil dari dashboard JKN) Dinas Kesehatan Provinsi - Lakukan koordinasi dengan Dinsos terkait verifikasi dan validasi data PBI, pencapaian UHC Kab. Barito Kuala Sudah mencapai 100,31 % (per 28 feb 2025) - Sebagai saran target yang ditetapkan adalah 12 Document yang merupakan Hasil kompilasi laporan setiap bulan dari Puskesmas Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
13.	1.02.02.2.02.00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - UHC 100,3% dengan Jumlah Peserta 326,382 (Data di ambil dari dashboard JKN) Dinas Kesehatan Provinsi - Lakukan koordinasi dengan Dinsos terkait verifikasi dan validasi data PBI, pencapaian UHC Kab. Barito Kuala Sudah mencapai 100,31 % (per 28 feb 2025) - Sebagai saran target yang ditetapkan adalah 12 Document yang merupakan Hasil kompilasi laporan setiap bulan dari Puskesmas Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
14.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - Aktifitas di sub kegiatan : screening hipoterooid pada bayi, AMP dan MPDN - AKI Tahun 2024 - 126 per 100.000 KH (5 Kasus) - AKI Tahun 2023 - 143 per 100.000 KH (6 Kasus) - dari 19 puskesmas hanya 6 yang PONED Bappeda Provinsi - pada sub kegiatan ini bisa di tambahkan aktifitas apa yang bisa menekan penurunan AKI Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
15.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - Aktifitas di sub kegiatan : screening hipoterooid pada bayi, AMP dan MPDN - AKI Tahun 2024 - 126 per 100.000 KH (5 Kasus) - AKI Tahun 2023 - 143 per 100.000 KH (6 Kasus) - dari 19 puskesmas hanya 6 yang PONED Bappeda Provinsi - pada sub kegiatan ini bisa di tambahkan aktifitas apa yang bisa menekan penurunan AKI Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
16.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer



Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - Aktifitas di sub kegiatan : screening hipoterooid pada bayi, AMP dan MPDN - AKI Tahun 2024 - 126 per 100.000 KH (5 Kasus) - AKI Tahun 2023 - 143 per 100.000 KH (6 Kasus) - dari 19 puskesmas hanya 6 yang PONED Bappeda Provinsi - pada sub kegiatan ini bisa di tambahkan aktifitas apa yang bisa menekan penurunan AKI Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						
17.	1.02.02.2.02.00 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	12	04.11.01 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.11.04 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala - Aktifitas di sub kegiatan : screening hipoterooid pada bayi, AMP dan MPDN - AKI Tahun 2024 - 126 per 100.000 KH (5 Kasus) - AKI Tahun 2023 - 143 per 100.000 KH (6 Kasus) - dari 19 puskesmas hanya 6 yang PONED Bappeda Provinsi - pada sub kegiatan ini bisa di tambahkan aktifitas apa yang bisa menekan penurunan AKI Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut: 1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) 2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar 3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan 4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional						

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------	-----



1.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
----	-----------------------	--	---	-------	---	--

Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Barito Kuala:
- Pagu belum diisi karena pelatihan ini menggunakan dana BOK

Dinas Kesehatan Provinsi
- Data SISDMK untuk Tenaga Kesehatan sesuai 9 Jenis Standar di Puskesmas Kab. Barito Kuala ada 7 Puskesmas dari total 19 Puskesmas
- Perlu updating Data di SISDMK sesuai dengan data existing
- Kebutuhan SISDMK untuk RS tipe D

Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut:

1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar
3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional

2.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
----	-----------------------	--	---	-------	---	--

Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Barito Kuala:
- Pagu belum diisi karena pelatihan ini menggunakan dana BOK

Dinas Kesehatan Provinsi
- Data SISDMK untuk Tenaga Kesehatan sesuai 9 Jenis Standar di Puskesmas Kab. Barito Kuala ada 7 Puskesmas dari total 19 Puskesmas
- Perlu updating Data di SISDMK sesuai dengan data existing
- Kebutuhan SISDMK untuk RS tipe D

Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut:

1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar
3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional



3.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
----	-----------------------	--	---	-------	---	--

Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Barito Kuala:
- Pagu belum diisi karena pelatihan ini menggunakan dana BOK

Dinas Kesehatan Provinsi
- Data SISDMK untuk Tenaga Kesehatan sesuai 9 Jenis Standar di Puskesmas Kab. Barito Kuala ada 7 Puskesmas dari total 19 Puskesmas
- Perlu updating Data di SISDMK sesuai dengan data existing
- Kebutuhan SISDMK untuk RS tipe D

Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut:

1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar
3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional

4.	1.02.03.2.02.00 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7	04.11.02 Pencegahan dan Penurunan Stunting 04.15.01 Investasi Pelayanan Kesehatan Primer 04.15.02 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 04.15.03 Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
----	-----------------------	--	---	-------	---	--

Catatan Pembahasan : Dinas Kesehatan Barito Kuala:
- Pagu belum diisi karena pelatihan ini menggunakan dana BOK

Dinas Kesehatan Provinsi
- Data SISDMK untuk Tenaga Kesehatan sesuai 9 Jenis Standar di Puskesmas Kab. Barito Kuala ada 7 Puskesmas dari total 19 Puskesmas
- Perlu updating Data di SISDMK sesuai dengan data existing
- Kebutuhan SISDMK untuk RS tipe D

Pembahasan terkait indikator yang tidak dibahas agar menjadi perhatian/didukung dari Kab-Kota, dimana 4 inidkatornya sebagai berikut:

1. Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
2. Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar
3. Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
4. Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional



c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Penduduk Penerima Bantuan Iuran PBI JKN	96800000	Orang
2.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peserta BPBU dan BP penerima kontribusi bantuan iuran	49603175	Orang
3.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.061.Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	172370	Orang
4.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	68	Layanan
5.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.061.Data dan Informasi TBC	2	Dokumen
6.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.062.Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC	1	Paket
7.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.061.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian TBC	30	Orang
8.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.061.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC	3	Laporan
9.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.061.Daerah Mendapat Pembinaan Program P2 TBC di Daerah	47	Provinsi/Kab/Kota
10.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	119	Layanan
11.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.033.Data dan Informasi Kusta dan Frambusia	1	Layanan
12.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.033.Pemeliharaan Sistem Informasi Kusta dan Frambusia	1	Paket
13.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	6	Paket
14.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.033.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	60	Orang
15.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.033.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	18	Provinsi/Kab/Kota
16.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.033.Daerah mendapat Pembinaan Program Kusta dan Frambusia di Daerah	20	Provinsi/Kab/Kota
17.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.001 Orang yang mendapatkan Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	105000	Orang
18.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.003 Pendayagunaan Dokter Spesialis	670	Orang
19.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.004 Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua	20	Orang
20.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEH.001.Promosi Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33	Kegiatan
21.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QKA.005. Layanan Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga	66	Laporan
22.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEH.001. Promosi Informasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	33	Kegiatan
23.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.001 Layanan UBM	11	Layanan
24.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.001 Orang yang mendapatkan Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	105000	Orang
25.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.001 Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Penyelenggaraan Layanan Upaya Berhenti Merokok	1	Layanan
26.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.006 Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Kawasan Tanpa Rokok	1	Layanan
27.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.001 Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok	30	Orang
28.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.006 Pelatihan Penerapan dan Penegakan KTR	100	Orang
29.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Upaya Berhenti Merokok	2	Laporan
30.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Layanan Upaya Berhenti Merokok	33	Daerah
31.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.003 Layanan Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	6	Layanan
32.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.003 Media Komunikasi Informasi Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	1	Layanan
33.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.003 Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	30	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
34.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.003 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	3	Laporan
35.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.003 Daerah yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	5	Daerah
36.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.002 Orang yang Mendapatkan Deteksi Dini FR Diabetes Melitus dan Obesitas	20000	Orang
37.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001 Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	150	Paket
38.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PFA.U02 NSPK Penyehatan Lingkungan Kategori II (HS-29)	6	Paket
39.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PFA.U02 NSPK Penyehatan Lingkungan Kategori II (HS-29)	16	Paket
40.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.001 Pelayanan Publik Bidang Penyehatan Lingkungan (HS-29)	38	Layanan
41.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.001 Media KIE Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	1	Dokumen
42.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.002 Media KIE Implementasi Kualitas Air Minum Rumah Tangga yang Memenuhi Standar (HS-29)	2	Dokumen
43.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.003 Media KIE Implementasi Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	1	Dokumen
44.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.004 Media KIE Implementasi Penyehatan Kualitas Udara Dalam Ruang di Pemukiman/Rumah Tangga Daerah	1	Dokumen
45.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.005 Media KIE Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	1	Dokumen
46.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.006 Media KIE Implementasi TPP Memenuhi Syarat (HS-29)	1	Dokumen
47.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.007 Media KIE Implementasi TFU Memenuhi Syarat (HS-29)	1	Dokumen
48.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001 Paket Sarana Pengawasan TPP	2	Paket
49.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.001 Pemeliharaan Sistem Informasi Bidang Kesehatan Lingkungan (HS-29)	9	Paket
50.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.001 Tenaga Terlatih Pengawasan Kualitas Air Minum (HS-29)	48	Orang
51.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.002 Tenaga Terlatih Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	500	Orang
52.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.003 Tenaga Terlatih Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	30	Orang
53.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.004 Tenaga Terlatih Implementasi TPP Memenuhi Syarat (HS-29)	25	Orang
54.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.005 Tenaga Terlatih Implementasi TFU Memenuhi Syarat (HS-29)	500	Orang
55.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001 Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (HS-29)	10	Laporan
56.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi 5 Pilar STBM (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
57.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.002 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Kualitas Air Minum	38	Provinsi/Kab/Kot a
58.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.003 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Kabupaten Kota Sehat (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
59.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.004 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Implementasi Fasyankes yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
60.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.005 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan terkait Pengawasan TPP (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a
61.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.006 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Capaian Target Pengawasan TFU (HS-29)	38	Provinsi/Kab/Kot a



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
62.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.007 Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dan Kebencanaan Lingkungan (Sudah diusulkan untuk diubah pada revisi renja menjadi Daerah Mendapat Fasilitas dan Pembinaan dalam Penyehatan Kualitas Udara (HS-29) namun nomenklatur belum dapat disesuaikan)	38	Provinsi/Kab/Kota
63.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAA.061.Masyarakat mendapatkan layanan Pencegahan dan Pengendalian TBC	172370	Orang
64.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	68	Layanan
65.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.061.Layanan Penemuan Aktif TBC	2	Dokumen
66.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.062.Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC	31	Paket
67.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.061.Pemeliharaan Sistem Informasi TBC	1	Paket
68.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.061.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian TBC	30	Orang
69.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.061.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC	3	Laporan
70.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.061.Daerah Mendapat Pembinaan Program P2 TBC di Daerah	47	Provinsi/Kab/Kota
71.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QAH.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	119	Layanan
72.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QMA.033.Data dan Informasi Kusta dan Frambusia	1	Layanan
73.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RCB.033.Pemeliharaan Sistem Informasi Kusta dan Frambusia	1	Paket
74.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.033.Layanan Surveilans dan deteksi dini Kusta dan Frambusia	6	Paket
75.	KEMENTERIAN KESEHATAN	SCM.033.Tenaga Kesehatan Terlatih Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	60	Orang
76.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.033.Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia	18	Provinsi/Kab/Kota
77.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.033.Daerah mendapat Pembinaan Program Kusta dan Frambusia di Daerah	20	Provinsi/Kab/Kota
78.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PDE.001.Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	45	%
79.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PDE.001.Rumah Sakit Terakreditasi paripurna	45	%
80.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.004.Pemantauan dan Monev Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pemantauan Wilayah Setempat	43	Laporan
81.	KEMENTERIAN KESEHATAN	PEA.001.Koordinasi Terkait Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahi	79	kegiatan
82.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.003.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja	38	Laporan
83.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.004.Pembinaan terkait Kesehatan Usia Reproduksi dan Lansia	38	Daerah
84.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.001.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Baru Lahir	38	Laporan
85.	KEMENTERIAN KESEHATAN	RAB.001.Media KIE Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Ibu dan Bayi Baru Lahir	2782038	Buku
86.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UAE.002.Pemantauan dan Evaluasi Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	38	Laporan
87.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.001.Pembinaan terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	139	Daerah
88.	KEMENTERIAN KESEHATAN	UBA.002.Pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	73	Daerah
89.	KEMENTERIAN KESEHATAN	QKA.005.Layanan Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga	66	Laporan



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	19
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	6
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	89

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DR. Denny P. Sinaga, ST, MT	19721208 199803 1 006	Kabid Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalsel
2	Aditya Dinta Masmitra, S.STP,M.IP	1992	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalsel
3	Arief Hidayat, S.E.	19910330 201903 1 014	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
4	Eko Purnama Sakti, SSTP, M.Si	198310242002121001	Kepala Dinas	DPMPPTSP Kab. Barito Kuala
5	Agisna Fauzia, S.Kom	19900727 201903 2 006	Perencana Ahli Pertama	Bappelitbang Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2175	0,15

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	20
Catatan Pembahasan : Beberapa masalah antara lain yang utama mengenai tata ruang (berkenaan dengan kegiatan usaha yang dekat dengan sungai) dan perizinan (berkenaan dengan kewenangan). Tahun 2024 = 10, tahun 2025 = 8, sehingga untuk tahun 2026 = 20.					
2.	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	36
Catatan Pembahasan : Total pelaku usaha yang besar ada sekitar diatas 50 dan yang diawasi ada 36 (yang berpotensi dengan resiko).					



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 10 April 2025
Jam : 12:27:32 PM

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	ANGGA PRIYADI, ST. M.Ec.Dev	198911152015031004	Perencana Ahli Pertama	BAPPEDA PROV KALSEL
2	Masrani	19771110 2009011005	"Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan"	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3	Achmad Mauluddin, S.Kom., M.Pd	198503122010121006	Widyaprada Ahli Muda	BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
4	Juniartinah	196806281998022005	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Barito Kuala
5	Hendra Kesuma Muchtar, SE, MM	19720302 200701 1 020	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Disdik batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73.19	



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 3:14:09 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SMP	Nilai	72.70	75.52
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	73.55	73.14
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72.31	72.34
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	63.90	64.78
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62.06	64.12
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SD	Nilai	76.72	78.75
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	65.05	67.01
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	58.37	60.81
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.13	73.23
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63.83	65.40



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	63.38	73.89
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	73.14	65.44

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	1.01.02.2.01.00 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : DISDIK BATOLA : PENDATAAN DENGAN KERJASAMA PEMDA DAN KORWIL TERKAIT ANAK TIDAK SEKOLAH MAUPUN YANG BERHENTI SEKOLAH.. DAN DILAKSNAKAN PROGRAM PEMBINAAN/SOSIALISASI KE ORTU BAHWA SEKOLAH ITU PENTING DAN PEMBERIAN PERLENGKAPAN SEKOLAH UNTUK ANAK YANG MAU SEKOLAH. PERLU MENGUNDANG ORTU AGAR DI BINA USIA YANG MELEWATI BATAS AKAN DI MASUKAN DI KESETARAAN. DI 17 KECAMATAN DALAM MELAKSANAKAN 17 KEGIATAN BPMP PERLUNYA KEGIATAN SOSIALISASI PELAKSANAAN MBG DAN 7 ANAK INDONESIA HEBAT ADA DISUBKEGIATAN INI DAN KEGIATAN TERKAIT APS INI DIARAHKAN KESUBKEG LAINNYA YAITU SUBKEG KOORDINASI DAN PERENCANAAN DISDIK KALSEL RUMAHAN SUBKEG PERLU DI SESUAIKAN LAGI CATATAN : 1. Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkait hal ini, Pemda dapat memanfaatkan data dan pemetaan yang kami sajikan melalui lampiran pada Surat Mendikdasmen 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 maupun Rapor Pendidikan. 2. Indikator prioritas SPM yang terkait APS, Literasi dan Numerasi, Kekhususan SMK, Kekhususan PAUD, dan Iklim (Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran Surat Mendikdasmen, perlu menjadi perhatian Pemda untuk mengawal ke seluruh dokumen perencanaan. 3. Subkegiatan tidak hanya terbatas pada yang terbahas dalam Rakortekrenbang, melainkan Pemda perlu mengakomodir subkegiatan yang sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pemetaan Subkegiatan Prioritas dalam Surat Mendikdasmen. 4. Program-program Prioritas Mendikdasmen yang perlu didukung bersama antara pusat dan daerah: â€¢ penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia â€¢ dukungan terhadap program Makan Bergizi â€¢ Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan â€¢ Digitalisasi â€¢ Pembelajaran Mendalam (Deep Learning); â€¢ Sekolah Model â€¢ Penguatan Bimbingan Konseling di â€¢ Wajib Belajar 13 dan â€¢ Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. â€¢ Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) â€¢ Tes Kemampuan Akademik Seluruh program prioritas tersebut sudah masuk ke dalam Pemetaan Subkegiatan Prioritas pada Surat Mendikdasmen yang kami sertakan dengan Deskripsi, Definisi Operasional, dan NSPK. 5. Untuk asesmen terstandar kelas 6 (SPMB kelas 7) diselenggarakan oleh Kab/Kota. Sedangkan asesmen terstandar kelas 9 (SPMB kelas 10) diselenggarakan oleh Provinsi. oleh karena itu, perlu pembiayaan dari pemerintah daerah. sedangkan untuk asesmen terstandar kelas 12 (untuk penerimaan mahasiswa baru) akan dibiayai pemerintah pusat (kemdikdasmen) Untuk Peraturan Menteri Dikdasmen terkait hal ini akan disampaikan dalam Waktu dekat karena saat ini masih dalam proses penyusunan. Penganggaran ini diharapkan terpisah dengan penganggaran Asesmen Nasional karena asesmen Nasional akan tetap dilaksanakan. (Menggunakan sub kegiatan Proses Belajar Mengajar)					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 3:14:09 PM

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	1.01.02.2.02.00 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Catatan Pembahasan : DISDIK BATOLA REVISI TARGET 2026 2 SEKOLAH GIBS ORANG DALAM KURUNG 3 TAHUN BERTURUT-TURUT SEBESAR 485 JUTA DAN 81 JUTA ORANG/TAHUN TARGET ANAK YG TIDAK SEKOLAH DIPERBANTUKAN PERALATAN SEKOLAH AGAR BISA SEKOLAH KEGIATAN INI ADA DISUBKEG LAIN. PERBANTUAN UNTUK ANAK YANG PINTER TAPI TIDAK MAMPU, KARENA LETAKNYA ADA DIBARITO KUALA. KLASIFIKASI BANTUAN TERGANTUNG DARI USIA ANAK ADA YANG DAPAT PERALATAN SEKOLAH ADA JUGA BERUPA UANGTUNAI. BPMP TINDAK LANJUT ANAK YANG TIDAK SEKOLAH AGAR BISA MASUK SEKOLAH. TERKAIT TARGET 2 ORANG DALAM 3 TH TIDAK EFEKTIF AGAR TARGET NYA DIPERBANYAK DISDIK KALSEL APM 80,88 APS 88,68 KALO PERBANTUAN CUMAN 2 ORANG TIDAK AKAN MENGANGKAT ANGKA TERSEBUT, DIHARAPKAN DARI PAGU TERSEBUT LEBIH BANYAK PENERIMA MANFAATNYA BAPPEDA BATOLA BANTUAN INI UNTUK ANAK YANG PRESTASI TAPI TIDAK MAMPU DENGAN SELEKSI, DAN AKAN DIDISKUSIKAN LAGI TERKAIT MASUKANNYA 1. Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkait hal ini, Pemda dapat memanfaatkan data dan pemetaan yang kami sajikan melalui lampiran pada Surat Mendikdasmen 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 maupun Rapor Pendidikan. 2. Indikator prioritas SPM yang terkait APS, Literasi dan Numerasi, Kekhususan SMK, Kekhususan PAUD, dan Iklim (Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran Surat Mendikdasmen, perlu menjadi perhatian Pemda untuk mengawal ke seluruh dokumen perencanaan. 3. Subkegiatan tidak hanya terbatas pada yang dibahas dalam Rakortekrenbang, melainkan Pemda perlu mengakomodir subkegiatan yang sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pemetaan Subkegiatan Prioritas dalam Surat Mendikdasmen. 4. Program-program Prioritas Mendikdasmen yang perlu didukung bersama antara pusat dan daerah: • penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia • dukungan terhadap program Makan Bergizi • Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan • Digitalisasi • Pembelajaran Mendalam (Deep Learning); • Sekolah Model • Penguatan Bimbingan Konseling di • Wajib Belajar 13 dan • Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. • Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) • Tes Kemampuan Akademik Seluruh program prioritas tersebut sudah masuk ke dalam Pemetaan Subkegiatan Prioritas pada Surat Mendikdasmen yang kami sertakan dengan Deskripsi, Definisi Operasional, dan NSPK. 5. Untuk asesmen terstandar kelas 6 (SPMB kelas 7) diselenggarakan oleh Kab/Kota. Sedangkan asesmen terstandar kelas 9 (SPMB kelas 10) diselenggarakan oleh Provinsi. oleh karena itu, perlu pembiayaan dari pemerintah daerah. sedangkan untuk asesmen terstandar kelas 12 (untuk penerimaan mahasiswa baru) akan dibiayai pemerintah pusat (kemdikdasmen) Untuk Peraturan Menteri Dikdasmen terkait hal ini akan disampaikan dalam Waktu dekat karena saat ini masih dalam proses penyusunan. Penganggaran ini diharapkan terpisah dengan penganggaran Asesmen Nasional karena asesmen Nasional akan tetap dilaksanakan. (Menggunakan sub kegiatan Proses Belajar Mengajar)						
2.	1.01.02.2.02.00 60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	75	04.04.02 Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja



Catatan Pembahasan : DISDIK BATOLA BIMTEK PERMATA PELAJARAN GURU AKAN DI AKOMODR USULAN DARI BPMP BPMP TERKAIT PEMBELAJARAN GURU DEEPLARNING BIMBINGAN KONSELING DIGITALISASI PEMBELAJARAN (CODING DAN AI) DAN Bintek pengembangan pedagogik profesi dan kompetensi guru BAPPEDA BATOLA AKAN DI AKOMODR USULAN DARI BPMP						
3.	1.01.02.2.03.00 40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0	04.01.01 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Catatan Pembahasan : DISDIK BATOLA TK DIBATOLA ADA 34 TERSEBAR DI SELURUH KEC ,TAHUN 2026 BELUM ADA RENCANA PEMBANGUNAN USB TK NEGERI. DI TAHUN 2026 AKAN DILAKSANAKAN REHAB SEKOLAH YAITU PENAMBAHAN RUANG SEKOLAH. BPMP TERKAIT KEGIATAN TERSEBUT BISA MASUK DISUBKEGIATAN REHAB SEKOLAH CATATAN KHUSUS: 1. Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkait hal ini, Pemda dapat memanfaatkan data dan pemetaan yang kami sajikan melalui lampiran pada Surat Mendikdasmen 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 maupun Rapor Pendidikan. 2. Indikator prioritas SPM yang terkait APS, Literasi dan Numerasi, Kekhususan SMK, Kekhususan PAUD, dan Iklim (Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran Surat Mendikdasmen, perlu menjadi perhatian Pemda untuk mengawal ke seluruh dokumen perencanaan. 3. Subkegiatan tidak hanya terbatas pada yang dibahas dalam Rakortekrenbang, melainkan Pemda perlu mengakomodir subkegiatan yang sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pemetaan Subkegiatan Prioritas dalam Surat Mendikdasmen. 4. Program-program Prioritas Mendikdasmen yang perlu didukung bersama antara pusat dan daerah: â€¢ penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia â€¢ dukungan terhadap program Makan Bergizi â€¢ Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan â€¢ Digitalisasi â€¢ Pembelajaran Mendalam (Deep Learning); â€¢ Sekolah Model â€¢ Penguatan Bimbingan Konseling di â€¢ Wajib Belajar 13 dan â€¢ Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. â€¢ Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) â€¢ Tes Kemampuan Akademik Seluruh program prioritas tersebut sudah masuk ke dalam Pemetaan Subkegiatan Prioritas pada Surat Mendikdasmen yang kami sertakan dengan Deskripsi, Definisi Operasional, dan NSPK. 5. Untuk asesmen terstandar kelas 6 (SPMB kelas 7) diselenggarakan oleh Kab/Kota. Sedangkan asesmen terstandar kelas 9 (SPMB kelas 10) diselenggarakan oleh Provinsi. oleh karena itu, perlu pembiayaan dari pemerintah daerah. sedangkan untuk asesmen terstandar kelas 12 (untuk penerimaan mahasiswa baru) akan dibiayai pemerintah pusat (kemdikdasmen) Untuk Peraturan Menteri Dikdasmen terkait hal ini akan disampaikan dalam Waktu dekat karena saat ini masih dalam proses penyusunan. Penganggaran ini diharapkan terpisah dengan penganggaran Asesmen Nasional karena asesmen Nasional akan tetap dilaksanakan. (Menggunakan sub kegiatan Proses Belajar Mengajar)						
4.	1.01.02.2.04.00 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	50	04.01.04 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah



Catatan Pembahasan : DISDIK BATOLA
KESETARAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK YG SUDAH BEKERJA DIARAHKAN KEPENDIDIKAN NONFORMAL PAKET A,B DAN C. DIKARENAKAN TIDAK MAMPU DAN DIBUJUK UNTUK SEKOLAH DENGAN DIPERBANTUKAN ANAK YANG JARAKNYA JAUH KE SEKOLAH DIPERBANTUKAN UANG TRANSPORT KESEKOLAH.

BPMP
TERKAIT KEGIATAN PERBANTUKAN PERLENGKAPAN SEKOLAH HARUS ADA DISSUBKEG LAIN, DAN TERKAIT PERBANTUAN KEUANGAN/BEASISWA PERLU DI BUATKAN JUKNISNYA.

BAPPEDA BATOLA
TERKAIT KEGIATAN PERBANTUKAN ANAK TIDAK MAMPU DAN DIBUJUK UNTUK SEKOLAH DENGAN DIPERBANTUKAN ANAK YANG JARAKNYA JAUH KE SEKOLAH DIPERBANTUKAN UANG TRANSPORT KESEKOLAH APAKAH SUDAH SIAP DENGAN MENYUSUN JUKNISNYA DALAM BENTUK (PERBUP)

CATATAN KHUSUS
1. Pemerintah Kab/Kota diharapkan dapat melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkait hal ini, Pemda dapat memanfaatkan data dan pemetaan yang kami sajikan melalui lampiran pada Surat Mendikdasmen 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 maupun Rapor Pendidikan.
2. Indikator prioritas SPM yang terkait APS, Literasi dan Numerasi, Kekhususan SMK, Kekhususan PAUD, dan Iklim (Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas) yang secara rinci tercantum dalam Lampiran Surat Mendikdasmen, perlu menjadi perhatian Pemda untuk mengawal ke seluruh dokumen perencanaan.
3. Subkegiatan tidak hanya terbatas pada yang terbahas dalam Rakortekrenbang, melainkan Pemda perlu mengakomodir subkegiatan yang sesuai dengan permasalahan di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pemetaan Subkegiatan Prioritas dalam Surat Mendikdasmen.
4. Program-program Prioritas Mendikdasmen yang perlu didukung bersama antara pusat dan daerah:
 • penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia
 • dukungan terhadap program Makan Bergizi
 • Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan
 • Digitalisasi
 • Pembelajaran Mendalam (Deep Learning);
 • Sekolah Model
 • Penguatan Bimbingan Konseling di
 • Wajib Belajar 13 dan
 • Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 • Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
 • Tes Kemampuan Akademik
Seluruh program prioritas tersebut sudah masuk ke dalam Pemetaan Subkegiatan Prioritas pada Surat Mendikdasmen yang kami sertakan dengan Deskripsi, Definisi Operasional, dan NSPK.
5. Untuk asesmen terstandar kelas 6 (SPMB kelas 7) diselenggarakan oleh Kab/Kota. Sedangkan asesmen terstandar kelas 9 (SPMB kelas 10) diselenggarakan oleh Provinsi. oleh karena itu, perlu pembiayaan dari pemerintah daerah. sedangkan untuk asesmen terstandar kelas 12 (untuk penerimaan mahasiswa baru) akan dibiayai pemerintah pusat (kemdikdasmen) Untuk Peraturan Menteri Dikdasmen terkait hal ini akan disampaikan dalam Waktu dekat karena saat ini masih dalam proses penyusunan. Penganggaran ini diharapkan terpisah dengan penganggaran Asesmen Nasional karena asesmen Nasional akan tetap dilaksanakan. (Menggunakan sub kegiatan Proses Belajar Mengajar)

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Akreditasi Lembaga	130653	Lembaga
2.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	6	Rekomendasi
3.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	16	Rekomendasi
4.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial	10	Rekomendasi
5.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan	1	Rekomendasi
6.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	2200	Rekomendasi
7.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Kepemimpinan	5824	Orang
8.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	182	Orang
9.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	1081	Orang
10.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	3036	Orang
11.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1560	Orang
12.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	2000	Orang
13.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	137215	Orang
14.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	666933	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
15.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	14	Rekomendasi
16.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	166	Kesepakatan
17.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Komunitas Literasi yang difasilitasi dan diapresiasi	100	Kelompok Masyarakat
18.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	1424	Lembaga
19.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	18150	Orang
20.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual	289	Rekomendasi
21.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal	38	Provinsi
22.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengawasan Pemanfaatan Buku Di Satuan Pendidikan	105	Lembaga
23.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina	105000	Orang
24.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	2754	Lembaga
25.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penutur bahasa terbina	8619	Orang
26.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi	800	Orang
27.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	772000	Orang
28.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	7	Unit
29.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	7	Paket
30.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	105	Kesepakatan
31.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan Vokasi Yang Selaras Dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	25	Lembaga
32.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN	550	Lembaga
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	540948	Lembaga
34.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 SDM Perbukuan yang Terbina	125	Orang
35.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Asesmen	1	Sistem Informasi
36.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Kurikulum	1	Sistem Informasi
37.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Perbukuan	1	Data
38.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1	Sistem Informasi
39.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	10360614	Orang
40.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten	140	Orang
41.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	428773	Orang
42.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	3220	Orang
43.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV	1470	Orang
44.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina	1256	Lembaga
45.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi	100	Kelompok Masyarakat
46.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Penataan Guru Dikdas	38	Provinsi
47.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	3033	Orang
48.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Penutur bahasa teruji	143648	Orang
49.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual	616	Rekomendasi
50.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	6448	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
51.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan	88	Dokumen
52.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Rapor Pendidikan yang dikembangkan	4	Rekomendasi
53.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	1	Sistem Informasi
54.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4369968	Orang
55.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Soal yang Dikembangkan	19340	Rekomendasi
56.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Generasi muda terbina program literasi	19045	Orang
57.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	4100	Orang
58.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	215474	Orang
59.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Model Asesmen Pendidikan	5	Rekomendasi
60.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Penataan Guru Dikmen dan Diksus	38	Provinsi
61.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Pengawas Sekolah yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	1500	Orang
62.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi	5786	Orang
63.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk Penerjemahan	2507	Dokumen
64.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk pengayaan pendukung literasi	300	Dokumen
65.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1935774	Orang
66.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	10	Rekomendasi
67.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Memperoleh Penghargaan	262	Orang
68.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	72408	Orang
69.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan	180	Orang
70.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1928271	Orang
71.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Bantuan Pemerintah Untuk lembaga/Organisasi Penyelenggara Pendidikan	2935	Lembaga
72.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan	296	Orang
73.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	891	Orang
74.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	4	Layanan
75.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	1691	Orang
76.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	5273	Orang
77.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan bimtek pengembangan kompetensi	20000	Orang
78.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Dokumen Hasil Pelaksanaan Tracer Study Pada Satuan Pendidikan Vokasi	1	Dokumen
79.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Guru Dikdas Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	23341	Orang
80.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan	376	Orang
81.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan	3	Layanan
82.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan	38	Provinsi
83.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	229	Orang
84.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Guru Dikmen Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	4269	Orang
85.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	720	Orang
86.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Platform Digital Pendidikan	5	Sistem Informasi



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
87.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1178	Lembaga
88.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Kepala Sekolah Non ASN yang menerima Tunjangan Khusus	391	Orang
89.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya	480	Orang
90.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	009 Guru TK/TKLB/Dikmas Non-ASN yang Menerima Insentif	30951	Orang
91.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru Dikdas Non-ASN Yang Menerima Insentif	23344	Orang
92.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah	134847	Orang
93.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	74014	Orang
94.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	4298	Orang
95.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen dan Diksus yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	900	Orang
96.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Insentif	2705	Orang
97.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	850	Orang
98.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	137144	Orang
99.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	022 SMK yang Melaksanakan Program UKS	72	Lembaga
100.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	040 Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	100000	Orang
101.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	041 Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	750	Orang
102.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	042 SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	250	Lembaga
103.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	049 SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	62	Lembaga
104.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	050 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	72	Lembaga
105.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	051 SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	450	Lembaga
106.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	103 Satuan PAUD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga
107.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	138 Satuan PAUD yang menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku	514	Lembaga
108.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	143 Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	10000	Lembaga
109.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	145 Satuan PAUD yang melaksanakan program UKS	514	Lembaga
110.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	180 Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	514	Lembaga
111.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	191 Satuan PAUD yang Direvitalisasi	14690	Lembaga
112.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	192 Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun	77510	Lembaga
113.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	203 SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga
114.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	231 SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga
115.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	233 SD yang Melaksanakan Program UKS	514	Lembaga
116.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	238 SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	514	Lembaga
117.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	280 SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
118.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	291 SD yang Direvitalisasi	39920	Lembaga
119.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	292 Unit Sekolah Baru SD yang Dibangun	58640	Lembaga
120.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	313 SMP yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	514	Lembaga



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
121.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	331 SMP yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga
122.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	333 SMP yang Melaksanakan Program UKS	514	Lembaga
123.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	338 SMP Yang Menerapkan Kurikulum yang berlaku	514	Lembaga
124.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	380 SMP yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
125.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	391 SMP yang Direvitalisasi	10280	Lembaga
126.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	392 Unit Sekolah Baru SMP yang Dibangun	16040	Lembaga
127.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	405 SMA yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	74	Lembaga
128.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	431 SMA yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	74	Lembaga
129.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	433 SMA yang melaksanakan program UKS	74	Lembaga
130.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	438 SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku	74	Lembaga
131.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	480 SMA yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	74	Lembaga
132.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	491 SMA yang Direvitalisasi	3090	Lembaga
133.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	492 Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun	5470	Lembaga
134.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	503 Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi	682	Lembaga
135.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	508 Satuan Pendidikan Yang Mendapat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	514	Lembaga
136.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	531 Lembaga Pendidikan Masyarakat yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	514	Lembaga
137.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	531 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	38	Lembaga
138.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	533 Satuan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	38	Lembaga
139.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	538 Lembaga Pendidikan Masyarakat Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	514	Lembaga
140.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	538 Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	38	Lembaga
141.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	540 Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	38	Lembaga
142.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	580 Lembaga Pendidikan Masyarakat yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	514	Lembaga
143.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	580 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	38	Lembaga
144.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	417298	Lembaga

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	16
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	1
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	144

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Ivonne Lestiyana, S.E., MM	197411242005012006	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	H. Hasan, SKM, MM.	19690722 199003 1 006	Sekretaris	Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
3	Rina Marlina, S.Ap.,MM	19770512 199703 2 004	Kabid Perdagangan dan Kemetrolagian	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
4	Handoko Wijaya, S.E.	19960311 202421 1 008	Perencana Ahli Pertama	Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	Persentase	7.1	4
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	Persentase	5	-

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.30.02.2.06.00 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Barito Kuala tidak menggunakan Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) - Provinsi melaksanakan Pengawasan ke Kabupaten/ Kota - Target Provinsi Tahun 2026 sebanyak 1 Laporan di Kabupaten Barito Kuala					
2.	3.30.02.2.07.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : - Penerbitan SKA Kewenangan Provinsi dan Kabupaten Kotabaru					



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 1:14:48 PM

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	3.30.05.2.01.00 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Barito Kuala tidak menggunakan Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional tetapi menggunakan sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kab/ Kota, Program : Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Outputnya UMKM) - Provinsi akan memfasilitasi pelaku usaha kab/kota sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan serta lulus kurasi - Tahun 2026 target Provinsi 2 Pelaku Usaha di Kabupaten Barito Kuala					
2.	3.30.05.2.01.00 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2
Catatan Pembahasan : - Kabupaten Barito Kuala tidak menggunakan Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan - Target Provinsi Tahun 2025 Sebanyak 8 Pelaku Usaha - Target Provinsi Tahun 2026 Sebanyak 16 Pelaku Usaha - Target Tahun 2026 Provinsi di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 2 Pelaku Usaha akan di fasilitasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan serta lulus kurasi.					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Ketentuan Asal (DKA) dan Skema Ketentuan Asal Barang Ekspor	850000	Badan Usaha
2.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Kerjasama Kelembagaan Ekspor	1	Kesepakatan
3.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Layanan Inquiry dan Temu	200	Badan Usaha
4.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Export Center Surabaya & Export Center Makassar	900	Badan Usaha
5.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Business Matching pada Pameran Pangan Nusa	38	Daerah
6.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pembinaan Pengelolaan Depo Gerai Maritim	1	Lembaga
7.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pembinaan Terkait Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan	130	Lembaga
8.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Market Intelligence	76	Rekomendasi

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	8

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Minggu**, Tanggal **13** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, ST., MM	198107212009032013	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2	Reinovi Soraya, S.Si, M.T	198511022009032007	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3	Khairul Arifin, M.IP	199104172015031002	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda	BAPPEDALITBANG KABUPATEN BARITO KUALA
4	Dewy Aryanti, S.Pd, M.A.	197912192005012011	Kepala Bidang Perhubungan Darat	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.67	0.95
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	99.99	99.99
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.67	0.95
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	99.99	99.99



B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.15.02.2.02.00 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	45
Catatan Pembahasan : Catatatn Indikator Outcome : 1. Tingkat keselamatan diangka 99,99 % dikarenakan di angkutan barang. saat ini untuk angkutan terminal belum aktif. trayek yang aktif 3 namun armada tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Sehingga armada angkutan yang langsung dikelola kabupaten Batola. Data yang digunakan untuk perhitungan didasarkan data kecelakaan dari Polres Kab Batola namun sifatnya kendaraan pribadi 2. Tanggapan DIsHub Kalsel : target menyesuaikan dengan kondisi dilapangan terkait tingkat keselamatan transportasi. diharapkan dalam perhitungan sudah menggunakan perhitungan terbaru yakni Tingkat Keselamatan Transportasi = 100% - (Jumlah kecelakaan angkutan umum yang termasuk trayek yang ditetapkan oleh pemda : total perjalanan angkutan umum pada trayek yang ditetapkan) x 100 %. 3. Rasio Konektivitas perhitungan sudah sesuai dengan menggambarkan kondisi dilapangan. adapun kondisi dilapangan yakni keterbatasan armada angkutan umum dan ASDP yang belum optimal Catatan SUB Kegiatan : 1. Rambu termasuk PJU berdasarkan panjang ruas jalan kewenangan Batola sepanjang 700 Km sekian dan jarak antar tiang listri. kebutuhan sebanyak 1100 Unit sekian. jumlah yang terpasang kurang lebih 4200 unit sekian. Sehingga masih banyak keperluan untuk pemenuhan target 2. pemasangan didasarkan pada data inventarisasi dan data aset 1.128 unit. masih terdapat rambu dan PJU yang belum terpasang karena baru terpasang kurang lebih 41 %. adpaun dikarenakan kemampuan daerah. Catatan BAPPEDA Kalsel : Terkait dengan dukungan sub kegiatan selain sub kegiatan yang disampaikan, diharapkan dapat dilakukan telaahan Kembali terhadap sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indicator outcome urusan perhubungan sesuai dengan nomenclatur urusan perhubungan di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Adapun beberapa sub kegiatan pendukung lainnya yang dimaksud sebagai berikut seperti : a. Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota : - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabuapten/Kota - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Menyesuaikan Kondisi di masing - masing daerah terkait trayek sesuai degnan SK Bupati) : - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Menyesuaikan dengan rencana pengembangan trayek angkutan umum) - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional) - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional) - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Sehingga dalam hal ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan kembali kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota untuk memastikan kembali dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan persiapan tahap rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota					
2.	2.15.02.2.03.00 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1



Catatan Pembahasan : Catatatn Indikator Outcome :

1. Tingkat keselamatan diangka 99,99 % dikarenakan di angkutan barang. saat ini untuk angkutan terminal belum aktif. trayek yang aktif 3 namun armada tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Sehingga armada angkutan yang langsung dikelola kabupaten Batola. Data yang digunakan untuk perhitungan didasarkan data kecelakaan dari Polres Kab Batola namun sifatnya kendaraan pribadi
2. Tanggapan DIsHub Kalsel : target menyesuaikan dengan kondisi dilapangan terkait tingkat keselamatan transportasi. diharapkan dalam perhitungan sudah menggunakan perhitungan terbaru yakni Tingkat Keselamatan Transportasi = 100% - (Jumlah kecelakaan angkutan umum yang termasuk trayek yang ditetapkan oleh pemda : total perjalanan angkutan umum pada trayek yang ditetapkan) x 100 %.
3. Rasio Konektivitas perhitungan sudah sesuai dengan menggambarkan kondisi dilapangan. adapun kondisi dilapangan yakni keterbatasan armada angkutan umum dan ASDP yang belum optimal

Catatan sub kegiatan :

1. berdasarkan dengan data trayek dan ketersediaan angkutan umum berpengaruh terhadap terminal. adapun terdapat 2 Terminal (Marabahan dan Handil Bakti). Posisi di Handil Bakti sudah tidak strategis berdasarkan pada kegiatan pelebaran jalan nasional adapun menyebabkan terminal handil bakti tidak berfungsi. Tahun 2023 Komisi III DPRD Prov. Kalsel melakukan peninjauan dan melakukan perencanaan yakni pemindahan ke simpang 4 handil bakti. Sehingga dalam melakukan perizinan parkir tidak dilakukan. adapun target PAD Kab Batola yang harus dipenuhi

Catatan BAPPEDA Kalsel :

Terkait dengan dukungan sub kegiatan selain sub kegiatan yang disampaikan, diharapkan dapat dilakukan telaahan Kembali terhadap sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indicator outcome urusan perhubungan sesuai dengan nomenclatur urusan perhubungan di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Adapun beberapa sub kegiatan pendukung lainnya yang dimaksud sebagai berikut seperti :

- a. Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota :
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabuapten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Menyesuaikan Kondisi di masing - masing daerah terkait trayek sesuai degnan SK Bupati) :
 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Menyesuaikan dengan rencana pengembangan trayek angkutan umum)
 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

Sehingga dalam hal ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan kembali kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota untuk memastikan kembali dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan persiapan tahap rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.15.03.2.13.00 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	12



Catatan Pembahasan : Catatn Indikator Outcome :

1. Tingkat keselamatan diangka 99,99 % dikarenakan di angkutan barang. saat ini untuk angkutan terminal belum aktif. trayek yang aktif 3 namun armada tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Sehingga armada angkutan yang langsung dikelola kabupaten Batola. Data yang digunakan untuk perhitungan didasarkan data kecelakaan dari Polres Kab Batola namun sifatnya kendaraan pribadi
2. Tanggapan Dishub Kalsel : target menyesuaikan dengan kondisi dilapangan terkait tingkat keselamatan transportasi. diharapkan dalam perhitungan sudah menggunakan perhitungan terbaru yakni Tingkat Keselamatan Transportasi = 100% - (Jumlah kecelakaan angkutan umum yang termasuk trayek yang ditetapkan oleh pemda : total perjalanan angkutan umum pada trayek yang ditetapkan) x 100 %.
3. Rasio Konektivitas perhitungan sudah sesuai dengan menggambarkan kondisi dilapangan. adapun kondisi dilapangan yakni keterbatasan armada angkutan umum dan ASDP yang belum optimal

Catatan Sub Kegiatan :

1. Pagu 2.975.000.000 dengan target 12 Unit. lokasi direncanakan yakni Kec. Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Alalak, Belawang, Barambai, Tabunganen, Tamban. Total pelabuhan dan penyeberangan ada 52 unit
2. Tanggapan Dishub Prov. Kalsel : Target menyesuaikan dengan kondisi di daerah dengan memperhatikan untuk pencapaian rasio konektivitas. Sehingga untuk pemenuhan rasio konektivitas dapat dioptimalkan ke ASDP.
3. Terkait dengan pagu dan target daapt dikoordinasikan lebih lanjut untuk menindaklanjuti terhadap penyusunan rancangan akhir perencanaan tahunan

Catatan BAPPEDA Kalsel :

Terkait dengan dukungan sub kegiatan selain sub kegiatan yang disampaikan, diharapkan dapat dilakukan telaahan Kembali terhadap sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indicator outcome urusan perhubungan sesuai dengan nomenklatur urusan perhubungan di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Adapun beberapa sub kegiatan pendukung lainnya yang dimaksud sebagai berikut seperti :

- a. Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota :
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabuapten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Menyesuaikan Kondisi di masing - masing daerah terkait trayek sesuai degnan SK Bupati) :
 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Menyesuaikan dengan rencana pengembangan trayek angkutan umum)
 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

Sehingga dalam hal ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan kembali kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota untuk memastikan kembali dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan persiapan tahap rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

2.	2.15.03.2.13.00 11	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0
----	-----------------------	--	---	------	---



Catatan Pembahasan : Catatatn Indikator Outcome :

1. Tingkat keselamatan diangka 99,99 % dikarenakan di angkutan barang. saat ini untuk angkutan terminal belum aktif. trayek yang aktif 3 namun armada tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Sehingga armada angkutan yang langsung dikelola kabupaten Batola. Data yang digunakan untuk perhitungan didasarkan data kecelakaan dari Polres Kab Batola namun sifatnya kendaraan pribadi
2. Tanggapan Dishub Kalsel : target menyesuaikan dengan kondisi dilapangan terkait tingkat keselamatan transportasi. diharapkan dalam perhitungan sudah menggunakan perhitungan terbaru yakni Tingkat Keselamatan Transportasi = 100% - (Jumlah kecelakaan angkutan umum yang termasuk trayek yang ditetapkan oleh pemda : total perjalanan angkutan umum pada trayek yang ditetapkan) x 100 %.
3. Rasio Konektivitas perhitungan sudah sesuai dengan menggambarkan kondisi dilapangan. adapun kondisi dilapangan yakni keterbatasan armada angkutan umum dan ASDP yang belum optimal

Catatan Sub Kegiatan :

1. terkait sub kegiatan yang dimaksud tidak dilaksanakan. terkait fasilitasi seperti palang otomatis masih masuk ke sub kegiatan yang lain.
2. Tanggapan Prov. Kalsel :
 - a. pemenuhan fasilitasi melakuakn koordinasi dan bantuan dari BPTD Kemenhub. Sehingga apabila ada pemenuhan
 - b. terkait dengan sub kegiatan agar dapat dilakukan pengkajian kembali dengan memperhatikan kondisi di lapangan serta dapat dimasukan dalam Renstra Dishub Kab BatolaTerkait dengan dukungan sub kegiatan selain sub kegiatan yang disampaikan, diharapkan dapat dilakukan telaahan Kembali terhadap sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indicator outcome urusan perhubungan sesuai dengan nomenclatur urusan perhubungan di Pemerintahan Kabupaten/Kota. Adapun beberapa sub kegiatan pendukung lainnya yang dimaksud sebagai berikut seperti :
 - a. Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota :
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabuapten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota (Menyesuaikan Kondisi di masing - masing daerah terkait trayek sesuai degnan SK Bupati) :
 - Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Menyesuaikan dengan rencana pengembangan trayek angkutan umum)
 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Opsional)
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan DanauSehingga dalam hal ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar dapat mengkoordinasikan kembali kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota untuk memastikan kembali dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan persiapan tahap rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	2
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Harry Harkitpa Saragih, S.Akun.	199804112021011001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappeda Prov.Kalsel
2	Raudati Hildayati, ST, M.Eng.	197904142006042046	Kepala Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Kalsel
3	Juniartinah, SE	196806281998022005	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Kab. Barito Kuala
4	Gutrah	198202242009042004	Pamong Budaya	Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71.67	13.42
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8.74	4.98
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.76	1.32
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20.17	-
5.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65.50	90



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	32.46	-
7.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0.31	1.09
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71.67	13.42
9.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8.74	4.98
10.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.76	1.32
11.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20.17	-
12.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65.50	90
13.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	32.46	-
14.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0.31	1.09

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler



NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.22.02.2.01.00 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	7	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : - Dengan Pelaksanaan berupa Event. terkait pagu akan di perbaiki kembali. - Mengikuti Kegiatan yang diselenggarakan di tingkat Provinsi - Finalisasi Raperda Bahasa Bakumpai						
2.	2.22.02.2.01.00 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : - Belum ada Program untuk SubKegiatan ini dan juga ini SubKegiatan ini akan dibahas lagi selanjutnya. - Pengusulan Warisan Tak Benda Kabupaten Barito Kuala - Pembinaan bisa merupakan Workshop, Sosialisasi dan Fasilitasi Kebudayaan						

2. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.22.05.2.01.00 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	1	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : - Tahun 2024 1 Objek - Tahun 2025 2 Objek - Dengan posisi baru 1 yang sudah ditetapkan.						
2.	2.22.05.2.02.00 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	0	08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
Catatan Pembahasan : - Monitoring Cagar Budaya dan Pembayaran Honor Juru Cagar Budaya. - SubKegiatan ini akan dibahas dengan membahas pagu dan target yang direncanakan. Pengembangan Cagar Budaya Sendiri bisa berupa Vidio Dokumentar, Rehabilitasi Fisik dan Promosi Cagar Budaya.						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang Dikembangkan	5640	Orang
2.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	1000	Orang
3.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Warisan Budaya Takbenda yang Diregistrasi Nasional dan Ditetapkan	286	Unit
4.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Event Film, Musik dan Seni	3	Kegiatan
5.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	302000	Orang



NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
6.	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	SDM Kebudayaan yang dibina	225	Orang

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	7
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	6

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	NADIYAH, S. SI, M.I.L	198401132006042004	SEKRETARIS	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Prov. Kalimantan Selatan
2	M. Rafie ST	197603131998031009	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPEDA Prov. Kalimantan Selatan
3	Ahmad Riadi, S.PI	197902282009041003	Perencana Ahli Muda	Bappelitbang BATOLA
4	Mugayatsyah, S.Pi	197512272005011011	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	25.85	67.99
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Garam	Ton	2500000	-
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6470000	9734
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19380000	12040
5.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83	24
6.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19100000	



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 4:23:46 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
7.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	7	

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.		NIHIL			
Catatan Pembahasan :					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.25.03.2.02.00 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	120	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan target 120 orang dengan alokasi anggaran Rp. 370.000.000 berupa kegiatan sosialisasi mengenai pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.						
2.	3.25.03.2.02.00 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	7	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Kegiatannya Tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan alokasi anggaran Rp. 370.000.000 berupa kegiatan 4 kelompok sosialisasi dan 3 kelompok pendampingan melalui pendataan nelayan yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.						
3.	3.25.03.2.02.00 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	324	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : tercantum pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana usaha perikanan tangkap yang targetnya 324 unit dengan alokasi anggaran 550juta untuk pemberian bantuan sarpras penangkapan terdiri dari 300 unit Jaring insang (gilnet dan trumelnet) dan 24 unit mesin kapal						

2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	3.25.05.2.01.00 04	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	25	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan target 25 pelaku usaha dari 194 pada tahun 2025 sehingga di tahun 2026 menjadi 219 pelaku usaha dengan alokasi anggaran Rp. 370.000.000 berupa kegiatan Gerai Pelangi bersama penyuluh						
2.	3.25.05.2.01.00 06	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)



Catatan Pembahasan : Sesuai kesepakatan ada penambahan pada tahun 2026 dengan target 5 Pelaku Usaha sehingga akumulatif menjadi 23 pelaku usaha Tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan target 5 pelaku usaha dari 194 pada tahun 2025 sehingga di tahun 2026 menjadi 23 pelaku usaha dengan alokasi anggaran Rp. 370.000.000 berupa kegiatan Gerai Pelangi bersama penyuluh						
3.	3.25.05.2.01.00 07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	20	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Tercantum pada sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan target pada tahun 2025 sebanyak 48, Tahun 2026 ditargetkan sebanyak 20 pelaku usaha (10 nelayan laut dan 10 nelayan PUD) sehingga menjadi 68 pelaku usaha dengan alokasi anggaran Rp. 370.000.000 berupa kegiatan Gerai Pelangi bersama penyuluh						
4.	3.25.05.2.01.00 12	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	0	02.10.09 Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)
Catatan Pembahasan : Tidak ada potensi pada kabupaten dan bukan kewenangannya						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	7
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	0
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	7
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Anisa Murni, S.T. MM.	19810721 200903 2 013	Kepala Bidang Infrastruktur & Kewillayahan	BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2	Maisarah Syarqawie, S.Kom., M.M	198303052011012008	kepala seksi infrastruktur e-government	Dinas Komunikasi dan Informatika ProvKalsel
3	FAKHRURRIJAL, ST, MT	197711031999031003	Kepala Bidang PPD	Bapperrida Kab.barito Kuala
4	AKHMADI, ST	197803122009041002	Kabid E-Government	Diskominfo Kab.Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	3
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	3
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	3
4.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	
5.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	3
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	3



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 11:04:54 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
8.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	3
9.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	
10.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.16.02.2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	201
Catatan Pembahasan : - target 2026 diatas dari tahun					
2.	2.16.02.2.01.00 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	363
Catatan Pembahasan : - target merupakan media berbayar, perbulan sebanyak 47 media - untuk media pemerintah daerah sebanyak 11 media					

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.16.03.2.02.00 34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1
Catatan Pembahasan : - untuk tingkat kematang berada pada level					
2.	2.16.03.2.02.00 38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : Kegiatan tidak dilaksanakan di daerah					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.16.02.2.01.00 16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi	Laporan	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : - dilasanakan pada tahun 2026, pagu di sesuaikan dengan kemampuan daerah - pagu dinas Kominfo Kab.Barito Kuala pada tahun 2026 sebesar Rp.3.898.403.388,- - kegiatan berupa pengelolaan informasi publik dan komonikasi publik pemda kabupaten/						



2.	2.16.02.2.01.00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : - Kegiatan belum di						

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.16.03.2.02.00 25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	0	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : - tidak ada kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi - sudah ada layan yang terintegrasi dengan portal satu data nasional						
2.	2.16.03.2.02.00 36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	10	07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Catatan Pembahasan : - jumlah sambung internet tahun 2024 17 - jumlah sambung internet tahun 2025 sebanyak 30 OPD, sudah memberlakukan bandwidth - target selanjutnya adalah Kantor Desa, sebanyak						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	N I H I L			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	2
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	5
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	4
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	AKHMAD ROSLAINI,S.AB	19710228 198903 1 002	KASUBAG PKA	DINAS KOPERASI DAN UKM PROV KALSEL
2	SITI AISYAH, SE.,MM	19770801 200604 2 028	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAPPEDA PROV KALSEL
3	HANDOKO WIJAYA	19960311 202421 1 008	Perencana Ahli Pertama	BAPPELITBANG
4	Novya maharanie,S.Pi, M.Si	19791121 200803 2 002	Kabid Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1.12	0,2
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	15	5
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	3.15	1
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3.24	0,2



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	8.90	2
6.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	10	4

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.17.07.2.01.00 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	150
Catatan Pembahasan : Target Nasional untuk Provinsi tahun 2026 sebanyak 306 unit usaha Target Kabupaten Batola tahun 2026 belum terisi bisa diakomodir pada Renja Akhir , pada sub kegiatan tersebut dapat ditambahkan dengan sub kegiatan yang baru berdasarkan Astacita presiden yang menjadi prioritas Nasional, Kabupaten Batola menargetkan 150 unit usaha dengan anggaran 200jt Provinsi : rumus : jumlah usaha kecil dan Menengah x100% : jumlah berusaha (Proporsi UKM) kesepakatan target Kabupaten Batola tahun 2026 sebanyak 150 unit usaha dengan anggaran 200 jt					
2.	2.17.07.2.01.00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	120
Catatan Pembahasan : Target Nasional untuk Provinsi tahun 2026 sebanyak 1800 orang Target kabupaten Batola tahun 2026 tidak ada tapi akan diakomodir pada RENJA akhir , dengan target 120 orang ,pagu anggaran 250 jt, Kesepakatan target Tahun 2026 untuk Kabupaten Batola sebanyak 120 orang dengan pagu Anggaran 250 jt					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
1.	2.17.06.2.01.00 03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	20	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
Catatan Pembahasan : Target Nasional untuk Provinsi sebanyak 100 kelompok masyarakat Target Kabupaten Batola belum ada karena tidak diambil program nya , kab/kota tahun 2026 agar mengakomodir program ini karena salah satu prioritas Nasional yang terdapat pada astacita presiden Prabowo, diakomodir nya pada rancangan akhir rencananya pagu anggaran 200 jt dengan target 20 kelompok masyarakat target Provinsi untuk kabupaten tahun 2026 sebanyak 20 kelompok masyarakat, kesepakatan target tahun 2026 kabupaten Batola sebanyak 20 kelompok masyarakat dengan pagu anggaran 200 jt						
2.	2.17.06.2.01.00 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	15	03.03.01 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
Catatan Pembahasan : Target Nasional untuk Provinsi tahun 2026 sebanyak 40 unit usaha Target Kabupaten Batola sebanyak 15 unit usaha dengan pagu Anggaran 150 jt, kesepakatan target Kabupaten Batola tahun 2026 sebanyak 15 unit usaha dengan Anggaran 150 jt						



c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Kemitraan Koperasi Dalam Program Makan Bergizi Gratis	10	Koperasi
2.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim	20	Koperasi
3.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Agromaritim	37	Koperasi
4.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Revitalisasi Koperasi	25	Koperasi
5.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi dan Pembinaan Peran Koperasi dalam Distribusi	30	Koperasi
6.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Sosialisasi Pembentukan Koperasi dari Kelompok Strategis	100	Orang
7.	KEMENTERIAN KOPERASI	Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Aneka Usaha	15	Koperasi
8.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pendampingan Produksi Koperasi Sektor Aneka Usaha	10	Koperasi
9.	KEMENTERIAN KOPERASI	Layanan Dana Bergulir dan Inkubator bagi Koperasi	10	Koperasi
10.	KEMENTERIAN KOPERASI	Pelatihan Intensif Bootcamp dan Magang Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	25	Orang
11.	KEMENTERIAN KOPERASI	Layanan Penguatan Literasi Perkoperasian	3	Kegiatan
12.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Sistem Informasi Kementerian UMKM	1	Layanan
13.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pemanfaatan SIDT oleh Daerah	1	Layanan
14.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro	5000	UMKM
15.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi Usaha Mikro	10150	Produk
16.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Berbasis Kompetensi	324	UMKM
17.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan Peningkatan Hilirisasi Produksi Usaha Mikro	240	UMKM
18.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi Perluasan Akses Pasar/ Promosi bagi Usaha Mikro	200	UMKM
19.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pendampingan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	7750	UMKM
20.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro	250	Orang
21.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga PLUT	12	Lembaga
22.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pendampingan Peningkatan Manajemen Mutu Produk bagi Usaha Kecil	135	UKM
23.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Produksi bagi Usaha Kecil	10	Unit
24.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Digitalisasi bagi Usaha Kecil	150	UMKM
25.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pembiayaan bagi Usaha Kecil/Sentra	180	UMKM
26.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Investasi, Fiskal, dan Pajak bagi Usaha Kecil	175	UMKM
27.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Kemitraan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar	135	UMKM
28.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Advokasi dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil	150	Orang
29.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Ekosistem Kewirausahaan	520	Orang
30.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pembinaan Lembaga Inkubator	5	Lembaga
31.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Layanan Pembinaan Inkubasi Startup dan Global Startup Hub	19	Unit
32.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan bagi Wirausaha dan Pendamping	625	Orang
33.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan	1	Sistem Informasi



C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1. Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2. Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3. Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	6
4. Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5. Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6. Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	2
7. Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	33

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Akhmad Syahid Berny, SP, MP	19880918 201503 1 001	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel
2	Arif Rahman, S.E.	199506092024211010	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov Kalsel
3	Ahmad Riadi, S.Pi,	19790228 200904 1 003	Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Kab Barito Kuala
4	Eddy Sudarwoso, SP	19770506 200701 1 007	Kabid Ketahanan Pangan	DKPP Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	90
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	70.4
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94.5	93.3
4.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15.6	10.45

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan ketahanan pangan

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.09.03.2.01.00 07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	90



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 10 April 2025
Jam : 8:25:57 AM

Catatan Pembahasan : Target : 3 Kelompok (90 Keluarga) Pagu : Contoh Aktivitas di Provinsi : Pekarangan B2SA					
2.	2.09.03.2.01.00 08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1
Catatan Pembahasan : Target : 1 Laporan per Tahun Aktivitas : - Pemantauan Harga-harga pangan tingkat konsumen dan produsen di pasar-pasar tradisional, - Pemantaun Lumbung Pangan terkait pasokan atau stok gabah atau beras - Pemantaun di penggilingan padi Catatan dari Provinsi : Jika anggaran besar, masukkan Aktivitas GPM 2-3x per tahun					

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.09.04.2.02.00 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Aktivitas : Penyaluran cadangan pangan ke desa yang rentan rawan pangan					
2.	2.09.04.2.02.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1
Catatan Pembahasan : Aktivitas : Sosialisasi Foodloss dan Foodwaste					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		N I H I L				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
1.	BADAN PANGAN NASIONAL	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	39	Kebijakan
2.	BADAN PANGAN NASIONAL	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	39	Data
3.	BADAN PANGAN NASIONAL	Data Situasi Konsumsi Pangan	1	Data
4.	BADAN PANGAN NASIONAL	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2400	Produk

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	4
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Kamis**, Tanggal **10** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	NANI CHOLILATI S.E.	199106072024212032	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Prov. Kalsel
2	Rina Astuti, S.Sos, MM	196910281994032006	Sekretaris	Dinas Dukcapil Prov Kalsel
3	H. FAKHRURRIJAL, ST, MT	197711031999031003	kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbang Barito Kuala	Bappelitbang Barito Kuala
4	Hidayat Rahmatullah	198003312009021005	Plt Sekretaris	Disdukcapil Batola

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	NIHIL					

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

- OUTCOME: Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.12.02.2.03.00 01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2
Catatan Pembahasan : sub kegiatan akan di akomodir pada rancangan akhir pada renstra dan renja 2026, pagu akan di sesuaikan dengan sub kegiatan baru					
2.	2.12.02.2.03.00 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Merupakan Sub Kegiatan Baru yang akan ditambahkan pada Tahun 2026. Untuk sementara mengalihkan sebagian anggaran yang sudah ada di Sub Kegiatan Lain. sub kegiatan akan di akomodir pada rancangan akhir pada renstra dan renja 2026					

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
----	-------------------	--------------	-----------	--------	--------



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 10 April 2025
Jam : 12:01:25 PM

1.	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Merupakan Sub Kegiatan Baru yang akan ditambahkan pada Tahun 2026. sub kegiatan akan di akomodir pada rancangan akhir pada renstra dan renja 2026, pagu akan di sesuaikan.					
2.	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Merupakan Sub Kegiatan Baru yang akan ditambahkan pada Tahun 2026. Untuk sementara mengalihkan sebagian anggaran yang sudah ada di Sub Kegiatan Lain. sub kegiatan akan di akomodir pada rancangan akhir pada renstra dan renja 2026					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	0
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	2
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	4
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

Pada hari **Rabu**, Tanggal **09** Bulan **April** Tahun **2025** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** telah membahas hal-hal berikut:

A. INFORMASI PEMBAHASAN

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROVINSI KABUPATEN BARITO KUALA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Relawanty, S.Kep, MM	19870105 200903 2 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan
2	Adethia Hailina SE.,ME	19790927 200501 2 011	Plt Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
3	HJ. SITI AMINAH, S.AP	19650408 198703 2 007	KADIS DISPERPUSIP	DISPERPUSIP Kabupaten Batola
4	Juniartinah, SE	19680628 199802 2 005	Fungsional Perencana Ahli Muda	Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

III ASTA CITA, OUTCOME PRIORITAS DAN INDIKATOR OUTCOME

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	77

B. HASIL PEMBAHASAN DAN KESEPAKATAN

1. OUTCOME: Meningkatkan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa

a. Dukungan Program dan Sub Kegiatan yang Reguler

1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	2.24.02.2.01.00 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	30
Catatan Pembahasan : - Disepakati dengan target 30					
2.	2.24.02.2.03.00 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	350
Catatan Pembahasan : Disepakati dengan target 350 pengguna					

b. Dukungan Program dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KPU
		NIHIL				
Catatan Pembahasan :						

c. Dukungan Rincian Output Kementerian/Lembaga



<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : [DOCID]
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 09 April 2025
Jam : 2:48:39 PM

NO	KEMENTERIAN / LEMBAGA	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
	NIHIL			

C. RINGKASAN

D. PENUTUP

1.	Jumlah Asta Cita yang Didukung	:	1
2.	Jumlah Outcome Prioritas	:	1
3.	Jumlah Indikator Outcome Prioritas	:	1
4.	Jumlah Program yang Mendukung	:	1
5.	Jumlah Sub Kegiatan yang Reguler	:	2
6.	Jumlah Sub Kegiatan yang Berkaitan Dengan KPU	:	0
7.	Jumlah Rincian Output yang Mendukung	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Barito Kuala** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

